Mayjen TNI (Purn) Theo Syafei:

js

Itu sangat menyakitkan dan sangat berat bagi seorang perwira jika diberhentikan dengan alasan melanggar kehormatan perwira. Lebih dari sekadar sakit adalah rasa malu yang begitu besar. Karena sejak akademi militer, kehormatan itu makanan setiap hari. Saya hanya tanya, wewenang Pangab memberhentikan seorang perwira tinggi. Seorang berpangkat jenderal diangkat dengan keputusan presiden. Pertanyaannya, karena ini baru pertama kali terjadi, apakah keputusan presiden tentang kepangkatan itu bisa dibatalkan oleh satu keputusan Menhankam. Menhankam hanya bisa mencopot jabatan seorang perwira tinggi. Barangkali ada klausul tertentu yang memperbolehkan hal ini, tetapi mana klausul itu? Mestinya, tidak bagus, tidak patut, dan tidak boleh cuma dihentikan sampai dengan DKP, itu memberi kesan DKP berada di atas hukum. **(vik/gg/uu/myr)**

Kompas
26 Agustus 1998

Kalau Gagal, Ya Sedih, Kecewa ...

BAGAIMANA perasaan seorang prajurit kalau kariernya terputus di tengah jalan? Di bawah ini penuturan singkat para perwira ABRI dan senior ABRI yang dihubungi *Kompas* secara terpisah, Selasa (25/8) di Jakarta. Intinya, mereka merasa kecewa, prihatin, sedih dan merasa seperti seorang yang gagal. Keputusan itu bisa tidak menjadi masalah, kalau yang bersangkutan menerima kesalahannya. Tapi kalau tidak? Ya, kecewa. Berikut penuturan mereka:

KSAD Jenderal TNI Subagyo HS:

Sudah jelas orang kalau dibegitukan jadi *gelo*. Jangankan soal diakhiri masa tugasnya, *wong temannya* duluan naik pangkat saja, itu orang sudah *gelo*. Jadi merasa gagal. Itu manusiawilah. Lebih-lebih habis dari dinas ketentaraan. Itu 'kan suatu kekecewaan yang besar sekali. Sebagai bekas atasan Prabowo, sebagai seorang manusia, saya ikut prihatin. Pasti orang sedih, bagaimana *sih* orang yang gagal. Kamu pernah gagal, *nggak*? Saya sebagai temannya, ya, sedih juga. Kegagalan itu 'kan menyedihkan, apalagi ini situasinya dalam keadaan demikian.

Jenderal TNI (Purn) Wismoyo Arismunandar:

Wah, jelas nggak senang. Tidak bahagia. Tapi sebagai satria, ya mesti kecewa. Tanya Pak Prabowo sajalah.

Letjen TNI (Purn) Bambang Triantoro:

Terus terang, perasaan saya sebagai prajurit, diberhentikan ketika masih ada kesempatan sepuluh tahun lagi, itu sayang sekali. Karier yang sudah dirintis begitu lama, dan merambat dari bawah. Padahal, Prabowo tinggal selangkah lagi ke pucuk pimpinan ABRI. Ini adalah suatu hukuman yang memalukan. Secara psikologis, akan berat sekali bagi yang bersangkutan. Bagi saya, ini betul-betul menyedihkan. Kalau dulu memakai baret merah itu membanggakan, sekarang sepertinya tidak ada harganya. Ini keadaan yang amat menyedihkan. Merataplah kita.

Letjen TNI (Purn) Harsudiyono Hartas:

Ya kecewa tentu saja, lalu mencari sebabnya dia diberhentikan. Sebelum dia kecewa, pasti ada sebabnya, karena di dalam nilai-nilai keprajuritan pasti ada sesuatu yang dilanggar. Berarti dia harus menyadari, saya kecewa karena seharusnya tidak melanggar itu. Dari aspek kehormatan saya kira merupakan suatu pukulan berat, karena ada Kode Etik Perwira. Antara lain, keberanian atas dasar kebenaran. Kode etik tadi akan menuntun semua kita. Sebagai seorang prajurit, ia harus menerima apa adanya. Ini merupakan pelajaran pahit bagi karier hidup seorang pribadi. Secara filosofis, orang kalau loncatnya terlalu jauh, ya akan terperosok. Sebab, ia tidak dibangun berdasarkan pengalaman pribadi dan mental yang tangguh untuk berkorelasi, berkomunikasi dengan sasarannya.

Mayjen TNI (Purn) Theo Syafei:

Itu sangat menyakitkan dan sangat berat bagi seorang perwira jika diberhentikan dengan alasan melanggar kehormatan perwira. Lebih dari sekadar sakit adalah rasa malu yang begitu besar. Karena sejak akademi militer, kehormatan itu makanan setiap hari. Saya hanya tanya, wewenang Pangab memberhentikan seorang perwira tinggi. Seorang berpangkat jenderal diangkat dengan keputusan presiden. Pertanyaannya, karena ini baru pertama kali terjadi, apakah keputusan presiden tentang kepangkatan itu bisa dibatalkan oleh satu keputusan Menhankam. Menhankam hanya bisa mencopot jabatan seorang perwira tinggi. Barangkali ada klausul tertentu yang memperbolehkan hal ini, tetapi mana klausul itu? Mestinya, tidak bagus, tidak patut, dan tidak boleh cuma dihentikan sampai dengan DKP, itu memberi kesan DKP berada di atas hukum. **(vik/gg/uu/myr)**

Letjen TNI Prabowo Subianto yang menjadi tokoh sentral dalam drama dan tragedi penculikan diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam terminologi sipil yang tidak disulit-sulitkan seperti di militer, Prabowo kita anggap dipecat. Sedangkan, Mayjen TNI Muchdi P.R. dan Kolonel Inf Chairawan dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural ABRI. Singkat kata, pimpinan ABRI memilih hukuman administratif ketimbang hukuman pengadilan.

Penculikan para aktivis kita anggap sebuah skandal yang memalukan. Akan tetapi, karena pelakunya adalah militer, pengungkapannya ditempuh melalui cara-cara khusus dengan lembaga super-khusus. Dan, hasilnya harus dimengerti dengan nalar-nalar khusus pula.

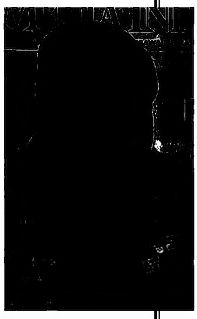

Naluri dan rasa keadilan publik melihat bahwa penculikan terhadap aktivis adalah kejahatan biasa. Yang menjadi unik dan rumit–dan ini menjadi tantangan penegakan hukum–karena pelakunya adalah orang-orang yang oleh negara diberi hak menggunakan senjata.

Sebagaimana layaknya sebuah skandal, publik sangat haus untuk mengetahui liku-liku kejahatan. Tetapi, kehausan itu tidak terobati. DKP yang memeriksa dan Pangab yang menghukum tidak memberi peluang kepada publik untuk mengetahui secara tuntas latar belakang penculikan. Terutama, siapakah yang memberi perintah kepada Prabowo melakukan operasi politik yang mengangkangi hak asasi warga?

Dengan memecat Prabowo, ABRI ingin memperlihatkan bahwa dalam tubuh organisasi ini berlaku punishment and reward. Akan tetapi dalam kasus Prabowo justru hukuman itu tidak memuaskan selera keadilan publik.

Media Indonesia,
Tajuk 25 Agustus

25 AUG 1998

HARIAN UMUM

Berita Yudha

MEMPERTINGGI KETAHANAN DAN PERJUANGAN NASIONAL INDONESIA

SELASA, 25 AGUSTUS 1998 ■ NO. 1755 TH. XXXI — TERBIT 8 HALAMAN ■ HARGA Rp 900,-

Menhankam/Pangab Baca Keputusan

Berakhir, Masa Dinas Prabowo Subianto

Jakarta, BY

Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto memutuskan mengakhiri masa kedinasan mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto.

"Keputusan saya terhadap Letjen TNI Prabowo Subianto adalah diakhiri masa dinasnya dalam ABRI. Terhadap Mayjen TNI Muchdi dan Kolonel Infateri Chairawan dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural di ABRI," ujar Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto di hadapan ratusan wartawan dalam dan luar negeri di Kantor Menhankam/Mabes ABRI, Jakarta, Senin (24/8).

Dalam keterangan persnya, Menhankam/Pangab didampingi para Kepala Staf Angkatan dan Kapolri yaitu Kepala Staf TNI AD (Kasad) yang juga sekaligus Panglima Kodam Jaya Letjen TNI (Purn) Bambang Triantoro, *mantan Kassospol ABRI*

Saya melihat apa yang disampaikan Pangab tadi egaknya ABRI tetapi tidak akan diberikan jabatan struktural apa pun sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Mengenai diajukannya ketiga perwira ke Mahkamah Militer, Jenderal Wiranto mengatakan hal itu tidak tertutup kemungkinannya jika dalam proses persidangan Mahmil terhadap 10 anggota terperiksa yang saat ini tengah diteliti Tim Pencari Fakta yang dibentuk ABRI nyata-nyata membuktikan ke arah itu.

"Dengan demikian tidak menutup kemungkinan untuk dilajutkan ke Mahmil, jika dalam proses persidangan mahmil terhadap 10 anggota terperiksa yang lain nyata-nyata membuktikan ke arah itu," tegas Menhankam/Pangab.

Ditanya mengapa Menhankam/Pangab tidak langsung memutuskan ketiganya diajukan ke mahmil, Wiranto mengatakan semuanya mengacu pada azas praduga tak bersalah.

Menhankam/Pangab juga menyatakan keputusan yang diambilnya itu berdasarkan pertimbangan penilaian dan pengamatannya atas kesalahan yang telah dibuat perwira-perwira tersebut.

Ia juga menegaskan keputusan yang diambilnya ini dilakukan tanpa tekanan dari siapa pun dan pihak manapun.

Yang jelas, tambah Jenderal Wiranto lagi, keputusan ini diambil demi kepentingan ABRI, bangsa dan negara RI.

Sementara itu Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo menyatakan apa yang terbukti seperti apa adanya, jangan sampai ada sepotong informasi yang disembunyikan.

Ini penting sekali supaya ada gambaran yang komprehensif

Prabowo

* DOK-BY

BERIKLAN
1975576
1975635

SAJIAN INFORMASI MASA DEPAN

Berita Buana

26 Agustus 1998 — No. 009 Tahun ke-28 — Harga Rp 1.500

LIPUTAN UTAMA NASIONAL ..... Halaman 3
LIPUTAN UTAMA EKONOMI ..... Halaman 6
FORUM PARTAI ..... Halaman 4

mpat Panser Jaga Rumah Prabowo

Jakarta,Buana

Sedikitnya, empat kendaraan lapis baja (panser) dan puluhan petugas yang dipimpin perwira berpangkat mayor tampak berjaga-jaga di sekitar rumah Letjen (Purn) Prabowo Subianto di Jl Cendana, Jakarta, Senin (24/8) malam, tepatnya beberapa jam setelah n/Pangab Jenderal TNI Wiranto mengumumkan n' mantan Danjen Kopassus itu dari ABRI.

ju, penjagaan ekstra ketat tampak pula di ujung al Jl Cendana serta di pertigaan Jl Tanjung, Menra Pusat. Menurut pemantauan *Buana*, hingga gah malam, sejumlah petugas berseragam ABRI ang berpakaian batik tampak mondar-mandir di n rumah perwira yang terlibat dalam aksi pencuis prodemokrasi itu. Jika ada orang datang, terwawan, langsung dihampiri petugas dan dengan sung mengadakan aksi penghalauan.

telah diintruksikan agar membubarkan setiap ada orang di sekitar rumah ini," kata petugas jaga, yang langsung mendapat perintah dari Prabowo. "Sebab emohon pengertian semua para wartawan agar tidak di sekitar rumah ini," kata petugas itu lagi.

anya, di mana Prabowo kini, petugas itu menjat. "Tidak tahu." Para petugas itu tidak tahu persis. abowo berada di Bandung atau Jakarta. Yang jelas, h agar tidak terjadi kerumunan di sekitar kediamu mantan Presiden Soeharto ini. Akhirnya, warg sedianya hendak menunggu Prabowo di depan itu terpaksa pergi menjauh. Senin malam itu, tidak n tampak masuk ke rumah jenderal bintang tiga h 'dipecat' itu, kecuali petugas keamanan.

menjelang tengah malam, sebuah mobil Hardtop at memasuki rumah Prabowo melalui pintu belaerapa saat kemudian, mobil itu keluar lagi. Saat , apakah mobil itu milik Prabowo, petugas jaga rsebut mengatakan, "Bukan." Menurutnya, mo- adik kandung Prabowo, Hasyim Djojohusumo. owo biasanya masuk ke rumah lewat pintu depan, u belakang," ujarnya.

itu kemudian menambahkan, Prabowo dan istriduga, saat ini tidak berada di kediaman Jl Ceeka kemungkinan berada di Bandung.

Rasa Keadilan

pihak, Kontras menilai, langkah ABRI memberi- administratif terhadap Letjen TNI Prabowo dan nya sama sekali mengabaikan tuntutan rasa ke- mengungkap kasus penculikan secara tuntas. Unras mendesak Puspom ABRI segera menjalankan sebagai institusi penyidik, yang wajib memeriksa ira Tinggi ABRI tersebut tersangka.

Penasihat Kontras Mulyana W Kusumah menilai, utusan Pangab itu, Prabowo tidak mungkin di- ? "Saya kira yang akan menentukan nanti bukan kanisme prosedural, tapi arah politik sekarang punya *pressure* tersendiri terhadap ABRI untuk l langkah yang tepat dalam merespons

PRABOWO SUBIANTO (KIRI) DAN MUCHDI PR: DPR menilai kasus penculikan tetap harus diusutkan

Agum: Tak Ada *Bargaining* dengan Prabowo

Jakarta, Buana

Hukuman pencecatan dari ABRI yang dijatuhkan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto kepada mantan Danjen Kopassus Letjen (Purn) Prabowo Subianto dinilai terlalu ringan. Sehingga, hal ini melahirkan spekulasi, adanya *bargaining* dengan menantu mantan Presiden Soeharto itu. Namun, spekulasi ini dibantah anggota DKP Letjen TNI Agum Gumelar.

"Tidak ada *bargaining* antara Pangab dengan Prabowo, dalam pengambilan keputusan terhadap Prabowo," kata Agum Gumelar, yang juga Gubernur Lemhanas, saat ditemui *Buana* di Jakarta, Selasa (25/8) pagi.

Saat ditanya, apa tanggapannya terhadap ketatnya sistem pengamanan di rumah menantu mantan Presiden Soeharto yang terlibat dalam penculikan aktivis prodemokrasi itu, dengan singkat Agum mengatakan, "itu bukan urusan kita."

Sedangkan saat ditanya, kenapa DKP tidak mengeluarkan rekomendasi agar Prabowo segera dimahmilkan, Agum tak langsung menjawab. Dia terdiam sejenak. "Pangab kan sudah bilang, kalau ada untuk untuk dimahmilkan, terutama adanya pengakuan 10 anggota Kopassus yang akan disidangkan, tidak menutup kemungkinan Prabowo juga akan dimahmilkan," ujar Agum.

Sebelumnya, Ny D Utomo—orang tua korban penculikan, Bimo Petrus—menilai, sudah setayaknya Prabowo dipecat. Tapi, bagi keluarganya, ini masih belum cukup setimpal dengan kesalahan yang diperbuat Prabowo. "Enak saja dia cuma dipecat. Sementara anak saya belum juga jelas, bagaimana nasibnya," ujar Ny Utomo.

"Soal pernyataan DKP yang mengatakan hanya menculik sembilan orang. Ini bukti kebohongan lain. Sebab, kalau hanya menculik sembilan orang. Lalu, siapa yang menculik aktivis yang lainnya. ABRI mestinya menjelaskan hal ini juga," ujarnya.

Lain lagi dengan korban penculikan, Andi Arief yang ditemui di Gambir Jakarta, Selasa pukul 04.45. Ia melihat, keputusan Prabowo dipecat dari jabatannya tanpa memasukkannya ke pengadilan mahkamah militer, sebagai upaya untuk menutupi keterlibatan para jendral dalam kasus-kasus lain. Seperti, kerusuhan 14-15 Mei, penembakan mahasiswa Trisakti, Tragedi Lampung, kasus Tanjung Priok, dan lainnya. Gejala ini sebagai bukti, gaya pemerintahan Soeharto masih sangat kuat di tangan kekuasaan Habibie.

Tradisi politik militer Orde Baru, dinilai Andi, memang selalu menghindarkan jenderal masuk Pengadilan Militer. Akhirnya, prajurt yang selalu jadi korban. Ini menunjukkan bahwa konsolidasi dalam tubuh militer masih belum selesai. Konflik masih berkecamuk. Wiranto juga tampaknya tidak ingin mengambil risiko berat dalam penajaman konflik. Kekuatan Prabowo dan Soeharto ternyata masih bercokol. ❑ dem/sab/pet

SIKSAAN BAGI KORBAN PENCULIKAN

Aktivis	Diculik	Siksaan
Pius Lustrilanang	2 Februari 96	Disetrum. Dimasukkan ke dalam bak dan diinjak-injak kepalanya. "Saya pikir, saya akan mati saat itu," ujarnya.
Andi Arief	28 Maret 98	Ditelanjangi dengan tangan diborgol ke meja. Separang ditegangi dengan aliran listrik.
Faisal Reza	13 Maret 98	Kaki diikat dengan kuat. Dimasukkan ke air es.

Di negeri Paman Sam, menurut Joseph M. Basset, penculikan merupakan kejahatan yang amat serius dan diancam hukuman maksimal seumur hidup. Pada zaman sebelum masehi, penculikan juga dinilai sebagai kejahatan besar dengan ancaman hukuman mati.

Penculikan yang terorganisasi oleh Deklarasi Terhadap Perlindungan Orang-Orang Hilang dinyatakan sebagai penghilangan secara paksa. Mengapa? Karena, orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau diculik itu bertentangan dengan kemauannya sendiri atau dirampas (dihilangkan) kemerdekaannya.

Biasanya, yang melakukan penculikan seperti itu adalah kelompok petugas khusus yang terorganisasi yang bertindak dengan persetujuan secara diam-diam dari penguasa tertentu. tetapi, bisa terjadi juga atas inisiatif si penculik sendiri. Dan, penguasa yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan penculikan sering cuci tangan.

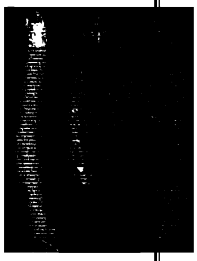

Bentuk penculikan yang terakhir itu terjadi karena pemerintah di negara yang bersangkutan tidak atau kurang demokratis alias pemerintahan tangan besi. Sebagaimana dimaklumi, setiap pemerintah tangan besi akan selalu mendapat reaksi dari masyarakat. Untuk meredam reaksi tersebut, pemerintah yang bertangan besi itu melakukan penahanan-penahanan tanpa dasar, termasuk penculikan.

Tapi, makin keras tindakan pemerintah, makin tajam pula reaksi dari rakyat. Itu rumus politik. Namun, prinsip yang sudah baku itu sering diabaikan penguasa karena lebih utama bagi dia mempertahankan kekuasaan daripada mengikuti aspirasi rakyat. Padahal, penguasa yang demikian sangat keliru. Ia menyangka penculikan itu dapat meredam reaksi tersebut, tapi kenyataannya justru melahirkan reaksi yang lebih tajam. Itulah sebabnya, betapapun mahal harganya, demokrasi harus ditegakkan.

***Baharuddin Lopa*,**
Sekjen Komnas HAM

25 AGUSTUS 1998

Ketidakpuasan, bahkan kekecewaan, terhadap putusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang hanya memecat Prabowo, tanpa mendudukkannya dalam kursi pesakitan mahkamah militer, terus mewarnai berita.

> **"Itu saya tidak bisa mengerti kok enak saja. Kalau jadi perwira berbuat salah kok cuma diberhentikan. Buat saya itu menjadi tanda tanya besar kenapa begitu. Saya tidak tahu bagaimana jalan pikirannya. Saya menganggap itu keputusan gila. Saya tidak bisa setuju dengan keputusan itu. Ini menunjukkan keragu-raguan pimpinan apakah dia mantu mantan presiden. Kok begitu."**

| ***Letjen TNI (Purn) Kemal Idris****, Ketua Barisan Nasional (Barnas)*

TERBIT SORE 12 HALAMAN

HARGA ECERAN RP 1.500

Pembaruan/Jeis Montesori S

MENENTANG KONGRES PDI – Belasan ribu pengunjuk rasa penentang pelaksanaan Kongres PDI di Palu berusaha menerobos barisan petugas keamanan yang menghalangi mereka memasuki Asrama Haji tempat berlangsungnya Kongres PDI pimpinan Soerjadi. Para pendukung PDI Perjuangan itu akhirnya tidak berhasil menemui Ketua Umum PDI hasil Kongres Medan itu.

Kemal Idris: Ajukan Prabowo Ke Mahkamah Militer

Jakarta, 25 Agustus

Berbagai tanggapan yang dikumpulkan mengenai keputusan yang dijatuhkan oleh Menhankam/Pangab Jenderal TNI

tandas Kemal.

Lebih jauh purnawirawan jenderal berbintang tiga ini menga-

tanggung-jawaban," kata Munir.

Kontras yang sejak awal berulangkali menyatakan ketidaksetu-

Dalam kesempatan itu Kontras kembali mendesak pemerintah dan pimpinan ABRI untuk memeriksa

Suara Pembaruan
25 Agustus 1998

"Puspom ABRI sebenarnya telah melakukan pemeriksaan terhadap ketiga perwira yang diperiksa oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP), tetapi itu untuk masukan DKP. Kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi berkas yang akan diajukan ke Mahmil [...]Sekarang kan Prabowo mengakui sembilan, makanya kita perlu mendalami lagi. Kita minta kalau ada masukan lain segera diberikan, misalnya dari para saksi korban."

| ***Mayjen TNI Syamsu Djalal****, Komandan Puspom ABRI, dalam berita Suara Pembaruan ("Puspom ABRI Akan Periksa Prabowo", 26 Agustus 1988)*

Suara Pembaruan
26 Agustus 1988

Puspom ABRI Akan Periksa Prabowo

AHMILUBKAN
RABOWO cs !!

Pembaruan/Charles Ulag

DUKUNG MEGAWATI – Sekitar 200 orang simpatisan yang tergabung dalam Komite Pendukung Megawat
PM), Selasa (25/8) siang melakukan aksi unjuk rasa di Dephankam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Aks
meminta agar kasus penculikan diusut tuntas dan dalang penculik agar diseret ke pengadilan.

27 AGUSTUS 1998

Kontroversi itu tak bersudah: perlukah menghadapkan Prabowo ke mahkamah militer, kemudian jika perlu bahkan harus apakah hal itu dapat dilakukan?

Menurut Syamsu D SH, pasal 9 ayat 1a UU tahun 1997 menyebutkan, pengadilan dalam lingkungan per adilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Pasal inilah, kata Dan Puspom ABRI yang akan digunakan Puspom ABRI untuk memeriksa Prabowo Subianto. Walau ia sudah pensiun tapi pada waktu melakukan tindak pidananya masih dinas aktif militer.
Dijelaskan Syamsu D SH, penculikan itu sendiri sudah merupakan pidana berat. Bahkan kedaluwarsanya lima tahun.

| ***Mayjen TNI Syamsu Djalaluddin**, Komandan Puspom ABRI, dalam berita Pos Kota ("Dan Puspom Syamsu D tepis pendapat pakar: ABRI berwenang mahmiltikan Prabowo", 28 Agustus 1998)*

Pos Kota
28 Agustus 1998

Dan Puspom Syamsu D tepis pendapat pakar

ABRI berwenang mahmiltikan Prabowo

JAKARTA (Pos Kota) - Pemeriksaan Prabowo Subianto untuk diajukan ke Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) mengacu pada Undang-Undang RI/Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI menyangkut peradilan militer. Hal ini dikatakan Dan Puspom ABRI

ke hal 3 kol. 3

Majalah mahasiswa Fisipol UGM, *Sintesa*, bekerja sama dengan Kepal Partai Rakyat Demokratik (PRD) menyelenggarakan diskusi bertopik "Kekerasan Politik dan Negara Teror". Selain sosiolog muda UGM Arie Sudjito, diskusi ini menampilkan korban penculikan, yakni Andi Arief dan Faisol Reza.

> **Salah seorang korban penculikan, Andi Arief, mensinyalir kasus penculikan terhadap dirinya dan aktivis pro-demokrasi lainnya me-libatkan dinas rahasia Amerika Serikat (AS), CIA. Hal itu dilakukan AS agar kekuatan radikal dan militan tidak ikut berperan serta dalam proses pergantian kekuasaan, sehingga tidak akan kebablasen seba-gaimana terjadi di Iran.**
> **"Ini sudah menjadi pola AS dengan CIA-nya ketika ikut campur dalam negara yang be- rada dalam proses transisi menuju demokrasi."**

| ***Andi Arief**, Korban penculikan, dalam berita Kedaulatan Rakyat ("Andi Arief: Soeharto Diktator Dunia – Penculikan Aktivis Libatkan CIA, 28 Agustus 1998)*

Kedaulatan Rakyat
26 Agustus 1998

ANDI ARIEF: SOEHARTO DIKTATOR DUNIA

Penculikan Aktivis Libatkan CIA

YOGYA (KR) - Salah seorang korban penculikan, Andi Arief mensinyalir kasus penculikan terhadap dirinya dan aktivis pro-demokrasi lainnya melibatkan dinas rahasia Amerika Serikat (AS), CIA. Hal itu dilakukan AS agar kekuatan radikal dan militan tidak ikut berperan serta dalam proses pergantian kekuasaan, sehingga tidak akan *kebablasen* sebagaimana terjadi di Iran.

Fisipol UGM dan Kepal PRD di ruang seminar Fisipol UGM, Kamis (27/8). Diskusi juga menampilkan korban penculikan Faisol Reza dan sosiolog muda UGM Arie Sudjito SSos.

Menurut Andi, bukti keterlibatan AS cukup banyak dan yang paling jelas kenyataan pasukan Kopassus yang menculiknya pernah dilatih di AS. Selain itu, proses penculikan hanya berlangsung saat per-

28 AGUSTUS 1998

Ketika Prabowo menjadi orang sipil karena sudah dipecat dari ABRI, peradilan manakah yang berwenang menyidang dirinya?

Menkeh Muladi menambahkan, sebagai dasar Prabowo harus diadili di peradilan militer yaitu pasal 9 UU No. 33 Tahun 1997. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana sebagai prajurit.

| ***Prof. Dr. Muladi, S.H.,*** *Menteri Kehakiman, dalam berita Pos Kota (Menkeh: Peradilan militer berwenang adili Prabowo", 29 Agustus 1998)*

Pos Kota
29 Agustus 1998

Wiranto usai mengikuti kegiatan latihan Kopassus sebelum mendapat baret merah kehormatan. (ip)

PALU (Pos Kota) - Ketua Umum DPP PDI Budi Hardjono bersama pengurus lainnya kemarin gagal terbang ke Jakarta. Rombongan DPP ini ke hal 2 kol. 7

Kasad: Tidak ada lagi yang *overacting*

Kopassus akan dibenahi

JAKARTA (Pos Kota) - Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD akan dibenahi mulai dari personil sampai kepada penampilan prajurit agar tidak *overacting* selama ke hal 5 kol. 3

Menkeh: Peradilan militer berwenang adili Prabowo

JAKARTA (Pos Kota) - Menteri Kehakiman (Menkeh) Prof. DR. Muladi, SH, menyatakan proses pengadilan terhadap Prabowo Subianto jelas masuk wewenang peradilan militer, ke hal 2 kol. 5

> **"Prajurit Kopassus di lapangan, kesan *overacting* harus tidak ada lagi. Kejadian (penculikan) dijadikan pelajaran berharga."**
>
> | ***Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo**, Kepala Staf Angkatan Darat, dalam berita Pos Kota ("Kopassus akan Dibenahi", 28 Agustus 1998)*

Pos Kota
29 Agustus 1998

didemo mahasiswa

Kota) - nya dari Kepala Badan tot Subroto, Jakarta Se-
ddu A- Urusan Logistik, ge- latan, kemarin didemo
abatan- dung Bulog di Jalan Ga- sekitar 15 ke hal 5 kol. 1

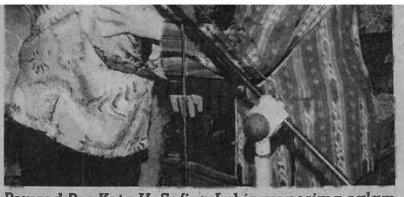

Pemred Pos Kota H. Sofjan Lubis menerima salam hangat dari Presiden Habibie, kemarin. (Tribrata)

Sulit bagi saya bubarkan PDI Soerjadi

nggapan 'bayangan' Soeharto

Kota) -
alinya,
abibie
an diri-
angan
ahulu-
al 4 kol. 1

Durin
lang
Kota) -
Kerja
i Idris
ampus
marin
ya dia
da fo-
pergu-
m pe-
l 5 kol. 6

Kemarin terpaksa gagal kembali ke Jakarta

Budi Hardjono Cs diturunkan dari pesawat

PALU (Pos Kota) - Ketua Umum DPP PDI Budi Hardjono bersama pengurus lainnya kemarin gagal terbang ke Jakarta. Rombongan DPP ini ke hal 2 kol. 7

Wiranto usai mengikuti kegiatan latihan Kopassus sebelum mendapat baret merah kehormatan. (ip)

Kasad: Tidak ada lagi yang *overacting*

Kopassus akan dibenahi

JAKARTA (Pos Kota) - Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD akan dibenahi mulai dari personil sampai kepada penampilan prajurit agar tidak *overacting* selama ke hal 5 kol. 3

Menkeh: Peradilan militer berwenang adili Prabowo

JAKARTA (Pos Kota) - Menteri Kehakiman (Menkeh) Prof. DR. Muladi, SH, menyatakan proses pengadilan terhadap Prabowo Subianto jelas masuk wewenang peradilan militer, ke hal 2 kol. 5

SEAB ambruk, kucurkan kredit tanpa agunan

PEMBUKUAN GANDA, LAPORAN KE BI DATA FIKTIF

BESOK: BANK KOSA KOLUSI DENGAN 20 PERUSAHAAN

JAKARTA (Pos Kota) - Bank SEAB (South East Asia Bank) termasuk dalam daftar bank terlikuidasi yang dilaporkan pihak BI ke Mabes Polri. Bahkan Presdir Handy Sunardio, sejak kemarin mulai mendekam dalam tahanan polisi. Tersangka lainnya yakni ke hal 20 kol. 1

Polisi tak tampak di antara jutaan massa

Giliran Hamami Nata diperiksa TGPF

JAKARTA (Pos Kota) - Mantan Kapolda Metro Jaya Mayjen Pol Drs Hamami Nata selama tiga jam dine- di Mabes Polri, kemarin siang. Dia didampingi sejumlah perwira menengah di jajaran Polda Metro

Pius akan Gugat Prabowo

marang, Bernas

Salah satu aktivis korban culikan, Pius Lustrilanang an menggugat mantan Kosdan Jenderal (Danjen) Kosus Lejen TNI Prabowo Suanto, sehubungan dengan ke-

Menurut Trimedya, gugatan itu akan dilakukan lewat aduan pidana biasa, sehingga nantinya dalam persidangan tidak akan terjadi seperti persidangan peristiwa Trisakti, dan persidangan tersebut berjalan dengan ju-

dip Semarang, Prof Dr Satjipto Rahardjo SH menyatakan gugatan itu bisa saja dilakukan. Namun harus melapor dulu kepada pihak kepolisian.

"Di sini sangat tergantung pada polisi. Jika polisi memang

mampu memperlihatkan bukti-bukti yang kuat dan mendukung gugatan tersebut. "Pengakuan Prabowo itu bisa juga dijadikan salah satu bukti," ujarnya.

Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Ma-

Bernas
30 Agustus 1998

29 AGUSTUS 1998

Menggugat Prabowo, bahkan Panglima Tertinggi ABRI Jenderal Besar Soeharto, melalui aduan pidana menjadi rencana salah satu korban penculikan, Pius Lustrilanang. Ia juga berencana menggugat Prabowo secara perdata.

> **"Kami segera menggodok konsepkonsep gugatan tersebut. Kami juga berusaha agar aktivis ain turut mengajukan gugatan ekaligus bersedia jadi saksi," ujar Trimedya Panjaitan SH kuasa hukum Pius, di Universitas Soegijapranoto Semarang, Sabtu (29/8).**
> **Trimedya yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pengacara Indonesia menyatakan, para korban penculikan seperti Andi Arief, Desmon J Mahendra dan Haryanto Taslam mau membantunya memberi keterangan secara jujur atas peristiwa yang pernah dialaminya waktu diculik.**

| ***Trimedya Panjaitan**, Ketua Kuasa Hukum Pius Lustrilanang dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pengacara Indonesia, dalam berita Bernas ("Pius Akan Gugat Prabowo", 30 Agustus 1998)*

"... pakar sosiologi hukum Universitas Diponegoro Prof Satjipto Rahardjo, SH menyatakan, bila benar Pius akan menggugat Prabowo cs, maka hal tersebut bukan perkara kejahatan namun berupa delik aduan, yaitu laporan telah terjadi suatu dugaan. Pengakuan Prabowo itu bisa digunakan sebagai petunjuk permulaan. Namun bila akan digunakan sebagai bukti, Polri harus yakin betul, karena nantinya Polri sendiri yang harus bertanggungjawab.
Ketika ditanya, bukankah saat ini Polri masih ada dalam tubuh ABRI, sehingga bisa saja, pengaduan Prabowo itu digunakan sebagai bukti awal, dan bukan sekadar petunjuk. Satjipto menyatakan, pada jalur pidana umum, Polri keluar dari ke-ABRI-annya, karena Polri adalah aparat sistem peradilan pidana, meskipun ada dalam satu tubuh ABRI
Hal inilah yang menyebabkan kondisi Polri saat ini *complicated*. "Pada jalur pidana umum, Polri keluar dari ke-ABRI-anya, karena dia aparat sistem peradilan pidana. Kondisi sekarang lucu, karena dia bagian dari ABRI, maka menjadikannya *complicated*," jelas Satjipto.

| ***Prof. Satjipto Rahardjo**, Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, dalam berita Suara Pembaruan ("Pius Akan Gugat Prabowo", 30 Agustus 1998)*

Suara Pembaruan
30 Agustus 1998

Pius Akan Gugat Prabowo

Semarang, 30 Agustus

Pius Lustrilanang akan menggugat Prabowo cs, sebagai pelaku penculikan atas dirinya. Gugatan terhadap mantan Danjen Kopassus yang sudah diberhentikan tersebut akan dilakukan melalui persidangan umum, bukan persidangan militer.

Hal itu ditegaskan kuasa hukum Pius yang juga Sekjen Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Trimedya Panjaitan SH kepada wartawan di sela-sela seminar ''Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebuah Agenda Reformasi Total'' yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat SPI dan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata di kampus Bendhan Dhuwur Semarang, Sabtu (29/8).

Dikatakan Trimedya, dasar dari gugatan tersebut adalah pengakuan Prabowo sendiri dalam Dewan Kehormatan Prajurit (DKP) bahwa ia (Prabowo) telah melakukan penculikan terhadap sembilan aktivis. Pius memilih proses peradilan biasa, gugatan tersebut tidak akan menunggu hingga Prabowo cs diajukan ke Mahkamah Militer. ''Kami meragukan independensi militer. Lihat saja kasus Trisakti, akhirnya mereka mentahkan juga,'' tegas Trimedya. Keraguan akan independensi tersebut, menurutnya sebab ada fanatisme korps militer, sehingga melalui pidana biasa, kemungkinan berat sebelah bisa dihindari.

Adapun keterangan Prabowo di DKP, keterangan para saksi, selain juga bukti-bukti tertulis, menurutnya sudah memenuhi kualifikasi bukti-bukti pidana. Yaitu menghilangkan hak asasi seseorang. Sementara gugatan perdata, Pius mengalami perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian materiil yang riil, karena tidak bisa bekerja.

Sementara saksi-saksi, Trimedya yakin aktivis yang juga diculik, seperti Desmond, Andi Arief dan Haryanto Taslam bersedia, karena mereka pun mendukung testimoni Pius beberapa waktu lalu.

Delik Aduan

Menanggapi rencana tersebut, pakar sosiologi hukum Universitas Diponegoro Prof Satjipto Rahardjo SH menyatakan, bila benar Pius akan menggugat Prabowo cs, maka hal tersebut bukan perkara kejahatan namun berupa delik aduan, yaitu laporan telah terjadi suatu dugaan. Pengakuan Prabowo itu bisa digunakan sebagai petunjuk permulaan. Namun bila akan digunakan sebagai bukti, Polri harus yakin betul, karena nantinya Polri sendiri yang harus bertanggungjawab.

Ketika ditanya, bukankah saat ini Polri masih ada dalam tubuh ABRI, sehingga bisa saja, pengaduan Prabowo itu digunakan sebagai bukti awal, dan bukan sekadar petunjuk, Satjipto menyatakan, pada jalur pidana umum, Polri keluar dari ke-ABRI-annya, karena Polri adalah aparat sistem peradilan pidana, meskipun ada dalam satu tubuh ABRI. Hal inilah yang menyebabkan kondisi Polri saat ini *complicated*.

''Pada jalur pidana umum, Polri keluar dari ke-ABRI-anya, karena dia aparat sistem peradilan pidana. Kondisi sekarang lucu, karena dia bagian dari ABRI, maka menjadikannya *complicated*,'' jelas Satjipto.

Namun demikian, bila Polri menerima laporan adanya dugaan kejahatan, maka sebagai alat negara yang harus melayani masyarakat, maka Polri harus menerima laporan tersebut. Soal diproses lebih lanjut atau tidak, itu terserah Polri menurut pandangan profesionalismenya. (135/STH)

BERPACU NASIB DI GENGGAMAN PRABOWO

Karir militer Letjen TNI Prabowo Subianto selesai di usianya yang masih muda. Tapi di tangannya tergenggam nasib para perwira tinggi ABRI. Dan Soeharto.

Prabowo belum tamat. Meski keputusan Pangab sudah turun, dan Prabowo (47 tahun) tidak berhak lagi mengenakan seragam dinasnya sejak 24 Agustus 1998, tapi ia tetaplah tokoh utama untuk menjernihkan kasus penculikan.

Perwira yang karirnya cemerlang itu memang telah menjalani pemeriksaan di depan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang sebagian besar anggotanya dari unsur Angkatan Darat adalah teman-teman "sepejuangannya" di Brigif Linud 17/Kostrad dan Kopassus. Letjen TNI Soegiono, Letjen TNI Fachrul Razi, Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Letjen TNI Djamari Chaniago, semuanya berasal dari Brigif Linud 17, di mana Prabowo pernah berdinas beberapa tahun. Tapi setelah usai proses di DKP, banyak hal yang tetap tidak terkuak.

Satu-satunya yang jelas setelah DKP hanyalah pemberhentian Prabowo dan pembebastugasan Mayjen TNI Muchdi PR dan Kolonel Chairawan. Dan ini adalah vonis yang sangat menyakitkan bagi perwira ABRI. Sumber DeTAK di DKP menyatakan bahwa diajukan ke Mahkamah Aura menampilkan aktivis-lebih ringan beban psikologi Jursyahbani Katjasungkana, putusan tersebut.

Ketertutupan adalah ciri ABRI. Banyak kasus yang menyangkut anggotanya, terutama bila yang terlibat adalah strata perwira tinggi, dibiarkan gelap. Termasuk kasus ini pula. Kalau akhirnya kasus penculikan ini diungkap oleh ABRI, itu pun lebih karena desakan masyarakat, dan tekanan dunia internasional.

MUCHDI, PRABOWO, SOEHARTO: Apakah melepaskan korban penculikan merupakan kesalahan analisis?

TIGA KEGANJILAN

Begitu berat kasus ini, karena menyangkut citra ABRI. Padahal selama ini ABRI terkesan sangat eksklusif bila menyangkut persoalan intern, aspirasi masyarakat tidak begitu diperhatikan. Jadi terli-

...ada keterpaksaan juga ABRI ingin mem... mewawancarainya," kata Erlita Rachman, redaksi sana majalah *Femina*.

...keganjilan yang muncul kemudian, yang akhirnya menjadi kontroversial.

Keganjilan pertama, ketika Feisal Tanjung, Pangab saat kejadian, menyatakan bahwa meskipun ia seorang Pangab, tidak bisa ia masuk ke seluruh bagian basis Kopassus di Cijantung. Alasannya, Kopassus itu kesatuan khusus, yang tidak sembarang orang bisa memasuki basisnya. Pernyataan Feisal Tanjung ini adalah kepolosan yang fatal, bagaimana seorang Panglima ABRI, yang memiliki otoritas demikian besar, dengan polosnya mengaku tidak bisa memasuki unit kesatuan di bawahnya.

Ada hal-hal yang tidak masuk akal dengan pernyataan Feisal Tanjung. Penculikan terjadi dalam beberapa 'kloter' dan dalam ...yang panjang sejak angkatan ...dan lain-lain hingga Haryanto Taslam, Andi Arief, dan lain-lain. Selama rentang waktu penculikan, terjadi tiga kali pergantian KSAD (Hartono, Wiranto, dan Subayo HS), namun jabatan Pangab tetap di tangan Feisal Tanjung. Untuk sebuah operasi militer yang permanen seperti ini —yang melibatkan dana besar (baca *Operasi Besar, Dana Besar*)— sangat tidak masuk akal jika Pangab mengatakan tidak tahu-menahu.

Keganjilan kedua, soal siapa yang memerintahkan Prabowo. Dengan agak tergesa-gesa Pangab dan DKP, menyatakan bahwa yang pasti perintahnya bukan dari Pangti dan Pangab. Sebagai Danjen Kopassus, Prabowo secara operasional berada di bawah Pangab, karena memang demikian jaturnya. Jadi yang bisa memerintah Prabowo, hanya Pangab. Sedang perintah langsung dari Pangti hanya dalam kondisi khusus, dan mestinya bukan sesuatu yang rutin. (Baca *Benang Kusut Bernama BKO*)

Jabatan Pangti pun sebenarnya lebih menyiratkan jabatan simbolis, seperti status raja atau ratu di negara-negara Eropa dan Jepang. Namun sebagai figur sentral, Soeharto beberapa kali tercatat memberikan perintah langsung. Menyebut beberapa kasus, misalnya, operasi penyerbuan ke Timor Timur 1975; perintah pencopotan jabatan Mayjen TNI Sintong Panjaitan (Pangdam IX/Udayana) dan Brigjen TNI RS Warouw (Pangkolakops Timtim) sehubungan dengan "Peristiwa Santa Cruz"; kemudian pengunduran diri Soemitro sebagai

Detak
7 September 1998

1 SEPTEMBER 1998

Ketertutupan adalah ciri ABRI. Banyak kasus yang menyangkut anggotanya, terutama bila yang terlibat adalah strata perwira tinggi, dibiarkan gelap. Termasuk kasus penculikan dan penghilangan warga negara ini. Kalau akhirnya kasus penculikan ini diungkap ABRI, itu pun lebih karena desakan masyarakat dan tekanan dunia internasional.

Tertutup, lalu terbuka, kasus ini pun menimbulkan kegaduhan dan keganjilan.

Keganjilan pertama, ketika Feisal Tanjung, pangab saat kejadian, menyatakan bahwa meskipun ia seorang Pangab, tidak bisa ia masuk ke seluruh bagian basis Kopassus di Cijantung. Alasannya, Kopassus itu kesatuan khusus, yang tidak sembarang orang bisa memasuki basisnya. Pernyataan Feisal Tanjung ini adalah kepolosan yang fatal, bagaimana seorang panglima ABRI, yang memiliki otoritas demikian besar, dengan polosnya mengaku tidak bisa memasuki unit kesatuan di bawahnya. Ada hal-hal yang tidak masuk akal dengan pernyataan Feisal Tanjung. Penculikan ini terjadi dalam beberapa kloter. Dan, jabatan Pangab tetap di tangan Feisal Tanjung.

Keganjilan kedua, soal siapa yang memerintahkan Prabowo. Dengan agak tergesa-gesa Pangab dan DKP menyatakan bahwa yang pasti perintahnya bukan dari Pangti dan Pangab. Sebagai Danjen Kopassus, Prabowo secara operasional berada di bawah Pangab karena memang demikian jalurnya. Jadi, yang bisa memerintah Prabowo hanya Pangab. Sedang perintah langsung dari Pangti hanya dalam kondisi khusus, dan mestinya bukan sesuatu yang rutin.

Jabatan Pangti pun sebenarnya lebih menyiratkan jabatan simbolis, seperti status raja atau ratu di negara-negara Eropa dan Jepang. Namun, sebagai figur sentral, Soeharto beberapa kali tercatat memberikan perintah langsung, seperti operasi penyerbuan ke Timor Timur pada 1975, perintah pencopotan jabatan Mayjen TNI

Sintong Panjaitan (Pangdam IX/Udayana), dan Brigjen TNI R.S. Warouw (Pangkolakops Timtim) sehubungan dengan "Peristiwa Santa Cruz".

Karena itu, pernyataan bahwa Pangab tidak tahu menahu, hal itu justru menggiring pada tudingan bahwa Soeharto telah mem-*bypass* Pangab dan memberi perintah langsung operasi penculikan. Dalam hal ini, faktor kedekatan antara Soeharto dan Prabowo sebagai mertua dan menantu akan memperkuat dugaan adanya bypass oleh Pangti. Dengan atau tanpa sepengetahuan Pangab, agaknya tidak menjadi persoalan mengingat semua figur di lingkaran elite kekuasaan hampir sepenuhnya nyantol ke Soeharto. Kalau itu yang terjadi, malang nasib rakyat Indonesia, sebuah organisasi yang memiliki keabsahan memanggul senjata, dimanfaatkan untuk kepentingan subjektif pemimpinnya.

Keganjilan ketiga, soal tuduhan Prabowo salah menganalisis perintah BKO. Tuduhan ini terkesan untuk menggiring opini publik bahwa kasus ini hanyalah persoalan teknis militer semata tanpa adanya muatan politik. Ini tampak dari dimainkannya istilah BKO yang masih asing di telinga publik. Bahkan, sesepuh ABRI Letjen TNI (Purn) Kemal Idris sekalipun tidak *ngeh* dengan istilah BKO.

nyangkut persoalan intern, aspirasi masyarakat tidak begitu diperhatikan. Jadi terli-

Ada hal-hal yang tidak masuk akal dengan pernyataan Feisal Tanjung. Penculikan

dan Pangab. Sebagai Danjen Kopassus, Prabowo secara operasional berada di

gan dengan "Peristiwa Santa Cruz"; kemudian pengunduran diri Soemitro sebagai

Operasi Khusus, Dana Khusus

Operasi penculikan para aktivis membutuhkan dana cukup besar. Untuk memberi makan mereka selama berbulan-bulan, serta memberi uang saku dan tiket pesawat ke daerah asal mereka yang dibebaskan, tentu membutuhkan anggaran khusus. Pius Lustrilanang yang diculik 4 Februari 1998 di Jakarta, tanggal 3 April diberi tiket pulang ke Palembang. Dan uang saku. Demikian juga Desmond J. Mahesa, diberi tiket ke Palembang, diberi uang saku dan dibelikan kaca mata baru. Haryanto Taslam, yang diculik di Jakarta 2 Maret 1998, tanggal 17 April dibebaskan dengan diberi tiket pulang ke Surabaya, sejumlah uang untuk beberapa hari tinggal di Hotel Satelit Surabaya dan uang saku.

Para korban penculikan bercerita bahwa mereka diculik oleh sedikitnya lima orang. Lantas dibawa dengan mobil, dan di tempat penyekapan, mereka ditempatkan di ruangan yang ber-AC dan kokoh bangunannya. Paling sedikit, di tempat penyekapan itu terdapat 20 orang penjaga.

Dari kenyataan itu, penculikan para aktivis tampaknya memang operasi intelijen yang direncanakan secara matang dan terorganisasi. Bukan operasi yang asal-asalan. Untuk menjalankan perintah operasi ini diperlukan organisasi yang kuat, punya dana cukup besar yang tidak perlu dipertanggungjawabkan, punya personil yang cukup besar dan terlatih, serta punya logistik.

Operasi penculikan para aktivis itu, tujuannya cuma satu yaitu untuk mempertahankan kekuasaan Soeharto. Menurut Munir, Koordinator Kontras, ada tiga fase penculikan masing-masing fase Kerusuhan 27 Juli, fase kampanye/pemilu 1997 dan fase Sidang Umum MPR-RI tahun 1998. "Masing-masing fase modus operasinya berbeda, tapi tujuannya sama yaitu untuk mengamankan kekuasaan dan mempertahankan status-quo. Dalam hal ini mempertahankan Soeharto," katanya.

Tapi mengapa operasi intelijen ditujukan untuk kepentingan politik seseorang? Inilah yang seharusnya dipertanyakan. Mantan Pangab Jenderal TNI (purn) Soemitro, sebelum meninggal pernah mengatakan, intel *service* yang baik tidak untuk kepentingan politik, melainkan menghasilkan produk-produk analisa mengenai keadaan, sehingga memudahkan komandan atau kepala pemerintahan mengambil kebijakan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi intel *service* tidak akan menghasilkan kebijakan yang justru meresahkan.

Sejak berdirinya Republik Indonesia hingga kini, peranan intelijen Angkatan Darat lebih menonjol dibanding angkatan lainnya. Dalam sejarahnya, intel AD ini asalnya cuma berupa staf saja. Tapi setelah adanya ancaman komunis internasional, lahirlah satuan intel AD yang dibentuk untuk menghadapi agen-agen komunis yaitu Baritmil dan PIDIAD. Tahun 1968 badan intelijen ini dikembangkan menjadi Pusintelstrat (Pusat Intelijen Strategis). Pusintelstrat kemudian menjadi BAIS (Badan Intelijen Strategis) dan terakhir tahun 1994 berubah lagi menjadi BIA (Badan Intelijen ABRI).

Menurut sebuah sumber, meskipun di antara anggota tim DKP (Dewan Kehormatan Perwira) yang dibentuk Pangab Jenderal TNI Wiranto cuma satu dua orang yang berbasis intel, tetapi seharusnya para jenderal itu tahu adanya operasi intelijen yang sedang dilaksanakan, yaitu operasi penculikan. Apalagi bila menyangkut urusan dana. Kecuali bila yang melakukan operasi khusus itu adalah badan intel yang bukan BIA dan tidak berada di bawah koordinasi Mabes ABRI. Mungkinkah? "Mungkin saja," kata sumber tadi. Operasi khusus itu, katanya, menjalankan instruksi langsung dari Pangti. ■ ma

4 DETAK • NO. 08 TAHUN KE-1 • 1 - 7 SEPTEMBER 1998

Detak
7 September 1998

Operasi penculikan para aktivis membutuhkan dana cukup besar. Untuk memberi makan mereka selama berbulan-bulan, serta memberi uang saku dan tiket pesawat ke daerah asal mereka yang dibebaskan, tentu membutuhkan anggaran khusus. Pius Lustrilanang diberi tiket pulang ke Palembang. Dan uang saku. Demikian juga Desmond J. Mahesa, diberi tiket ke Banjarmasin, diberi uang saku, dan dibelikan kacamata baru. Haryanto Taslam dibebaskan dengan diberi tiket pulang ke Surabaya dan diberi sejumlah uang untuk beberapa hari tinggal di Hotel Satelit Surabaya dan uang saku.

Para korban penculikan bercerita bahwa mereka diculik oleh sedikitnya lima orang. Lantas dibawa dengan mobil dan di tempat penyekapan, mereka ditempatkan di ruang ber-AC dan kokoh bangunannya. Paling sedikit, di tempat penyekapan itu terdapat 20 orang penjaga.

Dari kenyataan itu, penculikan para aktivis tampaknya memang operasi intelijen yang direncanakan secara matang dan terorganisasi. Bukan operasi yang asal-asalan. Untuk menjalankan perintah operasi ini diperlukan organisasi yang kuat, punya dana cukup besar yang tidak perlu dipertanggungjawabkan, punya personel yang cukup besar dan terlatih, serta punya logistik.

NEZAR PATRIA ■ KORBAN PENCULIKAN

"Pangab dan Pangti harus Dikejar"

Bagaimana Anda menilai vonis Pangab terhadap para perwira Kopassus?

Keputusan itu jelas tidak memuaskan banyak orang, terutama dari sudut korban. Dengan dipensiunkannya Prabowo, berarti kemungkinan untuk mengungkap kasus penculikan lebih jauh dan juga soal nasib 14 korban yang belum diketahui, menjadi sangat kecil.

Jadi seharusnya bagaimana sikap ABRI?

Jangan kepalang tanggung. Kalau memang ingin meyakinkan rakyat, ABRI harus memberikan pernyataan yang lebih fundamental. Termasuk posisi politik, yaitu dwifungsi ABRI. Karena kita tahu peristiwa-peristiwa yang melanggar HAM berasal dari dwifungsi ABRI sendiri.

Jadi ini belum selesai?

Belum. Karena ABRI mengambil sikap bukan karena dorongan internal, tapi karena dorongan eksternal seperti tekanan internasional dan tuntutan reformasi.

Apakah tanggungjawab ini cukup hanya sampai Prabowo?

Nggak cukup. Harus ditelusuri lebih jauh, karena katanya Prabowo hanya menerima perintah. Saya *nggak* yakin ada kesalahan analisis. Kepada siapa dia melapor? Yang di atas Prabowo, yaitu Pangab dan Pangti pada waktu itu, harus terus dikejar.

Kalau selesai hanya sampai Prabowo cs.

Itu penyelesaian yang tragis. Bukan hanya buat ABRI, tapi buat rakyat keseluruhan. Dan, kita semakin tidak percaya dengan kesungguhan ABRI untuk mendukung proses perubahan politik.

Anda optimis Prabowo dkk akan dibawa ke mahmil?

Saya *nggak* ngerti soal hukum militer. Bagaimana perwira ABRI yang terlibat satu kasus yang seharusnya dimahmilkan, tapi oleh Pangab diputuskan untuk pensiun saja. Apakah dengan posisi dia yang sudah menjadi sipil itu, bisa dibawa ke mahmil atau tidak. Tapi saya berharap, Prabowo dkk bisa dimahmilkan. Tinggal ketegasan sikap Pangab sendiri.

Mereka mengaku hanya menculik 9 aktivis saja?

Itu juga problem. Jelas, dari saksi-saksi korban, nama-nama Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, selalu disebut-sebut dalam tempat penyekapan di institusi yang sama. Kalau sampai ada keterangan bahwa mereka tidak tahu menahu, sangat aneh. Ada kecurigaan, mereka yang 14 orang itu menjadi korban misi intelejen yang gagal.

Maksudnya?

Seolah-olah dijadikan orang hilang selama-lamanya, karena suatu misi intelejen telah gagal. Apalagi, dengan adanya pengakuan para korban penculikan yang sudah bebas.

Menurut Anda, mereka masih ada?

Saya *nggak* yakin, tapi perasaan saya mereka masih hidup. Jika mereka masih hidup dan dibebaskan, bisa mengungkap skandal politik yang lebih besar. Sehingga, mungkin ABRI menyimpannya untuk sementara waktu. Tapi kalau dihilangkan benar-benar untuk selamanya, maka ini menjadi skandal politik yang lebih buruk dari kasus-kasus sebelumnya. ■

ezki

Detak
1-7 September 1998

"Nggak cukup. Harus ditelusuri lebih jauh, karena katanya Prabowo hanya menerima perintah. Saya nggak yakin ada kesalahan analisis. Kepada siapa dia melapor? Yang di atas Prabowo, yaitu Pangab dan Pangti pada pada waktu itu, harus terus dikejar. Itu penyelesaian yang tragis. Bukan hanya buat ABRI, tapi buat rakyat keseluruhan. Dan, kita semakin tidak percaya dengan kesungguhan ABRI untuk mendukung proses perubahan politik."

| ***Nezar Patria**, korban penculikan, dalam berita wawancara Detak ("Nezar Patria: Pangab dan Pangti harus Dikejar", 1—7 September 1998)*

RAHARJO WALUYO JATI ■ KORBAN PENCULIKAN

"Nggak Logis, Prabowo Salah Menganalisis"

Jenderal Prabowo dipensiun. Anda puas?

Penyelesaian kasus ini tidak bisa hanya administratif saja. Artinya, itu hanya sampai tingkat mengusut sampai sejauh mana pelanggaran kode etik di militer. Itu hanya berlaku untuk militer. Padahal yang dilakukan Prabowo bersama institusinya menyangkut nasib dan keadilan yang harus juga diproses secara sipil.

Keputusan ini tidak mencerminkan keadilan?

Ya. Itu hanya penyelesaian secara internal ABRI saja. Rakyat harus mengetahui, apa motivasi politik dari Prabowo dan operasi yang diorderkan kepadanya. Siapa yang memberikan order jelas, BKO itu diorderkan ke Prabowo. Jelas dia punya keahlian. Jadi, *nggak* logis dibilang Prabowo salah menganalisis. *Nggak* mungkin salah prosedur. Secara teknis, Prabowo *nggak* bersalah. Makanya harus diusut siapa yang memberikan BKO ini.

Andi ingin Prabowo dkk dibawa ke Mahmil?

Agar pengusutannya tuntas. Apa motif politiknya, dan siapa yang memberikan perintah. DKP seharusnya digunakan juga untuk menyelidiki hal itu, tidak hanya untuk masalah teknis saja. Harus diusut, kenapa sampai timbul BKO.

Kalau dia salah menganalisis BKO?

Saya tidak yakin. Tipis sekali kemungkinannya. Seorang Mayjen, pasti melalui seleksi yang sangat ketat, tak mungkin sampai salah menterjemahkan perintah. Apalagi militer dalam perintah operasi yang bersifat politik. Pasti detil perintahnya dan targetnya jelas. Sifat operasi, metode-metode operasi itu detil dan rigid, tidak ada peluang untuk interpretasi secara bebas. Jadi nggak ada penafsiran dalam instruksi dalam hirarki militer. Saya meragukan itu. Saya duga, itu hanya untuk menyeret Prabowo dan mengisolasi agar persoalan hanya sampai disitu saja.

Berarti ini operasi militer?

Ya. Dalam sistem politik di Indonesia, ABRI sah untuk masuk ke dalam masalah politik. Kalau Prabowo dimahmilkan, konsekuensinya harus ada koreksi besar-besaran terhadap peran politik militer, terhadap campur tangan mereka yang sudah terlalu jauh dan membuat kerusakan-kerusakan. Apalagi dalam beberapa kasus yang terungkap belakangan ini, terlihat watak militer sebagai suatu institusi yang memonopoli penggunaan alat-alat kekerasan dan praktek politik.

Selain Kopassus, adakah institusi lain yang terlibat?

Sejak awal Kontras mengatakan, tidak hanya satu kesatuan yang terlibat. Kodam juga terlibat, itu jelas dalam pernyataannya Sjafrie Syamsuddin bahwa dia mengetahui adanya kasus penculikan, terutama dalam kasus Mugiyanto, Nezar dan Aan. Pihak kepolisian yang menerima Andi Arief dan Nezar. Apakah Kopassus demikian dominan dan kuatnya, sehingga memaksa institusi-institusi lain untuk tunduk dibawah kemauannya? Artinya, ada lembaga lain yang berfungsi menjadi negosiator masing-masing kesatuan ini dalam menangani kasus penculikan. ■

wira

Detak
1-7 September 1998

"Penyelesaian kasus ini tidak bisa hanya administratif saja. Artinya, itu hanya sampai tingkat mengusut sampai sejauh mana pelanggaran kode etik di militer. Itu hanya berlaku untuk militer. Padahal yang dilakukan Prabowo bersama institusinya menyangkut nasib dan keadilan yang harus juga diproses secara sipil. Keputusan ini tidak mencerminkan keadilan. Rakyat 'kan harus mengetahui apa motivasi politik dari Prabowo dan operasi yang diorderkan kepadanya. Siapa yang memberikan order. jelas, BKO itu diorderkan ke Prabowo. jelas dia punya keahlian. Jadi, nggak logis dibilang Prabowo salah menganalisis. Nggak mungkin salah prosedur. Secara teknis, Prabowo nggak bersalah. Makanya harus diusut siapa yang memberikan BKO. Saya tidak yakin Prabowo salah menganalisis BKO. Tipis sekali kemungkinannya. Seorang mayor jenderal, pasti melalui seleksi yang sangat ketat, tak mungkin sampai salah menerjemahkan perintah."

| ***Rahardjo Waluyo Djati****, korban penculikan, dalam berita wawancara Detak ("Raharjo Waluyo Jati: Nggak Logis, Prabowo Salah Menganalisis", 1—7 September 1998)*

Tajuk
3 September 1998

PERKIRAAN PENCULIKAN DI LUAR KOPASSUS

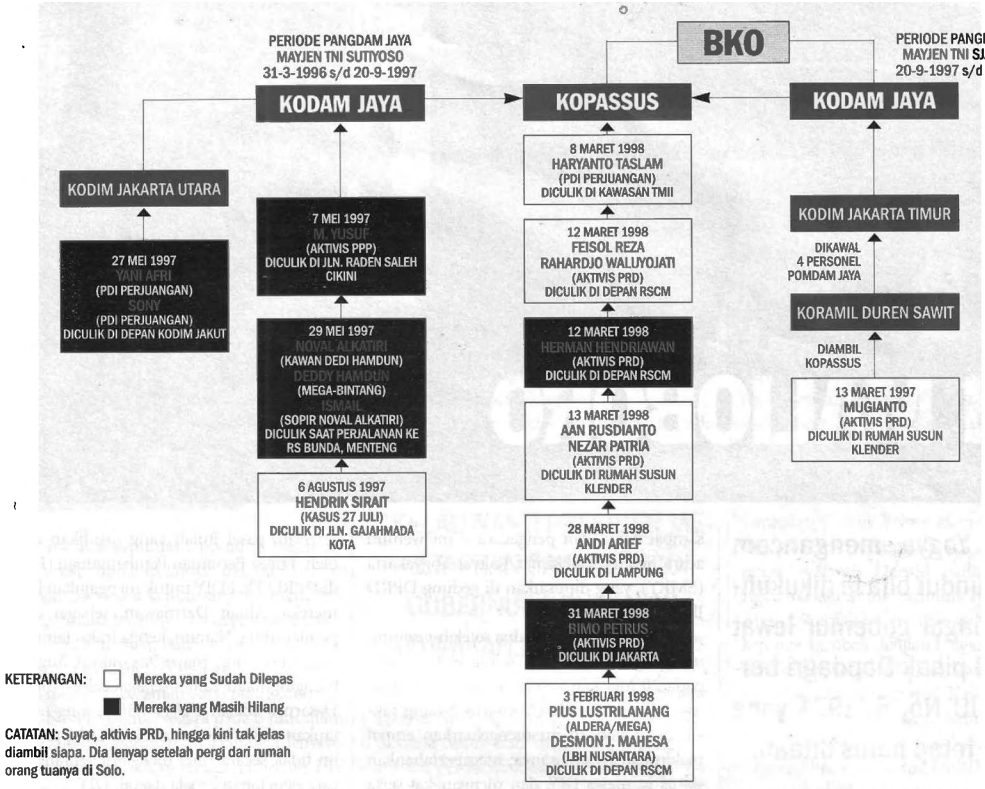

▲ *Kliping bagan penculikan ini memperjelas siapa yang diculik dan institusi mana yang terlibat di dalamnya. Konteks kliping ini penegasan berkali-kali Munir dari Kontras di berbagai kesempatan bahwa bukan hanya institusi Kopassus yang terlibat, melainkan ada lembaga lain.*

3 SEPTEMBER 1998

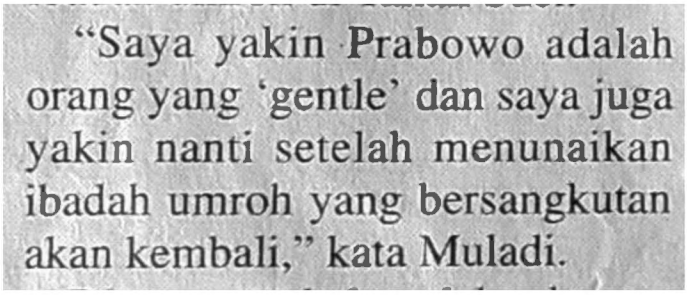
"Saya yakin Prabowo adalah orang yang 'gentle' dan saya juga yakin nanti setelah menunaikan ibadah umroh yang bersangkutan akan kembali," kata Muladi.

Media Indonesia
5 September 1998

| **Muladi**, *Menteri Kehakiman dan Anggota Komnas HAM, dalam berita Media Indonesia ("Prabowo tidak Dicekal karena Ia tidak akan Lari", 5 September 1998)*

Prabowo tidak Dicekal karena Ia tidak akan Lari

SEMARANG (Antara): Menteri Kehakiman Muladi merasa yakin bahwa mantan Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto tidak akan lari dari tanggung jawab, sehingga yang bersangkutan tidak perlu dicekal (cegah tangkal).

Pernyataan Muladi yang mantan Rektor Undip Semarang tersebut disampaikan ketika menjawab pertanyaan di Semarang, Kamis malam, menanggapi rencana Prabowo Subianto dan keluarganya untuk melakukan ibadah umroh di Tanah Suci.

"Saya yakin Prabowo adalah orang yang 'gentle' dan saya juga yakin nanti setelah menunaikan ibadah umroh yang bersangkutan akan kembali," kata Muladi.

Ditanya apakah sudah ada permintaan Mabes ABRI untuk mencekal Prabowo, Muladi yang sempat kini masih tercatat sebagai anggota Komnas HAM mengatakan, Mabes ABRI belum meminta pihaknya untuk melakukan pencekalan terhadap Prabowo, karena itu pihaknya tidak melakukan hal itu.

Menurut menteri, proyek padat karya untuk sektor kehutanan yang

Sementara itu mantan Kasospol ABRI Letjen TNI (Purn) Bambang Triantoro yang dihubungi secara terpisah berpendapat, hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tidak memiliki alasan kuat untuk menyeret Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus, ke Mahkamah Militer (Mahmil).

"Yang bisa menyeret Prabowo ke Mahmil adalah hasil pemeriksaan terhadap 10 anggota Kopassus yang akan segera diajukan ke Mahmil. Kalau nantinya, hasil pemeriksaan itu mengarah ke sana,

baru kemungkinan besar Prabowo bisa diajukan ke Mahmil," ujar Bambang yang kini menjabat sebagai ketua Yayasan Kesejahteraan Persatuan Kebangsaan (YKPK).

Belum terbukti

Permasalahannya sekarang, menurut Bambang, barangkali belum bisa dibuktikan bahwa dia (Prabowo red) telah melakukan tindak pidana.

"Yang melakukan penculikan bukan Prabowo, mungkin juga bukan Prabowo yang memerintahkan. Dia cuma setuju orang dicuti

lik dan hal itu tidak bisa dimasukkan sebagai tindak pidana sehingga tidak bisa diajukan ke Mahmil," ujarnya.

Tetapi, lanjut Bambang, sebagai seorang jenderal bintang tiga dan mantan Danjen Kopassus, hal itu merupakan kalau sampai tidak bisa mencegah anak buahnya melakukan aksi penculikan, jadi Prabowo telah merusak nama baik ABRI.

Seandainya hasil pemeriksaan DKP bisa mengajukan Prabowo ke Mahmil, tambah Bambang, dan ternyata yang bersangkutan me-

nang di Mahkamah Militer, itu akan lebih memalukan lagi.

"Sekarang ini, Prabowo dituntut sebagai apa..., apakah pejuka atau sebagai orang yang menyetujui aksi itu. Orang bisa menyatakan bahwa Prabowo tidak bersalah tetapi hanya kesalahan menganalisis BKO (Bawah Kendali Operasi)," katanya.

Hal itu tidak berarti bahwa Prabowo yang melaksanakan, karena yang menjalankan atau melaksanakan (penculikan) adalah 10 orang (anggota Kopassus) itu, dan

mungkin di antara mereka ada yang berpangkat letnan atau mayor yang mengambil inisiatif sendiri untuk menculik tanpa perintah Prabowo.

"Kalau hanya ini yang dijadikan dasar untuk membawa Prabowo ke Mahmil, kemungkinan besar mantan Danjen Kopassus itu akan menang dan hal itu akan memalukan lagi, apalagi jika yang bersangkutan menyewa pengacara yang lebih hebat. Kalau menang, maka Prabowo tidak bisa dihukum," ujar Bambang. (M-3)

7 SEPTEMBER 1998

Komisi Pelacak Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mendatangi kediaman Prabowo Subianto. Tujuan Tim Pelacak adalah memeriksa Prabowo berkaitan dengan kerusuhan Mei. Komisi Pelacak yang memeriksa dan memintai keterangan adalah Bambang W. Soeharto, Roosita M. Noor, dan Bambang Widjojanto.

Menurut Ketua TGPF dan sekaligus Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman, pemeriksaan atas diri Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Pangkostrad (Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat). Prabowo diberhentikan dari dunia kemiliteran dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal menyusul pengusutan kasus penculikan sejumlah aktivis.

Dalam pemeriksaan Prabowo itu, Komisi Pelacak telah mendapat penjelasan Prabowo yang menyatakan dirinya telah memberi tahu Panglima Komando Operasi (Pangkoops) Mantap Jaya yang juga Pangdam Jaya, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsuddin bahwa ada kekosongan pasukan pada daerah tertentu saat terjadi kerusuhan.

Masalah kekosongan pasukan ini menjadi fokus TGPF karena hasil pemeriksaan Sjafrie, ada lebih kurang 14.200 personel pasukan yang dikerahkan untuk mengamankan Jakarta pada 13 Mei di sejumlah kantor pemerintah dan tempat-tempat vital seperti PAM dan pertokoan serta kampus.

Prabowo Subianto Diperiksa Tim Pencari Fakta

JAKARTA (Media): Giliran Prabowo Subianto dimintai keteran
Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) setelah sebelumnya memeriksa pejabat militer dan sipil berkaitan kerusuhan pertengahan Mei lalu.

Prabowo dimintai keterangan di kediamannya, Senin (7/9), oleh Komisi Pelacak TGPF. Komisi ini beranggotakan Bambang W Soeharto, Roosita M Noor, dan Bambang Widjojanto.

Ketua TGPF Marzuki Darusman di Jakarta, kemarin, membenarkan pemeriksaan atas diri Prabowo yang saat kerusuhan itu menjabat Pangkostrad (Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat). Kini, Prabowo diberhentikan dari militer dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal menyusul penggusutan kasus penculikan sejumlah aktivis.

■ Prabowo Subianto

Lantas, apa informasi yang disampaikan Prabowo kepada TGP
Menurut Marzuki, Prabowo mengakui bahwa dirinya telah memb
tahukan Panglima Komando Operasi (Pangkoops) Mantap Jaya y
juga Pangdam Jaya, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsuddin, bahwa ada
kosongan pasukan pada daerah tertentu saat terjadi kerusuhan.

"Komisi Pelacak Keamanan pada hari Senin pekan ini telah men
pat penjelasan Prabowo yang menyatakan dirinya telah memberi t
Pangkoops tentang adanya sejumlah daerah kosong yang tidak dij
pasukan," ujar Marzuki.

Daerah mana saja yang kosong, tanpa penjagaan aparat keama
saat terjadi kerusuhan? Sayangnya, Marzuki memilih diam, tidak b
sedia menjelaskan titik-titik mana saja yang tidak dijaga pasukan
lama kerusuhan berlangsung.

Masalah kekosongan pasukan itu justru menjadi pusat perha
TGPF saat ini. Dalam pemeriksaan TGPF sebelumnya, Sjafrie Sj
suddin menjelaskan sekitar 14.200 personel pasukan yang dike
kan untuk mengamankan Jakarta pada 13 Mei diturunkan di sejum
kantor pemerintah dan tempat-tempat vital seperti PAM dan pert
an serta kampus-kampus.

Kendati Marzuki tidak bersedia mengungkapkan daerah yang
song pasukan, berdasarkan fakta di lapangan, kerusuhan justru
luas di sentra bisnis seperti daerah Glodok dan Kota (Jakbar), Ja
gara (Jaktim), dan Kebayoran Lama (Jaksel).

TGPF dibentuk pemerintah menyusul pemberitaan media m
menyangkut terjadinya perkosaan massal saat terjadi kerusuhan
disertai pembakaran dan penjarahan pertengahan Mei lalu. Hi
saat ini, kontroversi benar-tidaknya ada pemerkosaan massal m
berlangsung dan belum ada klarifikasi dari TGPF.

TGPF sudah minta keterangan pejabat sipil dan militer. Mereka
dimintai keterangan adalah Sutiyoso (Gubernur DKI), Hamami
(saat kerusuhan menjabat Kapolda Metro Jaya), Sjafrie Sjamsu
(saat kerusuhan menjabat Pangdam Jaya), dan Ka BIA Mayjen Z
Anwar Makarim. Menurut rencana, TGPF akan meminta keter
sejumlah menteri. (Was/M-3)

Media Indonesia
9 September 1998

MEDIA INDONESIA RABU, 9 SEPTEMBER 1998 7

Presiden Bicara soal HAM

Kemelaratan Ekonomi Faktor Pemicu Pelanggaran

JAKARTA (Media): Presiden BJ Habibie menegaskan perjuangan untuk menyelesaikan krisis ekonomi haruslah dilihat sebagai bagian dari komitmen pemerintah Indonesia kepada hak asasi manusia (HAM).

"Kemelaratan ekonomi akan menjadi salah satu faktor penting terjadinya pelanggaran HAM," ujar Presiden ketika membuka

yang saling menguntungkan. "Membaiknya situasi perekonomian akan menjadi sumbangan penting bagi pemajuan dan perlin-

Wina tahun 1993, pemajuan dan perlindungan HAM menjadi tanggung jawab pemerintah di setiap negara.

Secara filosofis, ujar Presiden, pandangan seperti itu telah dianut Indonesia sejak awal kemerdekaan. Secara lebih tegas, tutur Presiden, MPR telah memberikan instruksi kepada pemerintah un-

Kabinet ini dilantik, 22 Mei lalu. "Dalam waktu relatif singkat kami telah membebaskan tahanan-tahanan politik dan narapidana politik sepanjang hal itu dimungkinkan oleh hukum yang berlaku," ungkap Presiden.

Pemerintah, tutur Presiden, juga telah melangkah untuk mengadakan penyidikan terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM yang se-

rintah menyadari masih terlampau banyak aspirasi HAM dalam masyarakat yang belum dapat diwujudkan. Keadaan ini, ujar Presiden, harus dimengerti, mengingat Kabinet Reformasi Pembangunan baru berusia tiga bulan lebih.

"Dalam masa sesingkat itu, tentu saja masih banyak hal yang harus dikerjakan. Sementara Indonesia kini tengah dihadapkan pada

Media Indonesia
9 September 1998

8 SEPTEMBER 1998

Pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu pilar utama kebijakan kami, Kabinet Reformasi Pembangunan. Langkah nyata ke arah itu sudah dimulai sejak dilantik 22 Mei. Dalam waktu relatif singkat kami telah membebaskan tahanan-tahanan politik dan narapidana politik sepanjang hal itu dimungkinkan oleh hukum yang berlaku.

Kami juga telah mengadakan penyidikan terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM yang selama ini menjadi sorotan masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kami telah membuka pintu kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Kami juga telah memberikan kebebasan rakyat untuk mendirikan parpol-parpol, sepanjang asas dan tujuan-tujuan partai itu sejalan dengan asas serta tujuan negara.

| **B.J. Habibie**, *Presiden RI, dalam berita Media Indonesia ("Presiden Bicara soal HAM", 9 September 1998)*

Ketika Letjen TNI Prabowo Subianto dipecat dari ABRI, banyak mata menatap ke arah Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo —ayah Prabowo yang juga mantan Menteri Perdagangan dan Menristek pada pemerintahan Soeharto. Menjelang turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan, Sumitro sempat melontarkan sejumlah kritik keras terhadap kepemimpinan presiden yang juga besannya itu. Lalu apa yang dirasakannya ketika Prabowo dipecat? Apa pula pandangannya tentang 32 tahun kekuasaan Soeharto? **DeTAK** *beruntung berkesempatan mewawancarai guru besar ekonomi UI yang oleh sejumlah kalangan digelari sebagai "***Ayatullah***" ekonomi Indonesia itu. Berikut petikan wawancara yang dilakukan di rumahnya hari Minggu (6/9) sore lalu:*

"Mengadili perwira dalam tata cara tidak fair dan ksatria itu yang tidak saya setuju. Dalam kaitan human dignity dan *human right*, jangan atasan harus selalu benar. Saya masih ingat tahun pertama dia di Akabri, taruna di situ diajar untuk "kejam" sekali. Taruna kedua dan ketiga itu boleh apa saja dengan yuniornya. Di West Point nggak boleh begitu. Jadi dampak dari budaya pendidikan seperti itu, saya rasa sekarang *it is danger*, apalagi seperti menghadapi raja Jawa ini (Soeharto), jenderal-jenderal nggak berani."

| ***Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo,*** *Mantan Menteri Perdagangan dan Menristek di Masa Pemerintahan Soeharto. Ayahanda Prabowo Subianto, dalam wawancara Detak ("Soeharto Lemah terhadap Anak-Anaknya", 8 September 1998)*

Detak
8 September 1998

PROF. DR. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

Soeharto Lemah terhadap Anak-anaknya

Ketika Letjen TNI Prabowo Subianto dipecat dari ABRI, banyak mata menatap ke arah Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo —ayah Prabowo yang juga mantan Menteri Perdagangan dan Menristek pada pemerintahan Soeharto. Menjelang turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan, Sumitro sempat melontarkan sejumlah kritik keras terhadap kepemimpinan presiden yang juga besannya itu. Lalu apa yang dirasakannya ketika Prabowo dipecat? Apa pula pandangannya tentang 32 tahun kekuasaan Soeharto? DeTAK beruntung berkesempatan mewawancarai guru besar ekonomi UI yang oleh sejumlah kalangan digelari sebagai "Ayatullah" ekonomi Indonesia itu. Berikut petikan wawancara yang dilakukan di rumahnya hari Minggu (6/9) sore lalu:

Menurut Anda, apa yang paling krusial dari keadaan sekarang ini?

Yang menamakan diri pemerintahan, *agregate* kenegaraan itu memerlukan legitimasi. Sekarang yang ada baru legalitas. Saya mengadakan pembedaan antara *legality* (keabsahan hukum) dan *legitimacy* (pengakuan-mandat rakyat, red.). *Legality* bisa saja dibikin dan sekarang ini memang dibikin. Tapi *legitimacy* atau mandat dari rakyat itu belum.

Indikasinya?

Sekarang itu masyarakat kita, dunia lembaga formal, DPR/MPR, semua sedang resah terus. Begitu juga para politisi yang kurang puas, para profesional, para akademisinya ribut terus. Semua menghendaki reformasi tapi apa reformasi yang dimaui kurang jelas. Antara sektor formal dan nonformal — real sektor; non-formal tapi real, terjadi semacam dualisme. Ini yang secepatnya harus diatasi.

Dengan situasi seperti ini, bagaimana cara memenangkan kepercayaan rakyat dan dunia luar?

Salah satunya lewat pemilu. Tapi pemilu yang pelaksanaannya dengan undang-undang pemilihan yang sudah direformasi, yang sudah dijanjikan. Walau pasti tidak mungkin perfek, tapi itu kan legal formal sekaligus legitimasi yang diperlukan.

Tapi bagaimana bila ternyata ABRI masih bersikeras mendukung hanya Golkar?

Mungkin ABRI tidak melihat alternatif lain selain Golkar.

Apa tidak mungkin sikap ini merupakan kelanjutan budaya politik selama tiga puluh tahun yang diwariskan Soeharto?

Memang budaya politik yang saya rasa tertanam selama 32 tahun, merupakan

hambatan dari demokrasi tulen. Tentang hak rakyat dan kedaulatan rakyat, dalam benak, pikiran dan perasaan masyarakat sekarang ini, masih pada pengertian siapa yang punya legalitas itu dominan. Pokoknya, seolah yang berkuasa selalu benar terus.

Kembali ke masalah Pak Harto. Dalam kaitan psiko-politik Pak Harto ditempatkan sebagai masih memainkan peran penting, menurut Anda?

Bahwasanya orang-orang masih melihat selalu di belakang Habibie dan Wiranto, bayangan Soeharto, itu juga *psychological*. Tapi saya *nggak* lihat itu... Saya rasa, saya kenal besan saya itu dengan baik, walaupun *nggak* tahu seluruhnya tapi saya pernah bekerja dekat dengan dia.

Pandangan Anda terhadap Pak Harto yang sekarang banyak menerima hujatan?

Saya rasa masalahnya lain dulu lain sekarang. Pada awal bekerja dengan Pak Harto, waktu itu menurut saya dia baik dan hebat. Selama 10 tahun itu sebagai pembantu presiden kenapa kita para teknokrat berhasil membangun dan gawatnya ekonomi bisa diatasi; karena kita bisa percaya dan bisa mengandalkan dia secara sepenuhnya. Walaupun beliau belum terlalu mengerti, oke...baik, itu oke terus. Masa itu dia benar-benar pegang janji dan kata-katanya. Begitu banyak kritik di luar negeri, dan setiap kesalahan menteri-menterinya Pak Harto selalu bersikap *"Sudahlah saya tanggung jawab."* Hebatnya di situ.

Sekarang ini bagaimana ?

Sesudah itu memang ada perubahan. Selingat saya, 10 tahun terakhir ini yang paling kentara buat saya.

Permasalahan intinya apa?

Dua hal, terlalu lemah terhadap anak-anaknya dan pengaruh yang sangat merugikan masyarakat dan negara dari kelakuan anak-anaknya. Dan selain itu Soeharto terlalu lama berkuasa, kombinasi dua itulah yang terbaca oleh saya.

Di satu sisi betul bahwa anak-anaknya juga turut menciptakan suasana yang tidak menguntungkan. Tapi apakah, ada kemungkinan bahwa sebetulnya *the real* Soeharto ya seperti itu. Seperti tuduhan rakus harta dan haus kekuasaan. Menurut Anda?

Haus kekuasaan mungkin. Tapi *greedy material thing* (rakus harta benda), arahnya menurut saya — pribadinya, loh— itu tidak. Jadi dia ambil kekayaan supaya kekuasaan semakin kuat terkonsentrasi padanya. Seperti kasus yayasan-yayasan, semua itu untuk kekuasaan. Dia jadikan salah satu sumber dana menghimpun kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. *He needs money to buy power*, lebih menggarah ke sana. Tapi memang... pengaruh anak-anaknya besar sekali.

Perhatian pada anak yang berlebihan ini, sebagai mantan menteri dan besan, adakah penjelasan rasional yang Anda bisa sampaikan?

Mungkin begini... saya pernah membicarakan masalah ini dengan orang tua saya —ibu saya. Memang ada semacam beban kejiwaan masa lalu. Satu waktu dalam satu acara keluarga, waktu saya berusaha memperkenalkan keluarga kami dan nanya perihal keluarga Pak Harto, tanpa saya duga dia berbicara dengan sangat intens mengenai masa lalu dirinya.

Tepatnya kapan kejadian itu?

Oh, itu saat saya melamar Titiek (sekarang nyonya Prabowo-red.). Yah, ini saya buka sekalian saja... Pak Harto bercerita bahwa sewaktu dia masih dalam kandungan, ibunya sudah mengasingkan diri dari dunia kebangsawanan. *"Jadi sejak lahir saya sebenarnya enggak kenal ibu kandung saya. Jadi saya besar di desa. Saya jadi rebutan saat saya umur 10 tahun, antara keluarga yang mengasuh saya dengan bapak kandung saya. Kemudian saya dikompromikan ditaruh di Wonogiri, di keluarga mantri, bapaknya Sudarkatmono. Makanya Sudarkatmono lebih dari saudara kandung."*

Begitu menurut ceritanya.

Makna dari peristiwa itu?

Itulah yang membuat dirinya berlebih terhadap anak-anaknya. Karena tidak mau bernasib seperti masa kecilnya yang gelap keluarga dan kasih sayang orang tua aslinya. Makanya sekarang ia tebus dengan memberikan segalanya pada anak-anaknya.

Artinya dalam hal ini, posisi anak di sini dengan posisi bangsa dan negara, menurut Anda, kira-kira kalau Pak Harto disuruh mengambil pilihan yang mana?

Nyatanya dia pilih anaknya. Kenapa? Saudara tadi bicara soal sindrom, saya rasa dia juga terbiasa merasakan ungkapan *l'Etat c'est moi* —negara adalah saya. Itu kan sindrom budaya keraton juga, tuh. Seperti Amangkurat VII, bukan Amangkurat I.

Anda sebagai besan pernah *nggak* menegur?

Mungkin saya satu-satunya. Dua kali tentang anaknya. Saya dengar bahwa Benny Moerdani juga pernah singgung itu, tapi dimarahi. Saya dengar dari Sudharmono.

Saya datang ke dia, *nggak* tahu persis kapan, mungkin kira-kira 6-7 tahun lalu, dua kali saya *nonge* di Cendana. Saya kan Ketua Umum IKPN (Ikatan Koperasi Pegawai negeri), saya sampaikan bahwa putra-putra Bapak sudah menjadi isu politik. Saya sengaja *nggak* mengritik, hanya menyampaikan fakta saja . Dia diam, tidak ada perubahan. Saya *nggak* tahu apa dia marah atau dia terima. Waktu saya pamit, di pintu dia bilang, *"iya Pak Mitro saya menyadari anak-anak saya terkena isu politik."* Nah, saya kan lega.

Mengapa hasilnya tetap sama, tak ada perubahan berarti?

Wah, itu yang saya sulit mengerti...

Bagaimana Anda memposisikan Pak Harto sebagai seorang besan?

Ini hubungan yang sifatnya pribadi, jadi saya akan bicara secara umum saja. Saya kira tidak usahlah menilai hubungan pribadi dalam konteks pembicaraan ini.

Saya tidak pernah membantah bahwa

Detak
8 September 1998

saya mempunyai utang budi politik kepada Soeharto, sebab dialah yang memungkinkan saya kembali ke tanah air dari pengasingan. Dia sengaja mengirim Ali Moertopo untuk menemui saya dan meminta saya pulang. Akan tetapi utang budi saya yang paling utama dan lebih luas lagi ialah kepada pada rakyat dan masyarakat bangsa saya. Di kala kepentingan rakyat dilanggar —dan ini terjadi beberapa kali dalam pengalaman saya— waktu itu juga saya harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Kalau Anda sendiri terhadap anak-anak Anda bagaimana?

Waktu Hasyim (adik Prabowo) selesai, saya masih dalam kabinet. Waktu Hasyim mengatakan dia mau bisnis di Indonesia, saya jawab, "Selama saya masih jadi menteri, *"Please... Not in Indonesia!"*" . Makanya dia kerja di luar waktu itu.

November 1977 saya datang kepada Pak Harto, lalu saya katakan, "Nanti tahun 1978 saudara akan mempertimbangkan susunan kabinet, saya jangan dimasukkan lagi, saya sudah mendekati 60 tahun.... Hasyim itu mau berkarir di bidang bisnis, selama saya masih dalam pemerintahan *nggak* saya perkenankan...."

Jawaban Pak Harto?

You know what he said, yang mengejutkan dia bilang soal Hasyim..."*Kalau begitu Pak Mitro enggak adil terhadap anak-anak*" Nah, coba itu kan pandangan yang sangat berbeda. Sementara saya selalu anjurkan kepada anak-anak saya untuk tidak bergantung pada bantuan dan kemampuan orang tua. Maklum etos itu telah saya tanamkan sejak saya jadi buron politik di zaman pemerintahan Bung Karno. Hidup di luar negeri itu harus mandiri. Kalau soal anak, Pak Harto memang sangat lemah dan di situlah kelemahannya yang mendasar.

Sebagai ayah, Anda sendiri bagaimana menghadapi kasus Prabowo ini?

Begini, saya mulai dengan dua hal dulu. Saya mengingatkan apa yang pernah saya bilang selalu sebagai prinsip dasar yang tak dapat ditawar-tawar lagi oleh setiap anggota keluarga: *unequivocally, human dignity*, dan *social justice* merupakan hal yang harus selalu dijunjung tinggi. Tanpa itu, mau jadi apa kita.

Saya nggak bisa membayangkan menghadapi situasi sekarang. Itu pertama. Kedua, dengan situasi sekarang saya sekeluarga mendukung segenap langkah-langkah yang bertujuan menegakkan keadilan masyarakat, termasuk dalam kasus Prabowo.

Mengadili perwira dalam tata-cara yang tidak fair dan kesatria itu yang tidak saya setuju. Dalam kaitan *human dignity* dan *human right*, jangan atasan harus selalu benar... Saya masih ingat tahun pertama dia Akabri, taruna di situ diajar untuk 'kejam' sekali. Taruna kedua ketiga itu boleh apa saja dengan yuniornya. Di West Point *nggak* boleh begitu. Jadi dampak dari budaya pendidikan seperti itu, saya rasa sekarang *it is danger*, apalagi seperti menghadapi raja jawa ini (Soeharto-red.), jenderal-jenderal *nggak* berani.

Kembali pada kasus Prabowo, bagaimana dia sebagai militer dalam pandangan Anda?

Dalam beberapa hal Bowo mungkin kompromi. Seperti saya kasih kasus di Timor Timur itu, *nggak* mungkin sama komando membangkang atasannya. Tapi ada kasus dia ternyata membangkang. Karena tidak mau nurut perintah disuruh membunuh tawanan perang yang tak bersenjata. Saya mendukung langkah-langkah dia yang seperti itu, walau terkena sanksi tak apalah.

Termasuk yang sekarang?

Kasus Bowo khusus kali ini kok seakan-akan asas keadilan ini jadi kabur. Karena pertama Prabowo pada khususnya dan kopassus pada umumnya, sedah yang paling berjasa dan satu-satunya yang dipersalahkan. Bahwa ada berbagai instansi dan kesatuan yang terlibat, mengapa harus ditutup-tutupi? Toh semua yang terjadi merupakan satu paket program —untuk menegakkan kekuasaan, status-quo.

Jadi dalam kasus Prabowo, Anda bukan tidak setuju untuk diusut tuntas?

Caranya itu, loh. Dan, ini kan juga diakui oleh bekas-bekas korban penculikan. Mereka tidak ingin hanya Kopassus. Dungan di bawa ke Kramat (wilayah komando Kodam V Jaya-red.), jelas yang terlibat bukan hanya Kopassus. Tapi mengapa semua seolah-olah terpusat —*concentrated level* terpusat ke Bowo, semua kecaman. Apakah seorang Prabowo begitu berkuasa hingga bisa perintah sana sini ke berbagai daerah dan institusi. Padahal menurut seorang mantan Kasad, seperti ditulis DeTAK, kalau dalam ABRI ada oknum yang salah itu dua tingkat di atas kena, turut bertanggung jawab. Sebagai Danjen Kopassus kan dia punya dua atasan, Kasad dan Pangab waktu itu, mereka *nggak* mungkin *nggak* tahu, seharusnya mereka tahu!

Tapi ada juga kebiasaan yang mengatakan bahwa bisa saja mereka *nggak* tahu karena...

Maksud Saudara adanya Pangti. Yah, seperti yang dibenarkan oleh Hasnan Habib, Pangti itu (Soeharto-red) punya kebiasaan untuk langsung kasih perintah ke bawahan tanpa menghiraukan tingkat-tingkat hirarki. Saya itu sebagai menteri kadang-kadang di*bypass* (dipotong). Nah, itu kebiasaan raja Jawa. Tapi bagi dia *that's right*. Jadi tidak pernah ada keberanian mengungkap secara kesatria tentang KSAD, Pangab, dan Pangti. Kalau yang tiga ini dipertanyakan baru ada pengertian *justice* — keadilan, *that's about it*.

Hal lain yang Anda anggap sebagai penyimpangan keadilan?

Intinya seperti tadi itu, tapi cara pemberitaan dari sementara kalangan media dari dalam maupun luar negeri juga patut disesalkan, karena banyak berita cenderung mengandung hukuman. Seolah tidak ada asas praduga tak bersalah dipegang. Sudah cenderung menghakimi. Beberapa di antaranya tidak segan-segan memblikin profil-profil *personality* yang sudah menodai tablat pribadinya.

Seperti apa misalnya?

Salah satu media menulis, Prabowo kemarin pergi umroh dan sekarang dia entah di mana.... Padahal jelas dia ada di sini. Untung Cus Dur turut membantah isu tersebut. Kemarin tanggal 1 September, kita merayakan ulang tahun istri saya. Bowo ada di sini dengan Titiek dan anaknya. Jadi apa maksudnya melancarkan pemberitaan yang menyudutkan itu. Ini kan sudah merusak citra pribadi dan nilai *personality* dia (Prabowo).

Mengapa tidak secara resmi dilakukan bantahan?

Saya *enggak* mau seakan-akan karena dia itu anak saya maka saya bela-bela, kita hanya ingin *meluruskan* ada *justice* — keadilan. Harapan saya *enggak* lain daripada perlakuan dan tanggapan terhadap Prabowo itu secara adil dan benar. Tapi mengapa asas keadilan seakan-akan jadi kabur?

Tentu saya *enggak* mau bilang bahwa dia itu seluruhnya benar, tapi semua salah pun saya tidak berani katakan.

Tapi kenapa dari keluarga Bapak seringkali tidak menggunakan hak jawab?

Karena pertama, dalam proses ini kan Bowo terus-menerus diproses dalam DKP, kita tidak mau tambah mempersulit kedudukannya. Jangan sampai ada distorsi atas tragedi yang ada.

Dengan dipecatnya Bowo, bagaimana perasaan sebagai seorang ayah?

Sedih tentunya. Karena saya tahu Bowo... Dia itu kan hanya menjalankan perintah. Sebagai militer, sulit saya untuk sepenuhnya menyalahkan dia. Kalau dia seorang sipil, jelas dia telah melanggar hak asasi manusia. Tapi kalau memang mau mengusut sesuatu, hendaknya bersifat menyeluruh.

Maksud Anda?

Cari siapa dalang sesungguhnya di balik berbagai peristiwa. Mengapa tidak usut tuntas kasus Tanjung Priok, Kasus Lampung, dan lainnya?

Kalau bicara keadilan, artinya posisi Pangti pun harus dipertanyakan..?

Iya dong. Asal-usulnya dari sana, kok. Mengapa tidak usut tuntas kasus Tanjung Priok, Lampung dan lainnya? Siapa yang paling bertanggungjawab? Saya katakan ini bukan dengan dasar dendam atau sentimen. Saya bukan pendendam. Dulu saya jadi buronnya Bung Karno, tapi hubungan saya dengan Bu Fatmawati sangat baik. Jadi semata-mata hal ini saya lakukan karena menegakkan keadilan sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat luas.

Bicara soal keadilan, dalam hal DKP yang harus menggunakan norma-norma militer dalam menegakkan kehormatan perwira, kesan Anda bagaimana?

Saya sendiri kurang tahu persis apa yang terjadi. Bowo juga *enggak* mau banyak omong selama proses ini. Tapi kadang-kadang kan ada kebocoran juga. Bukan dari Bowo saja, tapi ada, lah yang lapor. Saya kan dulu mengajar di mana-mana; Seskoad, Seskogab, Lemhannas dan masih banyak lagi.

Kenyataannya, proses belum selesai tapi hukuman sudah dijatuhkan, bagaimana Anda menanggapi hal ini?

Dari sudut legalitas kan segalanya sudah diserahkan pada Pangab. Apa ada kemungkinan proses pengusutan berkembang sampai ke tingkat yang lebih tinggi, jawabannya ya dan tidak. Saya merasa kemungkinan ada juga keseganan untuk meneruskan. Kalau toh dianggap secara legalitas final, secara *Morality* sebenarnya belum final.

Khusus dalam kasus putra Anda, Prabowo?

Yah, kalau saudara mau bersikap kritis, coba bertanya; mengapa 9 (sembilan) aktivis yang diculik selamat semuanya, tapi yang 14 (empat belas) lainnya masih hilang sampai hari ini, apa ya mereka masih hidup?

Maksud Anda?

Karena yang sembilan orang itu, memang sepengetahuan Bowo dan dibebaskan dengan selamat atas kehendak Bowo pribadi.

Maksud kata 'pribadi' dalam kaitan ini?

Karena perintahnya tidak begitu.

Bagaimana perintah itu sebenarnya?

Perintahnya bukan hanya diculik, tapi mungkin lebih jauh lagi.

Dihabiskan maksudnya?

(Menjawab hanya dengan anggukkan kepala sambil menyimpan suatu perasaan yang terkesan sangat dalam)

Setahu Anda siapa yang memerintahkan Prabowo melakukan hal itu?

Siapa lagi kalau bukan seseorang yang sangat berkuasa. ■

001

DeTAK • NO. 09 TAHUN KE-1 • 8 - 14 SEPTEMBER 1998 7

▲ *Kliping wawancara ini menjadi penting lantaran di usianya yang sepuh, Sumitro Djojohadikusumo "turun gunung" memberikan sejumlah statemen lugas; bukan saja kepada kepemimpinan Soeharto yang sekaligus besannya, melainkan pula kasus penculikan yang sedang menerpa putranya, Prabowo Subianto.*

10 SEPTEMBER 1998

Korban penculikan Pius Lustrilanang mendatangi Puspom ABRI untuk memberi kesaksian tentang penculikan. Pius didampingi kuasa hukumnya, Hendardi, dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI).

Tim Pemeriksa Puspom ABRI yang dipimpin Kolonel Joko Sungkono melakukan pemeriksaan dari pukul 11.00 hingga sore hari. Menurut Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalal, kesaksian Pius memiliki nilai penting sebagai pelengkap atas berkas perkara penyidikan terhadap 11 perwira menengah ABRI yang diduga terlibat dalam operasi penculikan. Pengakuan Pius juga dapat digunakan sebagai petunjuk atas upaya pencarian 14 aktivis yang sampai saat ini keberadaannya tidak jelas.

> **"Keinginan saya bagaimana 14 teman saya yang hilang itu dapat sepenuhnya kembali. Untuk itu, saya bersedia membantu, bekerja sama dan memberikan keterangan kepada Puspom ABRI."**
>
> | ***Pius Lustrilanang,*** *korban penculikan, dalam Media Indonesia ("Pius Mendatangi Puspom ABRI", 11 September 1998)*

Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendampingi enam keluarga korban mendatangi Amien Rais di Jakarta untuk mendapatkan dukungan moral dalam pencarian 14 aktivis yang hilang. Amien Rais menemui keluarga korban penculikan bersama Sekjen PAN Faisal Basri dan A.M. Fatwa.

> **"Ada sesuatu yang aneh ketika Prabowo dicopot jabatannya oleh Pangab Wiranto. Mengapa pemerintah tidak langsung mengusut dia sebagai tersangka dari kasus hilangnya 14 aktivis prodemokrasi. Karena itu, hari ini, saya mengirimkan surat kepada Presiden untuk mendesak segera melakukan pengusutan. Jika Habibie tidak mau dibilang bagian dari rezim Soeharto, dia harus berani membawa Prabowo ke pengadilan."**

Amien Rais, *Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), dalam Media Indonesia ("Keluarga Korban Penculikan Temui Megawati dan Amien: Pius Mendatangi Puspom ABRI", 11 September 1998)*

JAKARTA (Media): Keberadaan 14 aktivis korban penculikan sampai saat ini masih misterius. Puspom ABRI mencoba melacak melalui kesaksian Pius Lustrilanang, sedangkan keluarga aktivis mencari dukungan moral dari Megawati Soekarnoputri dan Amien Rais.

Kemarin di Jakarta, didampingi kuasa hukum dari PBHI, Pius memberi kesaksian kepada Tim Pemeriksa Puspom ABRI yang dipimpin Kolonel Joko Sungkono. Pemeriksaan itu di mulai sekitar pukul 11.00 WIB dan baru selesai menjelang sore hari. Dalam pemeriksaan tersebut Pius didampingi kuasa hukumnya, Hendardi dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI).

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalal mengatakan, kesaksian Pius Lustrilanang itu memiliki nilai penting sebagai pelengkap atas berkas perkara penyidikan terhadap 11 perwira menengah ABRI yang diduga terlibat dalam operasi penculikan.

Di samping itu, lanjut jenderal berbintang dua itu, pengakuan Pius tersebut juga dapat digunakan sebagai petunjuk atas upaya pencarian 14 aktivis yang sampai saat ini keberadaannya masih tidak jelas.

Sebelum memberikan kesaksian, bersama Danpuspom ABRI dan Hendardi, Pius memberikan keterangan pers. Ia mengatakan, dirinya bersedia memberi kesaksian berangkat dari keinginan untuk membantu Puspom ABRI mencari dan menemukan kembali 14 aktivis yang masih hilang.

"Keinginan saya adalah bagaimana 14 teman saya yang hilang itu dapat secepatnya ditemukan kembali. Untuk itu, saya bersedia membantu, bekerja sama dan memberikan keterangan kepada Puspom ABRI," katanya.

Danpuspom pun menegaskan, pihaknya berupaya untuk secepatnya dapat menyelesaikan kasus penculikan aktivis. "Kesaksian Pius ini sangat penting tidak hanya sebagai pelengkap atas berkas perkara yang akan diajukan ke mahkamah militer juga sebagai petunjuk atas pencarian 14 aktivis yang diduga hilang," ujar Syamsu.

Syamsu mengatakan, "Tidak hanya masyarakat yang menanyakan kapan 14 aktivis yang diduga hilang dapat ditemukan kembali atau kapan berkas pemeriksaan anggota ABRI yang terlibat dalam kasus penculikan itu dapat segera diajukan ke Mahkamah Militer. Bahkan, Menhankam/Pangab sendiri selalu menagih hasil pemeriksaan," katanya.

Danpuspom menegaskan, pihaknya tetap memiliki komitmen untuk secepatnya mengungkap tabir gelap yang sampai saat ini masih menyelimuti korban penculikan.

"Semoga dengan keterangan Pius ini kita segera dapat menemukan kembali 14 aktivis yang sampai saat ini keberadaannya masih misterius. Keterangan ini juga menjadi pelengkap atas berkas perkara anggota ABRI yang diduga terlibat dalam kasus penculikan tersebut sehinga berkasnya dapat segera dilimpahkan ke pengadilan militer," ujarnya.

Dukungan moral

Sementara Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), kemarin, mendatangi Amien Rais dan Megawati Soekarnoputri untuk mendapatkan dukungan moral dalam mencari 14 aktivis yang hilang.

Amien Rais, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), berjanji akan menyurati Presiden Habibie untuk mendesak pemerintah mempercepat pencarian para aktivis.

Dia menilai ada sesuatu yang aneh terjadi ketika mantan Dansesko ABRI Letjen TNI Prabowo Subianto dicopot dari jabatannya, karena pemerintah tidak langsung mengusutnya sebagai tersangka.

"Ada sesuatu yang aneh ketika Prabowo dicopot jabatannya oleh Pangab Wiranto. Mengapa pemerintah tidak langsung mengusut dia sebagai tersangka dari kasus hilangnya 14 aktivis prodemokrasi. Karena itu hari ini saya mengirimkan surat kepada Presiden untuk mendesak segera melakukan pengusutan," kata Amien Rais.

Amien Rais didampingi oleh Sekjen PAN Faisal Basri dan AM Fatwa. Sedangkan Kontras mendampingi enam anggota keluarga aktivis yang hilang. Menurut rencana, keluarga aktivis yang hilang itu akan mendirikan tenda keprihatinan.

"Kami sangat mendukung perjuangan kalian untuk mencari anggota keluarga yang hilang, karena ini adalah persoalan yang hakiki," kata Amien Rais.

Ia memberi dukungan atas usaha keluarga aktivis yang hilang untuk mengadakan kemah keprihatinan dan dia menyatakan bersedia untuk datang ke kemah itu guna memberikan kekuatan moral. "Saya siap menghadiri kemah untuk memberi dukungan moral," kata Amien Rais.

Kunjungan Kontras ke Megawati mendapat sambutan baik. Mega didampingi oleh Sekjen PDI Alex Litaay, dan Haryanto Taslam (pernah diculik).

"Kami minta dukungan kepada Mbak Mega atas perjuangan kami mencari anggota keluarga kami yang masih hilang," kata Tuti, orang tua Sonny. (Edi/Wdh/Was/M-3)

Media Indonesia
11 September 1998

KASUS PENCULIKAN

Aktivis Hilang Kian Bertambah

Kasus 14 korban penculikan terus digulirkan. Dari Irianjaya juga dilaporkan ada 13 orang hilang saat kerusuhan. Ratusan perwira Trikora pun ditatar HAM.

14 SEPTEMBER 1998

Kemah Keprihatinan digelar di halaman Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Tenda hitam didirikan. Foto-foto korban penculikan dipampang. Selama tiga hari, dari 14 hingga 16 September, para orang tua korban dan aktivis LSM berkumpul di momen kemah itu sembari mendengarkan orasi dan pembacaan puisi. Sejumlah tokoh tampil memberikan dukungan moral dengan tampil berpidato, antara lain Andi Andojo, Soetjipto, A.M. Fatwa, Amien Rais, serta Sabam Sirait. Amien, misalnya, mendesak agar pemerintah segera menyeret Prabowo Subianto ke mahkamah militer. Bila diadili, Prabowo bisa menjelaskan di mana para aktivis yang masih hilang.

Forum
5 Oktober 1998

Kontras mengundang staf Amnesty International, Kerry Brogan, untuk mendesak pemerintah. Kerry pun menemui Menhankam/Pangab Wiranto, serta sejumlah pejabat pemerintah untuk masalah penculikan ini. Kerry mempersoalkan ke-14 korban penculikan yang belum kembali dan mengapa Prabowo dan kawan-kawannya belum diadili.

“Kami ingin menggugah pemerintah agar kasus penculikan diusut sampai tuntas.”

| ***Munir***, *Koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)*

“Bila masalah (penculik-an) itu berlarut-larut, bukan tidak mungkin komi-si ham pbb akan mengirim stafnya ke indonesia”

| ***Kerry Brogan***, *Staf Amnesty International*

“Mengapa (Kontras) harus melibatkan orang luar? Diselesaikan di antara kita sendiri kan bisa? Jangankan hilang, orang yang ada dan sengaja sem-bunyi pun akan kami cari”

| ***Mayjen TNI Syamsu Djalal***, *Danpuspom ABRI*

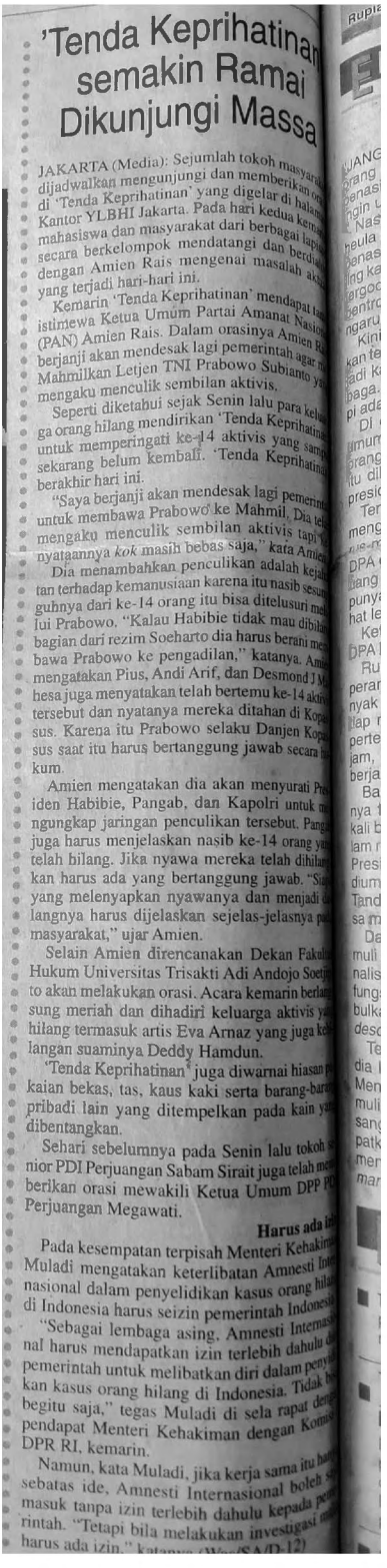

'Tenda Keprihatinan semakin Ramai Dikunjungi Massa

JAKARTA (Media): Sejumlah tokoh masyarak dijadwalkan mengunjungi dan memberikan or di 'Tenda Keprihatinan' yang digelar di halam Kantor YLBHI Jakarta. Pada hari kedua kema mahasiswa dan masyarakat dari berbagai lapis secara berkelompok mendatangi dan berdia dengan Amien Rais mengenai masalah aka yang terjadi hari-hari ini.

Kemarin 'Tenda Keprihatinan' mendapat ta istimewa Ketua Umum Partai Amanat Nasio (PAN) Amien Rais. Dalam orasinya Amien R berjanji akan mendesak lagi pemerintah agar n Mahmilkan Letjen TNI Prabowo Subianto ya mengaku menculik sembilan aktivis.

Seperti diketahui sejak Senin lalu para kelu ga orang hilang mendirikan 'Tenda Keprihatin untuk memperingati ke-14 aktivis yang samp sekarang belum kembali. 'Tenda Keprihatin berakhir hari ini.

"Saya berjanji akan mendesak lagi pemerint untuk membawa Prabowo ke Mahmil. Dia tel mengaku menculik sembilan aktivis tapi nyataannya *kok* masih bebas saja," kata Amien

Dia menambahkan penculikan adalah kejah tan terhadap kemanusiaan karena itu nasib sesu guhnya dari ke-14 orang itu bisa ditelusuri me lui Prabowo. "Kalau Habibie tidak mau dibila bagian dari rezim Soeharto dia harus berani me bawa Prabowo ke pengadilan," katanya. Ami mengatakan Pius, Andi Arif, dan Desmond J M hesa juga menyatakan telah bertemu ke-14 akti tersebut dan nyatanya mereka ditahan di Kop sus. Karena itu Prabowo selaku Danjen Kop sus saat itu harus bertanggung jawab secara h kum.

Amien mengatakan dia akan menyurati Pre iden Habibie, Pangab, dan Kapolri untuk m ngungkap jaringan penculikan tersebut. Pang juga harus menjelaskan nasib ke-14 orang ya telah hilang. Jika nyawa mereka telah dihilan kan harus ada yang bertanggung jawab. "Si yang melenyapkan nyawanya dan menjadi d langnya harus dijelaskan sejelas-jelasnya p masyarakat," ujar Amien.

Selain Amien direncanakan Dekan Fakul Hukum Universitas Trisakti Adi Andojo Soetj to akan melakukan orasi. Acara kemarin berla sung meriah dan dihadiri keluarga aktivis ya hilang termasuk artis Eva Arnaz yang juga ke langan suaminya Deddy Hamdun.

'Tenda Keprihatinan' juga diwarnai hiasan p kaian bekas, tas, kaus kaki serta barang-bara pribadi lain yang ditempelkan pada kain ya dibentangkan.

Sehari sebelumnya pada Senin lalu tokoh s nior PDI Perjuangan Sabam Sirait juga telah me berikan orasi mewakili Ketua Umum DPP P Perjuangan Megawati.

Harus ada iz

Pada kesempatan terpisah Menteri Kehakim Muladi mengatakan keterlibatan Amnesti Inte nasional dalam penyelidikan kasus orang hila di Indonesia harus seizin pemerintah Indonesi

"Sebagai lembaga asing, Amnesti Internas nal harus mendapatkan izin terlebih dahulu d pemerintah untuk melibatkan diri dalam penyi kan kasus orang hilang di Indonesia. Tidak b begitu saja," tegas Muladi di sela rapat den pendapat Menteri Kehakiman dengan Komis DPR RI, kemarin.

Namun, kata Muladi, jika kerja sama itu ha sebatas ide, Amnesti Internasional boleh s masuk tanpa izin terlebih dahulu kepada pe rintah. "Tetapi bila melakukan investigasi m harus ada izin," katanya (Wor/SA/D-12)

Media Indonesia
16 September 1998

16 SEPTEMBER 1998

Unjuk Rasa Keluarga Korban Penculikan

JAKARTA (Antara): Rombongan keluarga korban penculikan dan simpatisan mahasiswa akhirnya gagal menemui Menhankam/Pangab di Dephankam, kemarin siang, mereka ditolak masuk karena belum menyampaikan surat permohonan.

Rombongan pengunjuk rasa kebanyakan keluarga dari orang yang masih dinyatakan hilang—di antaranya ibunda Yani Afri, ayah Noval Alkatiri, dan orangtua Petrus Bimo Anugrah—itu bermaksud menemui Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto di Dephankam, untuk menanyakan nasib ke-14 orang keluarga mereka.

Kepergian keluarga korban yang diawali dengan *long march* dari YLBHI pada pukul 10.45 WIB itu sempat dihalang-halangi oleh aparat kepolisian di depan YLBHI. Namun karena para keluarga korban, terutama para ibu korban, berada di barisan depan, maka akhirnya mereka diizinkan jalan terus.

Selain diikuti oleh keluarga korban beserta korban penculikan seperti Andi arief, Pius Lustrilanang, dan Feisol Reza, aksi *long march* ke Dephankam itu juga diikuti para aktivis lainnya.

Setelah diizinkan jalan, sebagian keluarga korban, terutama para orangtua yang bermaksud menemui Menhankam, berangkat ke Dephankam di Jalan Merdeka Barat dengan menggunakan bus, sedang lainnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri Jl Diponegoro dan Jl Imam Bonjol menuju tujuan.

Tetapi aksi yang diikuti kurang lebih 100 orang aktivis itu berhenti di Jl Imam Bonjol di depan Deutsche Bank, karena tidak diizinkan melanjutkan perjalanan oleh aparat, yang diizinkan terus hanya perwakilan saja.

Karena tidak mau mengirim perwakilan, terjadi negosiasi antara aparat yang diwakili oleh Wakapolres Jakarta Pusat, Mayor Pol Ronny F Sompie dengan Ny Elizabeth salah satu korban penculikan dan Hendra Danu mewakili aktivis. Sementara aktivis lainnya melakukan aksi duduk di ruas kiri jalan dari arah Jl Imam Bonjol, sehingga terpaksa ditutup.

Sekitar pukul 12.25 WIB, para keluarga korban penculikan yang gagal menemui Menhankam tiba di lokasi itu dengan bus.

Menurut Sirra Prayuna dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang menyertai keluarga ke Dephankam, mereka tertahan di bundaran air mancur Monas dan hanya sempat menyampaikan pernyataan yang dibacakan Utomo Rahardjo, orangtua Petrus Bimo.

"Pernyataan itu kemudian diserahkan kepada Mayor Enky yang sempat menerima kami di depan gerbang Dephankam," katanya.

Tak berapa lama kemudian para demonstran itu akhirnya mau meninggalkan lokasi dan kembali berjalan menuju YLBHI setelah Ny Tuti (ibunda Yani Afri) mengucapkan terima kasih atas solidaritas mereka terhadap nasib ke-14 orang hilang tersebut. (M-3)

Media Indonesia
17 September 1998

Rombongan keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa serta para aktivis dan mahasiswa melakukan *long march* dari depan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat dengan tujuan kantor Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam). Tampak juga dalam rombongan ini aktivis korban penculikan yang sudah dibebaskan: Pius Lustrilanang, Andi Arief, dan Faisol Reza.

Long march itu sempat dihalang-halangi polisi di depan YLBHI. Namun, karena keluarga korban berada di barisan terdepan, akhirnya diizinkan berjalan terus. Sebagian keluarga korban berangkat ke Dephankam dengan naik bus, sebagian lainnya, terutama aktivis dan mahasiswa berjalan kaki menyusuri Jl. Diponegoro dan Jl. Imam Bonjol.

Keluarga korban gagal menemui Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto. Peserta aksi tertahan di bundaran air mancur Monas dan hanya sempat membacakan pernyataan sikap yang dibacakan ayahanda Petrus Bimo Anugerah, Utomo Rahardjo. Keluarga korban didampingi Kontras dalam aksi long march ini yang merupakan bagian dari Kemah Keprihatinan.

18 SEPTEMBER 1998

Para korban beserta keluarga 14 aktivis penculikan yang belum ditemukan menemui Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalal di Markas Puspom ABRI, Jakarta. Pada kesempatan itu, Andi Arief mengusulkan agar mereka dipertemukan dengan para tersangka penculik. Begitu pula Munir dari Kontras, pendamping korban, yang menginginkan pengacara tersangka penculikan dan pengacara korban penculikan dipertemukan.

Dalam pertemuan ini, Syamsu Djalal didampingi Wakil Ketua Penyidik Puspom ABRI Kolonel Sudirman Panigoro dan Kordsespri Kolonel Ginting.

Menurut Syamsu, meski para tersangka sudah dimaafkan para korban penculikan tersangka, penculik tetap diajukan ke Mahkamah Militer. Pemberian maaf sifatnya hanya meringankan.

■ KORBAN PENCULIKAN: Danpuspom ABRI Mayjen Syamsu Djalal berusaha membesarkan hati ibu salah seorang korban penculikan di kantornya kemarin. Kedua dari kanan adalah Andi Arief, aktivis yang dibebaskan penculik. Syamsu berjanji untuk mempertemukan para korban dengan para tersangka yang telah ditahan. ■ MEDIA / AGUS MULYADAY

Korban dan Keluarga Aktivis Minta Bertemu para Penculik

JAKARTA (Media): Para korban beserta keluarga 14 aktivis korban penculikan yang belum ditemukan minta agar dapat dipertemukan dengan tersangka penculik yaitu 11 oknum Kopassus yang kini masih ditahan di Puspom ABRI.

Permintaan tersebut disampaikan salah satu korban penculikan yang telah dilepas Andi Arief dalam pertemuannya dengan Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu di Markas Puspom ABRI, Jakarta, kemarin.

Selain bertemu Danpuspom, Andi Arief juga menyatakan kesediannya diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kelengkapan berkas perkara kasus penculikan para aktivis agar dapat segera diajukan ke Mahkamah Militer.

Menanggapi permintaan Andi Arief agar korban dan keluarga korban bersama para wartawan diizinkan bertemu dengan para tersangka penculik, Mayjen TNI Syamsu menyambut baik usulan itu dan didukung agar bisa secepatnya bertemu dengan 11 tersangka penculik.

"Percayalah, saran Saudara Andi Arief agar dipertemukan kita usahakan agar bisa bertemu. Namun bukan hari ini, tetapi dalam waktu dekat. Saya belum bisa pastikan kapan waktunya, karena harus dihubungi dengan pengacara para tersangka penculik terlebih dahulu," kata Danpuspom.

Dalam pertemuan itu Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu didampingi Wakil Ketua Penyidik Puspom ABRI Kolonel Sudirman Panigoro dan Korsespri Kolonel Ginting. Sedang korban penculikan dan keluarga aktivis korban penculikan yang belum kembali didampingi Ketua Kontras Munir.

"Kalau bisa pengacara korban dipertemukan dengan pengacara tersangka penculik," kata Munir.

"Dengan adanya pertemuan ini diharapkan bisa membantu penyelidikan Puspom ABRI. Jika sudah dipertemukan kami akan tanda tangani BAP-nya. Kalau dipertemukan diharapkan hati para tersangka penculik bisa luluh, dan tentunya akan membantu Puspom ABRI. Bahkan jika para tersangka itu bicara jujur kami rela jika mereka itu tidak diajukan ke pengadilan militer," kata Andi Arief.

"Puspom ABRI akan menghubungi pengacara penculik lebih dulu. Percayalah, Puspom ABRI mendapatkan perintah untuk mengusut kasus penculikan ini secara tuntas dan transparan. Puspom menyelidikinya dari informasi yang sangat minim. Namun dengan adanya keterangan Saudara Andi Arief maka Puspom ABRI bisa mengembangkannya. Sekarang, tersangka penculik sudah ditahan dan akan diajukan ke pengadilan militer," kata Syamsu.

Bukan saling memeriksa

Tenting kemungkinan pertemuan itu sebagai *bargaining*, Danpuspom menyebutkan bahwa pertemuan itu tentunya hanya silaturahmi dan bukannya saling memeriksa.

Puspom ABRI telah melaksanakan penyelidikan dan sekarang sedang melakukan pemeriksaan untuk kepentingan pengadilan militer. BAP korban penculikan sudah dikerjakan tinggal ditandatangani para korban penculikan. Dari sembilan BAP itu baru satu yang sudah ditandatangani. Meski demikian, penyelidikan dikembangkan dengan adanya keterangan Pius Lustrilanang — korban penculikan — kepada Puspom ABRI.

Menurut Syamsu, meskipun para tersangka sudah dimaafkan para korban penculikan tersangka penculik tetap diajukan ke Mahkamah Militer. Pemberian maaf itu sifatnya hanya meringankan saja, tambahnya.

Tentang kemungkinan Prabowo Subianto diajukan ke Mahmil, dia menyebutkan hal itu sudah jelas karena melakukan tindak pidana.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu sejumlah aktivis diculik dan sebagian di antara para korban telah kembali dan masih sekitar 14 korban sampai sekarang belum diketahui nasibnya. Mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo mengaku menculik sembilan aktivis dan semuanya sudah dibebaskan.(Wdh/D-12)

Media Indonesia
19 September 1998

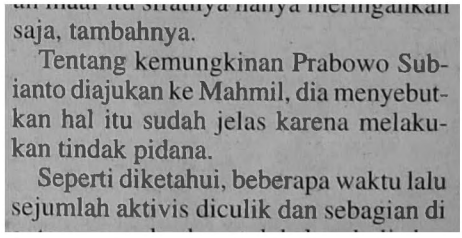

saja, tambahnya.

Tentang kemungkinan Prabowo Subianto diajukan ke Mahmil, dia menyebutkan hal itu sudah jelas karena melakukan tindak pidana.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu sejumlah aktivis diculik dan sebagian di

| Mayjen TNI Syamsu Djalal, *Danpuspom ABRI*

Media Indonesia
25 September 1998

Menunggu Laporan 25 Halaman

24 SEPTEMBER 1998

"Prabowo otomatis dibawa ke Mahmil karena dia telah mengaku menculik yang berarti tindakan pidana. Untuk mengajukan ke Mahmil, tim penyidik tinggal melengkapi dengan bukti dan keterangan saksi. Dari keterangan saksi-saksi itu, baik dari korban maupun tersangka, akan saling melengkapi. Sebab keterangan pelaku saja tidak bisa dipakai sebagai bahan dakwaan, harus dilengkapi bukti serta keterangan saksi lainnya. Jadi, Prabowo baru akan dimahmilkan setelah sebelas tersangka diajukan ke Mahmil. Keterangan mereka bisa dipakai bahan untuk mengajukan Prabowo ke Mahmil"

| ***Mayjen TNI Syamsu Djalal***, *Danpuspom ABRI , dalam Media Indonesia ("Kasus Penculikan Disidangkan Awal Oktober", 25 September 1998)*

Kasus Penculikan Disidangkan Awal Oktober

JAKARTA (Media): Sebelas anggota pasukan elite TNI-AD Kopassus tersangka kasus penculikan sejumlah aktivis prodemokrasi beberapa waktu lalu akan diajukan ke Mahkamah Militer (Mahmil) awal Oktober mendatang.

Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalal mengemukakan hal tersebut kepada wartawan kemarin di Jakarta seusai mengikuti rapat dengar pendapat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dengan Komisi I DPR RI.

"Para tersangka kasus penculikan akan segera diajukan ke Mahmil," kata Syamsu.

"Pastinya kapan Pak. Apakah awal Oktober?" kejar wartawan lagi. "Insya Allah. Akan saya usahakan," kata jenderal berbintang dua itu.

■ Mayjen TNI Syamsu Djalal ■ DOK-MEDIA

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu telah terjadi kasus penculikan terhadap sejumlah aktivis prodemokrasi. Kasus penculikan itu selain melibatkan sebelas anggota pasukan elite TNI-AD Kopassus, juga melibatkan mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto. Menantu mantan Presiden Soeharto itu mengaku kepada Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dipimpin KSAD Jende-ral TNI Subagyo HS bahwa dia telah menculik sembilan aktivis namun semuanya telah dibebaskan. Kini, masih 14 korban penculikan belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya.

Selain Prabowo, DKP juga memeriksa mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi dan Kol Chairawan yang juga diduga terlibat dalam kasus penculikan tersebut. Berdasarkan rekomendasi DKP, Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto memutuskan memberhentikan Letjen TNI Prabowo dari dinas ABRI.

Media Indonesia
9 November 1998

TAMU KITA

"Hukum Harus Ditegakkan, Bukan Dimain-mainkan"

31 OKTOBER 1988

"Siapa bilang Prabowo tidak bakal diseret? Masyarakat sendiri kan yang ragu-ragu pada pemeriksaan itu, bahwa Prabowo tidak akan diperiksa karena ABRI takut. Ini kan prasangka yang tidak-tidak saja…. Siapa yang mengatakan bahwa operasi intelijen itu boleh membunuh? Tidak ada ketentuan demikian. Operasi intelijen itu maksudnya untuk mencari dan mengumpulkan keterangan. Sekarang negara kita dalam keadaan apa? Makanya di sini peran polisi militer supaya jangan ada operasi-operasi militer di luar jalur."

*| **Mayjen (CPM) Syamsu Djalaluddin**, Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI, dalam D&R ("Hukum Harus Ditegakkan, Bukan Dimain-Mainkan", 31 Oktober 1998)*

D&R
31 Oktober 1998

"Hukum Harus Ditegakkan, Bukan Dimain-mainkan"

Mengapa kasus-kasus yang melibatkan oknum ABRI, seperti kasus penculikan aktivis dan kasus penembakan Trisakti, mencuat baru-baru ini saja. Apakah dulu kesalahan yang dilakukan militer selalu ditutup-tutupi sehingga polisi militer kurang terdengar gebrakannya?

Ah, tidak, sejak dulu juga pelanggaran itu sudah banyak terjadi. Maka dari itu, ada polisi militer. Tugas polisi militer itu kan menyelidiki, mengusut, menyidik semua personel prajurit yang melakukan pelanggaran, apakah pelanggaran disiplin, tata tertib, maupun tindak pidana.

Dulu, kok, kerja polisi militer terkesan tertutup?

Saya katakan lagi, polisi militer itu sebetulnya sejak dulu terbuka. Hanya pers yang tak mau datang. Ditambah lagi saya mempunyai prinsip sebagai orang beragama, silaturahmi itu kan sangat baik.

Bagaimana wibawa polisi militer selama ini di mata satuan ABRI?

Sudah sejak dulu kami berwibawa. Tanya saja kepada GPK Aceh. Karena apa? Karena, kami tidak bisa berbuat seenaknya. Kami tidak bisa menganiaya orang, karena kami adalah penegak hukum. Oke, saya selalu menekankan kepada prajurit saya, "Tanamkan dalam jati diri kalian, sebagai prajurit punya tugas sebagai penegak hukum, disiplin, dan tata tertib. Jadi, kalian tidak bisa sembarangan. Jangan kalian merasa kebal hukum. Konsekuensinya: sanksinya lebih berat." Maka dari itu, GPK itu senang sekali kalau mereka diserahkan ke Korps Polisi Militer. Polisi militer tanpa fakta dan bukti tidak bisa menahan orang sembarangan. Makanya, saya bicara itu berbeda dengan Kontras, yang begitu dapat informasi langsung cuap-cuap.

Ada kekhawatiran dengan pergantian jabatan Anda selaku Komandan Puspom akan menghentikan penyidikan terhadap kasus-kasus yang belum kelar?

Oh, tidak. Saya menangani kasus itu karena wewenang dan tanggung jawab. Jadi, apa yang menjadi tugas saya, itu kewajiban juga bagi pengganti saya. Itu sudah jadi kebijakan ABRI.

Perkembangan terakhir kasus penembakan Trisakti bagaimana?

ABRI tidak menutup-nutupi kesalahan. Bagi setiap prajurit ABRI, yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar.

Apa ABRI berkecil hati ketika Polri saat itu memakai pembela partikelir?

Sebenarnya ABRI juga terkejut, dalam arti kata, kok, aneh? Dalam tubuh ABRI itu sudah ada ketentuan, tidak boleh menggunakan pengacara luar kecuali atas seizin Panglima ABRI (Pangab). Nah, apakah Kapolri waktu itu (Dibyo Widodo) sudah minta izin belum?

Kalau memang itu tidak sesuai dengan ketentuan, kenapa masih diperbolehkan?

Waktu itu opini masyarakat sudah terbentuk. Nanti kalau ABRI menekan polisi agar tidak menggunakan pengacara dari luar, orang pasti akan berpikir, "Wah, ini ada apa? Jangan-jangan ABRI takut dan sebagainya." Maka dari itu, kemudian kami persilakan saja ada pengacara luar. Oditur dan hakim juga tidak memasalahkan lagi. Padahal, sebenarnya hakim bisa menanyakan hal yang sesuai dengan ketentuan kepada pengacara tersebut.

> "Saya tahu pada waktu Pak Basuki Rachmat, Pak Amirmachmud, dan Pak M. Yusuf itu datang, tidak ada yang membawa senjata, dan saya tahu di Istana Bogor itu hanya ada Ibu Hartini, Bayu, dan Taufan."

Dalam kasus Trisakti, apakah Puspom punya daftar tersangka penembak?

Makanya saya katakan tidak mudah membuktikan itu. Misalnya, sekarang sudah kami dapatkan tersangka, tapi kalau bukti-bukti yang bisa memperjelas tidak ada, ya, tidak bisa disidangkan. Pengakuan tersangka bahwa dialah yang menembak itu tidak bisa dijadikan bukti. Kita harus lihat senjata dan peluru yang dia gunakan, cocok atau tidak? Nah, inilah yang terjadi dalam kasus Trisakti.

Katanya ada keluhan dari polisi militer bahwa penyidikannya dipersulit polisi....

Kalau saya katakan dipersulit, tidak baik juga, kan? Tetapi kenyataannya, itulah kendala yang kita hadapi. Coba tanya kepada mahasiswa Trisakti, mereka kan selalu ikut dalam proses penyidikannya. Proyektil pelurunya saja dalam hasil penelitian Pusat Laboratorium Mabes Polri dikatakan tidak teridentifikasi. Akhirnya kami kan tidak mau, *wong* proyektil itu ditemukan di tubuh korban dan di dinding Gedung Syarif Thayeb. Tetapi, ketika dibawa ke Institut Teknologi Bandung dan Pindad di Bandung, ter-

Mayjen H. Syamsu Djalaluddin, S.H.

D&R, 31 Oktober 1998

D&R
31 Oktober 1998

Temuan TGPF Diumumkan Hari Ini

Masyarakat Diminta tidak Gamang

JAKARTA (Media): Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat tentang jumlah korban kerusuhan 12 s.d. 13 Mei 1998, namun hendaknya jangan bersikap gamang jika temuan tersebut tidak sama dengan jumlah hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Demikian pernyataan Marzuki Darusman, Ketua TGPF usai berbicara dalam Dialog Nasional yang bertema 'Aktualisasi Arah dan Tujuan Reformasi Pembangunan Bangsa', kemarin.

Menurut Marzuki, hari ini TGPF akan melaporkan hasil akhir temuannya pukul 16.00 WIB di Departemen Kehakiman (Depkeh). Kemarin, sebenarnya TGPF sudah sampai pada angka final mengenai jumlah korban pada kerusuhan 12 Mei lalu. "Tetapi sampai hasil tersebut diumumkan besok (hari ini—**Red**) kemungkinan perubahan angka tersebut masih terbuka," kilah Marzuki.

Bahkan, tegasnya, karena temuan baru selalu dimungkinkan sampai saatnya TGPF melaporkan hasil, hari ini pun sebelum diumumkan angka jumlah korban hasil temuan TGPF masih mungkin berubah.

Tetapi ketika didesak wartawan untuk mengungkapkan jumlah angka pasti korban hasil temuan TGPF Marzuki mengelak. "Saat ini saya belum berada adalam posisi yang sebaik-baiknya untuk melaporkan hasil penyidikan kerusuhan 12 Mei lalu," kilahnya.

Lebih jauh mengenai kemungkinan pengumuman hasil TGPF hari ini bisa mengungkapkan kasus-kasus di luar kerusuhan 12 Mei lalu, Marzuki berpendapat, hal itu mungkin saja berkaitan.

Karena, tegasnya, sampai saat ini semua lapisan masyarakat dimungkinkan mengambil kesimpulan yang seluas-luasnya untuk mengambil kesimpulan atas temuan-temuan TGPF.

Tetapi ketika wartawan menanyakan kemungkinan bahwa kerusuhan 12 Mei merupakan kejahatan terorganisasi, Marzuki berkilah, "Informasi tersebut belum layak dia-

jukan hari ini (kemarin—**Red**). Waktu yang tepat adalah pada saat TGPF menyampaikan laporan akhir besok (hari ini—**Red**) setelah melapor pada Menteri Kehakiman (Menkeh)."

Sementara, menyinggung isu perpecahan yang terjadi di TGPF, Marzuki berpendapat, hal itu tidak perlu diartikan perpecahan. "Sebenarnya itu bukan perpecahan," ujar Marzuki.

Hal itu hanya perbedaan pendapat yang merupakan dinamika yang sehat dan konstruktif. Sekaitan dengan permasalahan tersebut, Marzuki berpendapat, desakan-desakan yang dilakukan masyarakat mengenai permasalahan yang ada di TGPF justru merupakan tekanan-tekanan agar TGPF berperan lebih independen.

"Besarnya perhatian masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi di TGPF merupakan langkah bagus untuk mencegah pemerintah mencampuri kerja TGPF secara berlebihan," kata Marzuki. (SA/P-3)

Media Indonesia
3 November 1998

3 NOVEMBER 1998

Tim Gabungan Pencari Fakta yang diketuai Marzuki Darusman resmi mengumumkan hasil temuan mereka selama tiga bulan bekerja. Tim yang terdiri dari 7 orang dari kalangan pemerintahan dan 11 dari organisasi non pemerintahan (ornop).

Laporan itu dalam bentuk ringkasan 25 halaman dari 500 halaman yang diolah. Pengumuman sempat tertunda karena menyangkut keterlibatan nama dan institusi ABRI. Terutama, memasukkan nama Mayjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin yang masing-masing sebagai Pangkostrad dan Pangdam Jaya. Anggota dari internal ABRI seperti Komandan Korps Reserse Da'i Bachtiar menolak dimasukkan dalam poin yang dibacakan kepada masyarakat.

Laporan 27 TGPF ini disampaikan di hadapan ratusan wartawan di Departemen Kehakiman. Dalam dokumen Tim Gabungan Pencari Fakta terdapat sembilan (9) kesimpulan dan delapan (8) rekomendasi.

BAB II
ORGANISASI DAN TATA KERJA

1. Organisasi

1.1 Organisasi TGPF dirancang bersifat fungsional dan masing-masing bagian, termasuk setiap anggota, tidak berkedudukan subordinat terhadap bagian atau anggota lainnya.

Struktur dan susunan organisasi adalah sebagai berikut:

Ketua/Anggota	: Marzuki Darusman, SH (Komnas HAM)
Wakil ketua I/Anggota	: Mayjen Pol. Drs. Marwan Paris, MBA (Mabes ABRI)
Wakil Ketua II/Anggota	: K.H. Dr. Said Aqiel Siradj (NU)
Sekretaris/Anggota	: Dr. Rosita Sofyan Noer, SH (Bakom-PKB)
Wakil Sekretaris I/ Anggota	: Zulkarnain Yunus, SH (Depkeh)
Wakil Sekretaris II/ Anggota	: Asmara Nababan, SH (Komnas HAM)

Anggota :
1. Sri Hardjo, SE (Kantor Menperta)
2. Drs. Bambang W. Soeharto (Komnas HAM)
3. Prof. Dr. Saparinah Sadli (Komnas HAM)
4. Mayjen TNI Syamsu D, SH (Mabes ABRI)
5. Mayjen Pol. Drs. Da'I Bachtiar (Mabes ABRI)
6. Abdul Ghani, SE (Deplu)
7. I Made Gelgel, SH (Kejakgung)
8. Dunidja D. (Depdagri)

9. Romo I Sandywan, SJ (Tim Relawan)
10. Nursyahbani Katjasungkana, SH (LBH-APIK)
11. Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH. LLM (Elsam)
12. Bambang Widjojanto, SH (YLBHI)
13. Ita F. Nadya (Tim Relawan; mengundurkan diri sejak permulaan)

1.2 Dalam rangka penyelidikan, TGPF membentuk 3 Sub-tim, sebagai berikut:

1.2.1 Subtim Verikasi: Sri hardjo, SE (Ketua)
1.2.2 Subtim Testimoni: Drs. Bambang W. Suharto (Ketua)
1.2.3 Subtim Fakta Korban: Prof. Dr. Saparinah Sadli (Ketua)

2. Sekretariat

Untuk memperlancar tugas-tugas, TGPF membuka 3 sekretariat sebagai berikut:

2.1 Departemen Kehakiman
Jl. Rasuna Said, Kav. 4-5, Kuningan

Sekretariat ini dikoordinasi oleh Zulkarnain Yunus, SH., dibantu Muljanto, SH., Demak Lubis dan Bambang Pamungkas.

2.2 Jl. Hang Tuah Raya No. 3
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Sekretariat ini dikoordinasi oleh Dr. Rosita Sofyan Noer, MA., dibantu Dra. Hetty S., Indradi Kusuma, SH., dan Sri Rahajeng, SH.

3. Tim Asistensi

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, TGPF dibantu oleh satu Tim Asistensi sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Hermawan Sulistyo, Ph.D

Wakil Ketua/Anggota : Letkol Pol. Drs. Rusbagio Ishak

Anggota :
1. Drs. M. Riefqy Muna, M. Def. Stud.
2. Drs. Mohammad Rum
3. Drs. Hargyaning Tyas
4. Lettu Pol. Andi Nurlia
5. Lettu Pol. Pandra Arsyad, SH.
6. Robertus Robert, S.Sos.
7. Juliadi Karmandito, S.Sos.
8. Moch. Nurhasim, S.Ip.
9. Ir. Sri Palupi
10. Dra. Ruth Indiah Rahayu

4. Tata Kerja

Dalam rangka membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, TGPF membuka satu kotak pos dan 5 *hotlines*. Selain itu, TGPF membangun komunikasi untuk penyampaian hasil kepada masyarakat melalui media massa. TGPF juga membangun kerja sama dengan beberapa lembaga/instansi pemerintah maupun pihak lain.

Proses kerja TGPF mengikuti tahapan sebagai berikut:

4.1 Pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai sumber.
4.2 Melakukan verifikasi atas data dari berbagai sumber tersebut.
4.3 Mengadakan wawancara dengan sejumlah pejabat dan mantan pejabat, baik sipil maupun ABRI.
4.4 Mengadakan pertemuan konsultatif dengan lembaga profesi dan saksi ahli.
4.5 Melakukan kunjungan lapangan ke daerah-daerah.
4.6 Menyusun ulang gambaran alur peristiwa serta melakukan analisis.
4.7 Menyimpulkan temuan-temuan dan mengungkapkan duduk perkara sebenarnya.
4.8 Menyusun rekomendasi kebijakan dan kelembagaan.

KESIMPULAN TGPF #1

Sebab peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998 adalah terjadinya persilangan ganda antara dua proses pokok, yakni proses pergumulan elite politik yang bertalian dengan masalah kelangsungan kekuasaan kepemimpinan nasional dan proses pemburukan ekonomi moneter yang cepat. Di dalam proses pergumulan elit politik itu, ada pemeran-pemeran kunci di lapangan pada waktu kerusuhan. Dalam kaitan ini, pertemuan Makostrad tanggal 14 Mei 1998, patut diduga dapat mengungkap peranan pelaku dan pola pergumulan yang menuju pada kerusuhan yang terjadi.

■ TGPF

Misteri 14 Mei: Di Mana Para Jenderal

Tim Gabungan Pencari Fakta merekomendasikan pemerintah menyelidiki pertemuan di Makostrad, 14 Mei lalu. Padahal, persoalan yang lebih menarik: mengapa para jenderal meninggalkan Jakarta pada hari itu?

Foto: FVR

Keputusan Pangab tetap pergi ke Malang kendati keadaan mulai rusuh.

AKANKAH peristiwa kerusuhan 13-15 Mei terungkap secara tuntas? Pertanyaan ini mencuat setelah laporan Tim Gabungan Pencari Fakta yang diumumkan Selasa, 3 November lalu, mendapatkan berbagai reaksi keras. Utamanya terhadap rekomendasi agar pemerintah menyelidiki pertemuan 14 Mei di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, sebagai upaya menyibak peranan Letjen Prabowo Subianto dan kelompoknya dalam kerusuhan yang mengharubirukan Jakarta itu.

Salvo pertama protes diutarakan oleh para peserta pertemuan yang dituding. Hashim S. Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo, menggelar konferensi pers keesokan harinya. Pengusaha beken ini ditemani oleh Fadli Zon dan Farid Prawiranegara, yang juga hadir dalam acara di depan Stasiun Gambir itu. Menurut Hashim, pertemuan itu sangat terbuka dan melibatkan banyak orang sehingga tak mungkin menyangkut rencana makar. Apalagi acara itu bukan prakarsa abangnya, melainkan Adnan Buyung Nasution.

"Saya ambil inisiatif untuk bertemu dengan kawan-kawan karena saya sudah muak dengan fitnahan, dan saya anggap ini fitnahan yang luar biasa," kata Hashim. Ia lantas membeberkan isi pembicaraan yang menyangkut perkembangan keadaan terakhir dan ajakan Prabowo untuk membantu pengendalian keadaan, kritik Adnan Buyung terhadap pemerintahan Soeharto, dan soal penembakan mahasiswa Trisakti, yang dijawab Prabowo dengan menyatakan berani bersumpah di atas Alquran bahwa ia tak pernah memerintahkan penembakan kepada mahasiswa.

Keterangan ini umumnya dibenarkan oleh Adnan Buyung Nasution dalam kesempatan yang terpisah. Namun, tokoh pembela hak asasi manusia ini menyatakan bahwa ia bukan pemrakarsa pertemuan, tapi hadir atas undangan telepon W.S. Rendra. Uniknya, peserta yang lain, Setiawan Djody, bersikeras pertemuan itu diadakan karena Adnan Buyung Nasution meneleponnya meminta bantuan untuk bertemu dengan Prabowo. Djody, setelah berembuk dengan Rendra, mengontak Fahmi Idris, yang kemudian mengontak balik dan menyatakan Prabowo bersedia bertemu dengan mereka di kantornya.

Lantas bagaimana sebenarnya hasil temuan TGPF yang kemudian, antara lain, merekomendasikan penyelidikan atas pertemuan ini? Untuk menguak misteri ini, TEMPO menelusuri laporan lengkap TGPF berdasarkan wawancara dengan sejumlah pejabat militer dan sipil. Berikut ini adalah rekapitulasi penelusuran itu:

Selasa, 12 Mei 1998

Terjadi insiden penembakan mahasiswa Trisakti. Panglima Komando Operasi langsung memerintahkan keadaan siaga satu ke seluruh jajaran keamanan. Menurut Komandan Jenderal Marinir Mayjen Suharto, perubahan keadaan dari siaga tiga menjadi siaga dua lalu ke siaga satu itu diterima pada pukul 21.25 WIB. Kekuatan pengamanan terdiri atas 17 ribu anggota Kepolisian RI dan 10.364 pasukan pendamping, yang terdiri atas 5.764 pasukan lain-lain (17 unsur) serta 4.600 pasukan Kodam Jaya.

Prabowo mengaku berada di rumah ketika ditelepon Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin tentang tertembaknya mahasiswa Trisakti sekitar pukul 20.00. Ia kemudian berangkat ke kantornya, Markas Kostrad, untuk menyiapkan pasukan tambahan.

Rabu, 13 Mei 1998

Upaya pengamanan keadaan yang semakin genting oleh polisi hanya berhasil sampai upacara pemakaman mahasiswa yang tewas selesai. Kerusuhan mulai terjadi di Jakarta Barat dan beberapa lokasi lainnya. Sementara itu, menurut Kasdam Jaya Brigjen Suci Silalahi, atas perintah Pangkoops ia mengontak para panglima komando utama di Jakarta dan di luar Jakarta untuk meminta bantuan. "Saya langsung kendalikan bagaimana pemberangkatan Hercules ke Solo, Malang, Surabaya untuk angkut pasukan ke Jakarta hingga pada tanggal 14 sudah terkumpul 13.983 pasukan dan disusun dalam SSK-SSK," katanya kepada TGPF. Pada hari ini,

Tempo
16 November 1998

Kapolda Hamami Nata melaporkan kepada Kapolri bahwa pihaknya sudah kewalahan menghadapi situasi amukan massa yang marah kepada aparat kepolisian karena peristiwa penembakan mahasiswa, dan sesuai dengan prosedur SK 658 Pangab maka Pangkoops mengambil alih kemudi pengamanan. "Apabila seorang Kapolda di dalam mengendalikan wilayah dia merasa sudah tidak mampu, dengan sudah minta *backup* dan sebagainya, dia melaporkan kepada Kapolri dan ini sudah saya lakukan. Dan ini saya lakukan. Kapolri, ini situasi sudah begini. Saya kira satuan kita sudah turun dan harus diambil alih Pangab. 'Apa memang betul?' dua kali beliau tanya begitu," tutur Mayjen Hamami Nata. Pihak kepolisian mengalami kesulitan mengendalikan massa di lapangan karena merasa pasukan pendamping tidak terlalu mendukung upaya polisi membubarkan massa. Bahkan markas polisi diserbu, hingga tercatat 22 markas polisi dibakar dan dirusak berat dan sejumlah besar lainnya mengalami kerusakan ringan akibat lemparan batu. Pengalihan kendali pengamanan dari Kapolda ke Pangkoops Jaya membuat Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin memutuskan memindahkan pos koordinasi ke Markas Garnisun yang terletak bersebelahan dengan Markas Kostrad di Jalan Merdeka Selatan.

Sementara itu, dua prajurit marinir tewas jatuh dari helikopter dan seorang danramil meninggal tertimpuk batu. Melihat keadaan yang semakin rusuh, Panglima Kostrad Letjen Prabowo Subianto mengambil inisiatif mengontak Markas Besar ABRI dan mengusulkan agar kunjungan Pangab dan rombongan ke acara gelar Pasukan Pemukul Reaksi Cepat Kostrad di Malang yang dijadwalkan pada 14 Mei ditunda. "Keputusan dari Mabes ABRI tidak ditunda dan Pangab berkenan hadir. Saya juga tanya apakah Pangkostrad juga akan hadir di Malang, apa tidak sebaiknya di Jakarta. Tetapi keputusan dari Mabes ABRI tetap, ke Malang," kata Prabowo kepada TGPF.

Keputusan Pangab untuk tetap pergi ke Malang kendati keadaan mulai rusuh dianggap wajar oleh Kepala Pusat Penerangan ABRI Mayjen Syamsul Maarif. "Itu urusan Pangab berangkat ke Malang. Pengamanan di Ibu Kota Jakarta sudah dilimpahkan ke Pangdam Jaya sebagai penanggung jawab Kodam," katanya.

Kamis, 14 Mei 1998

Menurut keterangan Prabowo Subianto, ia sudah berada di Bandar Udara Halim Perdanakusuma pada pukul 6 pagi bersama para pejabat teras rombongan Pangab yang "cukup banyak jumlahnya". Rombongan lalu terbang ke Malang untuk menghadiri acara yang sudah disiapkan sebulan sebelumnya itu. Sementara itu, menurut pengakuan Komandan Jenderal Marinir Mayjen Suharto, ia bersama KSAL terbang dengan helikopter untuk mengikuti upacara pemanfaatan lahan tidur TNI-AL di Jonggol, yang diadakan pukul 9 pagi.

RULLY KESUMAADDIK - DR

Sjafrie Sjamsoeddin: Jenderal yang tak ikut ke Malang.

Adapun kepulangan rombongan Pangab dari Malang ternyata dipercepat hingga rombongan kembali mendarat di Halim sekitar pukul 12.30—dari jadwal semula pukul 14.00. "Dipercepat pulangnya karena sewaktu kami di Malang, kami dengar telepon-telepon ke Pangab di ruang VIP tentang kerusuhan di Jakarta," kata Prabowo.

Sesampai di Jakarta, Prabowo menyatakan langsung menuju ke Markas Kostrad dan melihat ada helikopter Pangkoops di helipad Makostrad (Markas Garnisun tidak memiliki helipad). Ia lantas bertemu dengan Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin di Markas Garnisun, kemudian diajak terbang dengan helikopter dan menyaksikan berbagai aksi pembakaran sudah terjadi. Setelah kembali mendarat di Makostrad, Prabowo berangkat ke Kantor ICMI di Gedung Departemen Agama untuk memenuhi jadwal pertemuan dengan Ahmad Tirtosudiro pada pukul 16.00. "Karena Pak Ahmad Tirtosudiro kan bagaimanapun Ketua ICMI pada saat itu, dan saya berharap ia dapat membantu menenangkan massa," kata Prabowo. Namun, tokoh yang akan ditemuinya itu tak ada di tempat. Maka ia kembali ke Kostrad dan dalam perjalanan menyaksikan kerumunan yang mulai beringas di sekitar Jalan M.H. Thamrin. Karena itu, ia mengaku langsung menemui Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin dan mengajaknya berpatroli mengamankan keadaan. "Saya lihat ada 16 panser yang parkir di depan Departemen Hankam mengamankan Dephankam dan Mabes ABRI. Saya bilang, saran saya, 16 panser itu jangan nongkrong saja. Sebagian suruh patroli sepanjang Sudirman-Thamrin mencegah pembakaran," tutur Prabowo. Saran itu rupanya diterima. Sjafrie kemudian bersama Prabowo dan Danjen Kopassus Mayjen Muchdi membawa delapan panser untuk berpatroli hingga sekitar magrib, dan ketika sampai di Kostrad telah ditunggu sejumlah tamu: Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djody, W.S. Rendra, dan lain-lain. Acara itu selesai dengan santap malam. Dan Prabowo kemudian menghadiri rapat paparan keadaan oleh Pangkoops di Markas Garnisun, yang dihadiri oleh Pangab serta para pejabat teras militer lainnya. Di akhir rapat, Pangab menawari para peserta untuk memberikan usulan. Menurut Mayjen Suharto, hanya dia dan Prabowo yang menanggapi tawaran itu. Prabowo mengusulkan agar Jakarta dibagi dalam beberapa sektor, dan tanggung jawab sektor diberikan kepada satu unit kesatuan. Suharto mengusulkan agar semua kendaraan lapis baja dikeluarkan untuk memperkuat efek pasukan keamanan. Setelah rapat bubar, Prabowo berpatroli dan dengan ditemani Ketua GP Ansor Iqbal Assegaf ia sempat berkunjung ke rumah Abdurrahman Wahid sekitar pukul 1 subuh.

Jumat, 15 Mei 1998

Keadaan mulai dapat dikuasai oleh pihak keamanan. Presiden Soeharto tiba di Jakarta dari kunjungan ke Kairo, dua hari lebih cepat dari jadwal semula.

Sabtu, 16 Mei 1998

Pasukan Pemukul Reaksi Cepat yang diperintahkan membantu pengamanan tiba di Jakarta.

Bambang Harymurti, Hani Pudjiarti, Darmawan Sepriyossa

▲ *Kliping ini mencoba merekonstruksi ulang apa yang disebut "Peristiwa 14 Mei" peristiwa disajikan ulang.*

Forum
30 November 1998

Mengungkap

Kejanggalan menyeruak dari halaman-halaman Laporan Akhir Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei. Data "dipelintir" demi kepentingan para aktivis?

REAKSI terhadap Laporan Akhir Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang diumumkan pada 3 November 1998, tampaknya masih belum akan berakhir. Banyak pihak menilai laporan TGPF itu terlalu banyak mengandung "lubang hitam" dan menyimpan pelbagai tanda tanya. Terutama menyangkut jumlah korban pemerkosaan. "Kami tak terima. Laporan itu kebohongan besar," kata Achmad Soemargono, aktivis Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI).

Ia kecewa karena Laporan Akhir itu sama sekali tak memberi titik terang. Baik tentang kejelasan isu pemerkosaan massal terhadap wanita keturunan Cina dalam kerusuhan besar, 13-15 Mei silam, maupun siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa itu. Laporan itu, "Sarat dengan muatan politis yang memojokkan mantan Pangkostrad Letnan Jenderal Prabowo Subianto," katanya seraya menunjuk isi butir pertama Kesimpulan dan Rekomendasi TPGF kepada pemerintah untuk mengusut pertemuan yang terjadi di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Makostrad), 14 Mei 1998.

Dalam Kesimpulan TPGF, sebab utama Kerusuhan Mei adalah terjadinya persilangan ganda antara dua proses pokok, yakni proses pergumulan elite politik yang bertalian dengan masalah kelangsungan kepemimpinan nasional dan proses pemburukan ekonomi moneter yang cepat. Nah, untuk mencari pemeran kunci di lapangan, TGPF merekomendasi agar pemerintah mengusut pertemuan itu.

Kesimpulan itu kontan memancing berbagai reaksi, terutama dari kalangan sipil yang hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka, antara lain, pengacara kondang Adnan Buyung Nasution, pengusaha Setiawan Djodi, budayawan W.S. Rendra, dan adik Prabowo, pengusaha Hashim S. Djojohadikusumo. "Saya muak dengan segudang fitnah dan tuduhan yang sudah luar biasa," kata Hashim yang menggelar konferensi pers sehari setelah pengumuman TGPF.

Peserta lain dalam pertemuan di Makostrad itu juga tak habis pikir, mengapa TGPF menjadikan acara itu sebagai titik kunci dalam pengusutan Peristiwa Mei. Padahal, mereka bertemu Prabowo justru untuk mencari tahu perihal huru-hara tersebut. "Saya bingung, mengapa Bambang Widjojanto tak bisa menjelaskan apa isi pertemuan Makostrad," kata Rendra. (Baca *Suatu Malam di Makostrad*).

"Saya tidak *ngeh* soal itu, sampai TGPF meminta kesaksian Fahmi Idris," kata Bambang Widjojanto, anggota TGPF yang juga turut hadir, bahkan termasuk paling gencar bertanya, dalam pertemuan di Makostrad, yang dihadiri 17 orang sipil. Tapi, Fahmilah satu-satunya sipil yang diwawancarai TGPF.

Keberatan juga disampaikan Panglima ABRI Jenderal Wiranto. Ia menilai TGPF telah melampaui wewenang dengan membuat investigasi dan analisis. Padahal, "TGPF dibentuk untuk mencari fakta yang berkembang di masyarakat lewat temuan dan testimoni untuk disampaikan kepada departemen yang membuat keputusan bersama," katanya.

Wiranto pantas geram. Dalam butir kesimpulan keempat, TGPF memang menyebutkan keterlibatan banyak pihak dalam kerusuhan itu dan secara terang-terangan menegaskan ABRI sebagai salah satunya. Baik sebagai penggerak, provokator, dan massa aktif—sekelompok bersama preman lokal dan massa organisasi politik—maupun sebagai pihak yang tidak mampu mencegah huru-hara itu.

Laporan akhir TGPF juga terasa cemplang lantaran jumlah korban pemerkosaan dalam Kerusuhan Mei yang dinanti-nantikan masyarakat ternyata masih berselaput awan keraguan.

Menurut TGPF, total korban pemerkosaan saat itu mencapai 52 orang (artinya, jauh di bawah angka yang dikampanyekan Tim Relawan di bawah pimpinan Pastor Sandyawan Sumardi S.Y. selama ini—baik di dalam maupun di luar negeri—yakni 168 orang). Di situ pun tidak disebutkan dalam definisi pemerkosaan massal. "Mestinya, TGPF menjelaskan secara terbuka mengapa mereka tak menemukan kasus pemerkosaan massal dalam Kerusuhan Mei itu," kata Ketua Partai Persa-

M. RIZAL

PENGUMUMAN TGPF. *Pangab tak diwawancarai.*

Kerusuhan Mei dengan Fakta Kontroversial

KERUSUHAN MEI. *Memojokkan Prabowo.*

tuan Pembangunan, Aisyah Amini. Sebab, kata dia, isu pemerkosaan massal yang dilontarkan Tim Relawan telah mencoreng harga diri Bangsa Indonesia di mata internasional.

Sayang, hingga kini belum satu pun anggota TGPF yang mampu menjelaskan pertanyaan Aisyah itu. Pastor Sandyawan sendiri belum bisa ditemui FORUM. Alhasil, bukan perkara aneh jika kemudian muncul dugaan ada pihak tertentu yang memiliki peran dominan di TGPF sengaja mengalihkan fokus tadi demi "menyelamatkan muka" Pastor Sandyawan dan Tim Relawannya.

Upaya penyelamatan itu pula, agaknya, yang menjadi salah satu perkara pemicu kekecewaan sebagian besar anggota TGPF. Sebagian anggota tim yang selama ini dikenal sebagai aktivis LSM kerap tampak mengarahkan kesimpulan tim. Kemasygulan terhadap gaya kerja TGPF itu mencuat dari penandatanganan persetujuan anggota terhadap laporan akhir: 10 dari 18 anggota TGPF ternyata menolak menekennya. (lihat: *Laporan Akhir Para Seteru*).

Rosita S. Noer termasuk yang menolak menandatangani laporan akhir. Alasannya, "Ada pihak yang memaksakan masuknya berbagai data yang tidak terverifikasi," kata Rosita. Yang ia maksudkan tentu saja "kelompok aktivis LSM", yakni Pastor Sandyawan dan Asmara Nababan (INFID). Mereka, konon, didukung oleh Ketua TGPF Marzuki Darusman (Komnas HAM), serta Ketua Sub Tim Verifikasi, Sri Hardjo (Kantor Menteri Negara Peranan Wanita).

Selain itu, Laporan Akhir hasil kerja Tim Perumus yang diketuai Marzuki itu dianggapnya telah jauh menyimpang dari *draft* yang disiapkan Tim Asistensi pada 17 Oktober 1998. Padahal, "*Draft* akhir itu adalah produk final yang tercatat di administrasi Tim Asistensi untuk dijadikan Laporan Akhir," kata Rosita.

Tugas Tim Asistensi yang dipimpin Hermawan Sulistyo adalah mengumpulkan dan mengolah berbagai data. Baik yang masih berupa data awal dan mesti diverifikasi—misalnya data tentang korban jiwa, korban pemerkosaan dan penjarahan—maupun data akhir yang dicek setiap Sub Tim. Data awal kebanyakan diperoleh dari Tim Relawan. Selebihnya dari Bakom PKB, Komnas HAM, YLBHI, Polri, dan beberapa *hotline* yang dibuka TGPF.

Rosita menyebut seabrek kejanggalan La-

▲ *Kliping ini menguji kesimpulan TGPF perihal "Kesimpulan #1" yang mendapatkan atensi luar biasa karena menyangkut mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto. Saksi mata di "14 Mei" bersuara, rekonstruksi peristiwa disajikan ulang.*

PEMAKAMAN KORBAN-KORBAN KERUSUHAN DI PONDOK RANGON. *Siapa provokator itu?*

poran Akhir. Salah satunya, dalam laporan itu, dinyatakan bahwa Sub Tim Verifikasi telah meminta kesaksian dan keterangan dari 124 orang lebih. Mulai dari saksi mata, saksi ahli, korban, keluarga korban, sampai pendamping korban. Sementara, dalam catatan Tim Asistensi—termuat dalam *draft* akhir—jumlah sumber yang telah diverifikasi Sub Tim Verifikasi adalah 14 orang. Ini pun tak termasuk mereka yang dimintai keterangan di lapangan oleh TGPF dan Tim Asistensi. "Lalu, darimana datangnya jumlah sumber yang diverifikasi dalam Laporan Akhir itu?" kata Rosita.

Perdebatan juga terjadi manakala anggota Sub Tim Verifikasi memilih sumber informasi yang mesti diverifikasi. Kalangan aktivis LSM yang duduk di Sub Tim Verifikasi *ngotot* agar tim menerima verifikasi terhadap sumber yang mereka ajukan. Misalnya, mereka mengajukan seseorang yang mengaku telah bercakap dengan seorang desertir Kopassus TNI-AD. Si pelarian bercerita pada sumber TGPF bahwa ia ikut melakukan provokasi dan pemerkosaan atas perintah Letjen Prabowo. Ketika dilacak lebih jauh, si "desertir Kopassus" itu ternyata tidak waras. Eh, salah seorang aktivis LSM di Sub Tim malah menukas enteng: "Itu karena dia dicekoki obat-obatan oleh ABRI supaya enggak mengaku."

Sebaliknya, kelompok aktivis langsung menolak dengan berbagai dalih, ada yang mengusulkan agar tim mewawancarai Mantan Pangab Jenderal (Purn.) Benny Moerdani. Padahal, "Banyak isu yang menyebut dia berada di balik kerusuhan," tutur Rosita.

Sikap pilih kasih juga terjadi dalam Sub Tim Testimoni yang diketuai Ketua Kosgoro, Bambang W. Soeharto, dan bertugas meminta kesaksian para pejabat yang dianggap bertanggung jawab. Sepuluh pejabat militer dan sipil memang diwawancarai. Tapi, Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan sama sekali tidak dimintai keterangan.

Sayang, ketika ditanyai FORUM, Bambang Soeharto tak bisa memberikan alasan cukup gamblang, mengapa ia dan anggota Sub Tim Testimoni tidak mewawancarai Pangab.

Suatu Malam di Makostrad

JAKARTA, 14 Mei 1998. Jalan Merdeka Timur, sepelontaran batu dari Istana Merdeka. Ketegangan terselip di antara suasana lengang sore itu. Hanya satu-dua mobil melintasi jalan di depan Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Makostrad) itu. Belasan panser, tak seperti biasanya, tampak memenuhi halaman. Beberapa orang prajurit menyandang senapan M-16 berseliweran. Maklum, sejak 13 Mei, api kerusuhan telah membakar sebagian wilayah Jakarta.

Selepas magrib, sebuah panser tiba-tiba masuk ke halaman Markas Komando Staf Komandan Garnizun Ibu Kota yang terletak tepat di sebelah Makostrad. Beberapa penumpang turun dan langsung masuk Makostrad. Mereka menyusul beberapa penumpang sedan dan *station wagon* yang masuk melalui pintu belakang.

Pertemuan para tamu Makostrad pada 14 Mei itu belakangan terkesan amat penting. Bahkan, TGPF menempatkan perlunya pemerintah menyelidikinya sebagai rekomendasi pertama dalam Laporan Akhir yang mereka umumkan pada 3 November 1998.

Sebetulnya, pertemuan apa itu? Menurut pengusaha Setiawan Djodi, salah seorang tamu malam itu, mereka ingin mengetahui perihal kerusuhan yang terjadi. Mereka tidak bertanya kepada Panglima ABRI karena ada desas-desus: Pangkostrad Letjen Prabowo terlibat dalam kerusuhan dan bertentangan dengan Pangab. "Jadi, kami langsung saja bertanya kepada yang bersangkutan," kata Djodi yang diminta penyair W.S. Rendra untuk mengatur pertemuan dengan Prabowo. "Saya diminta Adnan Buyung Nasution," ujar Rendra.

Saat itu, Djodi yang baru pulang dari Ujungpandang langsung meminta bantuan pengusaha Fahmi Idris. Dan, Prabowo ternyata bersedia pada hari itu juga.

Djodi bersama Rendra tiba Makostrad pukul 18.00 WIB. Di sana sudah ada Buyung Nasution, Ketua YLBHI Bambang Widjojanto, pengacara Hotma Sitompul dan Ruhut Sitompul, serta mantan ketua Walhi Zulkarnain. Ada pula anggota DPP Golkar Din Samsuddin, Fahmi Idris, pengusaha Maher Algadrie dan Farid Prawiranegara, Direktur Institut for Policy Studies (IPS) Fadli Zon, Ketua MUI H. Amidhan dan Mahyuddin Nawawi, Ketua Pemuda Ansor Iqbal Assegaf, dan Ketua Pemuda Muhammadiyah Hajrianto Tohari.

Pengusaha Hashim Djojohadikusumo dan Staf Ahli Pangab, Brigjen TNI Adityawarman Toha, juga datang. "Sebagai adik kandung Pangkostrad, saya ingin mencari tahu keamanan Ibu Kota yang sudah sangat mencekam," tutur Hashim. Tujuan itu tak berbeda dengan tamu lainnya. Hashim yang tiba di Makostrad pukul 17.30 WIB pun sempat menanyakan tujuan kedatangan Buyung dan kawan-kawan. "Ya, mau ketemu kakaknya, Pangkostrad," ujar Buyung ketika itu.

Waktu itu, Prabowo masih berkeliling kota dengan panser bersa-

Bambang Widjojanto pun tak bisa menjawab. "*Gua* ini siapa sih? Itu tergantung pemberi otoritas," katanya seraya tertawa.

Hal lain yang bisa dipersoalkan adalah metode wawancara Sub Tim Verifikasi yang terkesan "longgar", tanpa penggalian yang terarah dan kritis. Itu terlihat dari transkrip hasil wawancara terhadap tokoh-tokoh seperti Pangdam Jaya saat itu, Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin, dan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso. Kedua pejabat itu dibiarkan berceloteh hingga melantur ke sana-kemari.

Keanehan paling besar muncul dalam bab paling krusial, yakni tentang Data Korban. Untuk jumlah korban pemerkosaan, misalnya, dari 168 data korban yang disodorkan Tim Relawan, hanya 58 data korban yang dianggap layak oleh Tim Asistensi untuk diverifikasi. Tapi, ketika diverifikasi, hanya 18 korban yang bisa diyakini sebagai korban pemerkosaan dan "pemerkosaan plus" alias diperkosa kemudian dibunuh atau dianiaya. Dari 18 kasus itu pun, cuma tiga orang yang diwawancarai langsung oleh anggota TGPF. Keterangan selebihnya diperoleh dari keluarga korban, saksi, dokter, pendamping korban, dan para rohaniwan.

Tapi, dalam Laporan Akhir, jumlah korban pemerkosaan tiba-tiba melonjak hingga 52 orang. Sebagian besar korban, yakni 27 orang, justru didapat berdasarkan keterangan para rohaniwan. Padahal, hanya 13 korban dari data rohaniwan yang tercatat pernah diverifikasi. Dan, data Tim Relawan menempati ranking terakhir dalam tingkat kredibilitas sumber yang disepakati TGPF. Lantas, dari mana datangnya tambahan korban dalam Laporan Akhir? "Mungkin hanya anggota Tim Perumus yang tahu," kata Rosita Noer.

Berbagai kejanggalan itulah yang membuat sebagian besar anggota menolak Laporan Akhir yang dibacakan Ketua TGPF, Marzuki Darusman, di depan wartawan pada 3 November. Malah, empat mayor jenderal yang menjadi anggota, yakni Da'i Bachtiar, Dunidja, Marwan Paris, dan Abdul Ghani, terpaksa memberikan Catatan Keberatan atau *Minderheids Nota* terhadap Laporan Akhir itu.

Maka, pantaslah dipertanyakan mengapa Marzuki—yang juga tak ikut mencken—terkesan *ngotot* mengumumkan Laporan Akhir yang masih "bermasalah" itu. Apalagi, ada kabar, Marzuki dan Bambang Soeharto tadinya sudah bersepakat dengan Wiranto untuk mengumumkan Laporan Akhir itu setelah Sidang Istimewa MPR usai.

Kepada FORUM, Marzuki mengaku bahwa tak etis mengomentari laporan TGPF setelah diserahkan kepada pemerintah. "Laporan Akhir itu sudah menjadi milik publik dan TGPF tak berada dalam posisi yang boleh mengomentari. Pemerintah yang harus memberikan tanggapan," katanya.

Sejauh ini, pemerintah belum memberi tanggapan resmi. Sebab, "Presiden memberi waktu sebulan agar semua menteri yang meneken keputusan bersama pembentukan TPGF mempelajari Laporan Akhir itu," kata Menteri Sekretaris Negara Akbar Tandjung. Jadi, ya ditunggu saja.

Munawar Chalil, Hanibal W.Y.W., dan Ivan Haris

PRABOWO DAN SJAFRIE. *Makostrad kedatangan tamu.*

ma beberapa perwira tinggi. Sekitar pukul 19.00, Prabowo tiba bersama Kaskostrad Mayjen TNI Kivlan Zein dan Danjen Kopassus Mayjen TNI Mochdi P.R. Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin muncul sebentar sebelum pergi lagi.

Pada kesempatan pertama, Prabowo menerima Buyung, Rendra, Djodi, Fahmi, dan tamu lainnya. Din, Iqbal, Hajriyanto, Amidhan, dan Mahyuddin menunggu di luar. "Kami sempat kesal karena mereka datang belakangan, tapi diterima lebih awal," kata Din.

"Apa yang bisa saya bantu," kata Prabowo membuka pertemuan. Lalu, Buyung bertanya dengan keras soal keterlibatan Prabowo dalam penembakan mahasiswa Trisakti dan kerusuhan di Ibu Kota, tuntutan mundur Presiden Soeharto, dan soal isu friksi Prabowo-Wiranto. Dengan tegas Prabowo membantahnya. "Wiranto itu bos saya, masak saya menentang dia. Saya berani bersumpah dengan Alquran bahwa saya tak pernah memerintahkan penembakan itu," ujarnya.

Sementara soal tuntutan agar Soeharto lengser, Prabowo menyatakan: "Kalau memang rakyat menghendaki, Pak Harto pasti tak akan mempertahankan kekuasaannya dengan kekuatan senjata."

Pertemuan berakhir sekitar pukul 20.30 WIB. Setelah itu, ajudan Prabowo, Mayor M. Fuad Basya, mengatakan, "Rombongan kedua..." Inilah yang didengar Fahmi Idris yang kemudian terungkap dalam testimoni TGPF.

Karena keterbatasan waktu, Prabowo menerima Amidhan dan kawan-kawan sambil berjalan ke ruang makan bersama Buyung dan kawan-kawan. Amidhan sempat menanyakan siapa dalang kerusuhan. Prabowo berkata singkat, "Kiri."

Usai makan malam, rombongan Buyung, Djodi, Rendra, dan kawan-kawan pulang pertama kali. Baru kemudian Fahmi Idris, disusul Amidhan dan Mahyuddin, dan terakhir rombongan Din dan Fadli Zon. Setelah pertemuan itu, Prabowo, Kivlan, dan Mochdi mengikuti *briefing* Pangab di Makoskogar.

Lewat tengah malam 14 Mei. Dengan mengendarai panser, Prabowo berangkat dari Makostrad ke rumah Gus Dur, diantar Iqbal Assegaf.

Hanibal W.Y. Wijayanta dan Tim FORUM

Forum
30 November 1998

Tempo
16 November 1998

21 DESEMBER 1998

Jakarta, Kompas

Presiden BJ Habibie menginstruksikan agar segera diselesaikan proses penyidikan terhadap anggota Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) yang diduga terlibat penculikan para aktivis, guna mengetahui sejauh mana keterlibatan Letjen TNI (Purnawirawan) Prabowo Subianto dalam kasus itu. Selain itu, Presiden juga minta agar segera diselesaikan proses peradilan peristiwa Trisakti agar dapat diwujudkan kepastian hukum.

Kompas
22 Desember 1998

| ***B.J. Habibie**, Presiden RI, dalam Kompas ("Selidiki Keterlibatan Prabowo Subianto", 22 Desember 1998)*

KOMPAS HARI INI

...pas Online: http://www.kompas.com E-mail: kompas@kompas.com

Prabowo, Warga Jordania

HARIAN Jordania, *Al-Ra'i*, 12 Desember lalu menyatakan, "Sebuah Dekrit Raja dikeluarkan untuk menganugerahkan status kewarganegaraan Jordania kepada seorang warga negara Indonesia, Prabowo Subianto Kusumo." 6

Kompas
22 Desember 1998

22 DESEMBER 1998

Raja Hussein atas nama pemerintah Yordania secara resmi memutuskan menganugerahkan status kewarganegaraan kepada mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto melalui Dekrit Raja (Royal Decree). Sumber diplomatik menyebutkan, ada kemungkinan Prabowo Subianto mendapatkan anugerah status kewarganegaraan Yordania di sela-sela acara perjalanan umroh ke Tanah Suci.

Prabowo Subianto pergi ke Amman, Yordania, secara diam-diam. Bahkan, pihak Kedutaan Besar Indonesia di Kota Amman pun sampai tak tahu posisi sosok sepenting Prabowo Subianto. Padahal, ada beberapa kasus besar yang sedang diusut dengan melibatkan namanya. Selain soal penculikan yang belum selesai keputusannya, juga pencarian siapa yang terlibat dalam kasus kerusuhan Mei 1998.

Kota Amman memang bukan tempat asing bagi Prabowo karena ia adalah kawan akrab Pangeran Abdullah, Komandan Pasukan Khusus Yordania, yang juga putra mahkota negeri tersebut. Abdullah dan Prabowo

berkenalan saat sama-sama menempuh pendidikan infanteri di Amerika Serikat yang kemudian disambung lagi saat menjalani latihan antiteror di Jerman Barat.

Di Yordania, Prabowo Subianto lebih tertarik dengan kegiatan ekspor dengan menumpangi perusahaan adiknya yang sudah eksis di sana, PT Tirtamas. Karet, kopi, dan rempah-rempah, misalnya, merupakan komoditas yang amat dicari. Yordania merupakan pintu terbuka menuju seantero Timur Tengah, bahkan bisa menembus pasar Eropa dan Asia Tengah.

Yordania kaya dengan mineral fosfat. Cadangannya 1,5 miliar ton yang membuatnya menjadi negara penghasil fosfat terbesar kelima di dunia. Pendapatan per kapita penduduk negeri itu sekira US$1.500, dengan pertumbuhan ekonomi 6,5% setahun.

Karena kunjungan tak resmi alias diam-diam Prabowo Subianto itulah, pihak Kedutaan Besar RI di Amman kelabakan tatkala membaca berita Harian Al Ra'yi edisi 12 Desember yang memberi status kewarganegaraan kepada sejumlah pribadi, termasuk Prabowo Subianto. Di Yordania, kewarganegaraan ganda diperkenankan, sedangkan di Indonesia terlarang.

KOMPAS, SELASA, 22 DESEMBER 1998

Prabowo Mendapat Status Warga Negara Jordania

Jakarta, Kompas

Pemerintah Jordania secara resmi memutuskan menganugerahkan status kewarganegaraan kepada mantan Panglima Komando Cadangan Strategis AD (Pangkostrad) Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto Kusumo, melalui sebuah Dekrit Raja (Royal Decree). Pemberitaan tentang penganugerahan status warga negara itu dimuat di harian Jordania *Al-Ra'i* yang terbit di Amman, ibu kota Jordania, tanggal 12 Desember 1998. Berita itu sendiri baru diterima *Kompas*, Senin (21/12) malam.

Dalam terjemahan bebas, harian berbahasa Arab itu menyebutkan, "Sebuah Dekrit Raja juga dikeluarkan untuk menganugerahkan status kewarganegaraan Jordania kepada seorang warga negara Indonesia, Prabowo Subianto Kusumo."

Disebutkan, bersamaan dengan itu, Pemerintah Jordania juga memberikan status kewarganegaraan Jordania kepada seorang warga Pakistan Mohammad Sajid Bashir, warga Irak Mahmoud Al-Mayyahi dengan istri Berwin Abed Al-Hussein serta anak perempuannya Ala'a.

Pemerintah juga mengembalikan status kewarganegaraan Jordania kepada Ne'emeh Khalil Hikmat Al-Shara'a, Awad Mandouri, dan Nihaya al-Za'areer yang ingin kembali ke Jordania, negara asalnya. Sebaliknya, Pemerintah Jordania juga mengizinkan enam warganya untuk melepaskan kewarganegaraan Jordania guna mendapatkan status kewarganegaraan Jerman.

Prabowo Subianto

Walau begitu, belum ada penjelasan lebih rinci tentang status kewarganegaraan Jordania yang kini dimiliki mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto tersebut. Sumber-sumber diplomatik di Jakarta yang dihubungi *Kompas* menyebutkan, ada kemungkinan, Prabowo mendapatkan anugerah status kewarganegaraan Jordania tersebut di sela-sela acara perjalanan Umrohnya beberapa waktu lalu.

"Mungkin, di sela-sela Umroh itu, Prabowo bertemu Raja Hussein dan menceritakan semua kejadian yang dialami di sini, sehingga Raja Hussein tergerak untuk menganugerahkan status kewarganegaraan kepadanya melalui sebuah Dekrit," kata sumber tersebut. (rie)

Kompas
22 Desember 1998

Gatra
2 Januari 1999

yang pernah menjadi magnet bagi politisi dan militer di Tanah Air. Menurut adiknya, Hashim Djojohadikusumo, yang juga dikenal sebagai pemilik Kelompok Usaha Tirtamas, Prabowo memang tengah merintis karier di bidang bisnis. Ia menggeluti usaha ekspor-impor di negeri itu, dengan menggunakan bendera Tirtamas.

| ***Hashim Djojohadikusumo,***
Pengusaha dan Adik Prabowo Subianto

Saya mendukung sinyalemen itu. Karena sejak awal tahun 1998 sebagian kekayaan keluarga Cendana yang ada di luar negeri sudah mulai disertifikasi dari negara-negara Barat —Austria— ke bank-bank di negara-negara Arab.

--- Dr George Aditjondro

"Saya mendukung sinyalemen yang menyebut harta keluarga Cendana berada di luar negeri, sejak awal 1998, sudah disertifikasi ke sejumlah bank di negara-negara Timur Tengah termasuk Arab Saudi dan Yordania. Indikasinya:

- **Pemerintah Yordania dan Arab Saudi sudah lama melakukan *joint venture* dengan keluarga Cendana (Tutut dan Bambang Trihatmodjo). Tutut kan perwakilan dari Yordania Airline.**

Indonesia dulu hampir saja membeli pesawat tempur F16 dari Yordania, tetapi kemudian tidak disetujui Amerika. Jadi memang hubungan keluarga Soeharto dan keluarganya dengan Raja Husein sudah lama terjalin.

- **Adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, sampai saat ini masih tercatat sebagai utusan khusus Presiden B.J. Habibie untuk Eropa. Kemungkinan bahwa dia (Prabowo Subianto) dipindahkan ke Yordania dan mendapatkan status kewarganegaraan dari Yordania pasti Raja Hussein melakukan itu bukan karena hubungan baik saja, tetapi berdasarkan pertimbangan lain atau ada iming-iming. Sekarang Prabowo mendapatkan semacam suaka politik di Yordania dari Raja Hussein dengan mendapatkan tawaran status kewarganegaraan itu sudah sesuai dengan pola yang telah lama saya amati. Saya sudah dengar dan amati (sepanjang 1998), tapi ndak bisa dibuktikan.**

| ***George Junus Aditjondro***, *Dosen Sosiologi Universitas Newcastle, Australia, dalam Bangkit ("Soeharto Larikan Uang ke Yordania", 28 Desember 1998)*

Bangkit
28 Desember 1998

► *Kliping ini dimaksudkan mencari tahu kabar terbaru dari Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto dengan sejawat dekatnya. Salah satunya ada Achmad Sumargono. Tatkala ditanyakan kapan Prabowo pulang, Gogon, demikian Ketua Pelaksana Harian Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) ini dipanggil, jawabannya bikin optimistis dan diplomatis: "Beri dia kesempatan untuk ibadah. Dia juga pernah bilang, ingin memperdalam pengetahuan agamanya. Sebab dia mengakui pengetahuannya tentang Islam masih kurang. Masih bolong-bolong, katanya. Itu diakui Prabowo."*

Achmad Sumargono:

'Setelah Lebaran, Prabowo pulang'

Ketua Pelaksana Harian Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam [KISDI], Achmad Sumargono dikenal punya hubungan dekat dengan mantan Pangkostrad Letjen [Purn] Prabowo Subianto. Pekan lalu **Eko Cahyono** dari **AKSI** mewawancarainya. Petikannya:

Kapan terakhir bertemu Prabowo?

Saya memang pernah beberapa kali bertemu dengan Prabowo, misalnya di Cijantung saat buka puasa [dulu] di rumahnya, kemudian di Kostrad. Tapi, saya tak ingat tanggalnya. Terakhir bertemu Prabowo, saat kami sama-sama melakukan Umroh ke Mekkah beberapa waktu lalu.

Apa saja yang dibicarakan?

Ya, banyak. Kami saling tukar pikiran, salah satu misalnya perkembangan dan situasi terakhir tanah air. Dia juga bilang, banyak membaca buku-buku Islam. Teras terang saya masih *respect* terhadap Prabowo, dia kan pernah jadi orang besar. Dia juga bilang, kalau pensiun dia mau mengeluti bisnis. Nah, dia ke Yordania itu kan untuk membantu bisnis adiknya [Hashim] yang sudah mulai jalan.

Pandangan Prabowo terhadap TGPF?

Sebelumnya dia tidak punya pretensi apa-apa. Tapi, setelah ada tudohan ini, ya, dia baru *ngeh* [mengerti-red]. Jauh sebelumnya dia tidak *care*. Anda kan tahu, pendirian TGPF itu, bermula dari sejumlah LSM yang berteriak tentang kerusuhan Mei 1998. Kemudian, seolah-olah memunculkan bahwa ABRI itu tidak mampu menangani kerusuhan.

Apakah ada niat Prabowo untuk menggugat TGPF?

Yang ini saya tidak tahu. Tapi, kata adiknya [Hashim] dia akan menggugat. Saya kira wajar kalau keluarga Prabowo berbuat seperti itu. Sebab semua warga negara berhak mendapat perlindungan hukum. Tindakan menempuh lewat jalur hukum tentu lebih baik, ketimbang upaya lainnya.

Persiapan apa saja yang sudah dilakukan Prabowo untuk menggugat TGPF?

Saya belum mengontak Prabowo. Jadi, belum tahu.

Apakah KISDI akan mendukung Prabowo lewat jalur ini?

Secara moril, mungkin, iya. Sejauh itu demi kebenaran dan keadilan. Bagaimanapun kebenaran harus ditegakkan.

Saya kira wajar kalau keluarga Prabowo menempuh jalur hukum. Sebab, semua negara berhak mendapat perlindungan hukum.

Pandangan KISDI terhadap TGPF?

Saya pernah mengirim surat ke pada Presiden BJ Habibie tanggal 7 September 1998, isinya kami mendesak presiden untuk membubarkan TGPF, khususnya dalam menangani kasus perkosaan massal. Karena keberadaan tim ini sangat aneh.

Apakah Anda tele**wa**ter**-**

hadap TGPF?

Bagaimana, ya,.. TGPF itu kan dibentuk agar bekerja independen. Namun beberapa pekerjaan yang dilakukan, KISDI menilai terdapat petunjuk bahwa isu pemerkosaan sebagai manuver dan gerakan politik dengan kemasan HAM, yang perlu diwaspadai. Sebab akurasi kebenaran berita tersebut sangat dirugukan.

Kami pernah mengontak Bambang Widjojanto, KISDI minta ketemu dengan TGPF dan mau membantu memberi bahan masukan. Tapi entah kenapa, tiba-tiba pertemuan itu dibatalkan, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kami tentu saja kecewa dengan sikap TGPF. Lalu kami mengirim surat tanggal 3 September 1998, isinya TGPF harus bersikap obyektif. Kalau TGPF sudah minta keterangan mantan Pangdam Jaya, Gubernur DKI, mantan Kapolda, maka TPGF juga harus minta keterangan dari Benny Moerdani.

Sebab berdasarkan informasi yang diungkap majalah *Panji* [*Masyarakat*] terbitan 26 Agustus 1998 edisi tahun ke II No 19 dan Tabloid *Adil* terbitan No 46, tanggal 19-25 Agustus 1998, di situ dua media ini menuding Benny Moerdani sebagai dalang kerusuhan 13-14 Mei 1998. Nah, kenapa *kok* media ini tidak diminta bukti-bukti, kalau dia punya.

Apakah yang Anda maksud itu, Marzuki Darusman [Ketua TGPF] ada konspirasi dengan Benny?

Bisa saja kan?

Apa saran terbaik Anda untuk Prabowo?

Sebaiknya dia cepat pulang ke tanah air, agar masalahnya tak berlarut-larut. Biar semua menjadi *clear*.

Kalau Anda diminta bantuannya agar Prabowo pulang?

Saya kira tak perlu. Dia akan pulang dengan sendirinya. Dia punya kesadaran yang tinggi sebagai warga negara. Dia hebat daripada saya.

Kapan kira-kira Prabowo kembali ke tanah air?

Saya kira tidak lama, mungkin setelah Lebaran. Tepatnya saya tak tahu persis.

Tidak terlalu lama?

Saya kira tidak. Ini kan bertaitan dengan bulan suci Ramadhan. Beri dia kesempatan untuk ibadah. Dia juga pernah bilang, ingin memperdalam pengetahuan agamanya. Sebab dia mengakui pengetahuannya tentang Islam masih kurang. Masih bolong-bolong, katanya. Itu diakui Prabowo. ■

Vol. 3, No. 111, 29 Desember 1998 - 4 Januari 1999

Aksi
29 Desember 1998

PRABOWO PUNYA LINK DENGAN MOSSAD

Pengantar: LETJEN TNI (Purn) Prabowo Subianto diberi kewarganegaraan kehormatan oleh pemerintah kerajaan Yordania. Berita ini segera menjadi berita utama politik Indonesia mengingat sebagai tokoh kontroversial, Prabowo masih meninggalkan sejumlah persoalan dan tanda tanya di Indonesia, terutama mengenai posisi dan perannya dalam berbagai persoalan yang ditudingkan kepadanya, mulai dari kasus penculikan mahasiswa dan aktivis prodemokrasi, penembakan mahasiswa Trisakti dan kerusuhan Mei 1998 lalu.

OLEH: HERMAWAN SULISTYO

WAWANCARA IMAJINER DENGAN PRABOWO SUBIANTO

UNTUK mendapatkan gambaran mengenai pikiran-pikiran Prabowo di balik semua isu tersebut, Hermawan Sulistyo melakukan wawancara imajiner. Wawancara imajiner ini harus dilakukan, karena hingga saat ini Prabowo masih menetap di Istana Raja Hussein di Amman, ibukota Yordania. Berikut ini sebagian petikan wawancara tersebut.

Hermawan Sulistyo (HS): *Diterimanya Anda menjadi warga negara kehormatan Yordania menjadi berita utama di Indonesia. Bagaimanu sebetulnya kisah Anda bisa sampai mendapat kewarganegaraan kehormatan tersebut?*

Prabowo Subianto (PS): Sebetulnya masalahnya sederhana saja. Kalau tidak ada berita di *Al-Ra'i*, suratkabar Yordania mengenai masalah itu, orang tidak akan ribut. Berita itu *kan* yang diktip *Kompas*, kemudian diikuti koran-koran lain di Indonesia. Orang Indonesia itu suka sensasi, sehingga berita yang biasa saja menjadi luar biasa.

HS: *Apa punya kewarganegaraan lain itu hal yang biasa? Indonesia kan tidak mengenal prinsip dual citizenship alias dwikewarganegaraan?*

PS: Tetapi kalau orang lain tidak diributkan? Pak Habibie sampai sekarang tidak pernah mengklarifikasi dia punya kewarganegaraan Jerman atau tidak. Mengapa pers Indonesia tidak ribut?

HS: *Mungkin karena Habibie bukan perwira seperti Anda ya? Dia kan tidak pernah terlibat penculikan para aktivis. Dosanya hanya sebatas sebagai presiden tidak bertanggung jawab atas penembakan mahasiswa di Semanggi. Dan menerintahkan pasukan untuk menggebuki mahasiswa rasanya tidak separah memerintahkan penculikan para aktivis. Bisa Anda ceritakan soal penculikan itu?*

PS: Itulah. Mahasiswa tetap digebuki dan dibunuhi oleh pemerintah di bawah Pak Habibie. Dulu, kalau ada kasus seperti itu, selalu saya ditudoh pelakunya, sehingga saya di-DPK-kan (Dewan Kehormatan Perwira yang bertugas untuk menilai pelanggaran etika perwira TNI, *HS*). Saya mencatik itu karena ada perintah. Jadi saya pelaksana saja. Kalau Pak Habibie *kan* presiden, sehingga dia yang memberi perintah, bukan pelaksana seperti saya.

HS: *Kalau Anda hanya menjalankan perintah, siapa yang memerintah Anda pada waktu itu?*

PS: Dua orang jenderal perwira tinggi. Namanya tidak perlu saya sebut.

HS: *Pak Harto? Bukankah Kopassus hanya bisa diperintah oleh Panglih dan panglima tertinggi (tertinggi).*

PS: Bukan. Beliau tahu, tetapi bukan yang memberi perintah. Pokoknya saya tidak mau menyebut namanya. Di DKP saja saya menggunakan hak untuk tidak menjawab. Sebagai perwira sejati dan patriot Indonesia, saya tidak akan mengungkap nama tersebut. Itu rahasia dan kehormatan saya sebagai perwira.

HS: *Mengapa Anda melaksanakan perintah tersebut, kalau tahu tidak benar?*

PS: *Order is order!* Perintah bagi saya adalah perintah. Saya ini prajurit TNI. Jadi apapun perintah itu, harus saya laksanakan.

HS: *Bisa Anda ceritakan masa lalu Anda?*

PS: Masa kecil saya habis di luar negeri, pindah-pindah ikut orang tua. Di Malaysia, Jepang, Eropa, Amerika sampai SMA. Ayah (Soemitro Djojohadikusomo, begawan ekonomi Indonesia dan salah satu arsitek ekonomi orde baru, *HS*) adalah tokoh PSI, Partai Sosialis Indonesia yang sejak terlibat PRRI/Permesta dikejar-kejar oleh Bung Karno, sehingga harus pindah-pindah di luar negeri. Keluarga kami baru kembali ke Indonesia pada tahun 1967, ketika Bung Karno sudah jatuh dan Pak Harto naik.

HS: *Lalu Anda masuk Akabri?*

PS: Ya. Sebelumnya saya sempat kuliah di Fakultas Ekonomi UI. Mula-mula memang ingin jadi ekonom. Barangkali terpengaruh oleh ayah saya. Baru kemudian saya masuk Akabri, karena rupanya panggilun untuk menjadi tentara lebih besar dari pada keinginan untuk menjadi ekonom.

HS: *Kabarnya waktu Anda menjadi taruna Akabri belum bisa bahasa Indonesia?*

PS: Bisa, sedikit-sedikit. Maklum, tidak pernah tinggal di Indonesia. Sewaktu jadi taruna, pada saat taruna lain sedang belajar bahasa Inggris, saya malah diberi kursus bahasa Indonesia, sama-sama Agus Widjojo (putra pahlawan revolusi Sutoyo, sekarang Letjen Agus Widjojo, Asisrenum ABRI, *HS*).

HS: *Kabarnya Anda juga pernah desersi?*

PS: Begini ceritanya. Saya beranam, bersama lima teman taruna lain, semuanya anak Jakarta, kabur ke ibukota sewaktu liburan akhir pekan. Menurut peraturan, kami hanya boleh pesiar sampai Magelang saja. Tapi kami nekat pulang ke Jakarta, lalu ada yang kepergok oleh seorang perwira tinggi. Kami dilaporkan kepada Gubernur Akabri yang waktu itu dijabat Jenderal Sarwo Edhie (mertua Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, *HS*). Akhirnya kami diskors, tidak naik kelas satu tahun. Seharusnya saya lulus tahun 1973. Gara-gara masalah itu, saya baru lulus pada Angkatan 1974.

HS: *Juga sewaktu Anda kabur tanpa melapor di Timor Timur?*

PS: Istri saya waktu itu ulang tahun. Tentu saja saya ingin pulang ke Jakarta. Kalau saya melapor, pasti saya tidak akan diizinkan.

HS: *Karir Anda melejit di Timor Timur ya?*

PS: Ya. Jangan lupa, saya mengenyam pendidikan pasukan elit di negara-negara yang sangat disegani seperti Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat.

HS: *Pasukan elit mereka kan punya hubungan dekat dengan Mossad, pasukan khusus Israel?*

PS: Benar. Tidak ada salahnya belajar dari Israel karena Mossad memang hebat.

HS: *Itu pula sebabnya Anda memilih tinggal di Yordania, yang punya hubungan baik dengan Israel?*

PS: Betul. Anak Raja Hussein itu teman baik saya, kami sama-sama mendapat pendidikan di Amerika. Beliau kemudian pasukan khusus di Yordania. Selain itu, Yordania adalah negeri Islam, sehingga saya cukup mendapatkan proteksi di sini. Ada alasan lain. Sejak saya dipensiunkan dari dinas aktif ABRI, saya terjun ke dunia bisnis. Keluarga kami punya bisnis di Timur Tengah, sehingga saya bisa menjalankan bisnis dari Amman.

HS: *Lalu Anda diangkat sebagai warganegara Yordania?*

PS: Ya, wajar *dong* saya diberi kewarganegaraan kehormatan.

HS: *Tidak legih melepas WNI Anda?*

PS: Sebetulnya tidak. Saya ini patriot. Saya akan kembali ke tanah air. Tetapi kalau nyawa saya dan keluarga terancam, saya harus *mikir-mikir* dulu.

HS: *Mengapa Anda tidak tinggal di London saja? Kan Anda punya rumah di sana?*

PS: Sebetulnya saya memang ingin tinggal di sana. Tetapi saya mendapat info, bahwa ada anggota parlemen sayap kiri yang tidak suka saya tinggal di London. Mereka akan membawa kasus saya ke parlemen. Saya tidak mau nasib saya seperti Pinochet (Pinochet Duarte, diktator yang ditangkap di London atas kesalahan-kesalahan masa lalunya, *HS*).

HS: *Bagaimana Anda menilai perkembangan situasi belakangan ini di tanah air?*

PS: Sebelum saya dipensiunkan dari ABRI, apa-apa ditudukan kepada saya. Padahal ada yang saya lakukan dan ada yang tidak saya lakukan. Setelah saya pergi, tenyata Indonesia malah tambah rusuh karena Habibie tidak mampu mengendalikan para pendukungnyil sendiri.

HS: *Anda setuju dengan cara-cara penanganan ABRI terhadap unjuk krasa melawan pemerintah Habibie?*

PS: Jelas setuju. Tentara itu yang punya senjata, *masak* tidak boleh latihan menembak?

HS: *Tetapi yang ditembaki dan dipentungi itu mahasiswa dan rakyat?*

PS: Kalau menembak terabek, ya namanya bukan tentara. Kalau menembak orang *kan* seperti perang. Mereka itu musuh, harus dibasmi.

HS: *Apakah Anda berminat terjun ke dunia politik di Indonesia?*

PS: Setelah semuanya ini, mungkin tidak.

HS: *Lho, kan Ollie North juga seperti Anda?* (Kolonel Oliver North adalah perwira AS yang diadili karena terlibat skandal *Irangate* di Iran dan Contra di Amerika Latin).

PS: Indonesia bukan Amerika. Di sana, penjahat seperti Oliver North memang bisa menjadi politisi dan senator. Kalau di Indonesia, tidak mungkin.

HS: *Sekarang pertanyaan terakhir. Anda akan hidir jika dindili di Indonesia?*

PS: Memang saya ingin hadir. Banyak pemimpin yang merasa sok suci dan mengkambinghitamkan saya. Kalau saya diadili, mereka juga harus ikut menanggung akibatnya. Masalahnya, apakah keamanan saya dan keluarga bisa dijamin?

HS: *Terima kasih atas kesediaan Anda melakukan wawancara imajiner ini.*

PS: Terima kasih kembali. Sampaikan salam saya kepada Pak Habibie. Saya minta mendukungnya. ■

HERMAWAN SULISTYO

FOTO: DOK

◄ Ini adalah esai Hermawan Sulistyo dengan memakai gaya "Wawancara Imajiner". Esai model seperti ini pernah dikerjakan dengan sangat baik oleh Christianto Wibisono pada babak akhir era 70-an dengan tokoh "imajiner" bernama Bung Karno. Hermawan Sulistyo adalah peneliti utama bidang perkembangan politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan ketua Tim Asistensi TGPF Kerusuhan Mei 1998. Esai ini menderetkan sejumlah isu yang terkait dengan Prabowo Subianto. Termasuk menyentil rumor hubungan antara Prabowo dengan BIN Israel a.k.a Mossad.

Bangkit
28 Desember 1998

23 DESEMBER 1998

Persidangan 11 terdakwa anggota Kopassus atas penculikan aktivis pro demokrasi berlangsung di Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) II, Jakarta. Persidangan dimulai pukul 09.00 pagi hingga 11.15 WIB tampak yang hadir 20-an anggota Kopassus dengan berseragam pakaian dinas harian serta beberapa wakil keluarga korban penculikan yang belum kembali:

MAJELIS HAKIM

Ketua: Kolonel (CHK) Susanto, S.H. Anggota: Kolonel (CHK) Tampubolon, S.H., Kolonel (CHK) Yamini, S.H.

ODITUR MILITER TINGGI

Kolonel (CHK) M. Harom Widjaya
Kolonel (CHK) M. Suratman

TERDAKWA

Terdakwa 1: Mayor (Inf) Bambang Kristiono
Terdakwa 2: Kapten (Inf) F.S. Multhazar
Terdakwa 3: Kapten (Inf) Nugroho Sulistyo Budi
Terdakwa 4: Kapten (Inf) Yulius Stevanus
Terdakwa 5: Kapten (Inf) Untung Budi Harto
Terdakwa 6: Kapten (Inf) Dadang Hendra Yudha
Terdakwa 7: Kapten (Inf) Djaka Budi Utama
Terdakwa 8: Kapten (Inf) Fauka Noor Farid
Terdakwa 9: Serka Sunaryo
Terdakwa 10: Serka Sigit Sugianto
Terdakwa 11: Sertu Sukardi

PENASIHAT HUKUM (DIREKTORAT HUKUM AD)

Ketua: Kolonel Rettob Abdullah

Oditur menjerat para terdakwa dengan pasal 328 KUHP yang berbunyi: Barang Siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya, sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau menempatkan dia dalam keadaan sengsara.

Untuk itu, terdakwa telah melanggar pasal 328 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 333 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan diancam dengan hukuman 12 tahun penjara.

Penculikan Dilakukan atas Panggilan Nurani

* 11 Anggota Kopassus Diadili

Jakarta, Kompas

Operasi penculikan terhadap sembilan orang aktivis dilakukan oleh sebuah tim yang diberi nama "Tim Mawar". Seluruh anggota "Tim Mawar" adalah anggota korps Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus). Tim itu dibentuk dan dipimpin Mayor (Inf) Bambang Kristiono (terdakwa I) yang terpanggil nuraninya untuk mengamankan kepentingan nasional. Tindakan para aktivis yang radikal dianggapnya bakal mengganggu stabilitas nasional.

Hal itu terungkap dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi yang disampaikan Kol (CHK) M Harom Widjaya dan Kol (CHK) M Suratman, pada sidang atas sejumlah aktivis, Rabu (23/12), di Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta. Dalam dakwaan setebal 27 halaman, Oditur Militer hanya menguraikan proses penangkapan korban dan pelepasannya. Sedang apa yang terjadi selama korban dalam penyekapan, termasuk terjadinya penganiayaan dan penyiksaan, tidak disinggung sama sekali. Begitu juga soal nasib 13 korban yang masih belum kembali.

Persidangan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB sampai 11.15 WIB dihadiri sekitar 20 anggota Kopassus dengan seragam pakaian dinas harian, dan beberapa wakil keluarga korban penculikan yang belum

(Bersambung ke hlm 11 kol 1-4)

MEREKA YANG DIDAKWA MENCULIK

1. Mayor (Inf) Bambang Kristiono (terdakwa I)
2. Kapten (Inf) FS Multhazar (II)
3. Kapten (Inf) Nugroho Sulistyo Budi (III)
4. Kapten (Inf) Yulius Selvanus (IV)
5. Kapten (Inf) Untung Budi Harto (V)
6. Kapten (Inf) Dadang Hendra Yudha (VI)
7. Kapten (Inf) Djaka Budi Utama (VII)
8. Kapten (Inf) Fauka Noor Farid (VIII)
9. Serka Sunaryo (IX)
10. Serka Sigit Sugianto (X)
11. Sertu Sukadi (XI)

• Dakwaan Oditur, hlm 15

Kompas/ipe

Militer, Ja- ...tua Maje-

Kompas
24 Desember 1998

8 AKSI UTAMA

Karena bisikan hati nurani?

Tim Mawar disidangkan. Hati nurani.

Bagus Indahono

Benarkah karena bisikan hati nurani, Tim Mawar melakukan penculikan para aktivis? Herannya, juga tak ada dakwaan penganiayaan.

Percayakah jika bisikan hati nurani bisa membuat orang melakukan tindak pidana? Bukankah jika nurani yang berbicara, maka tak akan jauh dari semua hal yang bernama kebaikan? Apapun jawabannya, itulah setidaknya — menurut dakwaan oditur militer — tentang alasan penculikan yang dilakukan oleh 11 orang anggota Komando Pasukan Khusus [Kopassus] terhadap 14 orang aktivis di Jakarta sejak setahun lalu.

Boleh jadi pendapat Oditur Kol CHK. Harom Wijaya dan Kol CHK. M Suratman benar. Dan, lantaran bersumber dari hati nurani yang bersih, maka pada Juli tahun lalu, dibentuklah sebuah tim satgas yang namanya sungguh feminin: Tim Mawar.

Tim ini dipandu oleh Mayor [Inf] Bambang Kristiono dan beranggotakan 10 orang anggota Kopassus, Kapten [Inf] FS. Multaza, Kapten [Inf] Nugroho Sulistiyobudi, Kapten [Inf] Yulius Silfanus, Kapten [Inf] Untung Budiharjo, Kapten [Inf] Dadang Hendrayuda, Kapten [Inf] Djaka Budiutama, Kapten [Inf] Bauka Nurfarid, Serka [Inf] Sunaryo, Serka [Inf] Sigit Sugiyanto, Sertu [Inf] Sukadi.

Bertolakbelakang dengan namanya, Tim Mawar bertugas menculik aktivis demi menjaga stabilitas nasional dan rencana Sidang Umum [SU] MPR yang digelar tanggal 1-11 Maret 1998 dengan bermacam-macam cara. Dengan jalan makar, mengguncang perekonomian nasional, atau dengan membuat kerusuhan.

Orang-orang yang dianggap radikal oleh Tim Mawar itu di antaranya adalah Andi Arief, Desmon J. Mahesa dari LBH Nusantara, Pius Lustrilanang, Nezar Patria, Faisal Reza, Raharjo Waluyo Jati, Aan Rusdianto, Mugianto dan Hariyanto Taslam. Sementara empat belas orang lainnya yang juga diduga diculik—entah oleh siapa—kini masih belum diketahui keberadaannya.

[illegible]

'membekuk' Taslam.

Tak diberkas?

Sayang, Oditur tak merinci apa yang terjadi pada para aktivis itu selama mereka dipaksa 'menginap' di sebuah tempat. Dakwaan hanya memaparkan cara Tim Mawar menculik dan membebaskan aktivis setelah memberi mereka tiket pesawat untuk pulang ke daerah masing-masing.

Padahal, menurut para aktivis yang bebas, selama mereka disekap, mereka tak henti didera siksaan yang melampaui nilai-nilai kemanusiaan. Distrum, dipaksa tidur di atas es, diinjak, dipukul, ditelanjangi dan hal-hal yang sulit diterima oleh akal sehat. Semuanya sama sekali tidak dicantumkan dalam dakwaan.

Oleh karena tidak merinci penganiayaan, maka pasal-pasal mengenai penganiayaan tidak didakwakan. Alasannya enteng saja, "Itu tidak ada dalam BAP, yang kita peroleh hanya itu," ujar Oditur Harom Wijaya.

Karena alasan itu, Oditur hanya mendakwakan pasal membawa pergi orang secara melawan hukum [pasal 328 KUHP] dan merampas kemerdekaan orang [pasal 333 KUHP]. Untuk itu, KUHP mengancamnya dengan hukuman maksimal 12 tahun [bukan tujuh tahun seperti kata Harom].

Harom merasa hasil penyidikan Pusat Polisi Militer [Puspom] ABRI telah cukup untuk dibawa ke pengadilan. "Sudah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan," ujarnya. Sehingga ia merasa tak perlu melakukan tindakan lebih jauh.

Karenanya, oditur tak merasa perlu melakukan pemeriksaan tambahan. Atau memerintahkan penyidik melakukan pemberkasan soal, meskipun berwenang melakukannya. Tapi, "Itu mungkin saja dilakukan. Kita lihat saja perkembangan sidang nanti." ujar Harom.

Pasal penganiayaan

Berbeda dengan Harom, Pius Lustrilanang salah seorang korban memberikan keterangan berbeda. Menurutnya, Puspom memeriksanya dengan sangat teliti. "*Lho,* saya memberikan keterangan semuanya dengan sangat detail, *kok,*" bantah Pius. Artinya, sebenarnya tak ada alasan untuk tidak mendakwakan pasal penganiayaan kepada para terdakwa itu.

Oditur juga tak menyebutkan atas perintah siapa pembentukan tim itu dilakukan. Setidaknya pemberi izin membentuk tim dan melakukan semua tindakan penculikan dan penganiayaan. Apalagi itikad menarik garis komando di balik tindakan yang didakwakan. "Kita lihat saja perkembangannya nanti," kata Harom lagi.

Jika serius, menarik garis komando dan membongkar siapa yang berada di balik penculikan aktivis itu tak perlu harus menunggu perkembangan sidang pimpinan Kol CHK. Susanto. Semuanya sudah harus dipersiapkan oleh penyidik. ■

Endri Kurniawati

Kontroversi surat dakwaan

- Motif penculikan: hati nurani.
- Tidak menyebutkan aktor intelektual, siapa yang memerintahkan pembentukan tim dan menugaskan penculikan.
- Tidak memaparkan fakta penganiayaan setelah aktivis diculik sebelum dibebaskan.
- Tidak mendakwakan pasal penganiayaan.
- Tidak ada dakwaan khusus bagi terdakwa I yang punya peran lebih besar dibanding terdakwa lainnya.

Vol. 3, No. 111, 29 Desem...

Aksi
29 Desember 1998

Dalam surat dakwaan kepada sebelas terdakwa anggota Kopassus yang diperiksa Mahkamah Militer Tinggi II, Jakarta, sebagai pelaku penculikan para aktivis prodemokrasi, tidak ada menyebut sama sekali nama Prabowo Subianto. Padahal, kejadian penculikan itu berlangsung di Markas Kopassus, Cijantung, dan Prabowo Subianto masih menjabat komandan jenderal. Belum lagi, Dewan kehormatan Perwira (DKP) memutuskan Prabowo diberhentikan atau dipecat dari dunia kemiliteran karena keterlibatannya dalam penculikan.

Argumentasi penghilangan nama Prabowo Subianto itu dibungkus dengan kalimat yang musykil terjadi di tubuh militer: "penculikan dilakukan oleh Tim Mawar, yang dipimpin Mayor Inf Bambang Kristiono, berdasarkan panggilan hati nurani untuk mengamankan negara dari gangguan para aktivis radikal".

Jadi, anggota militer boleh bergerak sendiri berdasarkan panggilan hati nurani? Tanpa izin komandan, tanpa perintah? Sebuah kemajuan yang sangat dahsyat dalam tradisi militer yang sangat ketat dengan disiplin komando.

Selain itu, pemeriksaan para terdakwa penculik aktivis prodemokrasi ini, juga tak menyinggung perihal penganiayaan yang dilakukan para terdakwa. Padahal, menurut penuturan korban, siksaan yang dialaminya di luar batas kemanusiaan. Di samping itu, 14 korban penculikan yang hingga hari ini belum jelas rimbanya, juga tak menjadi materi dalam persidangan ini. Mungkin, memang bukan para terdakwa ini penculiknya. Sulitkah mendambakan keadilan bagi warga sipil dari lembaga Mahkamah Militer Tinggi ini?

Gugat
28 Desember 1998

Analisis: Jurus Prabowo Luput Jadi Terdakwa

MEMBAWA Prabowo Subianto sebagai dalang penculikan para aktivis prodemokrasi, tentu tak mudah. Perkara ini bukan murni perkara hukum, seperti rumusan penculikan di KUHP, tetapi jauh lebih pelik dan tali-temali dengan masalah politik ruwet, yang ditengara melibatkan para petinggi ABRI, yang masih berkuasa maupun yang sudah lengser. Berikut analisis hal-hal yang bisa jadi jurus Prabowo, menghindari kursi pesakitan.

■ Analisis I
Menjalankan Perintah Atasan

Di dalam disiplin militer, tak ada perintah dari komandan, yang bisa ditawar apalagi dibantah. Apalagi mengingat sebagai Danjen Kopassus, kesatuan pasukan elit, Prabowo hanya bisa diperintah oleh Pangab atau Pangti. Jadi, kalau Prabowo bisa membuktikan itu perintah Pangti atau Pangab, tak ada alasan untuk menghukumnya. Ada alasan pembenar, yang menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakannya melakukan penculikan.

■ Analisis II
Menjalankan Tugas Intelijen Kemiliteran

Sebagai komandan pasukan elit, yang bertanggungjawab dengan keamanan negara dari rongrongan kaum radikal, Prabowo bisa mengambil siapa saja, yang melakukan aksi subversif, yang akan menghancurkan sendi-sendi idiil dan konstitusional negara. Tindakannya itu merupakan bagian dari tugas intelijen kemiliterannya, yang dilindungi UU.

■ Analisis III
Dideponir demi Kepentingan Umum

Bila Prabowo diajukan ke kursi terdakwa, dan ia bisa menunjukkan perintah dari atasannya, baik Pangti maupun Pangab, dan kedua pimpinan puncak itu harus diseret untuk dimintai pertanggungjawaban hukum, tentu akan menimbulkan kekacauan militer dan kekosongan pemerintahan, yang memicu kerusuhan sosial atau perebutan kekuasaan. Karena kepentingan umum yang lebih besar akan menjadi korban, bila Prabowo dan pihak terkaitnya disidangkan, maka Jaksa Agung bisa menerapkan asas opportunitas, yakni persidangannya dideponir.

■ Analisis IV
Karena Keadaan Terpaksa

Tindakan Prabowo melakukan penculikan, jelas merupakan sebuah perbuatan melawan hukum. Kecuali bila tindakan itu dilakukan dalam keadaan memaksa, misalnya suasana dinilai dari hitungan militer sudah genting dan perlu langkah cepat. Maka, ada alasan pemaaf, yang menghapuskan kesalahannya. Karena tidak ada kesalahan, maka, sesuai asas pemidanaan, Prabowo tak bisa dipidana.

■ Analisis V
Dilakukan Saat Tidak Sadar

Orang yang melakukan tindakan melawan hukum, dalam keadan tidak sadar, baik karena pengaruh obat-obatan atau karena kondisi psikisnya yang tertekan, sehingga tak menyadari akibat dari apa yang dilakukannya, tak bisa dituntut hukuman.

Menurut ajaran *mensrea*, orang bersangkutan pada saat perbuatan dilakukan, tak menyadari hukum-hukum kasualitas, sehingga tak bisa dituntut pertanggungjawaban pidananya atas apa yang dilakukan pada saat tidak sadar itu.

❐ jur

Gugat
28 Desember 1998

▲ *Membawa Prabowo Subianto sebagai dalang penculikan para aktivis prodemokrasi tentu tak mudah. Perkara ini bukan murni perkara hukum, seperti rumusan penculikan di KUHP, tetapi jauh lebih pelik lagi dan tali-temali dengan masalah politik ruwet, yang ditengarai melibatkan para petinggi ABRI, yang masih berkuasa maupun yang sudah lengser. Kliping ini semacam editorial yang membaca lima kemungkinan lolosnya Prabowo Subianto dari tuntutan hukuman atas kasus penculikan.*

Tempo
4 Januari 1999

Mantan Komandan Puspom ABRI, Mayjen CHK Syamsu Djalaluddin, S.H., bahkan punya pendapat lebih jauh. Menurut dia, seperti yang dinyatakan KSAD dan Ketua DKP Jenderal TNI Soebagyo, Prabowo telah mengaku melakukan tindak pidana penculikan. Karena itu, tidak ada alasan lain, Prabowo memang harus diajukan ke mahkamah militer. Pemerintah Habibie mengeluarkan pernyataan senada setelah mempelajari temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Dalam temuan TGPF itu, disebutkan bahwa jika dalam persidangan anggota Kopassus tersebut terbukti Prabowo terlibat, bekas Komandan Kopassus dan juga bekas Panglima Kostrad itu akan diajukan ke mahkamah militer.

Logikanya, kata Syamsu lagi, tidak mungkin kesebelas anggota Kopassus itu melakukan operasi secara sendiri-sendiri, tanpa perintah komandannya, kecuali saat itu mereka adalah pasukan yang melakukan desersi. "Saat itu, mereka tidak desersi, sehingga sudah pasti ada yang memerintahkan mereka," Syamsu menegaskan lagi. Dan semuanya terlampau jelas jika dirunut dari hierarki komando di Kopassus. Saat itu, komandan satuan tugas operasi penculikan adalah Mayor Bambang. Atasan langsung Bambang adalah Kolonel Chairawan, yang secara langsung bertanggung jawab kepada Danjen Kopassus saat itu, Mayjen TNI Prabowo Subianto.

Karaniya Dharmasaputra, Dwi Arjanto, Edy Budiyarso

| ***Mayjen TNI Syamsu Djalal,***
Mantan Danpuspom ABRI, dalam Tempo ("Mengusut Nurani Tim Mawar", 4 Januari 1998)

Munir, Koordinator Kontras, menilai "dakwaan itu banyak celahnya". Pertama, terjadi pemutusan struktur komando. "Mereka kan hanya orang yang menjalankan perintah," ujar Munir kepada Rita Triana Budiarti dari GATRA. Padahal, kata Munir pula, sudah teramat jelas bahwa Prabowo mengaku bertanggung jawab atas kasus itu. "Artinya, para tersangka itu diperintah oleh Prabowo. *Nggak nyelonong* begitu saja," ujarnya menambahkan.

Kedua, masih menurut Munir, dakwaan itu tak mencantumkan perlakuan yang diterima para aktivis itu ketika diculik. "Macam-macam penganiayaan dan interogasi terhadap mereka (para korban) *nggak* ada dalam dakwaan," ujar Munir kesal.

Menurut Mayor Jenderal (purnawirawan)

Gatra
2 Januari 1999

| ***Munir**, Koordinator Kontras, dalam Gatra ("Mencurigai Panggilan Nurani", 2 Januari 1999)*

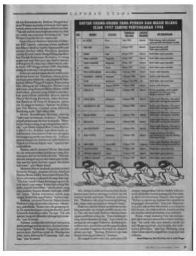

Gatra
2 Januari 1999

Menurut Mayor Jenderal (purnawirawan) Syamsir Siregar, mantan Asisten Intelijen Markas Besar ABRI, ihwal keterlibatan Prabowo sebenarnya tak perlu disangsikan lagi. "Dia kan sudah bilang bertanggung jawab, kok masih juga sangsi. Kalau kata orang Manado, *so* pasti dia terlibat," ujar Syamsir, yang juga mantan Kepala Badan Intelijen ABRI itu, lugas. "Kalau hakimnya masih juga sangsi, berarti dia *nggak* beres," katanya lagi.

Bahkan, menurut Syamsir, bukan hanya Prabowo yang seharusnya diproses. Alasannya, sederhana. "Kalau saya sih gampang saja. Di mana dan kapan orang itu diambil, pasti komando daerahnya tahu. Itu saja. Tak ada operasi yang tak diketahui pemegang komando," ujar Syamsir.

Namun, ketika dikonfirmasi mengenai peran petinggi militer lainnya, Syamsir seperti mengelak. "Sudahlah. Yang jelas, mereka punya dana, fasilitas untuk itu. Mereka kan jelas-jelas dibawa ke Cijantung. Jadi, apa lagi," ujar Syamsir.

| ***Mayjen TNI (Purn) Syamsir Siregar**, Mantan Asisten Intelijen Markas Besar ABRI, dalam Gatra ("Mencurigai Panggilan Nurani", 2 Januari 1999)*

Tanpa hendak prejudice terhadap persidangan kasus penculikan, harus dikatakan bahwa persidangan penculikan ini hanya untuk mengorbankan para perwira muda Kopassus, tanpa melibatkan tanggung jawab institusional dan komandannya, serta pihak lain yang diduga terlibat didalamnya.

Persidangan yang Kaburkan Kenyataan

Gugat
28 Desember 1998

| ***Bambang Widjojanto**, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam Gugat ("Persidangan yang Kaburkan Kenyataan", 28 Desember 1998)*

Gugat
28 Desember 1998

sidang terbuka

Kontroversi Seputar Prabowo

Jalan Panjang Menuju Kursi Terdakwa

The rising star yang gagal, Letjen (pur) Prabowo Subianto, tak pernah lekang menjadi perbincangan publik. Saat mertuanya Soeharto masih jadi Presiden RI, karir militer anak begawan ekonomi Sumitro Djojohadikoesoemo itu, disorot lantaran begitu cepatnya melejit. Tuduhannya, karir bintang tiga yang ada di pundaknya itu, tak lepas dari keberadaannya sebagai menantu Soeharto.

Teman-teman seangkatannya, memang disalipnya, bahkan juga kakak-kakak kelasnya di akademi militer Magelang. Hanya Mayjen Syafrie Syamsyudin, mantan Pangdam Jaya, yang mampu membayang-bayanginya.

Tapi, aksi penculikan aktivis pro demokrasi yang melibatkan dirinya, menyebabkan karir gemilang militernya terjungkal. Berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), Prabowo diberhentikan dengan hormat dari jajaran militer. Toh, cerita tak habis di sini. Prabowo yang oleh banyak kalangan aktivis, dituntut untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum, kemudian melenggang ke luar negeri.

Sempat beberapa saat tak ada kabar, meski berbagai kerusuhan di dalam negeri, dituding banyak orang sebagai ulahnya, termasuk kerusuhan Mei 1998. Begitu ada kabar dari mantan Pangkostrad ini, maka kabar beritanya langsung menggetkan, yakni Prabowo didaulat oleh Raja Yordania, Raja Hussein, menjadi warga negara kehormatan.

Bidikan perhatian publik pun diarahkan ke Prabowo kembali. Apalagi, berita itu muncul di tengah-tengah jalannya persidangan 11 anggota Kopassus, yang didakwa melakukan penculikan aktivis di Mahkamah Militer Tinggi di Jakarta. Dimana Prabowo dituding sebagai yang memberi perintah ke anak buahnya itu, tapi malah bisa lolos ke luar negeri.

Tak hanya Munir SH, koordinator KONTRAS yang mencak-mencak atas raibnya Prabowo dari dalam negeri, dan sekaligus dibiarkan itu. Bahkan, Menteri Kehakiman Prof Dr Muladi SH, juga mengancam akan mencekal Prabowo, bila ia berusaha menghindar dari tuntutan tanggungjawab atas peristiwa penculikan itu. Dan akan mencabut kewarganegaraan Prabowo, bila ia terbukti menerima kewarganegaraan dari pemerintah Yordania. Sementara Menteri Luar Negeri Ali Alatas SH, terus melacak kebenaran tawaran kewarganegaraan kehormatan dari Yordan ke Prabowo itu.

Seakan menjawab ributribut perihal, Prabowo melalui surat tertulisnya yang dikirim dari Yordan, menegaskan bahwa ia menolak tawaran warga negara kehormatan Yordan itu, dan tetap menegaskan dirinya adalah seorang patriot Indonesia.

Berhentikah kontroversi? Belum. Gunjingan kini berubah pada tak dikaitkannya Prabowo dengan dakwaan yang diajukan oditur militer terhadap 11 anggota Kopassus, yang melakukan penculikan. "Peradilan ini bukan didorong oleh niat mencari keadilan dan kebenaran," kata Marzuki Darusman, Ketua Komnas HAM, menyaksikan persidangan para penculik, tanpa menyebut-nyebut Prabowo.

Alhasil, guliran bola untuk menyeret Prabowo ke pengadilan, kini kian keras. Hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas kerusuhan Mei, yang menyebut Prabowo ikut bertanggungjawab, kini diramaikan lagi. Bagaimana nasib Prabowo tahun 1999 nanti? Entahlah. Berikut sepak terjang Prabowo, hingga ia tahu-tahu mendapat tawaran warga negara kehormatan Yordania.

■ Pebruari-Maret 1998

Terjadi penculikan besar-besaran terhadap aktivis di berbagai daerah. Di Jakarta, para aktivis yang diculik ditempatkan di penjara bawah tanah Makopassus Cijantung, Jakarta Selatan. Prabowo yang waktu itu menjabat Danjen Kopassus dianggap sebagai dalangnya.

■ 20 Maret 1998

Prabowo yang dikenal sebagai *the rising star* pasca Benny Moerdani, dipercaya menduduki jabatan Pangkostrad. Ia meninggalkan pos lama sebagai Danjen Kopassus. Kariernya yang meroket, juga diikuti kenaikan pangkat jadi Letnan Jenderal.

■ 12 Mei 1998

Terjadi penembakan terhadap enam orang mahasiswa Universitas Trisaktti, hingga meninggal dunia. panas. Tiga diantaranya langsung tewas dan satu lainnya meninggal di perjalan. Penembak misterius diduga pasukan Kopassus, yang ditempatkan di jalan tol.

Prabowo Subianto

Surat Prabowo dari Yordania

Prabowo ke Yordania: UPAYA MENCARI SUAKA?

Disaat kasus penculikan mulai disidangkan, Prabowo menghilang. Mantan Danjen Kopassus Letjen (Purn) Prabowo Subianto dikabarkan berada di Yordania dan mendapatkan status kewarganegaraan di negara Raja Hussein itu. Muncul spekulasi, Prabowo sengaja mencari suaka ke negara Timur Tengah itu. Benarkah demikian, berikut penuturan Prabowo sebagaimana ditulis dalam suratnya yang dikirim dari Amman, Yordania.

Mengenai berita bahwa saya telah diberi kewarganegaraan Yordania saya ingin memberi penjelasan sebagai berikut:

Saya memang pernah diberitahukan untuk menjadi warga negara Yordania. Namun saya untuk mengambil beberapa pertimbangan saya sangat berterima kasih namun tawaran tidak dapat saya terima, karena Indonesia tidak mengenal dwikewarganegaraan.

Sebagaimana diketahui, saya memang sangat dekat dengan keluarga Raja Hussein dan saya memang sering berada di Amman, dalam rangka berusaha untuk meraih kesan baru saya di bidang wiraswasta. Mengenai tuduhan-tuduhan bahwa saya adalah dalang dari berbagai peristiwa kerusuhan hasil TGPF mengenai Peristiwa 14 Mei 1998, saya dengan tegas dan keras menolak tuduhan-tuduhan tersebut.

Saya justru berusaha dan keras akan temuan TGPF tersebut. Saya telah memberi keterangan panjang lebar kepada TGPF dan saya yakin fakta-fakta jelas menunjukkan bahwa saya justru berjuang sekeras mungkin untuk menentramkan keadaan. Saya adalah seorang patriot Indonesia.

Saya telah bersumpah untuk selalu mengutamakan kepentingan Bangsa dan Rakyat Indonesia. Tidak mungkin saya akan berbuat untuk merugikan kepentingan Bangsa dan Negara saya. Seluruh hidup saya sampai saat ini saya curahkan untuk kepentingan Bangsa.

Selama ini saya tidak ingin membuat pernyataan-pernyataan karena saya ingin melindungi suatu suasana yang sejuk dan bersahaja di mana proses reformasi dan demokrasi ke arah suatu masyarakat yang demokratis lagi Bangsa Indonesia sangat membutuhkan suasana tersebut. Namun pada saat yang tepat saya pasti akan memberi penjelasan lebih rinci jika diperlukan.

PRABOWO SUBIYANTO

■ 13-14 Mei 1998

Terjadi kerusuhan luar biasa di Jakarta. Massa berjumlah ribuan merusak dan menjarah pusat-pusat perbelanjaan, membakar kendaraan di jalan, menteror masyarakat, serta menjurus tindakan rasial. Banyak wanita keturuan Cina jadi korban pelecehan seksual. Jakarta jadi lautan api. Kebakaran dan kebrutalan merajarela. Pelakunya diduga kelompok preman dan orang-orang Kopassus.

■ 22 Mei 1998

Di Markas Besar TNI Angkatan Darat, jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) diserahterimakan dari Letjen TNI Prabowo Subianto pada Mayjen TNI Johny Lumintang. Jabatan ini hanya bertahan 16 jam, karena Lumintang kemudian diganti Mayjen TNI Djamari Chaniago, Sabtu 23 Mei pukul 11.00 Wib. Di waktu bersamaan juga terjadi pergantian jabatan Danjen Kopassus dari Mayjen Muchdi PR pada Mayjen Sjahrir MS. Prabowo 'dibuang' ke kursi Dansesko ABRI, agar tak punya pasukan..

■ 25 Mei 1998

Desmond J. Mahesa, aktivis korban penculikan yang selamat, memberikan kesaksian di depan Dan Puspom ABRI Mayjen D Syamsu di kantor YLBHI Jakarta. Pada hari yang sama, dua korban penculikan di Jatim, Herma Hendrawan dan Feisol Rezha juga memberikan kesaksian pada Kontras dan Dan Puspom ABRI (usai mendengar kesaksian Desmond langsung menuju Surabaya). Kesaksian-kesaksian korban mengarah pada keterlibatan Kopassus dalam penculikan.

■ 14 Agustus 1998

Ketua Dewan Kehormatan Militer (DKP) yang juga KSAD, Jenderal TNI Subagyo HS, mengatakan pihaknya tengah meminta rekomendasi dari Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, tentang kemungkinan Prabowo, Muchdi dan Chairawan diajukan ke Mahkamah Militer dan dikenai sanksi administratif.

Prabowo yang waktu itu menduduki kursi Dansesko ABRI harus rela digeser dan dinonaktifkan. Ia tidak punya posisi yang pasti. Tidak lama kemudian ia dipensiunkan dari dinas militer.

■ 7 September 1998

Prabowo bertemu dengan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) di rumah Prabowo Jl. Cendana 7 Jakarta Pusat. TGPF diwakili Bambang W Soeharto, Bambang Widjojanto dan Rosita S. Noer. Kepada TGPF, Prabowo menegaskan dirinya tidak terlibat kasus kerusuhan. Ia justru berniat menentramkan keadaan.

■ 3 Nopember 1998

TGPF membacakan laporan final selama empat bulan bekerja. Mereka menyorot pertemuan 14 Mei di Makostrad, yang menjadi kunci pembuka keterlibatan Prabowo pada serangkaian kerusuhan.

■ 10 Desember 1998

Prabowo yang berada di Yordania sejak empat bulan lalu, tidak hadir dalam upacara Wisuda Purnawira di Kompleks Akmil, Magelang. Acara wisuda 69 perwira tinggi AD yang dipimpin langsung KSAD Jenderal Soebagio HS, hanya dihadiri 54 perwira. Prabowo dan 14 orang lainnya tidak hadir. Jenderal yang diwisuda diantaranya Feisal Tanjung, Syarwan Hamid dan Suyono.

■ 21 Desember

Terbetik berita Prabowo mendapatkan warga negara kehormatan dari petinggi Yordania, Raja Hussein. Diduga, jasa Prabowo amat banyak dalam pengembangan kualitas militer di negeri ini. Tapi, Prabowo menolak tawaran kehormatan itu.

■ 23 Desember 1998

11 anggota Kopassus disidang di Mahkamah Militer. Dalam sidang yang dihadiri Pius Lustrilanang (korban penculikan yang pertama memberi kesaksian), tak disebut sekalipun keterlibatan Prabowo Subianto. Fokus kesalahan diarahkan ke Mayor Inf. Bambang Kristiono, yang merasa terpanggil menyelamatkan bangsa. Tak disebutnya Prabowo ini, diduga sebagai upaya menutup aib di tingkat perwira tinggi. Karena dikhawatirkan jebakan pada Prabowo, bisa menyeret petinggi lain, termasuk KSAD (waktu itu dijabat Wiranto), dan Menhankam/Pangab (waktu itu dijabat Feisal Tanjung).

❐ bangun

Yang paling penting, pemerintah harus serius mengungkap kasus penculikan ini. Caranya, pemerintah harus berani secara lengkap dan utuh, mengumumkan hasil temuan-temuan yang diperoleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) kepada publik. Selain itu, demi tegaknya hukum dan keadilan, para aktivis yang belum kembali baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, harus segera dikembalikan. Jadi ini merupakan tanggung jawab yang besar.

| ***Letjen TNI (Purn) Hasnan Habib**, Diplomat dan Pengamat Militer, dalam Gugat ("Seret Juga Atasan Prabowo", 28 Desember 1998)*

Seret Juga Atasan Prabowo

Dakwaan Harus Diubah

Soeharto Seharusnya Terlibat

Gugat
28 Desember 1998

◄ *Kliping ini membuat kronologi bagaimana para terdakwa penculik aktivis 1998 ini sampai di kursi terdakwa Mahkamah Militer Tinggi. Kronologi ini mengingatkan kembali sejumlah kalender penting proses culik, periksa, adili. Termasuk, kepergian Prabowo Subianto ke Yordania dilakukan secara klandestin hingga jurnalis baru mengetahuinya empat bulan kemudian lewat "pemberitaan biasa" di sebuah harian di Kota Amman.*

RUDY HARTONO

BUAH KARYA SOEHARTO

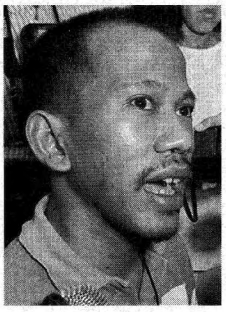

Pius Lustrilanang
(korban penculikan)

SEJAK awal sudah jelas, semua saksi bilang ada penyiksaan. Dicelupkan di bak air, disundut rokok, pemukulan, setrum, berbaring di balok es. Saya bersedia menjadi saksi: saya ungkap ini agar ada keadilan bagi mereka yang diculik dan keluarganya. Sidang ini untuk mencari kejelasan bagi semuanya. Dakwaan oditur kurang lengkap. Padahal semuanya saya sudah beberkan secara rinci. Saya pikir semua saksi juga begitu. Tak mungkin luput. Dalam sidang saya akan bicara ada penyiksaan. Pengadilan dimulai ketika ada selubung tanda tanya besar: Mengapa sidang digelar ketika Prabowo ada di Yordania? Dan sudah jelas status warga negaranya. Artinya antara mereka yang menjadi pelaksana teknis terputus hubungannya dengan mereka yang memberi order pertama. Karena Prabowo ada di tengah semua. Kalau Prabowo dihilangkan, ditaruh di Yordan, berarti ada upaya atau kesengajaan untuk mengislorir kasus ini menjadi semata-semata kasus kriminal. Tapi semua orang tahu, saya diculik karena aktivitas politik saya. Saya yakin. Kopassus tidak mungkin bertindak diluar komando. Yang berhak memberi komando adalah Pangab. Dan Soeharto punya hak prerogratif untuk menunjuk Danjen Kopassus dan Pangkostrad. Artinya dia juga punya jalur komando langsung. Saya yakin sejak awal, Soeharto ada di belakang semua ini. Dia yang memberi order. Sidang ini dimulai ketika Prabowo tidak ada di sini. Sudah empat bulan dia di sana—Yordania. Waktu saya ke luar negeri, mereka bilang saya tidak ksatria. Sekarang Prabowo bagaimana? Korban yang masih hilang sampai sekarang bukan lagi korban penculikan, tapi korban pembunuhan. Bagaimana cara mengadili? Harus berjenjang. Jangan seenaknya orang yang banyak tahu soal penculikan dibiarkan saja ke Yordania. Tanpa Prabowo motiv politik di balik kasus ini tak akan terungkap. Saya ditangkap karena aktivitas politik saya. Apa yang saya lakukan: menggunggat pencalonan kembali Soeharto. Siapa yang paling merasa diganggu kepentinganya, ya Soeharto, bukan Prabowo. ■

DAHLAN/JUNIANTO SETYADI

Bangkit
28 Desember 1998

28 DESEMBER 1998

"Mengapa sidang digelar ketika Prabowo Subianto ada di Yordania? Artinya, antara mereka yang menjadi pelaksana teknis terputus hubungannya dengan mereka yang memberi order pertama. Karena Prabowo ada di tengah itu semua. Kalau Prabowo dihilangkan, ditaruh di Yordania, berarti ada upaya atau kesengajaan untuk mengisolir kasus ini menjadi semata-mata kasus kriminal. Tapi semua orang tahu, saya diculik karena aktivitas politik saya. Ketika saya keluar negeri, mereka bilang saya tidak ksatria. Sekarang Prabowo bagaimana? Berjenjang. Korban yang masih hilang sampai sekarang bukan lagi korban penculikan, tapi korban pembunuhan. Jangan seenaknya orang yang banyak tahu soal penculikan dibiarkan ke Yordania. Tanpa Prabowo, motif politik di balik kasus ini tak akan terungkap."

| ***Pius Lustrilanang***, *Korban Penculikan*

Kompas
29 Desember 1998

Pemeriksaan 11 Anggota Kopassus

Seharusnya Komandan Bertanggung Jawab

Jakarta, Kompas

Jenderal TNI (Purn) Rudini, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), menyatakan tersentuh hati nuraninya menyaksikan proses pengadilan 11 anggota Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) oleh Mahkamah Militer Jakarta Timur.

Rudini

Menurut Rudini, seharusnya ada komandan yang berani menyatakan sepenuhnya bertanggung jawab atas kasus penculikan para aktivis itu. Dengan demikian, tidak perlu anak buah sebagai aparat pelaksana di lapangan ikut diadili dengan kadar kesalahan yang sama.

"Saya sebenarnya tidak ingin menyalahkan yang mengadili (Oditur Militer—**Red**). Tetapi saya ini 30 tahun dinas jadi tentara. Kalau melihat bawahan diadili, saya itu... bukan kasihan ya, tetapi hati nurani saya ini bunyi. Harusnya mereka itu ditanya, siapa yang memerintah. Yang memerintah itu yang harus dimintai tanggung jawab," kata Rudini yang kini Ketua Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPSI) dalam percakapan dengan *Kompas* di Jakarta, Senin (28/12).

Wawancara dilakukan untuk menanggapi proses pengadilan 11 anggota Kopassus oleh Mahkamah Militer Jakarta Timur, yang dinilai janggal. Dalam sidang hari Rabu (23/12), Oditur Militer menyebutkan aksi penculikan merupakan prakarsa Mayor Bambang. Oditur juga hanya menyentuh perkara penculikan, dan sama sekali tidak menyinggung soal penyiksaan seperti pengakuan para korban.

Tidak masuk akal

Rudini memberikan gambaran soal hierarki komando, disiplin militer, dan konsekuensi terhadap pelanggaran disiplin militer. Pasukan atau anak buah, katanya, dapat melakukan

(Bersambung ke hlm 11 kol 1-4)

Kepada Rudini disebutkan bahwa status Mayor Bambang waktu itu sebagai perwira menengah yang diperbantukan kepada Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto. "Kalau begitu, dia (Bambang) tidak lewat siapa-siapa, tetapi langsung ke Danjen Kopassus. Jadi jelas siapa yang harus bertanggung jawab," katanya.

"Tetapi memang ini aneh, *ndak* masuk akal. Bagaimana bisa terjadi seorang mayor Kopassus melakukan hal seperti itu. Tetapi kalau memang benar bahwa mayor Kopassus itu bertindak karena maunya sendiri, lalu mutu militer ini bagaimana? Hancurlah sudah!" katanya.

| ***Jenderal TNI (Purn) Rudini**, Mantan Kasad dan Ketua Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPSI), dalam Kompas ("Pemeriksaan 11 Anggota Kopassus: Seharusnya Komandan Bertanggung Jawab", 29 Desember 1998)*

31 DESEMBER 1998

Ketua Tim Penasihat Hukum dari 11 terdakwa anggota Komando Pasukan Khusus TNI (Kopassus) yang tergabung dalam Tim Mawar membacakan eksepsi atas dakwaan Oditur Militer Tinggi di hadapan Ketua Majelis Hakim Kolonel (CHK) Susanto.

Kolonel (CHK) Rettob Abdullah yang bertindak sebagai ketua Tim Penasihat Hukum mempertanyakan apakah memang ada bukti yang cukup bahwa selama dalam masa penculikan telah terjadi penyiksaan terhadap pada aktivis politik. Pengakuan korban saja tidak cukup menjadi bukti. Harus ada alat bukti.

Tim Penasihat Hukum juga menilai, dakwaan Oditur tidak menunjukkan adanya perbedaan rumusan dakwaan antara dakwaan penculikan dan dakwaan perampasan kemerdekaan sehingga dakwaan itu menjadi tidak jelas dan kabur.

Penekanan pasal 328 KUHP itu adalah masalah penculikan. Syarat penculikan orang harus ditangkap di tempat tinggalnya, atau tempat tinggal sementaranya secara melawan hukum dan di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau membuat orang sengsara. Kalau pasal 333 tentang perampasan kemerdekaan, seseorang diambil di mana saja, diborgol, ditutup matanya, dibawa pergi, lalu tidak sesuai dengan kehendak yang bersangkutan. Itu namanya perampasan kemerdekaan orang lain.

Karena tidak jelas, dakwaan oditur tidak sah dan karena itu dibatalkan.

Soal Penyiksaan, Pengakuan Korban tak Cukup

Jakarta, Kompas

Kolonel (CHK) Rettob Abdullah, Ketua Tim Penasihat Hukum 11 terdakwa anggota Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) yang tergabung dalam Tim Mawar mempertanyakan, apakah memang ada bukti yang cukup bahwa selama dalam masa penculikan telah terjadi penyiksaan terhadap para aktivis politik.

"Pengakuan korban saja tak cukup menjadi bukti. Harus ada alat bukti," kata Rettob kepada pers usai membacakan eksepsi di Mahkamah Militer Tinggi Jakarta, Kamis (31/12). Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Kol (CHK) Susanto, Rettob menyampaikan eksepsi atas dakwaan Oditur Militer Tinggi Kol (CHK) Harom Wijaya terhadap anggota Tim Mawar yang diketuai Mayor (Inf) Bambang Kristiono.

Sementara, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir kepada pers mengatakan, soal tidak adanya alat bukti penyiksaan berupa *visum et repertum* sebenarnya tak relevan dipersoalkan karena dakwaan tidak menyangkut penyiksaan.

"Bila diduga ada penganiayaan dan tak ada alat buktinya, oditur seharusnya tidak melimpahkan berita acara pemeriksaan (BAP) ke pengadilan. Seharusnya dikembalikan ke Puspom untuk dicarikan alat bukti, baru dilimpahkan ke pengadilan," katanya.

Tidak munculnya soal penyiksaan dan penganiayaan dalam dakwaan oditur militer menjadi kontroversi dalam sidang kasus penculikan itu. Karena para aktivis politik yang telah dibebaskan, dalam kesaksiannya kepada publik mengaku disiksa dengan berbagai cara, seperti disetrum, dibenamkan dalam bak air, dan ditidurkan di balok es.

Tidak jelas

Dalam sidang kemarin, Kapten (Inf) Djaka Budi Utama tidak hadir karena sakit. Sementara dalam eksepsinya, Rettob menilai, dakwaan Oditur tidak menunjukkan adanya perbedaan rumusan dakwaan antara dakwaan penculikan dan dakwaan perampasan kemerdekaan, sehingga dakwaan itu menjadi tidak jelas dan kabur. Dakwaan oditur tidak sah dan harus dibatalkan.

Sebelumnya, Oditur Militer Tinggi Kol (CHK) M Harom Widjaya bersama Kol (CHK) M Suratman mendakwa para anggota Tim Mawar yang dipimpin Mayor (Inf) Bambang Kristiono

(Bersambung ke hlm 11 kol 8-9)

Soal —— **(Sambungan dari halaman 1)**

(terdakwa I) telah melakukan penculikan. Oditur menjerat para terdakwa dalam pasal 328 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 333 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pelanggaran pasal 328 soal penculikan diancam hukuman 12 tahun penjara.

Kepada pers, Rettob mengatakan, dakwaan oditur tidak jelas dan lengkap. Penekanan pasal 328 KUHP itu adalah masalah penculikan. Syarat penculikan orang harus ditangkap di tempat tinggalnya, atau tempat tinggal sementaranya secara melawan hukum dan di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau membuat orang sengsara.

"Kalau perampasan (pasal 333 — **Red**), orang diambil di mana saja, diborgol, ditutup matanya, dibawa pergi lalu tidak sesuai dengan kehendak yang bersangkutan. Itu namanya perampasan kemerdekaan orang lain," tegasnya. Namun, menurut Rettob, dalam dakwaan oditur, kedua pasal tersebut dirumuskan dengan perbuatan yang sama.

Seharusnya di Palembang

Rettob juga mengungkapkan, perkara atas nama terdakwa IV Kapten (Inf) Yulianus Selvanus, Kapten (Inf) Untung Budi Harto (V), Kapten (Inf) Dadang Hendra Yudha (VI), Kapten (Inf) Djaka Budi Utama (VII), Kapten (Inf) Fauka Noor Farid (VIII), Serka Sunaryo (IX), dan Serka Sigit Sugianto (X) tidak berdasar untuk diperiksa di Mahmilti II Jakarta.

Para terdakwa, demikian Rettob, secara bersama-sama dan atas perintah terdakwa Mayor Bambang Kristiono telah menangkap aktivis Andi Arief di Bandarlampung. Jadi, khusus untuk penangkapan Andi Arief yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa adalah Mahkamah Militer I-04 Palembang karena *locus delicti* atau tempat tindak pidana dilakukan adalah di Bandarlampung, bukan di wilayah Mahmilti II Jakarta atau Mahmilti I-Medan.

Sementara Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Marzuki Darusman mengatakan, persidangan di Mahmil sekarang ini seharusnya bisa mengakses hasil temuan Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Dengan mengakses hasil temuan DKP diharapkan dapat diperoleh kepastian soal bagaimana keterlibatan orang perorangan dalam kasus penculikan serta status 13 orang yang masih hilang.

"Kita memang masih menghadapi suatu peradilan yang janggal, karena yang dilakukan suatu peradilan militer terhadap 11 anggota Kopassus yang sudah dibatasi penuntutannya hanya terhadap ke-11 itu, sementara pengetahuan masyarakat sudah lebih jauh dari itu," ungkap Marzuki kepada pers di Jakarta, Kamis (31/12). **(oki/bb)**

"Soal tidak adanya alat bukti penyiksaan berupa *visum et repertum* sebenarnya tak relevan dipersoalkan karena dakwaan tidak menyangkut penyiksaan. Bila diduga ada penganiayaan dan tak ada alat buktinya, oditur seharusnya tidak melimpahkan berita acara pemeriksaan (BAP) ke pengadilan. Seharusnya dikembalikan ke Puspom untuk dicarikan alat bukti, baru dilimpahkan ke pengadilan."

***Munir**, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)*

Kompas
2 Januari 1999

Mahkamah untuk Prabowo

Mengorbankan bawahan bukan reklame baik buat dwifungsi ABRI

SOAL Prabowo Subianto—jangan lupa, kini dia sudah purnawirawan—bukan cuma heboh anugerah kewarga negaraan Yordania dari Raja Husein saja, tapi soal bebas lepasnya seorang bekas Komandan Jenderal Kopassus yang disangka harus bertanggung jawab tentang penculikan, sedangkan regu istimewa yang ditugaskan melakukannya sedang diproses di pengadilan. Ini adalah diskriminasi dalam perlakuan hukum. Seakan-akan ada dua macam hukum yang berjalan; satu untuk orang biasa, dan yang satu lagi untuk orang-orang tertentu, yang ada di atas sana.

Sukar menetapkan apakah pembedaan ini karena privilese untuk Prabowo, atau untuk melindungi kepentingan lain yang lebih luas lagi. Tak perlu dimungkiri, memang ada perlakuan khusus bagi jenderal (tepatnya: pensiunan) flamboyan menantu mantan presiden Soeharto itu. Surat pensiunnya saja—walau telah lama disiapkan—ditunda-tunda sampai saat terakhir, baru ditandatangani oleh Presiden Habibie. Apakah ini karena kasihan atau takut atau solider kepada tokoh yang dikenal temperamental itu, tak jelas. Di lain pihak, sorotan hanya dipusatkan pada Prabowo seorang. Padahal banyak perwira tinggi lain yang diduga tidak mungkin tidak mengetahui, bahkan boleh jadi terlibat. Bekas Panglima Kodam V Jaya Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin dan para atasan Prabowo tidak pernah disebut-sebut lagi sekarang. Sungguh ajaib.

Prabowo, yang pernah menjadi Panglima Kostrad itu, tergolong sering apes. Operasi penculikan aktivis itu mungkin tak terbongkar andaikata kekuasaan Soeharto tidak berakhir mendadak bulan Mei lalu. Penghadiahan kewarganegaraan Yordania itu pun terungkap hanya karena kecelakaan kecil yang tak disengaja, akibat berita harian Al Ra'i di Amman, Yordania.

Tetapi terlepas dari masalah pribadi, memang tak mungkin dibayangkan Prabowo boleh lepas dari tanggung jawab. Uraian oditur militer bahwa ada seorang Mayor Kopassus AD, karena "panggilan hati nuraninya" untuk mengamankan kepentingan bangsa, membentuk satuan tugas yang terdiri dari tujuh orang kapten (!) dan tiga bintara lainnya untuk "menculik aktivis radikal", tak akan bisa termakan oleh akal orang desa yang paling lugu sekalipun. Kecuali kalau diakui bahwa ada perintah atau persetujuan dari atasan.

Dari peradilan, gejala membatasi persoalan tampak nyata. Kalau Prabowo dan perwira tinggi lainnya tidak diproses semestinya, itu berarti dua jenis hukum yang disebut di atas memang sedang diterapkan di sini. Atau tepatnya, tak ada hukum yang berjalan. Bersiaplah untuk kecewa. ■

Tempo
4 Januari 1999

4 JANUARI 1999

"Tetapi terlepas dari masalah pribadi, memang tak mungkin dibayangkan Prabowo boleh lepas dari tanggung jawab. Uraian oditur militer bahwa ada seorang Mayor Kopassus AD, karena "panggilan hati nuraninya" untuk mengamankan kepentingan bangsa, membentuk satuan tugas yang terdiri dari tujuh orang kapten (!) dan tiga bintara lainnya untuk "menculik aktivis radikal", tak akan bisa termakan oleh akal orang desa yang paling lugu sekalipun. Kecuali kalau diakui ada perintah atau persetujuan dari atasan."

***TEMPO**, Editorial, 4 Januari 1999*

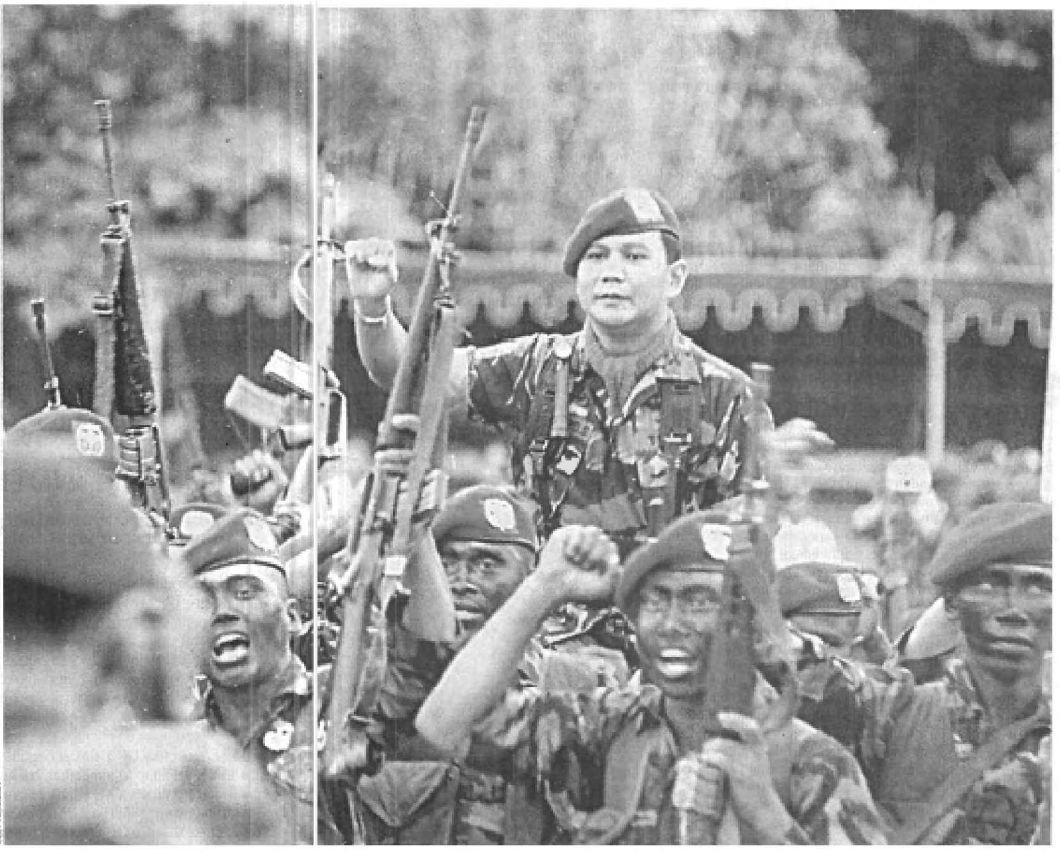

Tempo
4 Januari 1999

6 JANUARI 1999

Komnas HAM menerbitkan Evaluasi Tahunan Komnas HAM tentang Kondisi Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Evaluasi tersebut dibacakan Sekjen Komnas HAM Clementino dos Reis Amaral di Jakarta. Hadir dalam pembacaan itu Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman, Wakil Ketua I HR Djoko Soegianto, Wakil Ketua II Bambang W. Soeharto, dan Anggota Lies Soegondho.

Komnas HAM meminta agar proses peradilan terhadap sebelas anggota Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus) yang didakwa melakukan penculikan segera dibatalkan karena jelas melanggar hak asasi manusia. Lagi pula, peradilan itu bukan peradilan yang *fair*, serta tidak berpihak kepada para korban penculikan. Proses peradilan itu tidak menyentuh persoalan yuridis formal dalam proses persidangan yang tengah berjalan.

Pembatalan itu perlu, sebab jika tidak segera dijernihkan muncul kesan kuat adanya upaya menutupi dan melindungi penanggung jawab tindakan penculikan sebagaimana diputuskan Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Apalagi, kondisi umum di Indonesia secara menyeluruh tidak kondusif bagi perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai akibat tidak terpecahkannya serangkaian tindakan kekerasan yang merupakan pelanggaran berat HAM. Pertanyaan pokok yang timbul adalah mengapa aparat keamanan dan penegak hukum sepanjang tahun 1998 tidak mampu menuntaskan pelanggaran berat HAM di Indonesia.

Komnas HAM: Harus Dibatalkan, Peradilan 11 Anggota Kopassus

Jakarta, Kompas

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta agar proses peradilan terhadap sebelas anggota Komando Pasukan Khusus TNI-AD (Kopassus) yang didakwa melakukan penculikan, segera dibatalkan karena jelas melanggar hak asasi manusia. Lagi pula, peradilan itu bukan peradilan yang *fair*, serta tidak berpihak pada para korban penculikan.

Demikian salah satu butir Evaluasi Tahunan Komnas HAM tentang Kondisi Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang dibacakan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Clementino dos Reis Amaral di Jakarta, Rabu (6/1). Hadir dalam pembacaan pernyataan itu Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman, HR Djoko Soegianto (Wakil Ketua I), Bambang W Soeharto (Wakil Ketua II), dan anggota Lies Soegondho.

Menurut Komnas HAM, pembatalan itu perlu, sebab jika tidak segera dijernihkan akan timbul kesan kuat adanya upaya menutupi dan melindungi penanggung jawab tindakan penculikan sebagaimana diputuskan Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Komnas HAM juga menilai, saat ini kondisi umum di Indonesia secara menyeluruh tidak kondusif bagi perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai akibat tidak terpecahkannya serangkaian tindakan kekerasan yang merupakan pelanggaran berat HAM.

"Proses peradilan atas sebelas anggota Kopassus harus dibatalkan, karena telah terjadi pelanggaran HAM dan tidak menyentuh persoalan yuridis formal dalam proses persidangan yang tengah berjalan. Komnas HAM sama sekali tidak bermaksud mencampuri persidangan yang ada dalam arti melakukan intervensi. Sama sekali tidak," papar Djoko Soegianto, mantan hakim agung.

Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman melihat permintaan pembatalan persidangan itu harus dilihat dari sisi rasa keadilan masyarakat berkaitan adanya putusan DKP atas diri mantan Panglima Kostrad Letjen (Purn) Prabowo Subianto, mantan Komandan Jenderal Kopassus Mayjen (Purn) Muchdi Purwoprandjono, dan mantan Komandan Grup IV Kopassus Kolonel (Purn) Chairawan. "Peradilan atas sebelas anggota Kopassus ini tidak mencerminkan harapan keadilan masyarakat manakala dikaitkan dengan putusan DKP atas tiga Pati dan Pamen ABRI itu," tegas Marzuki.

Bambang Soeharto menampik kemungkinan timbulnya preseden buruk yang bakal terjadi jika rekomendasi Komnas HAM untuk membatalkan peradilan 11 anggota Kopassus ini dijadikan dan diikuti pihak-pihak atau institusi resmi lainnya. Menurut dia, justru Komnas HAM ingin menciptakan preseden baik agar peradilan itu berjalan *fair* sesuai dengan rasa keadilan masyarakat luas.

Tak kondusif dan kebal

Dalam bagian lain pernyataannya itu, Sekjen Komnas HAM menyatakan, kondisi umum di Indonesia tidak kondusif bagi perlindungan HAM. Ini karena pada saat yang sama terkesan tidak terselesaikannya berbagai pelanggaran berat HAM sebagaimana terjadi di tengah masyarakat. "Pertanyaan pokok yang timbul ialah, mengapa aparat keamanan dan penegak hukum sepanjang tahun 1998 ini tidak mampu menuntaskan persoalan pelanggaran berat HAM di Indonesia," ucap Amaral.

Komnas HAM juga prihatin

(Bersambung ke hlm 11 kol 4-7)

Kompas
7 Januari 1999

"Permintaan pembatalan persidangan harus dilihat dari sisi rasa keadilan masyarakat berkaitan adanya putusan DKP atas diri mantan Panglima Kostrad Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto, mantan Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono, dan mantan Komandan Grup IV Kopassus Kolonel TNI (Purn) Chairawan"

| ***Marzuki Darusman**, Ketua Komnas HAM, dalam Kompas ("Komnas HAM: Harus Dibatalkan, Peradilan 11 Anggota Kopassus", 7 Januari 1999)*

7 JANUARI 1999

Menkeh Soal Sidang Penculikan

Prabowo, Muchdi, dan Hartono Harus Didengar Keterangannya

"Prabowo dan Muchdi harus dijadikan saksi. Juga Hartono perlu didengarkan keterangannya, karena dia dianggap tahu persoalan itu. Ini akan meng-*clear*-kan, apakah tindakan terdakwa benar-benar atas perintah atau salah tafsir perintah. Kesaksian mereka akan membantu menghilangkan kesan *unfair trial* (peradilan yang tidak *fair*)," ucap Muladi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/1).

| ***Muladi**, Menteri Kehakiman, dalam Kompas ("Menkeh Soal Sidang Penculikan: Prabowo, Muchdi, dan Hartono Harus Didengar Keterangannya", 8 Januari 1999)*

- Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus/mantan Pangkosrad
- Mayjen TNI (Purn) Muchdi PR, mantan Danjen Kopassus
- Jenderal TNI (Purn) R. Hartono, mantan Kepala Staf TNI AD

Di tempat terpisah, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir mengemukakan, penyiksaan yang dialami korban penculikan yang tidak dimasukkan dalam dakwaan dan hanya ditempatkan sebagai unsur yang memberatkan merupakan upaya menghindari penilaian bahwa penyiksaan itu dapat menghilangkan nyawa orang. Hal itu juga merupakan upaya menghindari pertanggungjawaban jika terdapat korban lain yang mengalami nasib lebih parah dari nasib korban yang sudah kembali.

"Kita mencurigai tidak ma

| ***Munir**, Koordinator Kontras, dalam Kompas ("Menkeh Soal Sidang Penculikan: Prabowo, Muchdi, dan Hartono Harus Didengar Keterangannya", 8 Januari 1999)*

8 JANUARI 1999

Sidang dengan terdakwa 11 anggota Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) yang tergabung dalam Tim Mawar dilanjutkan kembali.

Di hadapan Ketua Majelis Hakim Kol (CHK) Susanto di Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) II-Jakarta, korban penculikan Nezar Patria memberikan kesaksian. Sebelumnya, majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan penasehat hukum terdakwa soal kewenangan Mahmilti menyidangkan kasus tersebut. Dalam putusan selanya, majelis menolak eksepsi tersebut dan memutuskan sidang diteruskan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

Dua saksi, Pius Lustrilanang dan Andi Arief, menolak memberikan kesaksian. Keduanya menolak bersaksi karena dakwaan oditur tidak mengungkapkan masalah penyiksaan serta nasib korban penculikan yang belum kembali, serta perintah komando penculikan.

Nezar Patria, korban penculikan yang lain, awalnya juga enggan bersaksi. Namun, setelah berdebat dengan hakim, ia mau memberikan kesaksian.

Saat meninggalkan ruangan sidang, Andi Arief sempat menyalami dan berpelukan dengan Mayor (Inf) Bambang Kristiono, pimpinan Tim Mawar.

M. RIZAL

KELUARGA KORBAN. *Siapa yang bertanggung jawab?*

Forum Keadilan
25 Januari 1999

Jakarta, Kompas

Sidang kasus penculikan sejumlah aktivis dengan terdakwa 11 anggota Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) di Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) Jakarta, Selasa (12/1), kembali diwarnai penolakan saksi untuk memberikan keterangan. Saksi Desmond J Mahesa sebenarnya menyatakan bersedia diperiksa, namun harus ada penjelasan dulu tentang kaitan kesebelas terdakwa tersebut dengan Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus.

"Saya bersedia bersaksi. Tetapi saya tidak mengenal seorang pun di antara terdakwa. Padahal, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) menyebut keterlibatan Prabowo, Muchdi PR, dan Kolonel (Inf) Chairawan dalam perkara penculikan yang menimpa saya serta teman-teman lain. Saya ingin tahu hubungan mereka (terdakwa) dengan Prabowo dkk," ujar Desmond.

Majelis yang dipimpin Kolonel (CHK) Susanto menilai, Desmond tidak bersedia memberikan keterangan. Tetapi penilaian itu disangkal Desmond. Ia berkata, "Saya bersedia memberikan kesaksian. Namun saya tak yakin terdakwa ini melakukan penculikan tersebut. Bagaimana saya dapat mem-

12 JANUARI 1999

Sidang kasus penculikan sejumlah aktivis dengan terdakwa 11 anggota komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) di Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) II-Jakarta dilanjutkan kembali dengan memeriksa saksi-saksi.

Ketua Majelis Hakim Kolonel (CHK) Susanto meyakinkan bahwa keterangan saksi-saksi diperlukan untuk menjawab apakah ke-11 terdakwa memang benar-benar menculik atau tidak. Tanpa ada keterangan saksi, dakwaan penculikan tidak dapat dibuktikan.

Saksi Desmond J. Mahesa yang dihadirkan menolak memberikan keterangan. Ia bersedia diperiksa, tetapi harus ada kejelasan tentang kaitan kesebelas terdakwa dengan Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto, mantan

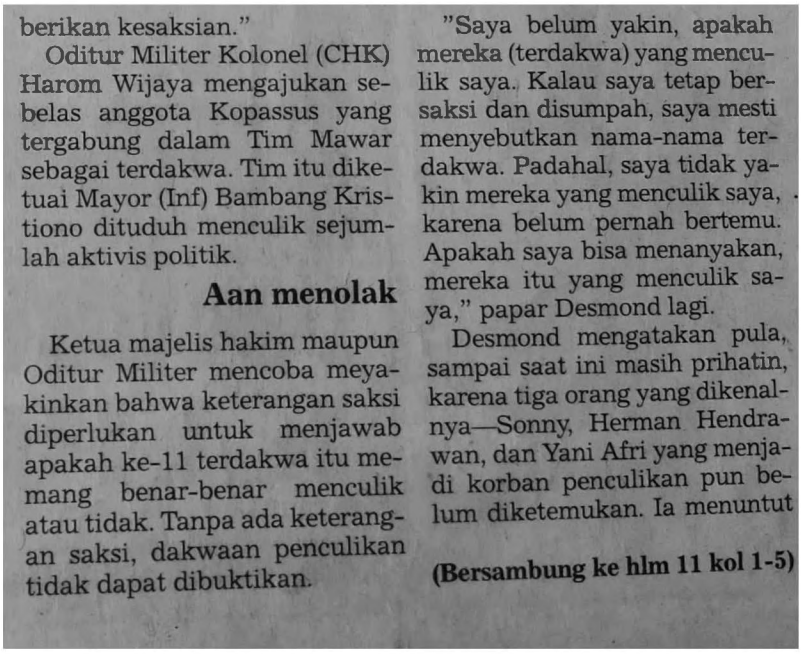

berikan kesaksian."

Oditur Militer Kolonel (CHK) Harom Wijaya mengajukan sebelas anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar sebagai terdakwa. Tim itu diketuai Mayor (Inf) Bambang Kristiono dituduh menculik sejumlah aktivis politik.

Aan menolak

Ketua majelis hakim maupun Oditur Militer mencoba meyakinkan bahwa keterangan saksi diperlukan untuk menjawab apakah ke-11 terdakwa itu memang benar-benar menculik atau tidak. Tanpa ada keterangan saksi, dakwaan penculikan tidak dapat dibuktikan.

"Saya belum yakin, apakah mereka (terdakwa) yang menculik saya. Kalau saya tetap bersaksi dan disumpah, saya mesti menyebutkan nama-nama terdakwa. Padahal, saya tidak yakin mereka yang menculik saya, karena belum pernah bertemu. Apakah saya bisa menanyakan, mereka itu yang menculik saya," papar Desmond lagi.

Desmond mengatakan pula, sampai saat ini masih prihatin, karena tiga orang yang dikenalnya—Sonny, Herman Hendrawan, dan Yani Afri yang menjadi korban penculikan pun belum diketemukan. Ia menuntut

(Bersambung ke hlm 11 kol 1-5)

Kompas
13 Januari 1999

Danjen Kopassus. Menurut Desmond, ia tak mengenal seorang pun terdakwa. Padahal, Dewan kehormatan Perwira (DKP) menyebut keterlibatan Prabowo, Muchdi, dan Chairawan dalam perkara penculikan yang menimpa dirinya dan teman-temannya. Desmond hanya ingin kepastian hubungan 11 terdakwa dengan Prabowo dkk.

Bukan hanya Desmond, korban penculikan lain, Aan Rusdianto juga tak bersedia memberikan keterangan. Sikap penolakannya itu sebagai ungkapan solidaritas dan keprihatinan terhadap persoalan di Aceh yang juga menjadi korban kekerasan militerisme.

Hanya Wakil Sekjen PDI Perjuangan Haryanto Taslam yang bersedia memberikan keterangan tentang apa yang dialaminya selama 40 hari dalam penyekapan.

25 JANUARI 1999

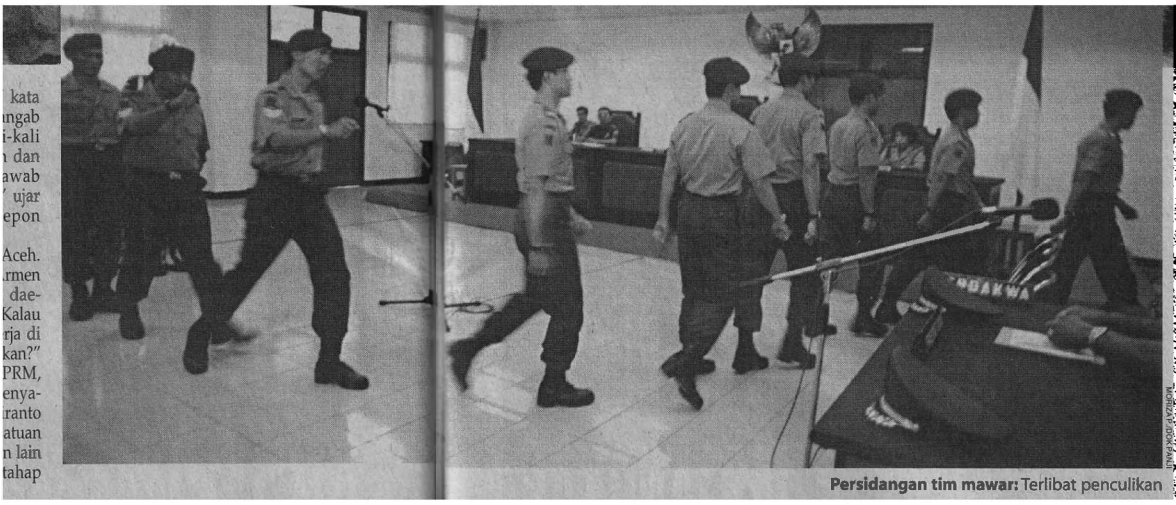

Persidangan tim mawar: Terlibat penculikan

Panji Masyarakat
25 Agustus 1999

Kendati mendapat reaksi dari berbagai pihak, Oditur Harom Widjaya menanggapi reaksi-reaksi itu dengan enteng. Menurut Harom, surat dakwaan itu dibuat berdasarkan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang diserahkan Puspom ABRI. Pasal penganiayaan tidak masuk dalam dakwaan karena tidak didukung dengan bukti kuat seperti bukti luka fisik dan alat-alat yang digunakan. Apalagi, *visum et repertum* para saksi korban pun tidak ada. "Harusnya dari awal sudah ada visum," ujarnya.

Keterlibatan Prabowo juga tidak disebut-sebut dalam BAP. "Kami tidak bisa mengarang-ngarang, membuat uraian yang tidak ada dalam pemeriksaan awal atau BAP," ucap Harom.

| ***Kolonel (CHK) M. Harom Widjaya**, Oditur militer yang menuntut 11 terdakwa penculik dari Tim Mawar, dalam Forum ("Menggelar Lakon Sebelas Mawar Terdakwa", 25 Januari 1999)*

M. RIZAL

KELUARGA KORBAN. *Siapa yang bertanggung jawab?*

SEBAGIAN "RAPOR" JENDERAL TNI WIRANTO
SEBAGAI MENHANKAM/PANGAB

MASALAH	PERNYATAAN WIRANTO	PELAKSANAAN	TANGGAPAN MASYARAKAT
Mantan Presiden Soeharto	• "ABRI tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan Presiden, termasuk Soeharto." (Kamis, 21 Mei 1998).	•. Hari itu juga aparat keamanan bersenjata lengkap mengamankan kawasan Jalan Cendana Jakarta Pusat.	• Tindakan aparat dianggap terlalu berlebihan. **(Hingga kini pengamanan ekstra ketat masih diberlakukan.)**
Penculikan Aktivis.	• "Tak ada kebijakan ABRI untuk menghilangkan orang-orang tertentu." (29 April 1998). • "Terdapat indikasi keterlibatan ABRI dalam kasus penculikan dan orang hilang." (3 Juni 1998). • "ABRI berjanji untuk menuntaskannya." (21 Juni 1998).	•. Membentuk Dewan Kehormatan Perwira (3 Agustus 1998). • Membebaskan Prabowo, Muchdi, dan Chairawan dari semua tugas dan jabatan struktural di ABRI dan memensiunkan mereka (24 Agustus 1998). • Rabu, 23 Desember 1998, kesebelas prajurit Kopassus mulai diadili di Mahkamah Militer II-08 Jakarta hingga kini.	• KONTRAS dan Komnas HAM menilai penyelidikan yang dilakukan ABRI sangat lamban. (3 Juli 1998). • Komnas HAM menilai persidangan kasus penculikan mirip gelar operasi untuk meminimalisasi dampak dan kerugian ABRI, bukan untuk mencari kesalahan dan kebenaran (24 Desember 1998). **(Ada 14 orang korban penculikan masih belum ditemukan. Penjelasan tentang tim lain di luar Kopassus belum jelas.)**
Penembakan Mahasiswa Universitas Trisakti	• "Prajurit ABRI terlibat dalam peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti, penculikan, dan kerusuhan Mei lalu." (21 Agustus 1998). • "ABRI mengalami kesulitan teknis dalam usaha pengusutan kasus penembakan mahasiswa Trisakti 12 Mei 1998." (27 Oktober 1998).	• Pengadilan kasus "Tragedi Trisakti 14 Mei" mulai digelar di Mahkamah Militer II 08 Jakarta Timur. (6 Juni 1998).	• Dihadirkannya dua perwira Brimob di Mahmilub dinilai telah membuat arah untuk menemukan pelaku sebenarnya menjadi semakin tidak jelas (13 Juni 1998). **(Hingga kini siapa pelaku penembakan yang menewaskan mahasiswa Trisakti masih tetap gelap.)**
Tragedi Semanggi (13 November 1998)	• "Ada sejumlah prajurit yang bersikap terlalu defensif dan menyimpang dari prosedur, menembaki dan memukuli mahasiswa."	• Danpuspom ABRI Mayjen TNI Djasri Marin mengaku telah memenjarakan 163 prajurit yang terlibat insiden Semanggi (23 November 1998).	• Masyarakat menyatakan prihatin dan menyesalkan terjadinya insiden itu (13 November 1998). **(Tragedi Semanggi masih menyisakan banyak misteri sekitar provokator, sniper, serta penindakan dan proses hukum para aparat yang terlibat.)**
Daerah Operasi Militer Aceh	• "Mencabut status Aceh sebagai Daerah Operasi Militer dan memerintahkan semua satuan dari luar Aceh untuk kembali ke pangkalan masing-masing." (7 Agustus 1998).	• Penarikan pasukan ditangguhkan karena belakangan muncul serangkaian kerusuhan yang diduga berkaitan dengan Gerakan Aceh Merdeka.	• Seluruh masyarakat Aceh langsung bersujud syukur begitu mendengar ucapan Wiranto tentang pencabutan status DOM di Aceh. **(Meski status DOM telah dicabut, muncul usulan untuk menghidupkan kembali Kodam Iskandar Muda)**
Pembunuhan Berantai Berkedok Dukun Santet di Banyuwangi.	• Ada pihak-pihak tertentu yang mengeksploitasi kasus Banyuwangi untuk memperoleh keuntungan politis." (18 Oktober 1998). • "ABRI sedang berupaya menyelesaikan kasus ini." (29 Oktober 1998).	• Kasus ini mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi (10 November 1998).	• PBNU mendesak aparat keamanan segera menyelesaikan kasus dukun santet (27 Oktober 1998). **(Misteri tentang keterlibatan beberapa oknum aparat terkesan ditutup-tutupi ABRI).**
Kerusuhan di Jln Ketapang, Jakarta	• "ABRI telah menangani kasus Jalan Ketapang. Sudah ada yang ditangkap." (8 Februari 1999).	• Setelah ditangkap, para preman pemicu kerusuhan dikurung ke Mapolda dan Markas Brimob Kelapa dua. Tapi belakangan dilepas lagi.	• Wagub DKI bidang Kesra H. Djaelani yakin, kejadian Ketapang tidak berdiri sendiri (27 November 1998). **(Masih banyak tersisa misteri, mengapa para preman pemicu kerusuhan itu punya tanda pengenal yayasan paspampres, beratribut dan bersenjata sama, dan akhirnya dilepas lagi.)**
Kerusuhan Kupang	• "Aparat keamanan sampai saat ini sedang mengusut kerusuhan Kupang." (1 Desember 1998).	• Polda NTT mengidentifikasi adanya keterlibatan delapan oknum pejabat pemda sebagai provokator (7 Januari 1999).	• Wakajati NTT Soeroyo, S.H., menyangsikan laporan penyidik yang menyebutkan tersangka pelaku pembakaran dan perusakan, masing-masing hanya satu orang (30 Desember 1998). **(Penyelesaiannya masih mengambang. Dalang di balik kerusuhan pun belum terungkap.)**
Kerusuhan Ambon	• "Saya ingin masalah Ambon diselesaikan lebih cepat." (3 Maret 1999). • "Ada aparat keamanan yang bertindak tidak adil dalam menangani kasus kerusuhan di Ambon." (7 Maret 1999).	• Kodam VIII/Trikora membentuk satuan tugas khusus untuk meneliti. (28 Januari 1998) • ABRI mengirimkan tim khusus beranggotakan 19 orang perwira (7 Maret 1999).	• Aparat dinilai lamban menindak provokator. • Amien Rais mensinyalir kerusuhan ini merupakan ulah sejumlah oknum ABRI (24 Januari 1999). **(Makin terkuak adanya keterlibatan aparat sebagai provokator.)**
Penyelesaian Akhir Tanjungpriok	• Belum ada pernyataan	• Danpuspom, Mayjen TNI Syamsu Djalal mengatakan bahwa untuk mengusut kembali kasus Tanjungpriok ia menunggu perintah Menhankam/Pangab. (22 Juni 1998).	• Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah menjelaskan peristiwa berdarah 12 September 1984 itu secara terbuka. **(Pangab belum bersedia menjelaskan masalah Tanjungpriok meskipun telah dikirimi surat Komnas HAM hingga dua kali.)**

Sumber: Pusdatin FORUM

◄ *Tahun 1998 adalah tahun kekerasan politik dan militer yang menyertai transisi kekuasaan. Daftar kronikal pada kliping ini adalah rangkuman kekerasan besar, sistematis, masif, yang melibatkan institusi militer yang dipimpin Menhankam/ Pangab Jenderal TNI Wiranto.*

Forum
5 April 1999

BABAK IV

Pengakuan-Pengakuan: Tertusuk Padamu, Berdarah Padaku

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya, sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau menempatkan dia dalam keadaan sengsara"

| ***Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*** *Pasal ini dibacakan Oditur Militer Tinggi yang dipimpin Kolonel (CHK) M. Harom Widjaya pada 23 Desember 1998 untuk menjerat 11 terdakwa penculikan bernama "Tim Mawar". Terdakwa melanggar pasal 328 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 333 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan diancam dengan hukuman 12 tahun penjara. Disarikan dari berita Kompas, 24 Desember 1998.*

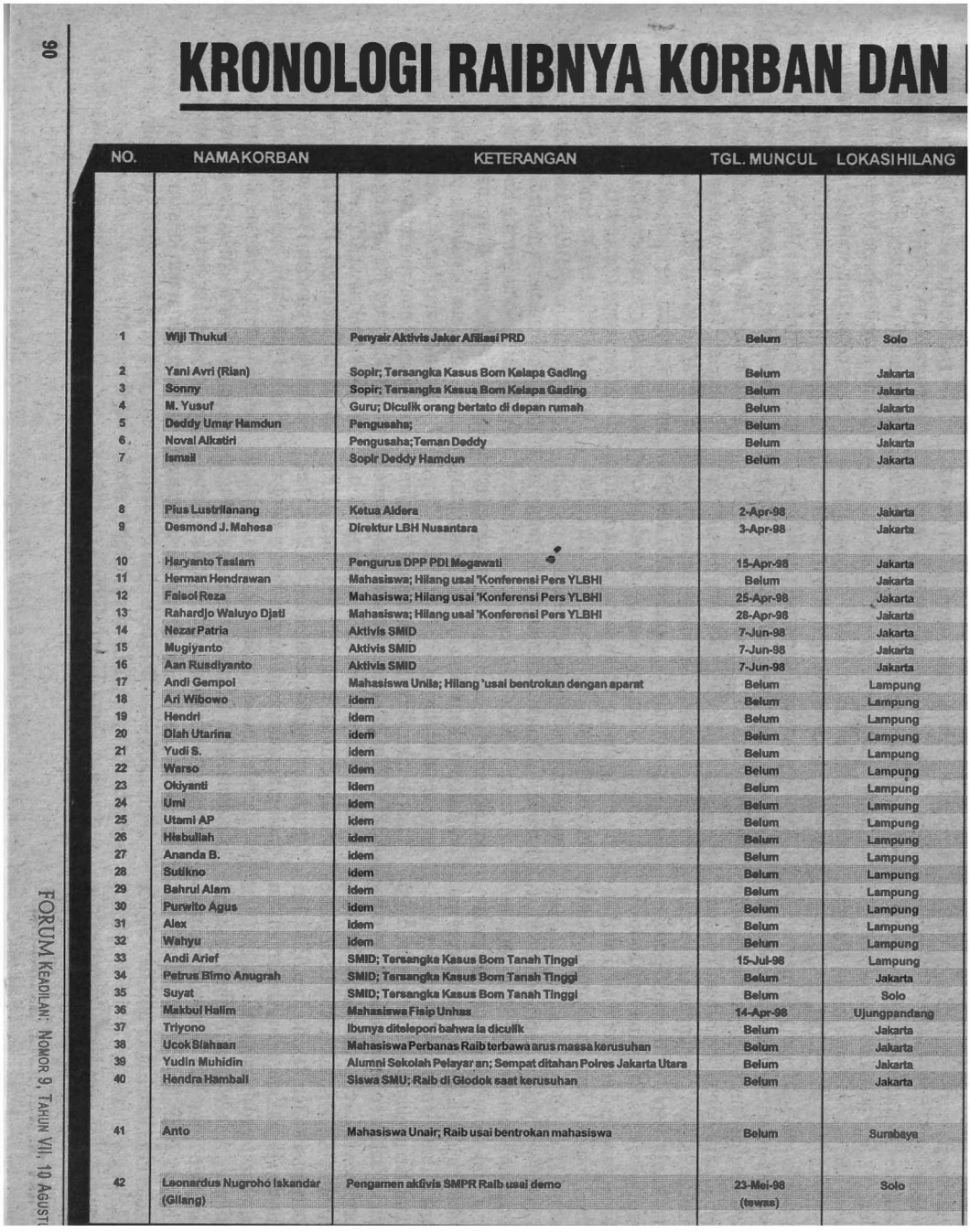

90

KRONOLOGI RAIBNYA KORBAN DAN

NO.	NAMA KORBAN	KETERANGAN	TGL. MUNCUL	LOKASI HILANG
1	Wiji Thukul	Penyair Aktivis Jaker Afiliasi PRD	Belum	Solo
2	Yani Avri (Rian)	Sopir; Tersangka Kasus Bom Kelapa Gading	Belum	Jakarta
3	Sonny	Sopir; Tersangka Kasus Bom Kelapa Gading	Belum	Jakarta
4	M. Yusuf	Guru; Diculik orang bertato di depan rumah	Belum	Jakarta
5	Deddy Umar Hamdun	Pengusaha;	Belum	Jakarta
6	Noval Alkatiri	Pengusaha;Teman Deddy	Belum	Jakarta
7	Ismail	Sopir Deddy Hamdun	Belum	Jakarta
8	Pius Lustrilanang	Ketua Aldera	2-Apr-98	Jakarta
9	Desmond J. Mahesa	Direktur LBH Nusantara	3-Apr-98	Jakarta
10	Haryanto Taslam	Pengurus DPP PDI Megawati	15-Apr-98	Jakarta
11	Herman Hendrawan	Mahasiswa; Hilang usai 'Konferensi Pers YLBHI	Belum	Jakarta
12	Faisol Reza	Mahasiswa; Hilang usai 'Konferensi Pers YLBHI	25-Apr-98	Jakarta
13	Rahardjo Waluyo Djati	Mahasiswa; Hilang usai 'Konferensi Pers YLBHI	28-Apr-98	Jakarta
14	Nezar Patria	Aktivis SMID	7-Jun-98	Jakarta
15	Mugiyanto	Aktivis SMID	7-Jun-98	Jakarta
16	Aan Rusdiyanto	Aktivis SMID	7-Jun-98	Jakarta
17	Andi Gempol	Mahasiswa Unila; Hilang 'usai bentrokan dengan aparat	Belum	Lampung
18	Ari Wibowo	idem	Belum	Lampung
19	Hendri	idem	Belum	Lampung
20	Diah Utarina	idem	Belum	Lampung
21	Yudi S.	idem	Belum	Lampung
22	Warso	idem	Belum	Lampung
23	Okiyanti	idem	Belum	Lampung
24	Umi	idem	Belum	Lampung
25	Utami AP	idem	Belum	Lampung
26	Hisbullah	idem	Belum	Lampung
27	Ananda B.	idem	Belum	Lampung
28	Sutikno	idem	Belum	Lampung
29	Bahrul Alam	idem	Belum	Lampung
30	Purwito Agus	idem	Belum	Lampung
31	Alex	idem	Belum	Lampung
32	Wahyu	idem	Belum	Lampung
33	Andi Arief	SMID; Tersangka Kasus Bom Tanah Tinggi	15-Jul-98	Lampung
34	Petrus Bimo Anugrah	SMID; Tersangka Kasus Bom Tanah Tinggi	Belum	Jakarta
35	Suyat	SMID; Tersangka Kasus Bom Tanah Tinggi	Belum	Solo
36	Makbul Halim	Mahasiswa Fisip Unhas	14-Apr-98	Ujungpandang
37	Triyono	Ibunya ditelepori bahwa ia diculik	Belum	Jakarta
38	Ucok Siahaan	Mahasiswa Perbanas Raib terbawa arus massa kerusuhan	Belum	Jakarta
39	Yudin Muhidin	Alumni Sekolah Pelayaran; Sempat ditahan Polres Jakarta Utara	Belum	Jakarta
40	Hendra Hambali	Siswa SMU; Raib di Glodok saat kerusuhan	Belum	Jakarta
41	Anto	Mahasiswa Unair; Raib usai bentrokan mahasiswa	Belum	Surabaya
42	Leonardus Nugroho Iskandar (Gilang)	Pengamen aktivis SMPR Raib usai demo	23-Mei-98 (tewas)	Solo

FORUM KEADILAN: NOMOR 9, TAHUN VII, 10 AGUST

▲ *Beberapa data tentang nama, waktu, kronologi penculikan berubah di kemudian waktu seiring dengan temuan susulan. Tabel ini lebih tepat untuk mengetahui siapa dan di posisi apa dalam hierarki ABRI saat kalender penculikan berlangsung.*

MASA JABATAN PETINGGI ABRI

TGL. HILANG	FEISAL TANJUNG	R. HARTONO	WIRANTO	PRABOWO S.	MUCHDY P.R.
27 Juli 1996	Panglima ABRI sejak 21 Mei 1993	KSAD sejak 11 Februari 1995	Panglima Kostrad sejak 1 Maret 1996	Danjen Kopassus sejak 17 Nov 1995	Pangdam VI Tanjungpura
26-Apr-97					
26-Apr-97					
7-Mei-97					
29-Mei-97					
29-Mei-97					
29-Mei-97					
		Menteri Penerangan sejak 6 Juni 1997	KSAD sejak 6 Juni 1997		
4-Feb-98					
4-Feb-98					
	Menhankam sejak 16 Februari 1998		Panglima ABRI sejak 16 Februari		
2-Mar-98					
12-Mar-98					
12-Mar-98					
12-Mar-98					
13-Mar-98					
13-Mar-98					
13-Mar-98					
19-Mar-98					
19-Mar-98					
19-Mar-98					
19-Mar-98					
19-Mar-98					
19-Mar-98					
19-Mar-98					
19-Mar-98					
19-Mar-98					
19-Mar-98					
19-Mar-98					
19-Mar-98					
19-Mar-98					
19-Mar-98					
19-Mar-98					
29-Mar-98					
31-Mar-98					
12-Apr-98					
9-Apr-98					
13-Mei-98					
14-Mei-98					
14-Mei-98					
15-Mei-98					
	Menko Polkam sejak 16 Maret 98		Menhankam/ Pangab sejak 16 Maret 1998		
19-Mei-98					
				Pangkostrad sejak 20 Maret 98 Dan Sesko ABRI sejak 22 Mei 98	Danjen Kopassus sejak 20 Maret 98 Wairjen ABRI sejak 22 Mei 98
21-Mei-98					

Forum
10 Agustus 1998

Wawancara Pius Lustrilanang:

"Tidak Ada Lagi Resiko yang Lebih dari Mati"

"Saya lulusan Akabri," begitulah pengakuan salah satu orang yang menculik Pius Lustrilanang. Orang itulah yang kemudian memberikan kenangan dengan menyetrum Pius, sebelum membebaskannya pada 3 April lalu. Tak pasti benar apa maksud sang penculik itu dengan menyebut "Akabri". Untuk menjatuhkan nama

PIUS LUSTRILANANG

Pius Lustrilanang adalah aktivis LSM yang dianggap berbahaya, terutama dalam menentang pencalonan Soeharto. Pius masuk incaran penculikan karena kapasitasnya sebagai sekretaris jenderal Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera).

Sejak duduk di bangku SMA De Britto, Yogyakarta, Pius sudah mengenal politik. Ketika kampanye pemilu 1987 berlangsung, ia mulai berkenalan dengan para aktivis UGM, yang lantas memunculkan pertanyaan pada dirinya sendiri, mengapa ada sekelompok orang yang memilih Golput?

Pertanyaan inilah yang sepertinya mengubah jalan hidupnya. Setamat SMA pada 1987, Pius memilih Jurusan Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, dan lulus pada 1995. Pius tipe pemuda yang gelisah melihat kondisi rakyat.

Tempo Interaktif
Agustus 1998

Selama kuliah, ia aktif memperjuangkan tegaknya demokrasi, termasuk membela hak-hak rakyat kecil yang tertindas.

Menjelang Sidang Umum MPR, Februari 1998, bersama dengan seniman Ratna Sarumpaet, dan beberapa aktivis mahasiswa lainnya di Jakarta, Pius yang mengaku kagum dengan Soekarno, Hatta dan Syahrir ini, mendirikan Solidaritas Indonesia Untuk Amien Rais dan Megawati yang disingkat Siaga. Organisasi ini lahir untuk mendu-

kung Amien dan Mega sebagai calon presiden RI perode 1998--2003. Di Siaga, Pius didapuk sebagai Sekjen.

Bagaimana cara menculik Pius? Itulah yang dibahas Tim Mawar. Satu informasi intelijen sudah di tangan. Pius akan RS Cipto Mangunkusumo, Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat. Ia mau membesuk orang tua temannya yang sakit. Mayor Bambang membentuk unit khusus. Untung sebagai ketua. Dengan sedan warna biru, Untung memimpin langsung operasi, dibantu Kapten Mustari dan tiga bintara.

Benar! Sekitar pukul 14.30 WIB, tanggal 4 Februari 1998, Pius masuk kawasan RSCM. Ia dibuntuti penculik. Sesampai di pintu RSCM, Kapten Mustari langsung menculiknya. Tubuh Pius segera dimasukkan ke dalam mobil. Kepalanya ditutup kain hitam, tangan diborgol ke belakang. Sebuah pistol diacungkan. Lantas, setelah menempuh perjalanan yang tak terlalu lama, Pius pun dijeblos-

Manusia (Komnas
: mereka telah dihilang-
leh kelom-
asi. "Telah
li kalangan
idak tertu-
erlibatnya
amanan,"
ernyataan
numkan 30
tentu tak
a-ada. Se-
yang ber-
ada Presi-
ah meman-
us ini. Dan,
ya, komisi
at durian
rilanang,
an penghi-
telah dile-
saksian di
nas HAM,
urn.) Sam-
dos Reis Amaral, dan
eka—dan disaksikan
Cuma, setiap hari, di ruangan tempat ia di-
sekap, radio disetel keras-keras. Di sana, ia
juga bertemu dengan Direktur LBH Nusan-
tara Desmon J. Mahesa, tokoh PDI Haryanto
Taslam, mahasiswa Unair Herman Hendra-
Menurut Hendardi,
masih merasa terancam
nas HAM
member
Tapi, itu
an mora
lembag
mempu
menjam
"Pius ti
politik. I
cari kete
bisa dip
kata Her
Namun
reksi S
Komnas
sempat
Pius bah
lindung
dari Pol
dak mau
gota Ko
kepada
salkan k
tetap pergi ke luar nege
Kesaksian Pius tadi
bohkan. Namun, sebe

Menurut Komnas HAM, penghilangan paksa yang dialami sejumlah aktivis dilakukan kelompok terorganisasi. Kini, pemerintah tengah berencana membentuk tim pencari fakta. Benarkah aparat ABRI pelakunya?

Forum Keadilan
18 Mei 1998

Membentuk Tim,

▶

Kapan mata Anda dibuka?
Kira-kira jam setengah enam sore. Karena setibanya di tempat itu saya dibawa ke suatu ruangan, lantas diinterogasi selama satu jam. Setelah itu dibawa ke sel dalam keadaan mata masih tertutup, dan ketika berada di dalam sel itulah mata saya baru dibuka.

Pius Lustrilanang: Mereka Berpikir dalam Kerangka Perang

kan ke sel berukuran kira-kira 2 meter x 2,5 meter.

Dengan masih tangan terborgol dan mata tertutup, para penculik itu berkata, "Tidak ada HAM dan tidak ada hukum di sini, yang harus kamu lakukan adalah menjawab setiap pertanyaan. Dan ingat, ada orang yang mati setelah keluar dari tempat ini dan ada juga yang hidup. Jadi jika kamu ingin hidup, jawablah yang benar."

Selama tiga hari tiga malam, lulusan Universitas Parahyangan ini menjalani kehidupan memilukan. Ia diinterogasi sembari disiksa, antara lain disetrum dan direndam dalam bak mandi yang terbuat dari porselen putih, yang lebarnya seukuran bahu orang dewasa dengan tinggi sekitar satu meter.

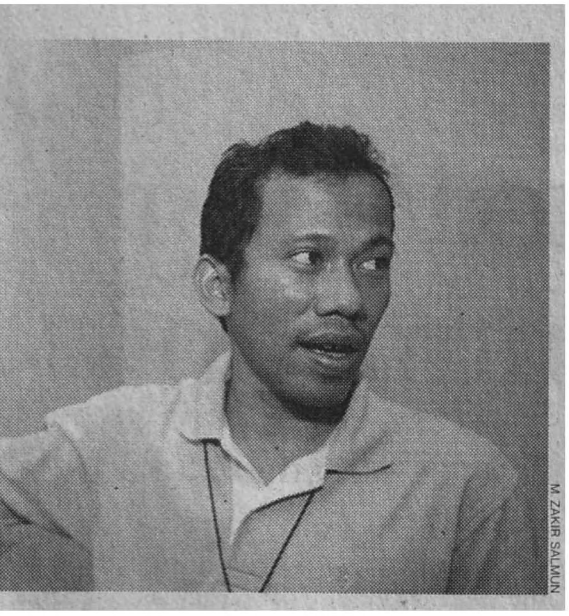
M. ZAKIR SALMUN

Ini Berat
Bagi Wiranto

Panji Masyarakat
29 Juli 1998

Dalam bak itu, kepala Pius diinjak agar seluruh tubuhnya terbenam dalam bak. Kran air terbuka sehingga air yang semula sebatas bahu itu menjadi sebatas hidungnya. Itu berlangsung berulang kali. Jika sudah tidak kuat, Pius mencoba meronta, setelah itu para interogator menarik kepalanya sejenak, lalu mencelupkan lagi kepala itu. Pius pun sempat berpikir, barangkali hayatnya tak berlangsung lama lagi. Pada hari kedua dan ketiga, mereka masih terus melakukan interogasi kepada Pius, tetapi siksaan fisik tidaklah seberat hari pertama.

Tatkala fase penyiksaan hebat itu mereda, Pius pun mulai menebak-nebak, di mana ia disekap. Seingatnya, setiap pagi hingga pukul sepuluh dan sore hari, Pius selalu mendengar suara pesawat yang terbang rendah. Lalu, tatkala ada orang yang membuka pintu, ia sempat melihat ada dua bangunan lain di luar tempatnya ditahan. Bentuknya bukan seperti rumah tinggal, lebih mirip seperti kantor, suasananya mirip di kantor kodim. Dengan tembok yang dicat dengan warna krem, di bangunan itu juga terdapat beranda yang berlantai coklat.

Pius Lustrilanang:
"Nasionalisme Saya Tidak Sempit"

Panji Masyarakat
29 Juli 1998

Pius Lustrilanang:
"Nasionalisme Saya Tidak Sempit"

TAK ADA yang menduga, seusai memberikan kesaksian kepada Komnas HAM, Jumat, 24 April lalu, Pius Lustrilanang langsung berangkat ke Belanda. Tak aneh bila setelah kepergiannya banyak yang menuduh lajang kurus berambut cepak itu pengecut dan tak nasionalis. Namun, Pius tentu mempunyai alasan sendiri, sebagaimana dijelaskannya kepada Munawar Chalil dari FORUM. Berikut petikan wawancara khusus melalui telepon dengan Pius yang ada di Den Haag, Belanda, Jumat, 1 Mei lalu.

Kepergian Anda ke Belanda itu memang sudah direncanakan?

Seminggu setelah dibebaskan, saya sudah memutuskan untuk bicara. Kemudian mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan jika saya harus pergi ke luar negeri. Belanda cuma salah satu negara tujuan, selain Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara ASEAN. Saya sudah mengurus bermacam visa. Saya juga mempunyai beberapa tiket yang *open* ke beberapa tujuan. Tapi, pada saat terakhir di Komnas HAM, saya memutuskan ke Belanda.

Benarkah kepergian Anda diatur kedutaan besar AS?

Bukan. Beberapa kawan dekat saya yang mengurus dan menyumbang biaya. Tapi, memang ada staf kedutaan AS yang senantiasa siap membantu dan menjamin bahwa tidak ada usaha-usaha yang dapat membahayakan diri saya selama berjam-jam menunggu kepergian saya ke luar negeri.

Komnas HAM tahu rencana itu?

Ya. Tadinya, demi keamanan, saya berencana berada beberapa jam di kedutaan AS, setelah memberikan keterangan kepada Komnas. Tetapi, Komnas HAM keberatan. Sebab, menurut mereka, itu akan memberikan konsekuensi diplomatik serius antara AS dan Indonesia. Meski tidak jadi, Komnas HAM sempat menyarankan agar saya ke bandara dengan mobil Palang Merah Internasional. Akhirnya, Komnas HAM sendiri, yakni Pak Bambang Suharto dan A.R. Baramuli, yang mengantar saya sampai ke pintu pesawat.

Siapa yang menampung Anda di Belanda?

Kawan-kawan Indonesia yang berada di Belanda. Secara bergantian, saya menginap dari satu apartemen ke apartemen lain. Mereka sudah siap.

Apa, sih, yang akan Anda lakukan?

Semuanya teman-teman yang mengatur. Dan saya lihat ada usaha yang dilakukan oleh LSM di sini maupun pejabat pemerintah untuk mengundang saya memberikan kesaksian. Saya juga akan kampanye ke Jerman, Belgia, Inggris, Irlandia, dan kemudian ke AS. Dari AS mungkin mampir ke Jepang dan balik lagi ke Belanda. Di AS saya akan berusaha bertemu anggota Kongres secara resmi.

12 FORUM KEADILAN: NOMOR 3, TAHUN VII, 18 MEI 1998

Setiap pukul tiga sore selalu ada bunyi terompet yang menandai apel sore. Terompet apel ini menyakinkan Pius bahwa penculiknya bukanlah mafia. Mana ada kelompok mafia rutin apel dengan membunyikan terompet. Belum lagi, para penculik ini dibekali senjata. Dalam konteks Indonesia, hanya militer yang memonopoli senjata. Pius pernah melihat pistol FN 46 yang dibawa penodongnya, satu pistol revolver kecil, dan satu buah magasin senjata di atas meja.

Pius sama sekali tidak mengenal wajah para penculik. Mereka selalu memakai penutup wajah ala ninja. Badan mereka dibalut jas hujan besar. Dalam kalkulasi Pius, ada 15 orang yang berbeda yang membawakannya makan selama dua bulan dalam penyekapan.

Lauk yang kerap dikonsumsi Pius adalah lele, kembung, ikan mas, nasi putih, dan sayur. Dugaan Pius, kelompok penculik ini punya juru masak sendiri karena semua yang dia makan selalu dalam keadaan hangat. Apa yang ia makan sama dengan yang dimakan para penculik itu.

BUAH KARYA SOEHARTO

SEJAK awal sudah jelas, semua saksi bilang ada penyiksaan. Dicelupkan di bak air, disundut rokok, pemukulan, setrum, berbaring di balok es. Saya bersedia menjadi saksi: saya ungkap ini agar ada keadilan bagi mereka yang diculik dan keluarganya. Sidang ini untuk mencari kejelasan bagi semuanya. Dakwaan oditur kurang lengkap. Padahal semuanya saya sudah beberkan secara rinci. Saya pikir semua saksi juga begitu. Tak mungkin luput. Dalam sidang saya akan bicara ada penyiksaan. Pengadilan dimulai ketika ada selubung tanda tanya besar: Mengapa sidang digelar ketika Prabowo ada di Yordania? Dan sudah jelas status warga negaranya. Artinya antara mereka yang menjadi pelaksana teknis terputus hubungannya dengan mereka yang memberi order pertama. Karena Prabowo ada di tengah semua. Kalau Prabowo dihilangkan, ditaruh di Yordan, berarti ada upaya atau kesengajaan untuk mengislorir kasus ini menjadi semata-semata kasus kriminal. Tapi semua orang tahu, saya diculik karena aktivitas politik saya. Saya yakin. Kopassus tidak mungkin bertindak diluar komando. Yang berhak memberi komando adalah Pangab. Dan Soeharto punya hak prerogratif untuk menunjuk Danjen Kopassus dan Pangkostrad. Artinya dia juga punya jalur komando langsung. Saya yakin sejak awal, Soeharto ada di belakang semua ini. Dia yang memberi order. Sidang ini dimulai ketika Prabowo tidak ada di sini. Sudah empat bulan dia di sana—Yordania. Waktu saya ke luar negeri, mereka bilang saya tidak ksatria. Sekarang Prabowo bagaimana? Korban yang masih hilang sampai sekarang bukan lagi korban penculikan, tapi korban pembunuhan. Bagaimana cara mengadili? Harus berjenjang. Jangan seenaknya orang yang banyak tahu soal penculikan dibikarkan saja ke Yordania. Tanpa Prabowo motiv politik di balik kasus ini tak akan terungkap. Saya ditangkap karena aktivitas politik saya. Apa yang saya lakukan: mengggunggat pencalonan kembali Soeharto. Siapa yang paling merasa diganggu kepentingannya, ya Soeharto, bukan Prabowo. ■

DAHLAN/JUNIANTO SETYADI

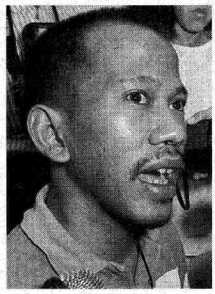

Pius Lustrilanang
(korban penculikan)

M MAWAR

Bangkit
28 Desember 1998

Soal makanan ini juga Pius mulai sadar bahwa ia disekap dalam teritori Cijantung karena suatu hari ia mendapatkan nasi bungkus yang ketika ia perhatikan bungkusannya tertulis rumah makan padang di Jalan Raya Cijantung. Dari situ Pius berpikir, membeli nasi bungkus pasti mencari tempat yang terdekat dan bukannya mencari warung yang jauhnya puluhan kilometer.

Pius dibebaskan pada 3 April 1998. Saat itu, lebih kurang pukul 11.30. Setelah selesai diinterogasi, ada seorang perwira yang mengaku padanya bahwa ia adalah lulusan Akabri. Ia bilang bahwa dulu ketika masih di Akabri, ia pernah dipukuli kakak kelasnya sebelum lulus sebagai kenang-kenangan. Pukulan itu tanda rasa sayang, katanya.

Lalu, si Akabri itu bilang pada Pius ia juga ingin memberinya sesuatu sebagai kenang-kenangan yang tak terlupakan, yaitu setruman sekali lagi sebelum dibebaskan. Dengan mata tertutup, tubuhnya dicabik aliran listrik.

Setelah mendapatkan "kenang-kenangan tanda rasa sayang" itu, Pius diberi baju, celana, dan sepatu baru, lan-

Pius akan Gugat Prabowo

Semarang, Bernas

Salah satu aktivis korban penculikan, Pius Lustrilanang akan menggugat mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto, sehubungan dengan keterlibatannya dalam penculikan para aktivis.

"Kami segera menggodok konsep-konsep gugatan tersebut. Kami juga berusaha agar aktivis lain turut mengajukan gugatan sekaligus bersedia jadi saksi," ujar Trimedya Panjaitan SH, kuasa hukum Pius, di Universitas Soegijapranoto Semarang, Sabtu (29/8).

Trimedya yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pengacara Indonesia menyatakan, para korban penculikan seperti Andi Arief, Desmon J Mahendra dan Haryanto Taslam atau membantunya memberi keterangan secara jujur atas perisiwa yang pernah dialaminya waktu diculik.

Di samping menggugat Prabowo, Pius dan kawan-kawan mungkin juga menggugat Soeharto, selaku Panglima Tertinggi ABRI, ketika penculikan-penculikan itu terjadi.

Menurut Trimedya, gugatan itu akan dilakukan lewat aduan pidana biasa, sehingga nantinya dalam persidangan tidak akan terjadi seperti persidangan peristiwa Trisakti, dan persidangan tersebut berjalan dengan jujur. Trimedya memandang, jika diajukan dalam peradilan militer, independensi peradilan tidak terjamin.

"Tidak mungkin ABRI akan mengadili dirinya sendiri. Apalagi kemungkinan kami juga akan menggugat Panglima Tinginya," ujar Trimedya.

Selain mengajukan gugatan pidana, Trimedya juga menyatakan kemungkinan Pius juga akan mengajukan gugatan perdata karena dengan tindakan Probowo yang telah mengaku menculiknya, Pius mengalami kerugian secara materiil.

Sedang dasar gugatan kepada Pangti, Trimedya menyatakan tindakan penculikan tersebut dilakukan secara sistematis berdasar suatu perencanaan, pola, dan tujuan tertentu. Secara hierarkis ABRI, Pangti pasti tahu bahkan mungkin bisa juga menjadi otak operasi ini.

Guru besar Fak Hukum Undip Semarang, Prof Dr Satjipto Rahardjo SH menyatakan gugatan itu bisa saja dilakukan. Namun harus melapor dulu kepada pihak kepolisian.

"Di sini sangat tergantung pada polisi. Jika polisi memang melihat ada delik pidana yang bisa ditindalanjuti sebagai dasar gugatan maka gugatan itu dapat diteruskan," ujarnya.

Selain itu, untuk memperkuat penyidikan polisi, Pius harus mampu memperlihatkan bukti-bukti yang kuat dan mendukung gugatan tersebut. "Pengakuan Prabowo itu bisa juga dijadikan salah satu bukti," ujarnya.

Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Hendardi menyatakan gugatan itu bisa saja dilakukan. Namun yang terpenting saat ini, masyarakat harus mendesak agar Prabowo di bawa ke Mahkamah Militer.

(jj)

Prabowo Subianto

Pius Lustrilanang

dkm

Bernas
30 Agustus 1998

tas disuruh makan yang kenyang dan menunggu hingga pukul 15.00. Lalu, Pius diantar enam orang ke Bandara Soekarno Hatta di Cengkareng.

Tiba di bandara, sebelum diturunkan dari mobil, Pius disuruh menundukkan kepala. Lalu, penutup mata dibuka, Pius pun diberi tiket pesawat dan mereka minta untuk langsung berjalan memasuki bandara tanpa menengok ke arah mobil. Pius berjalan, tetapi matanya masih bisa menangkap bahwa mobil yang mengantarkannya ke bandara adalah Kijang berwarna abu-abu.

Pius berangkat dari Terminal B, tetapi oleh para penculiknya diturunkan di Terminal C. Pius pun lantas bergegas masuk bandara dan memasuki pesawat menuju Palembang.

Di telinga Pius, masih terngiang ancaman terakhir para penculik agar tidak bercerita kepada siapa pun mengenai apa yang dialaminya. Kalau dilanggar, ia akan diburu dan dibunuh.

(*) Disarikan dari Tempo Interaktif *("Wawancara Pius Lustrilanang: Tidak Ada Lagi Resiko yang Lebih dari Mati", 2 Mei 1998),* Forum Keadilan *("Membentuk Tim, Mencari Penculik", "Pius Lustrilanang: Nasionalisme Saya Tidak Sempit", 18 Mei 1998),* Bangkit *("Buah Karya Soeharto", 28 Desember 1998),* Sinar *("Yang Salah Soeharto", 28 Juli 1998),* Panji Masyarakat *("Ini Berat bagi Wiranto", 29 Juli 1998),* Bernas *("Pius Lustrilanang: Prabowo Harus Diadili", 24 Desember 1998; "Pius akan Gugat Prabowo", 30 Agustus 1998).*

AKSI DI SIANG BOLONG

❑ **TANGGAL** 3 Februari, pukul 09.30. Tiga anggota tim, yakni Kapten Julius, Kapten Dadang dan Kapten Jaka meluncur dari Cijatung dengan menggunakan Kijang warna biru. Informasi awal, Desmond sedang di kantornya di Cililitan Kecil, Jakarta Timur.

Tiba di sasaran pukul 10.30 atau satu jam dari Cijatung. Jaka turun dari mobil, mendekati sasaran. Julius dan Dadang menunggu di mobil yang diparkir di ujung jalan, memantau dari kejauhan. Setengah jam berlalu, tiba-tiba Desmond J Mahesa ke luar kantor. Para prajurit tak mau bertindak gegabah. Begitu Desmond naik mikrolet ke arah Kampung Melayu, penculik membututinya.

Sesampai di Jl Salemba Raya, tepatnya di depan Kantor Departemen Pertanian, Desmond turun. Tanpa sadar ia terus diikuti Dadang. Jaka, mulai merapatkan mobilnya ke arah Desmond. Dengan cepat, Dadang mendorong Desmond ke arah mobil yang sudah dibuka pintunya. Julius menarik dari dalam dengan cepat. Sejurus kemudian, Desmon tak bisa bergerak karena tangannya diborgol. Matanya ditutup kain hitam.

Operasi sukses. Tak ada kepanikan, meski penculik beraksi di siang bolong, di tepi jalan raya yang ramai. Mereka lalu menyusuri rute Salembe, Kramat, Cikini, Diponegoro, Tol Jagorawi, Cijantung. Setiba di Cijantung, Julius dan Dadang menggiring Desmond ke ruang *briefing* dan melapor kepada Mayor Bambang. Nugroho dan Julius bertugas menginterogasi Desmond. Materi pertanyaannya, berkisar soal kegiatan politik yang dilakukan Desmond: dituduh menggerakan massa demonstrasi.

Interogasi, penyiksaan, teror berjalan selama sebulan. Merasa isi kepala Desmond sudah habis dan tak ada yang tersisa, penculik mengantar Desmond ke Bandara Soekarno-Hatta, 2 April 1998, pukul 06.00.

Bangkit
28 Desember 1998

DESMOND J. MAHESA

Tanggal 3 Februari 1998, pukul 09.30 WIB. Tiga anggota Tim Mawar, yakni Kapten julius, Kapten Dadang, dan Kapten Jaka meluncur dari Cijantung dengan menggunakan Kijang warna biru. Informasi awal, Desmond sedang di kantornya di Cililitan Kecil, Jakarta Timur.

Tim tiba di titik sasaran pukul 10.30 atau satu jam dari Cijantung. Jaka turun dari mobil, mendekati sasaran. Julius dan Dadang menunggu di mobil yang diparkir di ujung jalan, memantau dari kejauhan. Setengah jam berlalu, tiba-tiba Desmond J. Mahesa ke luar kantor. Para penculik tak mau bertindak gegabah. Begitu Desmond naik

GATOT SRI WIDODO

DESMOND J. MAHESA DI YLBHI. *Tergantung jaminan Pangab.*

Forum
1 Juni 1998

mikrolet ke arah Kampung Melayu, penculik langsung membuntutinya.

Sesampai di Jalan Salemba Raya, tepatnya di depan Kantor Departemen Pertanian, Desmond turun. Tanpa sadar, ia terus diikuti Dadang. Jaka mulai merapatkan mobilnya ke arah Desmond. Dengan cepat, Dadang mendorong Desmond ke mobil jenis Vitara warna abu-abu yang sudah dibuka pintunya di bawah todongan pistol FN. Julius menarik dari dalam dengan cepat. Sejurus kemudian, Desmond tak bisa bergerak karena tangannya diborgol. Matanya ditutup tas hitam. Tubuhnya dibaringkan di lantai mobil. Saat itu, kacamata minus Desmond terjatuh sehingga ia sulit mengenali wajah penculik.

Operasi sukses. Tak ada kepanikan, meski penculik beraksi di siang bolong, di tepi jalan raya yang ramai. Mereka lalu menyusuri rute Salemba, Kramat, Cikini, Diponegoro, Tol Jagorawi, dan berakhir di Cijantung. Setiba di Cijantung, Julius dan Dadang menggiring Desmond ke ruang briefing dan melapor kepada Mayor

Pengakuan Desmond J. Mahesa

"Konsekuensinya Saya akan Dihabisi"

Jakarta (Bali Post) -

Sekalipun jaminan keamanannya belum jelas, Desmond J. Mahesa tetap mengungkapkan kisahnya ketika menjadi orang hilang. Dengan pengakuan ini, berarti bertambah satu lagi pengakuan orang yang pernah hilang, setelah Pius Lustrilanang dan Harjanto Taslam.

"Saya mengalami peristiwa yang serupa dengan yang dialami Pius dan Taslam, yang rupanya dilakukan sebuah organisasi yang rapi," kata Direkur LBHN cabang Jakarta Desmond J. Mahesa, di LBH Jakarta, Selasa (12/5), kemarin.

Didampingi penasihat hukum dari DPP Ikadin, Kontras, PBHI serta anggota Komnas HAM Albert Hasibuan, selama satu jam Desmond yang menghilang sejak 3 Februari hingga 3 April 1998 memberikan kesaksian dan pengakuannya di depan para wartawan dalam dan luar negeri.

Menurut pengakuan Desmond, dirinya diculik 3 Februari 1998 di depan gedung GKMI Jalan Salemba oleh tiga orang yang diketahui salah seorangnya berambut keriting. "Mereka menyuruh masuk ke mobil sambil menodongkan senjata," katanya.

Serupa dengan yang dialami Pius, cerita Desmond, kepalanya ditutupi tas hitam dan dibaringkan di dalam mobil yang diketahui jenis Vitara dengan warna abu-abu.

Selama perjalanan, dengan kepala ditutup, Desmond dibawa menuju ke sebuah tempat yang tidak dapat ia identifikasikan letaknya. "Namun, saya sempat mendengar mesin pesawat di sekitar lokasi," ujarnya.

Di lokasi penyekapan, dengan muka ditutupi, para penculik, selama tiga jam melakukan interogasi seputar keterlibatan dan aktivitasnya dengan kekerasan. "Dengan tangan dan kaki diborgol, saya disetrom dan dipukul," kata Desmond.

Selama di ruang penyekapan, ia mengaku ditempatkan di ruang sel No. 6 dan sempat bertemu Pius Lustrilanang, Harjanto Taslam, Feisal Riza serta beberapa orang yang dinyatakan hilang.

Perlakuan penyiksaan dan intimidasi yang dialaminya, menurut Desmond, dilakukan hanya hari pertama. Selebihnya, selama satu setengah bulan, ia dipindah-pindahkan. "Dari satu sel ke sel lain," ujar Desmond. Hal itu terjadi, tambahnya karena tiap hari, secara silih berganti ada orang baru yang masuk dan diculik. "Termasuk kedatangan Pius," katanya.

Sehari sebelum pembebasannya, Desmond ditawari skenario alasan kepergiannya oleh para penculik. Menurutnya, para penculik menyuruh mengakui bahwa kepergiannya selama ini, untuk melakukan penelitian di Irian Jaya. "Selain itu, saya disuruh menghubungi para penculik lewat *pager* tiap saat," paparnya.

Hal. 11
Waswas terhadap Ancaman

Bali Post
13 Mei 1998

Bambang. Nugroho dan Julius bertugas menginterogasi Desmond yang diborgol di kursi. Materi pertanyaannya berkisar soal kegiatan politik yang dilakukan Desmond: tuduhan menggerakkan demonstrasi.

Di sela pemeriksaan, Desmond sempat disuruh menyelam dalam bak air. Interogasi, penyiksaan, teror berjalan selama sebulan. Dalam bilik penyekapan itu, Desmond dipaksa mendengarkan siaran radio yang disetel keras-keras.

Merasa isi kepala Desmond sudah habis dan tak ada yang tersisa, penculik membawanya ke Bandara Soekarno-Hatta, 2 April 1998, pukul 06.00 WIB. Ia "dipulangkan" ke kampung halamannya di Kalimantan. Penculik mengancam bila ada yang bertanya diam saja atau jelaskan alibi bahwa kepergiannya diam-diam selama ini untuk melakukan penelitian di Irian Jaya.

(*) Disarikan dari Bangkit *("Aksi di Siang Bolong", 28 Desember 1998),* Forum Keadilan *("Perlu Komisi, bukan Tim Kecil", 1 Juni 1998),* Bali Post *("Pengakuan Desmond J. Mahesa: Konsekuensinya Saya akan Dihabisi", 13 Mei 1998)*

Waswas terhadap Ancaman

Dari Hal. 1

Para penculiknya juga mengancam akan melenyapkannya apabila ia menceritakan pengalamannya. "Konsekuensinya saya akan dihabisi," ujarnya.

Untuk itu, kata Desmond, tidak ada alasan satu pun mengapa ia menceritakan semua pengalamannya tersebut, kecuali hanya untuk mengungkapkan kebenaran. "Saya ingin kasus ini dituntaskan," ungkapnya.

Rasa waswas terhadap ancaman para penculik selama ini, tidak hanya ditujukan kepadanya akan tetapi juga kepada pihak keluarga dan saudara serta teman-temannya di Banjarmasin.

Terhadap jaminan keselamatan yang diberikan kepadanya, Desmond hanya berpegang kepada pernyataan Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto bahwa ABRI akan melindungi orang hilang yang telah kembali. "Yang pertama tentu saya yakin ajal ada di tangan Tuhan," ujarnya.

Desmond menolak jika ada anggapan bahwa ia akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Pius, yaitu pergi ke luar negeri. "Saya ingin tuntaskan hal ini di Indonesia," katanya.

Anggota Komnas HAM Albert Hasibuan mengatakan, pengalaman Desmond serupa dengan yang dialami Pius bahwa telah terjadi pelanggaran HAM.

Menyinggung tentang perlunya dibentuk Tim Penyidik Independen dalam kasus orang hilang, Albert menolak dengan alasan, pihak Komnas HAM akan menunggu hasil dari tim yang dibentuk ABRI.

Mengomentari kesaksian Desmond, koordinator Kontras Munir mengatakan, dengan segala risiko yang dihadapi Desmond, pihak Kontras akan mendukung kepentingannya selama di Jakarta. "Baik kepentingan hukum selama jaminan ABRI belum Kongkret maupun kepentingan fisik," ujar Munir.

Menurut rencana, Kontras juga akan mendampingi Desmond ke Puspom ABRI untuk memberikan keterangan pengalamannya tersebut. "Juga akan minta jaminan keselamatan bagi yang lainnya," jelas Munir.

Jaminan belum Jelas

Munir S.H. menyatakan, sampai saat ini jaminan kongkret dari aparat keamanan dalam menghadapi kasus orang hilang masih belum jelas.

Dikatakan, aparat keamanan khususnya Danpuspom ABRI sudah mendatangi Feisal Reza dan Waluyojati yang sudah kembali setelah beberapa waktu hilang karena diculik oleh orang yang tak diketahui identitasnya, akan tetapi keduanya belum bersedia memberikan keterangan sebelum ada jaminan yang kongkret.

Menurutnya, secara kongkret jaminan yang diberikan oleh aparat tidak ada, selain jaminan yang telah disampaikan oleh Menhankam/Pangab Wiranto. "Karena itu jaminan tersebut harus dibuktikan," ujarnya.

Karena jaminan keselamatan orang hilang ini masih belum kongkret, lanjutnya, pihaknya akan membentuk tim kecil yang akan berusaha memberikan jaminan keselamatan bagi orang yang akan memberikan kesaksian selama dinyatakan menghilang. Diakui Munir, ia memang masih belum mengetahui sama sekali cara kerja timnya.

Sebetulnya, lanjut Munir, pihaknya masih menunggu beberapa pengaduan dari tim kecil. Namun, yang perlu dicatat, kata Munir bahwa kesaksian Desmond J. Mahesa merupakan orang pertama korban penculikan yang akan memberikan keterangan resmi di depan suatu proses penyidikan.

Hal ini, menurutnya, merupakan suatu hal yang penting. Lagi pula Desmond adalah tokoh kunci dari upaya kasus penculikan di samping Andi Arief, tuturnya. "Jadi, saya kira keterangan besok yang akan disampaikan ke Puspom ABRI akan mengikat Puspom untuk melakukan pelacakan lebih lanjut ke tempat pelaku penculikan, indikasi dan motif ke arah mana penculikan tersebut," tambah Munir.

Menurutnya, kehadiran Desmond ke Dispuspom ABRI bukan karena diundang oleh Puspom, akan tetapi merupakan salah satu upaya untuk mencari tahu pemecahan dalam menangani kasus orang hilang, tambahnya. Hal ini, menurut Munir, merupakan bagian dari proses untuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab atas penculikan-penculikan tersebut.

Tentang rencana kesaksian Andi Arief, Munir berpendapat, sampai hari ini Kontras masih meminta pada Dispenpom ABRI untuk memeriksa Andi Arief, akan tetapi masih belum dilakukan. Sampai saat ini Andi Arief juga masih ada di Polda dan pemeriksaannya dihentikan menunggu sampai kasus pemeriksaan selesai.

Sebab, katanya, menurut kesepakatan segitiga antara Kapolda, Andi Arief, dan Kontras pemeriksaan dihentikan menunggu sampai ada kejelasan terhadap kasus penculikan tersebut. "Dan sampai hari ini Andi Arief memang bersikap tidak mau diperiksa," ujarnya lagi.

Ditanyakan apa yang sudah lepas dari penculikan juga akan memberikan kesaksia? "Saya nggak tahu, kita memang mengupayakan agar mereka memberikan kesaksian. Akan tetapi karena tingkat tekanan yang diterima orang berbeda-beda, keberanian mengungkapkan peristiwa yang dialaminya juga berbeda-beda," ungkapnya.

(ryt/jar)

Telepon Penting

Permintaan Interlokal	: 100
Permintaan Internasional	: 101
Info SLI	: 102
Informasi waktu	: 103
Booking Internasional	: 104
Interlokal Tanpa Tunda	: 105
Penerangan Interlokal	: 106
Booking Intern untuk Wartel	: 107
Penerangan Lokal	: 108
Informasi Tagihan Telepon	: 109
Polisi	: 110
Polisi Militer	: 125
Pengaduan Anggota ABRI	: 125
Posko Kewaspadaan Nasional	: 122
Pemadam kebakaran	: 113
SAR	: 115
Gangguan Tlp /Tlp.Umum	: 117
Ambulance	: 118
Info Pelayanan Pos	: 161
Telemarketing Telkom	: 162
Info Pelayanan KB	: 163
Info Telegram/Phonogram	: 165
Info Pariwisata	: 166
Telkom Calling Card (TCC)	: 168
Informasi Pendidikan	: 175
Gangguan PLN	: 234806
STB N	: 262872
Starko	: 13022
Easy Call	: 13033
Starpage	: 13099
Biz: Call	: 234567

TRANSPORTASI

Praja Taxi	: 289090
Bali Taxi	: 701111
Ngurah Rai Taxi	: 724724
Pan Wirthi Taxi	: 723366

INFORMASI PENERBANGAN

Bandara Ngurah Rai	: 751011
Reservasi Garuda	: 235169
Reservasi Merpati	: 235358
Reservasi Sempati	: 237343
Reservasi Bouraq	: 241397
Reservasi Mandala	: 242933

RUMAH SAKIT

RSUP Sanglah	227912-15
PMI/RSUP Sanglah	: 227911
RSAD Udayana	: 228061
RSU Wangaya	: 222141
RSU Manuaba	: 426393
RSU Surya Husada	: 235041
RSU Dharma Yadnya	: 462629
	: 462488
	Fax. : 462488
RSU Dharma Usadha	: 227560
	: 234824
RSU Bina Atma	: 425744
RSU Saidharma	: 227220
RSU Khusus Bedah GRAHA USADHA	: 423467
	: 426492
Klinik SOS Gatotkaca	: 223555
RS Bhakti Rahayu	: 430270
	: 430245
Nusa Dua Clinic (0361)	: 771324
Markas PMI Cabang Badung Jl. Imam Bonjol Denpasar	: 484305
Pelayanan Ambulance Gawar Darurat PMI Cabang Badung	: 484305
Pelayanan Usaha Transfusi Darah (PUTD) PMI Cabang Badung d.a. RSUP Sanglah Denpasar	

Bali Post
13 Mei 1998

Mimpi Buruk Hendrik

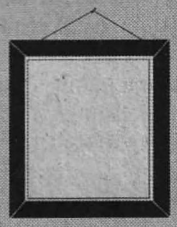

INILAH contoh orang yang hilang muncul lagi. Hendrik Dikson Sirait, 26 tahun, aktivis Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera), kelihatannya sehat-sehat saja. Tapi, mahasiswa semester akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional itu mengaku, sejak beberapa pekan terakhir ia sering dirambati rasa takut. Terutama, bila ia mendengar atau membaca berita tentang "lenyapnya" beberapa aktivis kampus atau LSM. "Jujur saya akui, saya takut sekali," kata Hendrik kepada D&R. Itulah rupanya akibat yang melekat setelah ia "hilang".

Itu semua berawal dari "hilangnya" Hendrik pada 1 Agustus 1996. Ia ditahan orang tak dikenal seusai mengikuti jalannya sidang gugatan Megawati Soekarnoputri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada saat menunggu kendaraan umum di Jalan Gajah Mada, Hendrik tiba-tiba dihajar beberapa orang lalu dilemparkan ke dalam sebuah kendaraan. Tubuhnya dibaringkan di lantai mobil dan wajahnya ditutup dengan tas. Tutup kepalanya baru dibuka setelah mereka sampai di sebuah ruangan, yang menurut Hendrik sebuah kantor.

Ingin Menjadi Menteri

Di tempat itulah, Hendrik menjalani hari-hari penyiksaannya. Hampir setiap saat, ia diperiksa petugas yang berganti-ganti. Pokoknya, "Saya diposisikan sebagai aktivis PRD yang menggerakkan kerusuhan 27 Juli," tutur Hendrik. Sedikit saja jawaban Hendrik berbau membantah atau menolak, tangan atau kaki terbungkus sepatu *but* atau pentungan mampir ke tubuhnya. Jari tangan dan daun telinga Hendrik juga pernah dililiti kabel terbuka yang dialiri arus listrik. Karena itu, Hendrik sempat harus mengaku bahwa alasannya mengobarkan Kerusuhan 27 Juli adalah memenuhi ambisinya untuk menjadi Menteri Dalam Negeri suatu saat nanti.

Padahal, pada saat peristiwa itu meledak, Hendrik sedang menonton pertandingan basket di televisi. Hendrik juga bukan aktivis PRD. Saat itu, ia menjabat sebagai Koordinator Bidang Advokasi Pusat Informasi Jaringan Reformasi (Pijar).

Selama diperiksa di kantor itu, tak secuil pun kabar tentang Hendrik sampai ke keluarganya. Tak pelak, kerabat pemuda berambut gondrong itu pun sempat mengira Hendrik sudah tewas. Sebuah kebaktian penguburan pun sempat disiapkan.

Hidup dan mati di tangan Tuhan, kata para agamawan. Setelah enam hari harus hidup hanya dengan celana dalam dan gebukan, Hendrik dipindahkan ke Polda Metro Jaya. Barulah keluarganya mendapatkan kabar tentangnya. Setelah dua kali diperiksa, penahanan Hendrik ditangguhkan, 26 Agustus 1998.

Kini, Hendrik agak mengurangi aktivitas politiknya. Sesuai dengan amanat almarhum ibunya, ia ingin terlebih dulu menyelesaikan studinya. Kendati masih merasakan trauma psikis akibat peristiwa itu, Hendrik tak menyimpan dendam. Ia bertekad melanjutkan perjuangannya tanpa cara kekerasan.

Laporan Ahmad Nur S.

D&R, 11 April 1998

HENDRIK DIKSON SIRAIT

Tak pernah terbayangkan oleh mahasiswa semester akhir Universitas Nasional Jakarta ini ia mengalami trauma yang luar biasa. Seusai menghadiri jalannya sidang gugatan Megawati Soekarnoputri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 1 Agustus 1996, ia diciduk di Jalan Gajah Mada saat menunggu bus lewat. Beberapa orang menghajarnya sebelum dilempar ke dalam mobil.

Ia lupa jenis kendaraan. Tetapi, ia ingat bagaimana tubuhnya dibaringkan di geladak mobil dengan wajah tertutup. Penutup itu dibuka setelah ia berada dalam ruangan. Mirip kantor.

Apa yang disebutnya "kantor" itu menjadi kamar penyiksaannya. Saat itu, Hendrik berusia 26 tahun. Hampir setiap saat, tatkala petugas mengintrogasinya, tubuhnya dihujani rasa sakit tak terperi. Tuduhan Hendrik adalah aktivis PRD yang menggerakkan kerusuhan 27 Juli 1996.

Jika ia membantah atau menolak, tangan atau kaki yang terbungkus sepatu but atau pentungan menggasak tubuhnya. Jari dan daun telinga Hendrik pernah dililiti kabel terbuka yang dialiri arus listrik.

> **"… Hendrik sempat harus mengaku bahwa alasannya mengobarkan Kerusuhan 27 Juli adalah memenuhi ambisinya untuk menjadi Menteri Dalam Negeri suatu saat nanti."**
>
> | ***Hendrik Dikson Sirait***, *korban penculikan, dalam berita D&R ("Mimpi Buruk Hendrik", 11 April 1998)*

D&R
11 April 1998

Walikota Subagio berdialog dengan anggota Siskamling Swakarsa di Lapangan Podomoro, Sunter, Jakarta Utara. (sur)

12 Ribu warga ikut apel Siskamling

JAKARTA (Pos Kota) - Waspadai isu negatif yang berkembang di masyarakat. Isu tersebut tidak benar dan harus ditangkal karena dapat mengganggu stabilitas keamanan ibukota, terutama menjelang Hari Kemerdekaan RI dan Sidang Istimewa MPR. ke hal 3 kol.1

Aktivis Hendrikson Sirait akan beri kesaksian ke Puspom ABRI

JAKARTA (Pos Kota) - Aktivis korban penculikan, Hendrikson Sirait, Senin besok, akan bersilaturahmi ke Puspom ABRI. Dalam pertemuan itu ia akan memberikan keterangan tentang nasibnya saat diculik ke hal 3 kol.3

mengundurkan diri
i PTN kosong

JAKARTA (Pos Kota) - Sedikitnya 30 persen kursi di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) 'kosong' usai penyaringan ujian masuk hal 7 kol.5

Polisi Kenya bantah lakukan penahanan

NAIROBI (Ant/Rtr) - Kepolisian Kenya hari Sabtu membantah berita yang menyatakan mereka telah menahan beberapa orang sehubungan dengan ke hal 6 kol.1

gamanan ibukota
nanan swakarsa
hertahrakan

DIOTOPSI - *Dua ahli forensik Dr Slamet Poernomo dari mabes Polri dan Dr Budi Sampurna dari LKUI mengotopsi kerangka mayat laki-laki misterius yang ditemukan di sungai Umpu Blambangan Umpu Lampung Utara. Mayat tersebut sebelumnya ditemukan membusuk 18 Juli 1998 oleh warga setempat, diduga salah satu mayat aktivis yang hilang. (foto: ant)*

Ibu 57 anak meninggal bisulan

SANTIAGO (Ant/Rtr) - Seorang wanita Chili yang pernah mencetak rekor dunia karena me-

Pos Kota
9 Agustus 1998

Sesungguhnya, ia bukan orang Partai Rakyat Demokratik (PRD). Hendrik adalah Koordinator Bidang Advokasi Pusat Informasi Jaringan Reformasi atau Pijar. Ketika kerusuhan 27 Juli membakar ruas Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Hendrik sedang menonton pertandingan basket di televisi.

Saat menjalani hidup suram di ruang penyiksaan, Hendrik tak pernah terhubung dengan keluarga. Malahan, keluarga sudah mengikhlaskan bahwa anggota keluarga mereka ini sudah tewas. Kebaktian penguburan pun sudah disiapkan.

Setelah enam hari harus hidup dengan celana dalam dan gebukan, ia dipindahkan ke Polda Metro Jaya, barulah keluarga diberitahu.

Hendrik pun bisa menghirup udara bebas alias penahannya ditangguhkan pada 26 Agustus 1998.

Yang tak pernah hilang dari ingatannya adalah derita psikis akibat kekerasan negara dan aparatur bersenjata atas kehidupannya.

(*) Disarikan dari D&R *("Mimpi Buruk Hendrik", 11 April 1998),* Pos Kota *("Aktivis Hendrikson Sirait akan beri kesaksian ke Puspom ABRI", 9 Agustus 1998).*

FAISOL REZA

Pada 1998, Faisol Reza tercatat sebagai mahasiswa akhir Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM. Ia ingat persis tanggal yang mengubah hidupnya itu: 12 Maret. Faisol adalah satu dari belasan orang yang dihilangkan paksa oleh institusi militer yang bernama ABRI itu.

KASUS PENCULIKAN AKTIVIS

Reza Menduga Syafrie Terlibat

YOGYA (KR) - Faisol Reza, salah seorang aktivis mahasiswa korban penculikan mengatakan dalam batas-batas tertentu mantan Pangdam Jaya Mayjend Syafrie Samsudin terlibat dalam kasus penculikan. Reza mengatakan hal ini karena tiga mahasiswa aktivis PRD, Nezar Patria, Mugiyanto dan Aan Rusdiyanto yang ditangkap Syafrie pernah berada dalam satu lokasi penyekapan dengan Reza selama dua hari.

"Dengan bukti ini, jelas dalam batas-batas tertentu ia memang terlibat dan harus mengakuinya," tandas Reza usai bicara dalam diskusi panel dan pemutaran film bertema "Kekerasan Dalam Orde Baru" (Menelusuri Fakta Penculikan dan Perkosaan Tgl 13-14 Mei 1998 di Jakarta) di ruang Sidang Fakultas Hukum UII, Jalan Tamansiswa, Sabtu (25/7). Hadir dalam acara itu Rektor UII Prof Dr Zaini Dahlan, Dekan FH UII HM Busyro Muqoddas SH MH dan PR I Dr Moh Mahfud MD.

Untuk memperkuat dugaannya itu, Reza juga mengatakan Sekjen PDI Pro Mega, Haryanto Taslam saat diculik juga pernah ditanyai soal kesehatannya oleh seseorang yang diduga Taslam adalah Syafrie. "Tapi hal ini harus dikonfirmasikan dengan Taslam," ujar Reza yang mengaku mendapatkan informasi ini dari Kontras.

Dalam penjelasannya, Reza mengaku pernah mendengar berita RRI tanggal 31 Maret pukul 12 siang yang memberitakan pernyataan Syafrie bahwa dirinya tidak tahu menahu soal penculikan. Sore harinya, sekitar pukul 16.00 ada tiga orang berpakaian safari yang sangat dihormati dan dikawal beberapa ajudan datang di tempat penyekapan. Setelah kunjungan ini, berturut-turut Pius Lustrilanang dan Desmond J Mahesa dibebaskan pada tanggal 2 dan 3 April. "Saya menduga salah satu dari tiga orang yang begitu disegani itu adalah Syafrie," ujar Reza yang masih tercatat sebagai mahasiswa jurusan sejarah Fakultas Sastra UGM.

Menyinggung soal masih disekapnya 14 aktivis lainnya, Reza berpendapat ada tiga kemungkinan, pertama ada penculik lain selain Kopassus, kedua mereka sudah meninggal dan ketiga ada pertimbangan politik lain. Reza mengatakan dalam melakukan penculikan ada pola khusus yang melibatkan jajaran militer. Jika Kopassus mengatakan tidak tahu dimana 14 korban yang disekap itu berada, kemungkinan mereka bisa berada di Kodam Jaya, Kodim, Koramil, Polda ataupun Polri.

Mengenai korban penculikan yang belum dibebaskan sudah meninggal, Reza mengatakan itu bisa saja terjadi karena

* Bersambung hal 7 kol 8

Penjarah Tambak Tewas Ditembak

JAKARTA (KR) - Perintah Kapolri agar menindak tegas penjarah tampaknya segera ditindaklanjuti aparat, seperti dilakukan petugas Polsek Mauk, Kabupaten Tangerang pada Sabtu (25/7) dinihari sekitar pukul 02.00 WIB.

Petugas yang mendapat laporan tentang adanya penjarahan udang di tambak PT Wiradua Muskita Indah, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, terpaksa bertindak tegas hingga seorang tersangka berinisial Suh (35) tewas ditembak.

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Polda Metro Jaya, Letkol Pol Aritonang mengatakan, Suh, warga Kedung Uler, Kabupaten Brebes itu tewas karena mengabaikan enam tembakan peringatan.

"Tersangka tewas karena hendak menyerang petugas dan mengabaikan enam tembakan peringatan," kata Aritonang di Jakarta, Sabtu.

Aritonang mengemukakan, Suh bersama dua kawannya, Sur (46) dan Tag (40), sekitar tengah malam masuk ke tambak udang itu dengan perahu dari arah laut.

Setelah membobol pagar, Suh mengawasi keadaan, sedangkan Sur dan Tag menebar jala untuk menangkap udang yang dalam beberapa minggu siap panen itu. Aksi mereka dipergoki karyawan tambak, namun karena khawatir akan datangnya massa penjarah, mereka tidak berani menghentikan pencurian dan hanya menelepon Polsek Mauk.

Petugas yang dengan cepat datang ke lokasi, segera memerintahkan tiga orang tersebut menyerah, tapi sikap persuasif itu dilecehkan para penjarah.

* Bersambung hal 8 kol 8

Kedaulatan Rakyat
26 Juli 1998

Penculik Tanyakan Koalisi Amien-Mega-Gus Dur

* Satu Lagi Korban Penculikan Bersaksi

Jakarta, Bernas

Lagi seorang aktivis mahasiswa yang menjadi korban penculikan bersaksi atas peristiwa yang dialaminya. Faisol Reza (25) mahasiswa Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta yang hilang sejak 12 Maret 1998 dan dilaporkan telah kembali pada 26 April, Jumat (26/6) sore kemarin memberikan kesaksiannya di kantor YLBHI, Jakarta.

Reza yang hilang setelah menghadiri konferesi pers KNPD di YLBHI, mengaku diculik oleh 6 orang di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di tengah perjalanan sekeluar dari YLBHI untuk menuju ke Jalan Salemba. Saat itu dia bersama rekannya Raharjo Waluyo Jati. Sejak diculik sampai menjelang pulangnya dia mengaku disiksa habis-habisan.

Dia tidak hanya sekadar dimaki-maki dengan kata-kata kasar lalu ditampar, dipukul atau ditendang. Lebih dari itu dia mendapatkan siksaan dengan cara kaki ditindih kaki meja yang diduduki penculik, atau dicabuti bulu kakinya.

Hal yang sangat menyiksa, menurutnya, ketika terus-menerus disetrom dengan sengatan listrik yang rasanya sampai menembus tulang dan pembuluh darahnya. Bagian yang distroom tidak hanya bagian badan tetapi juga alat vitalnya.

Reza juga sempat ditelanjangi dan didudukan di atas balok es dan disiram es selama sepuluh menit sambil diinterogasi.

Reza yang sempat beberapa kali terisak mengaku tidak diijinkan melakukan sholat ketika izin untuk menjalankannya.

Selama disekap itu juga dia sempat ditanyai tentang keterlibatan mantan Pangab LB Moerdani, pengusaha Sofyan Wanandi dan mantan menteri YB Sumarlin dalam hubungannya dengan PRD. Reza juga sempat ditanyai soal penggalangan oposisi yang dilakukan oleh Amien Rais, Megawati Soekarnoputri dan KH Abdurahman Wahid (Gus Dur).

Berikut penjelasan Reza kepada para wartawan, dengan gaya bertutur seperti aslinya.

Saya diculik bersama Waluya Jati setelah menghadiri konferensi pers KNPD. Sesuai konferensi pers itu saya meninggalkan LBH menuju ke arah (Jalan) Salemba. Saat itu saya merasa diikuti sebuah mobil Jimny.

Lalu saya menghindari dengan cara masuk ke RSCM. Naik ke lantai 2, tetapi kemudian mereka yang jumlahnya 6 orang itu mendapatkan saya. Saya ditangkap lalu diseret dan dipukuli. Kacamata saya jatuh dan pecah. Sesudah itu saya diseret dan dibawa ke mobil Jimny berwarna biru metalik.

Tiga puluh menit kemudian mobil berhenti di sebuah bangunan. Di tempat ini saya disiksa dengan cara dipukul, ditendang, dimaki-maki dengan kata-kata binatang seperti anjing dan kata-kata lain seperti bajingan.

Kemudian beberapa interogator masuk. Tangan kiri saya tetap diborgol dan diikat pada kaki kursi demikian juga tangan kanan saya. Pundak saya dipegangi beberapa orang. Kemudian saya tahu, cara itu untuk meredam saya kalau memberontak saat distrom.

Setelah itu mereka menanyai saya mengapa saya diambil. Saya menjawab: "Mungkin karena saya menentang Soeharto, karena Soeharto anti demokrasi." Lalu saya ditanyai tentang aktivitas saya di PRD.

Waktu menjawab pertanyaan itu, kalau jawaban saya tidak memuaskan mereka, pasti mereka akan menyiksa saya. Dalam posisi seperti itu bebarapa orang di belakang saya bertugas memegangi saya, sehingga kalau saya distrom badan saya tidak bisa berontak.

Tetapi saya tetap berontak kalau saya tidak kuat menahan.

Bersambung ke hal. 7 kol

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 5-19 Yogyakarta 55224 Telp. (0274) 563929 (hunting) Fax. (0274) 513235
E-Mail: humas@ukdw.ac.id Web Site: www.ukdw.ac.id
Penerimaan Mahasiswa Baru
FAKULTAS TEKNIK (S1)
Jurusan Teknik Arsitektur
Jurusan Teknik Informatika
FAKULTAS BIOLOGI (S1)
Jurusan Biologi Lingkungan
FAKULTAS THEOLOGI (S1)
FAKULTAS EKONOMI (S1)
Jurusan Manajemen Perusahaan
PASCA SARJANA (S2)
Magister Theologi
GELOMBANG PENDAFTARAN
- Gelombang 1: 01 Mei - 20 Juni
- Gelombang 2: 21 Juni - 31 Juli
- Gelombang 3: 01-28 Agustus
Pendaftaran On-Line:
http://www.ukdw.ac.id

Bernas
27 Juni 1998

Seusai menghadiri konferensi pers Komite Nasional Penegak Demokrasi (KNPD) di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), ia bersama Rahardjo Waluyo Jati keluar ke Jalan Salemba. Lalu, lebih kurang enam orang tak dikenal menghampiri

Ia berlari. Naik ke lantai dua. Namun, lorong di sekitar RS Cipto Mangunkusumo itu buntu. Faisol sama sekali tidak menguasai peta jalan. Ia tertangkap. Ulu hatinya ditinju. Kacamatanya jatuh dan pecah. Kepalanya di-kain hitam-kan. Ia diseret ke sebuah mobil Jimny yang sudah menunggu.

Tas Faisol dirampas. Tas itu berisi jaket coklat, draf proposal rencana pendirian PKU, Partai Kemaslahatan Umat. Ada juga buku Sekolah Kapitalisme yang Licik dan buku soal sejarah pers mahasiswa. Di tas itu juga selain block notes berlogo Kompas, Faisol juga membawa radio panggil merek Nixxo Swing Starpage. Semuanya dirampas.

Lebih kurang 30 menit dari peristiwa di RSCM itu, mobil Jimny berwarna biru metalik itu berhenti di sebuah

Derita Korban Culik

Kulit Ngilu Selama Seminggu

Bernas/ysr

USAI KESAKSIAN -- *Faisal Reza, aktivis yang diculik militer, menjawab wartawan usai menyampaikan kesaksian di Fakultas Hukum UII, Jalan Tamansiswa, Yogya, Sabtu (25/7).*

LUKA jiwa yang dialami para korban penculikan tampaknya tak pudar begitu saja begitu mereka dibebaskan. "Trauma itu masih sering saya rasakan, terutama kalau lagi sendirian," kata Faisal Reza mahasiswa semester akhir Fakultas Sastra UGM, Sabtu (25/7).

Reza adalah satu di antara korban penculikan yang sudah menghirup udara bebas. Meski, ia sendiri akui, masih belum bebas betul dari rasa takut.

"Kalau sedang sendirian, atau bepergian naik kendaraan. Apalagi kalau saya mendengar suara-suara yang mirip ketika saya diculik dan disiksa, jantung saja berdebar lebih cepat. Perasaan aneh, merayapi sekujur tubuh saya. Intinya... takut, ngeri," ujarnya ketika mengisahkan kembali pengalamannya 'bisa menghilang' seusai diskusi di Fakultas Hukum UII, kemarin.

Sebelum dilepas, seperti korban-korban lain, ia diancam untuk tidak buka mulut mengenai kehilangannya. Berkali-kali, katanya, para penculik menekan dirinya agar tidak melapor ke polisi, apalagi konferensi pers atau mengadu ke LBH.

Ia sama sekali dilarang menceritakan hal sebenarnya kepada siapa pun, bahkan kepada keluarga. Kalau tiga hal ini dilanggar, penculik mengatakan tidak segan-segan akan menghabisi Reza dengan cara apa pun meski ia minta pelindungan Panglima ABRI.

Mereka, katanya, akan memburu Reza tanpa menghilangkan kesempatan sedetik pun. "Mereka bilang gerakan mereka tidak bisa dicegah kekuatan apa pun. Meski Reza sembunyi di balik beton sekalipun, mereka akan menghancurkan karena mereka bilang bisa bikin bom."

Reza diculik bersama Raharjo Waluyo Jati (korban lain) di komplek RS Ciptomangunkusumo tanggal 12 Maret 1998, mata Reza ditutup dengan kain hitam. Terakhir yang ia sempat lihat, kendaraan yang dipakai para penculik adalah mobil Jimny warna merah metalik.

Bersambung ke hal.8 kol 1

Bernas
26 Juli 1998

bangunan. Di tempat inilah Faisol disiksa dengan cara dipukul, ditendang, dimaki-maki dengan kata-kata binatang seperti anjing dan bajingan.

Beberapa interogator masuk. Tangan kiri Faisol tetap diborgol dan diikat pada kaki kursi. Demikian pula tangan kanannya. Pundaknya dipegangi beberapa orang yang kemudian ia tahu cara itu untuk meredam tubuhnya kalau memberontak saat disetrum.

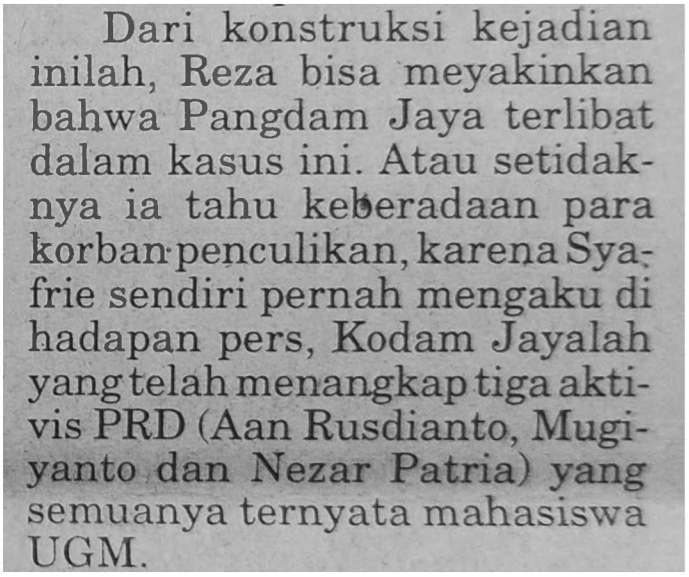

Dari konstruksi kejadian inilah, Reza bisa meyakinkan bahwa Pangdam Jaya terlibat dalam kasus ini. Atau setidaknya ia tahu keberadaan para korban penculikan, karena Syafrie sendiri pernah mengaku di hadapan pers, Kodam Jayalah yang telah menangkap tiga aktivis PRD (Aan Rusdianto, Mugiyanto dan Nezar Patria) yang semuanya ternyata mahasiswa UGM.

| ***Faisol Reza**, korban penculikan, dalam berita Bernas ("Derita Korban Culik: Kulit Ngilu Selama Seminggu", 26 Juli 1998)*

Pertanyaan yang mereka ajukan adalah mengapa ia diambil. Faisol menjawab, mungkin karena ia menentang Soeharto karena Soeharto anti demokrasi. Ia ditanya pula aktivitasnya di Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Sewaktu Faisol menjawab serangkaian pertanyaan, jika jawaban tak memuaskan, para interogator menyiksanya habis-habisan. Walau sudah dipegangi, Faisol tetap memberontak saat aliran listrik mengaliri tubuhnya. Ia merasa,

alat yang dilekatkan ke tubuhnya itu bisa menembus hingga pembuluh darah. Faisol merasa tubuhnya seperti dibor. Setrum itu meninggalkan darah beku di paha.

Jika siksaan dengan menyetrum berhenti, para penculik ini melakukan siksaan dengan metode lain. Mereka mencabuti bulu kaki sembari tertawa antar mereka. Ada yang bilang dapat enam. Ada juga yang menimpali dapat sepuluh bulu kaki.

Akibat siksaan itu, selama sepekan di sel, Faisol merasakan ngilu setiap kali kulitnya bersentuhan dengan benda lain atau dengan tangannya sendiri.

Suatu hari, Faisol didatangi tiga orang yang tampaknya sangat dihormati oleh para penculik. Sebelum itu, melalui berita radio yang mereka dengar dengan diputar keras-keras sepanjang hari, bahwa Pangdam Jaya mengatakan telah menangkap tiga aktivis PRD, yaitu Aan Rusdianto, Mugiyanto, dan Nezar Patria.

Faisol kemudian tahu, sebelum mereka dibawa ke Polda Metro Jaya, ketiga nama yang disebut Pangdam Jaya disekap dan disiksa di tempat yang sama dengan Faisol disekap.

Di "hari pembebasan", Faisol diancam tidak menceritakan apa yang dialaminya kepada siapa pun. Apalagi pers. Jangan coba-coba membohongi mereka. Begitu Faisol ketahuan berbohong dengan memberikan keterangan pers, para penculik mengatakan detik itu juga mereka "menyelesaikan tugas".

Penculik bilang kepada Faisol bahwa ia tak pernah bisa lolos. Kalau tidak sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, setahun ia tak akan bisa lolos. mereka bilang, pasti ada

hari saat lengah. Jika hari itu datang, para penculik ini "menyelesaikan tugas" mereka.

Meski Faisol bersembunyi di balik beton sekalipun, para penculik ini sangat yakin bisa menemukan karena mereka akan menghancurkan beton itu lantaran punya keahlian bikin bom.

Jelang "hari bebas" itu, Faisol dikeluarkan dari terungku selnya. Dia dibawa "ke atas". Disuruh cukur kumis dan janggut, lalu difoto. Sorenya, dia dibawa kembali ke ruang bawah untuk bersalin pakaian. Jelang magrib 25 April, ia dimasukkan ke dalam mobil dengan mata tertutup rapat. Dekat gerbang gardu, ia dilepas dan terus diawasi hingga masuk ke Stasiun Gambir dengan tujuan seperti tertera dalam tiket KA Argo Bromo: Surabaya. Bersamaan dengan tiket itu, para penculik memberinya uang saku Rp140 ribu.

Sebelumnya, Faisol sudah diberitahu bahwa ia dikawal beberapa orang yang mendapatkan kursi duduk tak jauh darinya. Saat subuh, ia sampai di Stasiun Pasar Turi Surabaya. Lalu, bergegas ke Terminal Bus Purabaya. Lima jam dari Purabaya, ia sudah berkumpul lagi dengan keluarga. Masih ia ingat pesan si penculik, jika ditanya ke mana saja selama ini, jawablah: selama ini menghilang karena diancam seseorang; selama masa tiarap itu membantu teman jadi pengedar buku.

(*) Disarikan dari Kedaulatan Rakyat *("Kasus Penculikan Aktivis: Reza Menduga Syafrie Terlibat", 26 Juli 1998),* Bernas *("Derita Korban Culik: Kulit Ngilu Selama Seminggu", 26 Juli 1998; "Penculik Tanyakan Koalisi Amien-Mega-Gus Dur", 27 Juni 1998).*

RAHARDJO WALUYO JATI

Jati dijangkiti penyakit aneh: takut listrik. Ia selalu menghindar berurusan dengan listrik. Bahkan, memasang colokan kabel pun ia tidak berani. Rupanya, Jati dicekam trauma.

Bayangkan, selama disekap para penculik, hampir sekujur tubuh mahasiswa Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta, ini–mulai dari ujung jari kaki, pangkal paha, perut, dada, tangan, hingga leher bagian belakang–berulang kali disengat dengan tongkat beraliran listrik.

Selama empat hari pertama ia berada dalam ruang penyekapan, para penculiknya kerap menyundut punggung dan tangannya dengan rokok menyala. Kata Jati, betapa menderitanya ia secara fisik hingga badannya tak sanggup lagi merasakan sakit. Ancaman bunuh, dipaksa berbaring di atas balok es, dipukul, ditendang menjadi menu yang ia hadapi sepanjang interogasi.

Semua itu bermula saat perut keroncongan di siang hari 12 Maret 1998. Hari itu, ia mengikuti acara Komite Nasional Penegak Demokrasi (KNPD) di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Hari itu memang perasaannya tidak enak. Ia seperti ada yang membuntuti. Sudah dua hari ia merasakan ada mata yang terus menguntitnya. Dua hari itu ia bisa lolos lantaran bisa menghindar. Tetapi, tidak dengan 12 Maret saat ia sedang ikut konferensi pers menolak pertanggungjawaban Soeharto di Sidang Umum MPR.

Siang itu, seusai konferensi pers, ia keluar bersama Faisol Reza mencari makan siang di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kali ini, pemburunya lebih agresif. Ia dan Faisol berlari masuk ke rumah sakit. Malang bagi Faisol, ia tertangkap duluan. Jati melihatnya ditelikung dan dihujani pukulan oleh dua lelaki berbadan tegap. Sementara ia sendiri bersembunyi di WC untuk menghindar. Malang, pemburu mereka menggedor pintu kakus setelah meneriakkan ancaman hendak menembak. Jati pun keluar dan langsung diseret seperti seorang kriminal. Ia menyusul Faisol yang lebih dahulu dilumpuhkan.

Di tempat itulah Djati diinterogasi, ditanyai tentang kaitannya dengan Jenderal Benny Moerdani (mantan Panglima ABRI), Ketua PDI hasil Munas Megawati, hingga pengusaha Sofjan Wanandi. Ia mengaku sesekali dipaksa tidur tengkurap tanpa baju selama 10 menit di atas balok es. Di tempat penyekapan itu Djati mengaku bertemu dengan, antara lain, Andi Arief, Harjanto Taslam, Pius Lustrilanang, Yani Afri (belum ditemukan), Desmond Junaidi Mahisa, dan Dedi Hamdun (suami Eva Arnaz, juga belum ditemukan).

Kisah Gilang dan Djati

Gatra
30 Juni 1998

| ***Rahardjo Waluyo Jati**, korban penculikan, dalam berita Gatra ("Kisah Gilang dan Djati", 30 Juni 1998)*

Mulai hari itulah proses penyiksaannya dimulai di sebuah ruangan khusus dengan macam-macam "metode". Rupanya, para penculik berhasrat sekali menangkap Andi Arief karena nama ini yang terus-menerus ditanyakan. Penyiksaan itu mulai mereda setelah hari keempat atau saat Jati dipindahkan ke ruangan bawah bergabung dengan korban culik lainnya. Di ruangan inilah Jati tahu "tetangga sel"-nya adalah Pius Lustrilanang dan dari Pius juga ia tahu bahwa kamarnya itu bekas Sonny dan Ryan. Sebelum kedatangan Jati, Sonny dan Ryan "dilepas".

Dari radio yang diputar dengan volume sangat keras, Jati tahu Andi Arief tertangkap dan orang tuanya mengadu ke ke Komnas HAM. Dari radio yang diputar dengan volume sangat keras, Jati tahu Andi Arief tertangkap dan orang tuanya mengadu ke ke Komnas HAM. Dari suara radio yang meneror hidup tiap hari itu juga mereka menjadi tahu bahwa dunia internasional mulai menekan terhadap hilang secara misteriusnya para aktivis.

Mencurigai Panggilan Nurani

MANTAN korban penculikan, Rahardjo Waluyo Jati, kini dijangkiti penyakit aneh: takut listrik. Aktivis muda ini selalu menghindar berurusan dengan listrik. Bahkan, memasang colokan kabel pun ia tidak berani. Rupanya, Jati dicekam trauma. Bayangkan, selama disekap para penculik, hampir sekujur tubuh mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, itu —mulai ujung jari kaki, pangkal paha, perut, dada, tangan, hingga leher bagian belakang— berulang kali disengat dengan tongkat beraliran listrik. Voltasenya cukup tinggi, tentu.

Bukan itu saja. Menurut pengakuan Jati, selama empat hari pertama, para penculiknya kerap menyundut punggung dan tangannya dengan rokok menyala. "Secara fisik, aku sangat menderita, bahkan aku tak mampu lagi merasakan sakit," tutur Jati. Belum lagi sejumlah teror terhadap dirinya, misalnya ancaman dibunuh, dipaksa tidur di atas balok es, dipukul, dan ditendangi sepanjang interogasi.

Awal penderitaan Jati itu bermula pada 12 Maret silam. Siang itu, seusai mengikuti acara di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, perut aktivis muda yang bergabung dalam Partai Rakyat Demokratik (PRD) —organisasi yang masuk dalam daftar hitam pemerintah —itu mulai keroncongan. Setelah pamit pada teman-temannya, ia bersama rekannya, Faisol Reza, mencari warung untuk mengisi perut di sekitar Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Namun, di tengah perjalanan, mata Jati mendapati beberapa orang sedang mengikuti mereka berdua. Perasaannya mendadak tidak enak. Terlebih, beberapa hari sebelumnya, pemuda kelahiran Jepara, Jawa Tengah, 24 Desember 1969, ini terus dikuntit beberapa orang tak dikenal. Segera ia membatalkan niatnya, lalu menyeberang, lari menuju ke lantai II Unit Gawat Darurat RSCM. Orang-orang itu pun mengejar. Apes, lorong itu buntu.

Ketika hendak berbalik turun, Jati melihat rekannya, Reza, ditelikung dan dihujani dengan bogem mentah oleh dua orang berbadan tegap. Seram. Jati pun bersembunyi di kamar kecil dan menguncinya dari dalam. Namun, tak berapa lama, pintu itu digedor keras oleh orang-orang berbadan tegap itu sambil berteriak. "Mereka mengancam akan menembak saya," ujar Jati, yang kemudian terpaksa membuka pintu itu.

Segera Jati dan Reza diringkus, digelandang, dan dimasukkan ke sebuah mobil. Mereka dibawa kawanan penculik itu ke suatu tempat —banyak yang menyatakan, lokasi itu berada di sekitar Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Cijantung, Jakarta Timur.

Selang beberapa hari kemudian, di bangunan yang sama, mereka mendapati beberapa aktivis yang tak jelas di mana hutan rimbanya pada masa-masa itu. Sebut saja, Andi Arief, Ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID); Nazar Patria (Sekretaris Jenderal SMID); Pius Lustrilanang, Sekretaris Jenderal Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera); Desmond J. Mahesa (Lembaga Bantuan Hukum Nusantara); Haryanto Taslam (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan); Herman Hendrawan dari Pusat Perjuangan Buruh Indonesia *(onderbouw* PRD); serta Mugianto dan Aan Rusdayanto (PRD).

Aksi kekerasan itu kemudian terungkap lewat pengakuan Pius di depan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, beberapa hari setelah dilepas kawanan itu. Maka, kasus itu pun meledak. Apalagi, setelah Pius melanglang buana ke berbagai negeri untuk memberi pengakuan, desakan internasional kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan pengusutan kasus penculikan itu makin menjadi-jadi. Peran Letnan Jenderal Prabowo Subianto, yang kala itu menjabat Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat (Kostrad), dan satuan elite Kopassus mulai ramai digunjingkan.

Akhirnya, pihak ABRI terpaksa membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk menyidik keterlibatan Prabowo. Hasilnya, terungkap ada "kesalahan prosedur". Prabowo mengaku bertanggung jawab atas penculikan sembilan aktivis yang dilakukan anak buahnya. Tapi untuk para aktivis yang masih hilang hingga kini, Prabowo mengaku tak bertanggung jawab. Yang pasti, setelah rekomendasi pemeriksaan DKP itu diserahkan kepada Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto, alumnus Akabri 1974 yang kariernya sempat melesat itu diberhentikan dengan hormat.

Bersama Prabowo, Mayor Jenderal Muchdi Purwopranjono (Komandan Jenderal Kopassus kala itu) dan Kolonel Chairawan (Komandan Satuan Antiteror Grup IV Kopassus) ikut terkena sanksi, walau lebih ringan. Mereka berdua tak dipensiunkan, "hanya" di-*lengser*-kan dan tak boleh lagi memegang jabatan struktural di Markas Besar ABRI.

Toh, banyak kalangan, terutama para aktivis prodemokrasi, yang tak puas dengan putusan itu. Rata-rata menganggap, Prabowo bukan satu-satunya tokoh dalam kasus tersebut. Maka, beredarlah di masyarakat beberapa nama pejabat militer yang kala itu memegang posisi kunci, antara lain bekas Pangab Jenderal (purnawirawan) Feisal Tanjung dan bekas Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (purnawirawan) R. Hartono.

Atas anggapan itu, Feisal Tanjung membantah. "Saya tak pernah mengeluarkan perintah operasi untuk melakukan penculikan," ujar Menteri Koordiantor Bidang Poli-

Walau sidang penculikan sudah digelar, nama Prabowo tak tertera dalam surat dakwaan. Padahal, ia telah mengaku bertanggung jawab.

MENUNTUT KEJELASAN NASIB ORANG HILANG. Hati nurani.

Gatra
2 Januari 1999

Benar saja, tak lama kemudian ruang bawah tanah mendapatkan kunjungan yang sepertinya adalah perwira tinggi lantaran bau parfumnya berkelas dan pastilah itu mahal. Jati tak mengetahui wajahnya karena memakai topeng. Sang perwira dikawal tujuh orang.

Hari demi hari, Jati menyaksikan satu-satu rekannya korban culik "dibawa keluar". Mula-mula Pius, lalu Desmond. Dan tak lama kemudian Hartas.

Lalu, tibalah gilirannya pada pekan terakhir April 1998. Selama menjalani "upacara pembebasan", Jati tak sudah-sudah dinasihati agar tidak menyelenggarakan konferensi pers. Kalau melanggar perjanjian, Jati dan keluarganya akan menerima akibatnya.

Pemeriksa yang bersuara bariton dan tampaknya sudah berumur, atas nama Allah Swt, bakal mencarinya di mana pun kalau ia mengaku diculik, disekap, disiksa di tempat ini. Dia bilang, matanya ada di mana-mana: di kampus, di rumah Jati. Terakhir, demikian santiajinya untuk Jati, kebebasan itu bukan dia yang putuskan melainkan kehendak Allah.

Pagi-pagi sekali pada 25 April, kesehatan Jati diperiksa terakhir kalinya di ruangan atas. Mungkin penculik ini ingin memastikan semua bekas luka yang diperoleh Jati selama disiksa sudah hilang semuanya. Selain vitamin, Jati juga dibelikan kaus baru, sepatu baru, celana dalam baru.

Demikianlah, Jati mendapatkan dirinya berada di stasiun dengan tiket kereta api bisnis Fajar Utama untuk Kota Semarang. Dia memasuki Stasiun Jatinegara dengan mengantongi amplop uang berisi Rp150 ribu.

(*) Disarikan dari Gatra *("Kisah Gilang dan Djati", 30 Juni 1998; "Mencurigai Panggilan Nurani", 2 Januari 1998).*

kan diri dari jabatan Ketua Umum dan meletakkan jabatan Wakil Ketua MPR/DPR RI.

bertanggung jawab, beretika, dan bermoral yang senantiasa diajarkan Buya kepada para

peduli terhadap aspirasi rakyat yang sudah berbulat tekad mengakhiri *status quo*.

Emron Pangkapi juga meng-

Bersambung ke hal 8 kol 5

Diculik, Dianiaya di Tempat "X"

Jakarta, Bernas

Tiga aktivis mahasiswa korban penculikan, Senin (8/6) memberikan kesaksian. Disebutkan, mereka diciduk 13 Maret lalu, dua hari kemudian diserahkan ke Polda Metro Jaya dan ditahan di sana selama 83 hari. Namun, tak banyak keterangan yang diperoleh, sebab mereka masih 'takut' bicara secara terbuka.

Saat menyampaikan kesaksian kemarin, mereka didampingi Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir SH.

Mereka adalah Nezar Patria (lulusan Fakultas Filsafat UGM 1997), Mugiyanto (mahasiswa Jurusan Sastra Inggris Fak Sastra UGM angkatan 1992) dan Aan Rusdiyanto (mahasiswa Sastra Indonesia Fak Sastra Undip angkatan 1992).

"Saat ini kami belum bisa ceritakan semua yang kami alami secara rinci. Ada kondisi psikologis yang cukup menekan kami, walaupun kami sudah menceritakan semuanya kepada Puspom ABRI," kata Nezar.

Sebelumnya, mereka berkisah bahwa mereka sempat menginap dua hari dua malam (13-15 Maret) di suatu tempat yang mereka sebut X. Di sinilah ketiganya mengaku mengalami siksaan. Sesudah itu mereka dibawa ke suatu tempat yang kemudian mereka ketahui adalah Kodim Jakarta Timur.

Setelah itu mereka ditahan di Polda Metro Jaya, "Kami ditahan di Polda Metro Jaya sejak 15 Maret 1998 lalu," kata Nezar Patria. Ia mengaku, sebelum dibawa ke Polda Metro Jaya, sempat dibawa dan kemudian berada di sebuah tempat.

rtr

KESAKSIAN -- *Tiga aktivis mahasiswa, (dari kiri) Mugiyanto, Aan Rusdianto dan Nezar Patria, Senin (8/6) di Jakarta, menyampaikan kesaksian seputar penculikan mereka.*

"Di Polda kami tidak mengalami siksaan. Tentang makan standarnya, ya standar tahanan. Di sini kami sempat ketemu AA. Tapi maaf kami tak bisa kemukakan karena tekanan dan ancaman," ujar Nezar.

Menurut Nezar, penculikannya terjadi pada tanggal 13 Maret sekitar pukul 19.00. Saat itu ia dan Aan sedang membuat minum di kediaman mereka di lantai dua Rusun Kelnder.

"Tiba-tiba pintu diketuk orang. Setelah Aan membuka, ada empat orang bertubuh kekar berdiri di muka pintu. Seorang di antara mereka memakai jaket hitam, bertopi wool warna hijau. Kami langsung dipegang.

Bersambung ke hal 7 kol 5

Tim Ekonomi U

* Tawarkan 3 Agend

Yogya, Bernas

Hari Selasa (9/6) ini, "Tim Ekonomi" dari UGM direncanakan mengadakan acara dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI perihal agenda reformasi di bidang ekonomi. Berkaitan dengan hal itu, tim yang

Bernas
9 Juni 1998

NEZAR PATRIA

Sekelompok orang tak dikenal, 13 Maret 1998, pukul 19.00, merangsek ke rumah tinggal Nezar Patria di Rumah Susun Klender, Lantai II. Di rusun itu Nezar tak tinggal sendirian. Ia tinggal bersama ketiga kawannya yang lain: Aan Rusdianto, Mugiyanto, Petrus Bimo Anugerah. Aan adalah mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Diponegoro angkatan 1992. Sementara dirinya baru setahun lulus dari Fakultas Filsafat UGM. Baik Nezar, Aan, Mugi, maupun Bimo sama-sama aktif di Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) yang berafiliasi ke Partai Rakyat Demokratik yang diburu aparat keamanan karena tuduhan penggerak Kerusuhan 27 Juli (1996).

Bernas
9 Juni 1998

Malam itu, Nezar yang pertama kali datang ke rusun. Ia dari Depok. Lalu, disusul Aan.

Saat Nezar menjerang air, pintu diketuk. Aan maju membuka pintu. Sejurus setelah pintu terbuka, dua orang berbadan kekar langsung menyergap Aan. Nezar masih berada di dapur. Dengan sigap, dua yang lain langsung menghampirinya. Ia ingat, salah satu penculik ini memakai jaket hitam dan menutupi mukanya dengan kain wool warna hijau.

terjadi sejak Andrew Johnson 1868—secara formal terjadi setelah Ketua Mahkamah Agung William H Renquist mengangkat

laksanaan sidang.

"Kini kita berada di dalam situasi di mana kita harus bergerak maju, tanpa tahu aturan-

persidangan tak merunccing menjadi pertentangan antarkubu partai, seperti ketika dilangsungkan voting atas pasal-pasal dasar *impeachment* di tingkat DPR AS (House of Re-

bertindak sebagai jaksa penuntut umum (*prosecutor*) terhadap

(Bersambung ke hlm 11 kol 3-5)

• Berebut karcis, hlm 20

Nezar Patria:

Saya Disetrum dan Dipukuli

Jakarta, Kompas

Saksi korban penculikan Nezar Patria mengaku selama tiga hari tiga malam dirinya disetrum dan dipukuli oleh para penculiknya. Para penculik itu menginterogasi dirinya dan menanyakan soal keberadaan Andi Arief serta hubungan kegiatan saksi dengan Amien Rais dan Megawati Soekarnoputri.

Hal itu diungkapkan Nezar Patria saat memberikan kesaksian pada sidang penculikan aktivis politik di Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) II-Jakarta, Jumat (8/1). Sidang dengan terdakwa 11 anggota Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) yang tergabung dalam "Tim Mawar" dipimpin Ketua Majelis Hakim Kol (CHK) Susanto.

Sebelum pemeriksaan saksi, majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa soal kewenangan Mahmilti menyidangkan kasus tersebut. Dalam putusan selanya, majelis menolak eksepsi tersebut dan memutuskan sidang diteruskan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

Dua saksi lain, Pius Lustrilanang dan Andi Arief, menolak memberikan kesaksian. Mereka menolak bersaksi karena dakwaan oditur tidak mengungkapkan masalah penyiksaan serta nasib korban penculikan yang belum kembali, serta perintah komando penculikan. Nezar awalnya juga enggan bersaksi, namun setelah sedikit berdebat dengan hakim ia mau memberikan kesaksian.

Ditodong pistol

Nezar menceritakan, dirinya ditangkap orang tak dikenal, 13 Maret 1998 pukul 19.00 WIB di tempat tinggalnya di Rumah Susun (Rusun) Klender, Lantai II. Di rusun itu ada juga Aan Rusdianto. Nezar dan Aan ditangkap empat orang tak dikenal. "Mereka ketok pintu. Aan buka pintu dan saya lihat Aan dipegang oleh dua orang tidak dikenal. Saya masih berada di dapur dan berjalan ke pintu. Dan kemudian dua orang lagi masuk mengambil saya," katanya.

(Bersambung ke hlm 11 kol 1-2)

putri. "Pertanyaan di mana Andi Arief cukup gencar. Karena tidak mengetahuinya, saya disetrum, dipukul, dan interogasi selama tiga hari tiga malam. Selama itu, saya banyak mendapatkan banyak setruman dan pukulan, sehingga tidak bisa makan dan bibir saya pernah pecah karena tidak tahan dengan setruman. Saya coba berteriak Allahu Akbar dan mereka mengin-

Kompas
9 Januari 1999

| ***Nezar Patria,*** *korban penculikan, dalam berita Kompas ("Nezar Patria: Saya Disetrum dan Dipukuli", 9 Januari 1999)*

Nezar sempat menanyakan bapak-bapak ini dari mana?

Namun, para penculik langsung membentaknya dan bilang jangan banyak tanya sembari salah satu dari mereka membenamkan ujung pistol di perut Nezar. Ia digiring ke tangga bawah lantai satu. Tangannya langsung dibor-

gol, dimasukkan ke dalam mobil jip, mata ditutup, dan mobil melaju dengan sangat kencang.

Semuanya berlangsung dengan sangat cepat. Hanya hitungan semenit dua menit.

Dalam mobil dengan musik disetel keras-keras, Nezar ditanyakan soal keberadaan Andi Arief. Saat bilang tidak tahu, ia digebukin dna diteriaki si penculik sebagai bangsat pembohong.

Sejam setelah proses penjemputan, Nezar ditempatkan di sebuah ruangan khusus. Tanpa ada pertanyaan apa pun, tubuhnya menjadi sasaran pemukulan beberapa orang. Sampai-sampai kursi kayu yang didudukinya patah.

Saat diinterogasi itu, materi berputar pada satu hal, di mana Andi Arief. Lalu, adakah hubungan dirinya dengan aktivitas politik Amien Rais dan Megawati Soekarnoputri. Khusus mengorek informasi soal di mana rimbanya Andi Arief, Nezar yang memang tidak tahu terus dipukul dan disetrum. Ia bisa memastikan proses itu berlangsung selama tiga hari tiga malam.

Tubuhnya menjadi obyek penyetruman dan samsak empuk tendangan-tendangan keras. Suatu kali, tendangan diarahkan tepat ke dadanya dan ia terjengkang ke lantai.

Setengah tak sadar, Nezar pun menjawab Andi Arief di Lampung. Ia menjawab spontan seperti itu karena ia tahu Andi berasal dari Lampung. Saat sempoyongan dengan dada yang nyeri, Nezar dibaringkan di sebuah velbed. Kedua kakinya diikat kencang pada tepi velbed, dan kedua tangan diborgol juga pada tepi velbed. Para interogator menanyakan apa saja aktivitas politiknya selama ini yang tentu saja diikuti dengan sundutan setrum. Interogator mengabsen sejumlah nama dan apakah nama itu ia kenal: Waluyo Jati, Faisol Reza, Herman, Desmond, Pius.

Sesaat ruangan menjadi hening. Lalu, terdengar langkah-langkah sepatu yang diseret berat yang tak lama kemudian diikuti teriakan dan erangan kesakitan seseorang yang juga sedang disiksa dan diinterogasi di ruang yang sama. Nezar sangat mengenal suara itu. Dia sahabatnya sendiri: Mugiyanto.

Agar tubuh tetap kuat, saat penyiksaan mereda, para penculik menyodorkan makanan. Nasi bungkus dengan lauk ikan. Nezar menyantapnya dengan meringis karena bibirnya terluka. Ia tetap duduk di atas velbed dengan tangan kiri terborgol dan mata tertutup kain.

Usai makan, penyiksaan berlangsung kembali. Sejak kedatangan di ruangan itu, tak pernah terlupa oleh Nezar, hingga subuh, tubuhnya menjadi santapan setrum. Belum lagi teror bunyi alarm yang membuat gendang telinga meledak. Mesin pendingin udara dinyalakan sedingin-dinginnya sehingga tubuhnya yang nyaris telanjang menggigil tak terkira.

Lantaran banyaknya mendapatkan setruman dan pukulan, Nezar sulit sekali makan karena bibirnya pecah. Ia sangat tak kuat dengan sengatan aliran listrik yang dijalarkan ke tubuhnya oleh para penculik.

Saat sengatan itu datang, dengan perut yang diinjak, Nezar hanya bisa berteriak ALLAHU AKBAR!

Tak lama kemudian, Nezar dibawa ke suatu tempat yang lain dengan naik mobil untuk dilakukan proses verbal. Dalam proses pindah itu, mata tetap tertutup. Tangan diborgol. Dituntun menaiki tangga sedemikian rupa hingga sampai di ruangan. Penutup mata dibuka. Ia melihat sejumlah petugas keamanan dengan handy talky.

Sebelum proses verbal berlangsung, Nezar disuguhkan makanan. Mata Nezar menyapu ruangan 2 meter x 2 meter itu hingga menumbuk tulisan di dekat pintu. Dia lupa apakah "Kodalops 05" atau "Koladaops 05". Kodalops adalah akronim dari Komando Pengendalian Operasi (Kodalops).

Usai di-"BAP", ia diminta menandatangani surat tanpa kop. Barulah setelah itu, dengan mata kembali ditutup, bersama Aan, ia dibawa ke Polda Metro Jaya 15 Maret 1998 dengan mobil Kijang.

(*) Disarikan dari Kompas *("Nezar Patria: Saya Disetrum dan Dipukuli", 9 Januari 1999),* Bernas *("Diculik, Dianiaya di Tempat 'X'", 9 Juni 1999), S. Sinansari Ecip [Buku] (Siapa "Dalang" Prabowo, Oktober 1999).*

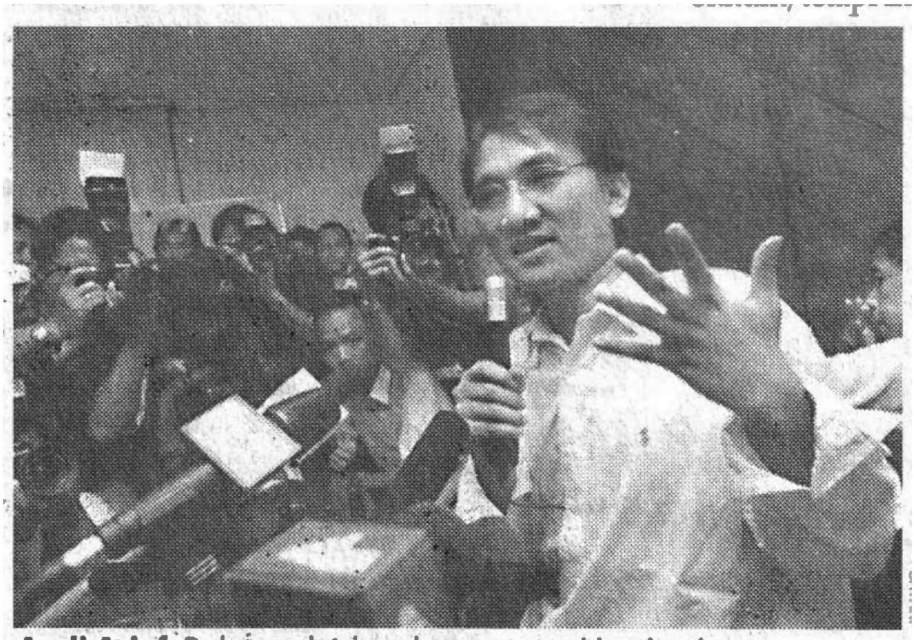

Andi Arief: Bukan sekedar oknum, tetapi institusi

ANDI ARIEF

Andi Arief, mahasiswa lulusan Fisipol UGM, adalah salah satu tokoh muda yang paling diburu. Nyaris semua yang diculik dan disekap terlebih dahulu, materi interogasinya adalah di mana Andi Arief?

Andi Arief adalah ketua umum Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Sebuah organisasi yang menjadi underbow Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Para penggerak SMID ini juga dituduh sedang membikin makar dengan bikin bom yang kemudian meledak di kamar pegiatnya sendiri di Rumah Susun Tanah Tinggi.

Panji Masyarakat
29 Juli 1998

Tak Mungkin Inisiatif Prabowo Pribadi

Nama Andi Arief pun ada dalam daftar utama pengambilan paksa. Ia diculik pada 28 Maret, pukul 11 siang di toko alat musik Studio 4 Musik. Toko yang ada di salah satu ruko milik kakaknya ini berada di Way Halim, Bandar Lampung.

Catatan dari Sarang Penculik (1)

Lapor, Ambon-Ambon Sudah di Tangan!

KETUA Umum Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) Andi Arief, diculik di kediaman kakaknya, di Bandar Lampung, 28 Maret lalu. Setelah 20 hari, tanggal 18 April, ia 'ditemukan' di sel Polda Metro Jaya. Hari Selasa (14/7) ia dibebaskan. Dan sepekan kemudian, Selasa (21/7) tampil di Jakarta, memaparkan kesaksian dan pengalamannya. Berikut, nukilan penuturan lulusan Fisipol UGM ini yang disajikan wartawan *Bernas*, **Willy Pramudya** dan **Sugiyanto**.

SAYA diculik 28 Maret, pukul 11 siang di rumah toko (Ruko) Way Halim Bandarlampung, tempat kakak saya. Waktu itu saya sedang di lantai dua. Mereka (para penculik itu) lebih dari tujuh orang.

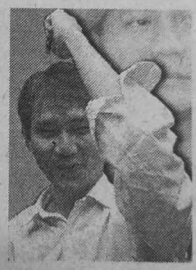

Saya kaget, tapi sempat tanya, 'dari mana?' Mereka tak menjawab. Saya kira gerombolan preman. Mereka tanya, 'Ini Andi Arief?' Saya jawab, 'Bukan!'. Mereka tetap memaksa saya turun. Saya diseret ke halaman.

Ada tiga mobil — semua Kijang, biru, merah dan biru kehitam-hitaman — menunggu. Saya dinaikkan ke mobil pertama, warna biru. Kepala saya ditutup. Mata saya ditutup kain hitam kemudian dipasang seibo - topeng teroris.

Proses pengambilan saya dari atas ruko hingga mobil tak sampai lima menit. Cukup profesional. Saya tak tahu akan dibawa ke mana. Penculik hanya berpesan, 'kamu istighfar dan tenang bersama kami...'

Kira-kira dua menit di mobil, penculik memberi laporan, entah ke mana, melalui *handphone* (HP) yang bunyinya pakai kode: 'Ambon-Ambon' sudah di tangan!'

Sekitar lima menit, mobil berhenti di suatu tempat. Salah seorang dari penculik berhenti di depan sebuah rumah, lalu bilang 'Sudah diambil! Rapikan barang-barang, jangan ada yang tersisa!'.

Bersambung ke hal. 8 kol. 3

Operasi penculikan Andi Arief dilakukan lima orang berpakaian preman. Tiga orang di antaranya berambut cepak, dua sisanya gondrong. Secara kilat mereka masuk ke toko dan langsung menodongkan pistol.

"Ini Andi Arief?" salah satu penculik bertanya.

"Bukan," jawab Andi Arief.

Mereka tetap saja menyeret Andi turun. Ada tiga mobil Kijang terparkir. Ia dinaikkan di mobil biru. Kepalanya ditutup kain hitam, kemudian dipasang seibo, topeng teroris. Begitu cepat kejadiannya. Andi memperkirakannya tidak lebih dari lima menit. Penculik berpesan kepada Andi agar memperbanyak istighfar dan tenang bersama para penangkapnya.

Lebih kurang dua menit di mobil, penculik memberi laporan, entah ke mana. "Ambon-Ambon sudah di tangan!" Lima menit kemudian, penculik berhenti dan Andi mendengar salah satu dari mereka mengatakan, "Sudah diambil! Rapikan barang-barang, jangan ada yang tersisa!"

Bernas
23 Juli 1998

Catatan dari Sarang Penculik (1)
Lapor, Ambon-Ambon Sudah di Tangan!

Raibnya Para Aktivis

Penculikan: Beberapa aktivis yang menyebut diri prodemokrasi dan mahasiswa susul-menyusul hilang dari masyarakat. Di antaranya ada yang diculik dari rumah. ABRI membantah kasus ini ada kaitannya dengan operasi intelijen.

Demonstrasi mahasiswa menimbulkan buntut tidak sedap. Setelah bentrokan fisik dengan aparat keamanan pecah menjadi insiden berdarah, kini beberapa tokoh demonstran, dari kalangan mahasiswa maupun aktivis lainnya, dikabarkan hilang tak tentu rimba. Mereka "diambil" secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada pihak keluarga.

Aksi para penculik itu, selain bertentangan dengan hukum, jelas meresahkan masyarakat. Berbagai kalangan sudah mendesak pemerintah agar memberikan penjelasan perihal orang-orang yang hilang diculik. Jika tidak, akan muncul tuduhan bahwa penculikan dilakukan oleh aparat keamanan.

Adapun mereka yang dikabarkan hilang itu salah satunya ialah Haryanto Taslam, fungsionaris DPP PDI Megawati Soekarnoputri, yang raib sejak 8 Maret lalu. Yang lainnya adalah Umi Masrifa dan Bahrul Alam (mahasiswa Unila), Ananda (pelajar), dan Andi Arif, ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Ketiganya hilang dari Bandar Lampung.

Andi Arif, Sabtu pekan lalu, hilang karena "diculik" sekelompok orang saat pemuda lajang ini berada di rumah toko (ruko) milik kakaknya di Jalan Kiai Maja, Way Halim Indah, Bandar Lampung. Nasib Arif tidak ada yang tahu bahkan orangtuanya sendiri, Arief Makhya dan seluruh keluarganya hanya dapat berharap agar penculik tetap menjunjung tinggi hukum dan asas praduga tak bersalah. Sejak pecahnya insiden berdarah di Unila pada 19 Maret lalu, satu per satu para aktivisnya "menghilang" sukar dilacak karena lenyap tanpa jejak. Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lampung, ketiga orang itu sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Mereka masih dalam pencarian.

Tidak jelas juga, mengapa Andi Arif yang dikabarkan sebagai pimpinan tertinggi PRD setelah Budiman Sudjatmiko ditahan, baru sekarang "diambil". Sebelum ini, dia cukup leluasa bergerak di Jakarta. Sejak Desember 1997 dia beberapa kali berada di Bandar Lampung sebelum tinggal cukup lama di kampung halamannya sampai dia diculik.

Deretan daftar orang yang hilang bertambah. Di kantor Komnas HAM Jakarta tercatat nama Pius Lustrilanang (29), sekretaris Solidaritas Indonesia untuk Amien Rais dan Mega (Siaga) yang juga sekjen Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera). Ia menghilang sejak 10 Februari lalu. Setelah kejadian itu, pada bulan yang sama menyusul "hilang" pula Desmon J. Mahesa, direktur LBH Nusantara cabang Jakarta dan Hariyanto Taslam tadi.

Hilangnya mereka, menurut Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) banyak dipertanyakan orang kepada lembaga hukum ini. Tidak saja pertanyaan dari dalam negeri, tetapi juga datang dari luar negeri, misalnya Lembaga Amnesti Internasional, *Lawyers Committee for Human Rights* (LCHR), *Human Right Watch* (HRW), dan *American Bar Association* (ABA). Menurut Direktur Eksekutif PBHI Hendardi, masyarakat asing itu mempertanyakan eksistensi Pasal 3 Piagam Semesta HAM yang ikut ditandatangani Indonesia yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup, berhak atas kebebasan dan keamanan pribadinya". Begitu juga dengan Pasal 9: "Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang."

Keresahan PBHI itu akhirnya berwujud sebuah surat yang dilayangkan kepada delapan instansi pemerintah, LSM, media massa, senat mahasiswa termasuk kepada presiden. PBHI meminta aparat keamanan mencari kejelasan dan memberitahukan kepada masyarakat. Bila persoalan ini dibiarkan berlarut-larut akan melahirkan pandangan yang miring terhadap pemerintah.

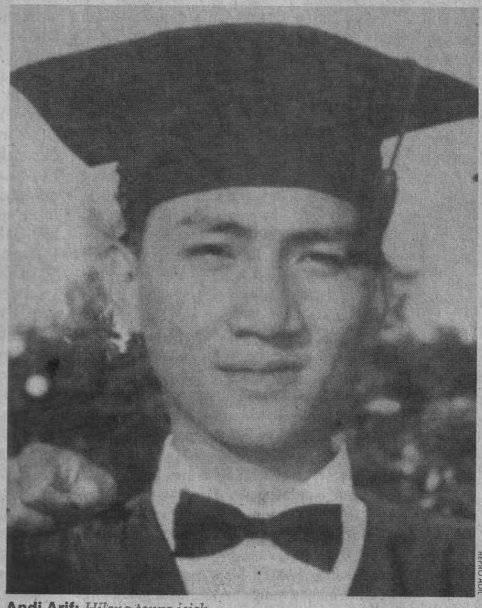

Andi Arif: *Hilang tanpa jejak*

Begitu seriusnya masalah itu, Komnas HAM lewat Clementino dos Reis Amaral menilai, hilangnya para aktivis yang menyebut dirinya prodemokrasi itu bisa dijadikan indikasi bahwa telah terjadi pelanggaran HAM. Jaminan bagi masyarakat untuk hidup tenang menjadi terancam. Asas *freedom from fear* atau bebas dari ketakutan mulai tidak terjamin. Yang jelas, bila peristiwa serupa terjadi berkepanjangan, bukan tidak mungkin akan timbul pertanyaan tentang kerja aparat keamanan. Kapuspen ABRI Brigjen TNI Abdul Wahab Makodongan membantah bila hilangnya aktivis LSM dan organisasi lainnya punya hubungan dengan ABRI, apalagi bila itu dikaitkan dengan operasi intelijen ABRI.

Sebenarnya, perihal hilangnya beberapa aktivis telah dilaporkan kepada Pangab dan Kapolri pada 23 Februari lalu. Surat juga dilayangkan PBHI kepada Menko Polkam Feisal Tanjung sebagai koordinator keamanan pada 28 Maret. PBHI meminta agar pemerintah melakukan upaya konkret dalam menyikapi peristiwa ini karena merupakan tugas aparat keamanan mencari tahu tentang keberadaan para aktivis. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjelaskan pada masyarakat tentang tabir yang belum terkuak ini. Perlakuan penculik misterius itu makin serius untuk diselesaikan. ■

AKMAL STANZAH

Panji Masyarakat
6 April 1998

Setelah dua jam perjalanan, para penculik tiba di Pelabuhan Bakauheni. Penutup kain hitam Andi Arief dilepas. Mata Andi langsung menyapu seisi kabin mobil. Ada lima orang penculik. Tiga berambut pendek, dua gondong. Si sopir berambut pendek agak keriting. Yang duduk di samping sopir memakai topi. Rambutnya pendek yang kemudian diketahui Andi sebagai komandan penculikan.

Di pelabuhan ini, para penculik mengganti plat nomor mobil sembari menunggu pintu kapal feri dibuka. Mobil diteduhkan di dekat sebatang pohon. Saat tiba waktunya masuk, terjadi insiden.

Kijang yang membawa Andi Arief rupanya tak mau antre saat masuk ke lambung kapal. Gelagat tak baik pengemudi Kijang LGX berplat No. B 150 LX ini yang membuat petugas pelabuhan datang menegur. Alih-alih mau antre, salah seorang penumpang mobil malah mencabut pistol dan memukulkannya ke lengan petugas kepolisian pelabuhan. "Kami Kopassus. Jangan ganggu tugas kami," hardik salah satu penculik sembari menodongkan pistol ke wajah polisi itu.

Keributan itu rupanya mengundang perhatian seorang petugas POM setempat, Kopka Azabidin. Begitu melihat PM, para penumpang Kijang menjadi santun. Mereka langsung memperkenalkan diri sebagai anggota Kopassus dari Grup I Serang. Seorang mengaku berpangkat mayor, satunya

Operasi penculikan terhadap aktivis Andi Arief diwarnai kecerobohan. Inilah kisah perjalanan para penculik dari Lampung hingga Jakarta.

CEROBOH, pangkal petaka. Gara-gara meninggalkan beberapa kesalahan, operasi penculikan aktivis Andi Arief di Lampung agaknya akan mudah tersingkap. Pasalnya, unit kecil pelaksana operasi meninggalkan beberapa jejak. Misalnya, mereka meninggalkan helm, catatan nomor *handphone*, radio panggil, serta terlibat insiden kecil di Pelabuhan Bakauheni dengan sesama aparat, saat mereka akan membawa Andi Arief ke Jakarta.

Malahan, kejadian di Bakauheni itulah yang dijadikan awal penyelidikan. Dan Puspom ABRI Mayjen Syamsu Djalaluddin mengaku mengurai benang kusut kasus penculikan aktivis ini lewat insiden itu. Ia meminta laporan insiden di Pelabuhan Bakauheni, kepada POM ABRI di sana. Selanjutnya, Polisi Militer Daerah Militer II Sriwijaya Detasemen II/3 mulai menyelisik ulang peristiwa tersebut. Kejadian itu memang terjadi hanya selang dua jam dengan aksi penculikan terhadap Ketua Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (Smid), di toko alat musik "Studio 4 Musik", milik salah seorang kakaknya di Way Halim, Bandar Lampung. Perjalanan Bandar Lampung-Bakauheni secara normal bisa ditempuh kendaraan selama dua jam.

Operasi penculikan Andi dilakukan oleh lima orang berpakaian preman. Ketika itu jam menunjukkan sekitar pukul 11.00. Tiga orang di antaranya berambut cepak dan dua lainnya berambut gondrong. Secara kilat mereka masuk ke toko dan langsung menodongkan pistol. Seorang lagi memborgol lengan Andi Arief, dan menyeret paksa masuk ke dalam mobil Kijang LGX. Lantas secepatnya mobil itu melesat ke arah Pelabuhan Bakauheni.

Sekitar pukul 13.00 terjadi insiden di Pelabuhan Bakauheni. Kisahnya, setelah penculik tiba di pelabuhan, mobil yang membawa

MEREKA YANG MASIH HILANG. Kepastian nasib mereka masih ditunggu keluarga.

Tajuk
23 Juli 1998

Catatan dari Sarang Penculik (2)

Mau Jadi Suami Eva Arnaz?

DIBANDING kan-rekan yang an, mungkin saya k terlalu parah siksa. Yang paling ya rasakan ada-h, tangan saya di-gol dua, diikat-n di kursi, dan ta saya ditutup. berlangsung tan-putus selama 10 r.

Dalam keadaan ang, saya sulit berpikir. Jadi, yang-bayang masa lalu mun-. Dugaan saya, yang mereka tanyakan adalah informasi banyak-banyaknya, supaya a ingat yang sudah-sudah.

Setahu saya, mereka yang alik yang sempat bertemu a di sel, ada tiga orang: Wa-o Jati, Haryanto Taslam, dan sol Reza. Kami sempat berca-cakap. Ini bermula dari ma-

na, apa saja penyik-saan yang dialami, kami diskusi, dan mereka sudah men-ceritakan (ketika di-lepas), kecuali Har-yanto Taslam. Saat saya di sana, Har-yanto dalam keada-an sakit, merintih-rintih, dan sempat diperiksa dokter.

Ketika saya di ruangan atas, ada ju-ga keteledoran para penculik. Penjaga saya sempat menyebut nama beberapa orang — Aan Rusdiyanto, Mugiyanto, Faisol Resa, Waluyo Jati, Suyat, Her-man Hendrawan, Pius, Desmon, dan Dedi Hamdun.

Khusus Dedi (suami Eva Ar-naz), mereka bilang, 'Mas Andi baik-baiklah kalau menjawab pertanyaan, supaya tak di-Dedi Hamdun-kan'. Saya bingung. Apa maksudnya mau dijadikan suami Eva Arnaz? Hahahaha...

Saya bisa berdiskusi pan-jang dengan penculik. Mereka tak melakukan kekerasan pada saya. Bahkan ada yang sering merangkul saya: 'Aduh, Mas Andi, kami terpaksa karena menjalankan tugas.' Mungkin hati kecil mereka menolak juga. Kami sempat diskusi soal Tim-tim.

Komandannya cerita bahwa dia baru beberapa minggu pu-lang sekolah dari Inggris — dia sebut nama sekolah, saya lupa namanya. Ada rasa keleluarga-an. Sampai-sampai dia keluar-kan kaset kecil berisi lagu *so-undtrack* film *Pocahontas*.

'Ini lagu kesenangan anak saya!' Dia sebut nama anaknya dan dia menelepon anaknya. 'Halo, ini papa di Jakarta. Ka-

Bersambung ke hal. 4

Bernas
25 Juli 1998

kapten. Setelah mengeluarkan "surat tugas" anggota POM membiarkan Kijang berlalu. Kelak, insiden di lambung Kapal Feri Mufida itu menjadi salah satu titik penting penyelidikan Puspom mengurai kasus penculikan aktivis prodemokrasi ini.

Kembali ke cerita perjalanan Andi Arief. Dari kapal hingga mobil masuk ke Kebon Jeruk, tutup mata Andi Arief dibuka. Ia mengetahui bahwa ia sudah masuk ke Kebon Jeruk karena mobil mereka antre di gerbang tol. Dari titik itulah mata Andi Arief kembali disarungi kain hitam hingga mereka tiba di tempat "X". Sesampainya di "X", Andi mendengar orang-orang berteriak dan tertawa, "Ini, toh, yang namanya AA!".

Dengan mata tetap tertutup Andi lalu dimasukkan ke sebuah ruangan "meeting" di lantai atas dengan jarak tu-run dari mobil lebih kurang 10 meter. Andi menyebut itu ruang "meeting" karena ada yang menyebutnya demiki-an. Andi disimpan di ruang ini sejak kedatangan hingga 6 April. Lalu, ia dipindah ke ruangan bawah dengan menu-runi tangga-tangga yang ternyata adalah sel. Radio dipu-tar keras-keras. Satu sel diisi satu orang. Semuanya diam. Andi lalu mendengar ada takbiran (7 April, Idul Adha). Andi penasaran, siapa gerangan tetangga selnya.

Sesungguhnya, dari ruang atas atau "meeting", Andi Arief mendengar percakapan para interogatornya menyebut sejumlah nama yang sangat akrab dengannya, seperti Aan Rusdianto, Mugiyanto, Faisol Reza, Rahardjo Waluyo Jati, Suyat, Herman Hendrawan, Pius, Desmond, dan Deddy Hamdun.

Seturut pengakuan Andi Arief, sebagaimana ia tuturkan kepada Koordinator Kontras, Munir, Andi disiksa habis-habisan. Kedua tangannya diborgol. Kakinya diikat di meja. Andi tak bisa buang air besar dan makan pun disuapi. Ada enam orang menggarap Andi sembari menempelkan pistol ke tubuhnya. Jika macam-macam, mereka tak sungkan-sungkan menembaknya.

Salah satu penculik bilang ke telinga Andi, "Mas Andi baik-baiklah kalau menjawab pertanyaan supaya tak di-Deddy Hamdun-kan."

Setelah selesai digarap di "X", para penculik menyerahkan Andi Arief ke Mabes Polri pada 17 April 1998. Memang, Andi termasuk buronan polisi lantaran diduga terlibat kasus ledakan bom di rumah susun Tanah Tinggi. Menurut ayah Andi, Arief Makhya, keluarga baru menerima surat penahanan pada 23 April. Isinya ganjil pula. Disebutkan, Andi ditahan sejak 29 Maret 1998. Padahal, sebelumnya Kapolri Jenderal Dibyo Widodo menyatakan di hadapan jurnalis tak tahu-menahu soal kasus Andi Arief.

Andi Arief betul-betul bisa kembali menghirup udara bebas pada 14 Juli 1998. Tepatnya, malam hari. Ia langsung pulang ke Lampung, tanah tumpah darahnya.

(*) Disarikan dari Bernas *("Catatan dari Sarang Penculik (1): Lapor, Ambon-Ambon Sudah di Tangan!", 23 Juli 1998; "Catatan dari Sarang Penculik (2): Mau Jadi Suami Eva Arnaz", 24 Juli 1998; "Catatan dari Sarang Penculik (3): Khawatir Amien Rais Jadi Presiden", 25 Juli 1998), Tajuk ("Insiden di Atas Feri Mufida", 23 Juli 1998),* Forum Keadilan *("Membentuk Tim, Mencari Penculik, 18 Mei 1998),* Panji Masyarakat *("Raibnya Para Aktivis", 1 April 1998; "Andi Arief: Tak Mungkin Inisiatif Prabowo Sendiri", 29 Juli 1998).*

BODICH

KELUARGA HARYANTO TASLAM DI LBH. **Belum banyak cerita yang terungkap.**

LIPUTAN UTAMA

Cerita Wewegombel dan Orang-Orang Hilang

Sejumlah yang "hilang" mulai pulang. Hanya pengamen di Yogya yang mengadu ke LBH, selebihnya enggan bercerita. Perlu menunggu resolusi Komisi Hak-Hak Asasi Manusia PBB?

DI JAWA, DULU, KETIka pohon-pohon besar dan tinggi masih banyak, ada masanya orang tua bilang kepada anak-anak: "Jangan keluyuran di waktu *surup*, kamu nanti digondol *wewegombel*." *Surup*, itulah magrib; dan *wewe* adalah hantu berambut panjang, bisa terbang, dan suka menculik anak-anak yang kemudian, konon, anak itu ditemukan *nongkrong* di pohon tinggi. Konon, anak yang digondol *wewe*, setelah ditemukan, mulutnya seperti terkunci. Bila kemudian ia sadar lagi, biasanya ia lupa apa yang terjadi.

Kisah orang hilang di Tanah Air belakangan ini seperti kisah *wewe* itu. Yang hilang pun adalah "anak-anak nakal" yang suka "bikin onar". Juga, seperti kisah penculikan oleh *wewe* yang kemudian si anak yang diculik muncul lagi "di pohon tinggi", orang-orang yang muncul lagi kini juga berada di luar Jakarta, padahal konon "hilangnya" di Jakarta. Konon, biasanya, anak yang dibawa *wewe* ketika ditemukan mulutnya seolah terkunci. Barangkali, ia terteror oleh bentuk dan perilaku sang *wewegombel*. Siapa tahu, mereka yang muncul lagi dan tak mau bicara pun terteror oleh yang mereka alami selama "hilang".

Yang jelas, para orang tua kita tampaknya tak ingin mengetahui secara persis siapa dan apa itu *wewegombel*—memang hantu atau suatu ide untuk membuat anak-anak patuh duduk di rumah di kala magrib. Juga, di Indonesia sekarang sepertinya pihak kepolisian kurang proaktif, melainkan menunggu laporan. Bahkan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkesan pasif. Misalnya, kenapa mereka tak menemui yang muncul lagi yang tak mau bercerita kepada wartawan sekalipun itu (Pius Lustrilanang, Haryanto Taslam, umpamanya)?

Sejauh ini, yang mencoba menemui me-

D&R
25 April 1998

nculikan — —

bali. Sidang dipimpin Ke-Majelis Hakim Kol (CHK) nto, dengan hakim anggota (CHK) Yamini dan Kol Drs pubolon. Sedangkan 11 ter-wa didampingi tim penasi-hukum dari Direktorat Hu-Angkatan Darat yang dike-Kol Rettob Abdullah.

ditur menjerat terdakwa m pasal 328 KUHP jo pasal yat (1) ke-1 KUHP atau Pa-33 ayat (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Pelanggar-asal 328 soal penculikan di-n hukuman 12 tahun pen-Sidang dilanjutkan 31 De-er dengan acara pemba-eksepsi penasihat hukum wa.

Tim Mawar

lam dakwaan diuraikan, bulan Juli 1997 Mayor ng Kristiono membentuk "Tim Mawar" yang ber-kan 10 orang. Menurut n Bambang, yang pada dian menjabat sebagai menengah yang diper-an kepada Komandan al Kopassus, tindakan ktivis yang dianggap radi-kan mengganggu stabilitas nal. Hal ini diperkuat de-adanya kegiatan para ak-tersebut yang diduga ikut lalangi kejadian-kejadian ti misalnya aksi unjuk rasa. intah Bambang kepada

(Sambungan dari halaman 1)

terdakwa lainnya adalah operasi yang bersifat sangat rahasia dan tertutup. Operasi menggunakan metoda hitam dengan posko berdiri sendiri. Dari hasil pemantauan Tim Mawar, Mayor Bambang mengambil kesimpulan, aksi kerusuhan telah membahayakan dan mengancam stabilitas nasional. Dari informasi yang berhasil dikumpulkan ditemukan daftar nama yang tergolong radikal, antara lain saksi Andi Arief dan saksi Nezar Patria, demikian Oditur Militer.

Penangkapan dan penculikan dilakukan sebuah tim kecil yang terdiri dari rata-rata tiga sampai empat orang anggota "Tim Mawar", yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terlebih dulu mengenai kegiatan-kegiatan para calon korban mereka. Penculikan dilakukan di beberapa tempat di Jakarta dan Lampung.

Ditabrak

Dalam "pengambilan" Haryanto Taslam, misalnya, Oditur menguraikan, setelah mengamati daerah Pondok Gede, 8 Maret 1998 sekitar pukul 18.45 WIB, terdakwa II Kapten Multhazar melihat Haryanto Taslam muncul mengendarai mobil merk Lancer, kemudian memerintahkan terdakwa V Kapten Untung Budi dan anggotanya untuk menyelidiki dan menangkap Haryanto Taslam di tempat yang memungkinkan tanpa menimbulkan keributan.

Sekitar pukul 19.15 WIB, setelah melewati jalan pintu utama Taman Mini, mobil yang dikemudikan terdakwa VI Kapten Dadang Hendra dan dipimpin terdakwa V Kapten Untung Budi Harto langsung menabrak mobil yang dikemudikan Haryanto sehingga ia menghentikan mobilnya dan keluar dari mobil. Kesempatan ini dimanfaatkan terdakwa Untung dengan menghampiri Haryanto. Namun, Haryanto mengatakan, "Tidak apa-apa dan tidak mempersoalkan masalah tabrakan tersebut", sedangkan terdakwa IV Kapten Yulius Selvanus minta agar diselesaikan di tempat lain.

Haryanto kemudian dibawa masuk ke dalam mobil Kijang cokelat bernomor polisi B 1428 BD, sedangkan mobil milik Haryanto diserahkan terdakwa V Untung Budi kepada terdakwa II Multhazar. Selanjutnya, terdakwa V Untung Budi mengambil alih kemudi mobil dan langsung menuju Poskotis Cijantung. Selama dalam perjalanan, Haryanto dibergol dan matanya ditutup dengan saputangan.

Saksi

Oditur meminta pengadilan memanggil 17 orang sebagai saksi, yaitu delapan korban penculikan (hanya Rahardjo Waluyo Djati yang tidak dipanggil sebagai saksi), Kapten (Inf) Sudarso (Perwira Seksi Operasi Kodim 0505/BS Jaktim), Serka Sutomo (Babinsa Malaka Jaya, Duren Sawit, Jaktim), Sertu Siwanto (Kodim 0505/BS Jaktim), Letkol (Pol) Kamaludin Lubis (Wakil Direktur Serse Umum Korserse Polri), Lettu (Pol) Pandit Purnawa (Perwira Unit Sat Idik Upal Ditserse Mabes Polri), Mujiono (Ditserse Polda Metro Jaya), Sutjipto HN (Ketua RT 004/01 Kel Malaka Jaya, Duren Sawit, Jaktim), Syahdan (penjaga toko milik kakak Andi Arief di Lampung), dan HM Arief Mahya (ayah Andi Arief).

Usai sidang, ketika ditanya mengenai upaya pembelaan terhadap terdakwa, penasihat hukum Kol Rettob Abdullah enggan berkomentar banyak. "Nanti kamu ikuti saja perkembangannya. Nanti kamu pasti tahu," katanya singkat.

Sedangkan Oditur Kol Harom mengatakan, dalam pemeriksaan nanti cukup terbuka kemungkinan ditemukan fakta baru, misalnya mengenai korban penculikan lain yang saat ini nasibnya belum jelas, dan keterlibatan para perwira tinggi Kopassus, termasuk mantan Komandan Jenderal Kopassus Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto. "Sementara ini berkas yang saya terima tidak menyebutkan soal korban penculikan lain dan keterlibatan orang lain di luar kesebelas terdakwa ini," jelasnya. **(bb/oki)**

HARYANTO TASLAM

Kompas
24 Desember 1998

Tanggal 8 Maret 1998, antara magrib dan isya. Setelah mengamati secara cermat di daerah Pondok Gede, Kapten Multhazar melihat Haryanto Taslam muncul mengendarai mobil merek Lancer. Ia lalu menyuruh Untung Budi dan anggotanya untuk menyelidiki dan menangkap Haryanto Taslam di tempat yang memungkinkan tanpa menimbulkan keributan.

Setelah melewati jalan pintu utama Taman Mini Indonesia Indah, mobil Kijang yang dikemudikan Dadang Hendra langsung menabrak mobil yang dikemudikan Haryanto. Rupanya, tim memakai skenario kecelakaan lalu lintas. Lokasi "kecelakaan" berada di pertigaan Jl Arab, Kampung Rambutan, Jakarta

Sekitar sebulan di tangan penculik, 14 April 1998, Haryanto dibawa ke Bandara Husein Sastra Negara, Bandung. Di tangannya tersedia tiket Merpati tujuan Surabaya. Tidak seperti Pius, Haryanto tak mau buka suara, setelah lepas dari tangan penculik, Hartas —panggilan akrabnya— lebih banyak tutup mulut. Ia khawatir anak istrinya menjadi korban. Mengapa? Pelaku mengancam akan menghabisi keluarganya kalau angkat bicara soal penculikan dan penyiksaan.

| ***Haryanto Taslam**, sekjen DPP PDI Perjuangan dan korban penculikan, dalam berita Bangkit ("Aksi di Siang Bolong", 28 Desember 1998).*

Merasa ditabrak, Haryanto menghentikan mobilnya. Ia kemudian keluar. Untung Budi Harto langsung menyambangi. "Tidak apa-apa," kata Wakil Sekjen DPP PDI Megawati Soekarnoputri ini.

Kendati dicurangi, Haryanto memilih ngalah. Tetapi, para penabrak yang terdiri dari beberapa orang berambut cepak, justru mendesak. Kapten Yulius Selvanus berteriak, "Ayo kita selesaikan di tempat lain."

Haryanto kemudian dibawa masuk ke dalam mobil Kijang cokelat bernomor polisi B 1428 BD, sedangkan mobil milik Haryanto diserahkan Untung Budi Harto ke Multhazar. Selanjutnya, Untung mengambil alih kemudi mobil dan langsung menuju Poskotis Cijantung.

Bangkit
28 Desember 1998

M MAWAR

Selama dalam perjalanan, kedua tangan Haryanto diborgol dan matanya ditutup dengan sapu tangan. Selama dalam mobil, Haryanto tidak disiksa. Bahkan, saat ia bilang kesakitan karena borgolnya sempit, penculik bersedia melepas dan memindahkan borgol itu di depan. Saat Haryanto mengeluh tak bisa bernapas karena kain hitam penutup mata menutupi hidung, para penculik memperbaik letak penutup tersebut.

Haryanto Taslam

"Soeharto Paling Berkepentingan"

Wawancara: Ia yakin sejak awal, yang melakukan adalah ABRI. Soeharto dianggap tahu.

Wakil Sekjen PDI versi Munas, Haryanto Taslam, termasuk korban penculikan yang dibebaskan sejak awal Mei lalu. Meski ia datang ke Komnas HAM, tapi ia tak mau mengungkapkan proses penculikan dan yang dialami selama penculikan. Ini banyak yang menyayangkan. Tapi, ia punya pendirian lain. Haryanto yang sekarang bekerja di tabloid *DeTak* mengisahkan tentang penculikan dan kesaksian motivasi politik di balik penculikan kepada Pracoyo Wiryoutomo dari *Panji*. Berikut petikannya.

Kenapa Anda tidak mau menjelaskan kisah penculikan?

Itu tidak penting sekarang. Yang pertama, setelah mengetahui dari saksi-saksi korban, adalah mengungkap motif politik di belakang penculikan itu. Apakah memang ada politisasi dari satuan ABRI, dan dijadikan alat untuk membersihkan gangguan terhadap kekuasaan. Ini penting agar kita semua tahu bahwa memang demikian rendahnya moralitas penguasa pada saat itu. Mereka menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Yang kedua, penyelamatan dari korban-korban yang belum jelas nasibnya sampai hari ini.

Anda sendiri menilai motif politik penculikan terhadap Anda itu apa?

Saya kira karena ketakutan bahwa kelanggengan kekuasaan akan terganggu menjelang Sidang Umum MPR.

Apa kaitannya dengan aktivitas Anda di PDI?

Oh pasti. Dari dulu kenapa Mega disingkirkan karena dianggap sebagai ancaman dari *status quo*. Penghilangan orang secara paksa itu kan di sekitar Sidang Umum MPR, ini jelas motifnya politik dalam kaitan dengan kelangsungan kekuasaan.

Semua aktivis politik yang diculik adalah mereka yang mendambakan kehiduan demokrasi. Jadi, mereka ini lawan politik kekuasaan?

Ya, gerakan-gerakan demokrasi dianggap mengganggu proses kelanggengan kekuasaan.

Saat diinterogasi, Anda ditanyai soal rencana pengerahan massa satu juta orang ke DPR. Bagaimana sebenarnya?

Itu hanya ketakutan saja. Mereka ketakutan oleh bayangan sendiri. Kalau saya bisa mengerahkan satu juta orang, wah betapa hebatnya saya. Saya memang ditanya soal itu, ya saya jawab. Kalau saya mampu mengerahkan satu juta orang, betapa hebatnya saya. Sebelum ditangkap saya memang mendengar tuduhan itu, saya anggap sepele. Saya ketawa saja. Saya malah bangga. Itu kan hanya isu yang mereka ciptakan sendiri. Siapa pihak-pihak di balik penculikan itu secara logika politik bisa ditebak.

Haryanto Taslam: Mereka takut bayangan sendiri

Anda juga disiksa?

Saya tidak disiksa seperti yang lain. Mereka menghormati saya, tidak dipukul atau dikerasi. Saya malah berdebat dengan yang menginterogasi.

Bila bermotifkan politik, berarti Panglima Tertinggi ABRI mengetahuinya.

Saya katakan, karena motivasi politik kan untuk mengamankan Sidang Umum MPR, maka bisa diperkirakan dengan mudah siapa yang paling berkepentingan dengan suksesnya sidang umum. Ya, itu bisa Anda perkirakan.

Bisa dikatakan Presiden Soeharto kala itu yang berkepentingan?

Ya, kita tidak bisa menuduh langsung Soeharto. Analisisnya memang begitu, mengarah kepada Soeharto karena dialah pihak yang paling berkepentingan. Nah, apa benar Soeharto sendiri? Selain itu, pangab sebagai pihak penanggung jawab keamanan secara nasional juga tahu. Secara operasional Kodam Jaya yang sampai mengerahkan 27.000 personel, itu kan kelihatan sekali.

Anda yakin penculikan itu murni bukan hanya inisiatif Kopassus saja?

Kalau betul-betul aparat, apalagi jumlahnya tidak satu dua orang. Secara logika, mana mungkin mereka berbuat begitu atas inisiatif sendiri. Mereka ini kan pasukan elite, terkenal punya disiplin ketat dan keterampilan tinggi. Jadi, tidak mungkin apa yang mereka lakukan bukan atas sepengetahuan dan perintah atasan. Apa kepentingan mereka melakukan penculikan?

Sejak diculik, Anda punya keyakinan pasukan ABRI yang melakukan?

Saya tidak bisa membayangkan. Tetapi saya punya keyakinan yang melakukan aparat ABRI. Indikasinya dari kecepatan mereka bertindak, orang-orang yang benar-benar terlatih, senjata dan peralatan lain yang dipergunakan, borgol dan perlengkapan dalam menginterogasi. Ruang tahanan yang benar-benar disiapkan, benar-benar penjara yang hebat. Bukan penjara-penjaraan.

Supaya tidak terulang lagi, apa yang mesti diperbuat ABRI dan pemerintah?

Secara hukum harus ada ketentuan-ketentuan yang jelas melarang penghilangan secara paksa dan tindak kekerasan. Itu harus. Selain itu, juga harus ada kedewasaan dari pemerintah dan ABRI untuk lebih menghargai perbedaan pendapat. Jangan hanya karena berbeda pendapat, dan mentang-mentang karena kekuasaan, menggunakan kekuasaan untuk menghabisi pihak yang berbeda pendapat.

Dikatakan ada 10 tersangka, Anda masih mengenali mereka atau tidak?

Sudah lupa. Dulu saya ditangkap kan di dekat Taman Mini (rumah Haryanto di dekat Asrama Haji Pondok Gede). Saya waktu itu, karena kondisi politik, jarang pulang ke rumah. Pas-pulang ke rumah, rupanya mungkin saya sudah ditunggu. Saat meninggalkan rumah, tiba di tempat yang agak gelap, mobil saya ditabrak. Otomatis saya keluar. Nah, saat itulah saya langsung dimasukkan ke mobil, ditutup kain hitam, dan diborgol. Selain itu, situasinya agak remang-remang, berlangsung cepat, dan saya kurang memperhatikan. ■

Panji Masyarakat
29 Juli 1998

rakyat, ujarnya.
Amien mengusulkan agar

sul tindakan aparat militer yang menganiaya empat tahanan

situasi di mana persoalan Aceh sedang mendapat sorotan inter-

Saksi — —

agar nasib 13 korban penculikan yang hilang dijelaskan. "Apakah terdakwa itu bukan pelaku penculikan yang dibawa ke Polda. Sebab ada korban penculikan, seperti Aan Rusdianto, Nezar Pratia, dan Mugiyanto yang dibawa ke Polda," paparnya lagi.

Akhirnya, majelis hakim memutuskan tidak mendengarkan kesaksian Desmond. "Silakan saksi pikir-pikir. Kalau nanti ingin memberikan keterangan, silakan menghubungi Oditur," papar Susanto.

Selain Desmond, korban penculikan lainnya Aan Rusdianto pun tak bersedia memberikan keterangan. Sikap penolakan itu sebagai ungkapan solidaritas dan keprihatinan terhadap persoalan di Aceh, yang adalah korban militerisme pula.

Mobil dibeli

Sementara Wakil Sekjen PDI

(Sambungan dari halaman 1)

Perjuangan Haryanto Taslam bersedia memberikan kesaksian. "Saya tidak mengenal terdakwa. Karena itu, apa yang saya sampaikan di persidangan ini cuma menyangkut apa yang saya alami, dan tidak terkait dengan terdakwa," tandasnya. Pernyataan itu diterima majelis hakim, walau saat bersumpah sebagai saksi, Haryanto tetap menyebut nama terdakwa.

Menurut Haryanto, penculikan yang menimpanya terjadi 8 Maret 1998, sekitar pukul 19.00 WIB. Mobil sedan yang dikendarainya ditabrak dari belakang oleh mobil Toyota Kijang warna gelap di dekat Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Pengendara mobil Kijang tersebut menawari ke bengkel. Tetapi karena kerusakan mobilnya tidak terlalu parah, Haryanto menolak. Saat itu dua penumpang mobil Toyota Kijang memaksanya masuk ke dalam mobil penabrak tersebut.

Di dalam mobil, Haryanto mengaku diborgol dan ditutup matanya dengan kain hitam. "Selama dalam mobil, saya tidak disiksa. Bahkan, saat saya bilang kesakitan, sebab borgolnya sempit, mereka bersedia melepas dan memindahkan borgol itu di depan. Saat saya mengeluh tak bisa bernapas, sebab kain hitam penutup mata menutup hidung, mereka pun memperbaiki penutup tersebut," jelasnya.

Selama dibawa dan dimasukkan ke dalam sel di suatu tempat yang tidak diketahuinya, Haryanto mengaku sangat tertekan. Ia tak ingat lagi mobil yang dikendarainya saat diculik. Tetapi oleh pelaku mobil itu akhirnya dibeli seharga Rp 7 juta, karena di bawah tangan, dan tanpa surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Namun waktu dirinya akan dilepaskan, uang pembelian mobil itu ditambah menjadi Rp 16 juta.

Selama disekap sampai tang-

Tak Boleh — —

(Sambungan dari halaman 1)

lalu, Bulog memanfaatkan beras asal Jepang ini untuk operasi

Sekitar sebulan sepuluh hari di tangan penculik, 14 April 1998, Haryanto dibawa ke Bandara Husein Sastranegara, Bandung. Di tangannya tersedia tiket pesawat Merpati tujuan Surabaya. Sejak saat itu, Haryanto tak mau buka suara, setelah lepas dari tangan penculik. Hartas lebih banyak tutup mulut. Ia mengkhawatirkan anak istrinya menjadi korban. Mengapa? Karena ia dibisiki ancaman akan menghabisi keluarganya kalau angkat bicara soal penculikan dan penyiksaan.

Bagaimana dengan nasib mobil Haryanto Taslam yang ditabrak para penculik? Mobil yang dikendarainya saat diculik itu dibeli seharga Rp7 juta rupiah karena di bawah tangan dan tanpa surat Bukti Kepemilikan Kendaraan

mental panjang terhadap peristiwa itu. "Saya betul-betul terkejut. Tak menyangka, sekelom-

mawe, Subagyo menegaskan mereka harus ditindak tegas. **(mba/nj/uu/ksp/ful)**

gal 14 April 1998 — sekitar 40 hari Haryanto mengemukakan, tidak diperlakukan kasar oleh penculiknya. Bahkan, ia cuma dua kali ditanyai mengenai aktivitas politiknya dan diminta membuat semacam laporan tentang aktivitasnya tersebut. Saat disekap, selain diberi pakaian, ia pun mengaku diberikan makan yang cukup tiga kali sehari.

Walaupun berbicara dengan penculiknya, Haryanto menyatakan, tak mengenal suara mereka. "Apakah, ada suara yang saksi kenal, misalnya suara Jenderal Prabowo?" tanya Oditur. Saksi menjawab, "Saya tidak mengetahuinya. Apalagi, saya tidak mengenal suara Prabowo."

Berkomunikasi

Di sel, Haryanto mengakui sempat berkomunikasi dengan korban penculikan yang lain, seperti Desmond, Pius, Andi Arief, Rahardjo Waluyojati, dan Faisol Reza. Mereka tak sempat bertemu langsung. Percakapan antarkorban itu dilakukan subuh, pukul 02.00 WIB, setelah siaran radio yang memenuhi ruangan sel habis, dan mereka hanya saling berbicara dari selnya masing-masing.

Haryanto menuturkan, ia dilepaskan di Bandung, 14 April 1998. "Saya sudah dibekali tiket ke Surabaya maupun uang Rp 4 juta. Saya diminta tidak segera pulang dan bersantai dulu. Namun saya tak bisa mengingat siapa pelaku penculikan itu," paparnya.

Setelah "di alam bebas", Haryanto mengutarakan, sempat dihubungi pelaku penculikan itu melalui telepon. Dalam menghubunginya, pelaku tak menyebutkan jati dirinya, kecuali menyebut inisialnya "BM". "Saya tidak tahu siapa "BM" itu. Tetapi mereka menyebutnya sebagai "Burung Malam". Sampai sekarang saya tidak pernah dihubungi lagi," katanya. **(tra)**

tetapi mereka harus membayar angkos dari gudang Bulog ke

ganti. Jadi bukan orang Bulog/Dolog yang minta ongkos,"

Kompas
13 Januari 1999

Bermotor (BPKB). Namun, sewaktu dirinya akan dilepaskan, uang pembelian mobil itu ditambah menjadi Rp16 juta rupiah.

Saat "di alam bebas", Haryanto Taslam sempat dihubungi pelaku penculikan via telepon. Pelaku tak menyebutkan identitasnya kecuali inisial "BM" atau "Burung Malam".

(*) Disarikan dari D&R *("Cerita Wewegombel dan Orang-Orang Hilang", 25 April 1998),* Kompas *("Penculikan Dilakukan atas Panggilan Nurani", 24 Desember 1998),* Bangkit *("Aksi di Siang Bolong", 28 Desember 1998),* Panji Masyarakat *("Haryanto Taslam: Soeharto Paling Berkepentingan", 29 Juli 1998).*

Jeritan hati keluarg

JIKA MENINGGAL DI

Pengantar Redaksi: Masih ada lagi 14 korban penculikan yang belum kembali. Ada apa dibalik semua ini? Pos Kota menurunkan tulisan ini dari sisi keluarga. Semoga bermanfaat.

TERUNGKAPNYA kasus penculikan terhadap para aktivis yang ternyata dilakukan oleh oknum

KISAH LAINNYA BACA BESOK

Komando Pasukan Khusus (Kopassus), sempat memberi harapan besar bagi keluarga 14 korban penculikan lain yang hingga kini

ke hal. 8 kol. 1

Manajer PSSI terlibat korupsi R

Presiden beri izin Nurdin Halid

Hajah Aliyah. (yo)

Achmad Yusuf. (sur)

Keluarga 9 korban Gresik

Pemda Bogor tutup tempat hiburan malam

Tangani Prabowo soal kasus penculikan

Wiranto besok umumkan DKM

ACHMAD YUSUF

Achmad Yusuf tinggal di Jalan Raden Saleh II, Jakarta Pusat. Menurut ibu Achmad Yusuf, Hj. Aliyah, anaknya tersebut terakhir meninggalkan rumah pada 7 Mei 1997 pukul 08.00 dengan alasan hendak pergi ke rumah teman.

Sejak saat itu, Yusuf tidak pernah kembali ke rumah atau memberi kabar kepada orang tuanya. Di rumah, orang tua Yusuf diliputi waswas memikirkan nasib anaknya.

Perasaan tersebut beralasan karena selama ini Yusuf tidak pernah meninggalkan rumah lebih dari sehari. Jika akan pergi ke suatu tempat, ia pun selalu memberitahu orang tua.

Pihak keluarga kemudian mencari keberadaan Yusuf. Tak lupa pula mereka mendatangi seluruh rumah sakit yang ada di Jabodetabek atau mendatangi rumah sanak

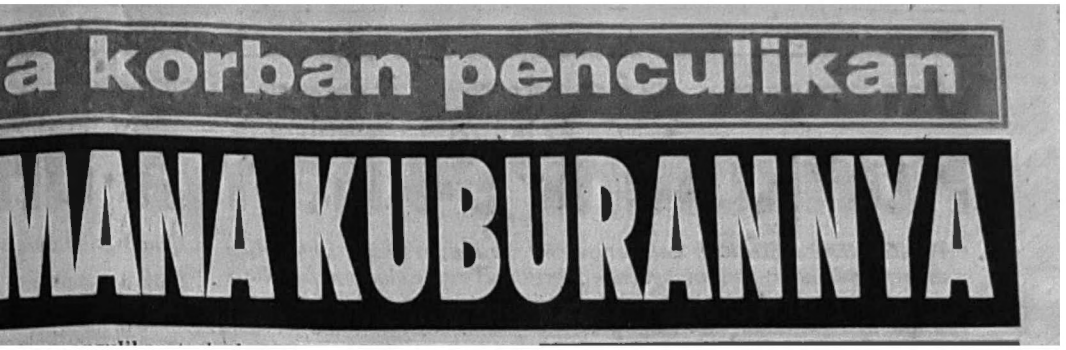
a korban penculikan
MANA KUBURANNYA

Pos Kota
2 Agustus 1998

saudara, teman, dan handai taulan. Tapi, jejak lelaki muda ini tak juga ditemukan.

Kegelisahan akan nasib Yusuf terus membebani keluarganya. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, kemudian berganti bulan dan tahun, tidak juga diketahui nasib anak keenam dari sepuluh bersaudara ini. Tak berhenti ibunya berdoa agar Yusuf diberi kekuatan oleh Allah Swt.

Setelah dilaporkan ke polisi dan tidak mendapat berita tentang nasib Yusuf, pihak keluarga akhirnya melapor ke Puspom ABRI, LBH Jakarta, dan Komnas HAM. Ketiga instansi itu menjadi tujuan pelaporan karena menyusul perkembangan semakin maraknya aksi penculikan terhadap para aktivis.

Sebagai orang tua Yusuf, Hj. Aliyah sangat merindukan anaknya, apalagi sudah 14 bulan tidak pernah bertemu. Dirinya merasa heran jika anaknya diculik dengan alasan terlibat kegiatan politik.

Sepengetahuannya, Yusuf tidak pernah mengikuti kegiatan politik apa pun. Yang ia tahu Yusuf memang merupakan simpatisan PPP dan rajin mengikuti berbagai kegiatan sosial maupun pengajian seperti di Kwitang dan Mangga Dua.

Itulah sebabnya, ia merasa heran jika Yusuf benar-benar menjadi korban penculikan dengan alasan sebagai aktivis. Karena selama ini anaknya tidak pernah menjadi anggota lembaga swadaya masyarakat tertentu. Kalau Yusuf diculik, mungkin si penculik salah sasaran.

JIKA MENINGGAL DI MANA ..... (Sambungan dari hal. 1)

belum diketahui dimana rimbanya.

Berdasarkan catatan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), lembaga yang berjuang membela korban penculikan yang dibentuk LBH Jakarta, terdapat 14 orang yang saat ini belum kembali ke pihak keluarganya. Salah satu di antaranya Achmad Yusuf.

Menurut Hj. Aliyah, 59, ibu kandung Achmad Yusuf, saat dijumpai di rumahnya di Jalan Raden Saleh II, Jakarta Pusat, anaknya terakhir meninggalkan rumah pada 7 Mei 1997 pukul 08.00, dengan alasan hendak pergi ke rumah teman.

Sejak saat itu Yusuf, panggilan akrab Achmad Yusuf, tidak pernah kembali ke rumah atau memberi kabar kepada orangtuanya. "Kami selalu was-was memikirkan nasib Yusuf," ujarnya sedih. Perasaan tersebut beralasan karena selama ini Yusuf tidak pernah pergi meninggalkan rumah lebih dari sehari. Jika akan pergi ke suatu tempat, ia pun selalu memberitahu orangtua.

Pihak keluarga kemudian mencari keberadaan Yusuf. Tak lupa pula mereka mendatangi seluruh rumah sakit yang ada di Jabotabek atau mendatangi rumah sanak saudara, teman dan handai taulan. Tapi jejak lelaki ini tak juga ditemukan.

Kegelisahan akan nasib Yusuf terus membebani keluarganya. Dari hari ke hari, minggu ke minggu kemudian berganti bulan dan tahun, tidak juga diketahui nasib anak keenam dari sepuluh bersaudara ini. "Kami tidak henti berdoa agar Yusuf diberi kekuatan oleh Allah," kata Hj. Aliyah penuh harap.

Setelah dilaporkan ke polisi dan tidak mendapat berita tentang nasib Yusuf, pihak keluarga akhirnya melaporkan ke Puspom ABRI, LBH Jakarta dan Komnas HAM. Ketiga instansi ini dilaporkan, karena menyusul perkembangan semakin maraknya aksi penculikan terhadap para aktivis.

Simpatisan PPP

Hajah Aliyah menambahkan sebagai orang tua Yusuf, ia sangat merindukan anaknya, apalagi sudah 14 bulan tidak pernah bertemu. Dirinya merasa heran jika anaknya diculik dengan alasan terlibat kegiatan politik.

Sepengetahuannya, Yusuf tidak pernah mengikuti kegiatan politik apa pun. "Yang saya tahu Yusuf merupakan simpatisan PPP dan rajin mengikuti berbagai kegia-

Oleh karena itu, Hj. Aliyah mengimbau kepada pemerintah agar mengembalikan anaknya jika masih hidup atau memberi tahu kuburannya jika sudah meninggal. Keluarga sudah pasrah dan rela untuk menerima kehadiran Yusuf dalam keadaan yang terburuk pun.

Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat setempat, Yusuf termasuk dekat dengan temannya. Setelah lulus SMA Negeri 4 Gambir tahun 1988, ia melanjutkan kuliahnya di Universitas Indonesia Jurusan Kimia (D3).

Untuk mengembangkan ilmu yang diterima dari bangku kuliahnya, Yusuf kemudian mengajar di salah satu SMU swasta di Jakarta Pusat selama tiga tahun. Selama mengajar tersebut, Yusuf aktif menggerakkan siswanya menjadi anggota pecinta alam dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Tidak mengherankan bila sejak menghilangnya Yusuf di tengah keluarga, banyak rekannya dari SMU atau UI yang datang menanyakan nasib lelaki muda yang murah senyum itu.

Hal yang membuat Ny. Aliyah bertambah sedih adalah saat menanti kepulangan sang anak, ayahanda Yusuf,

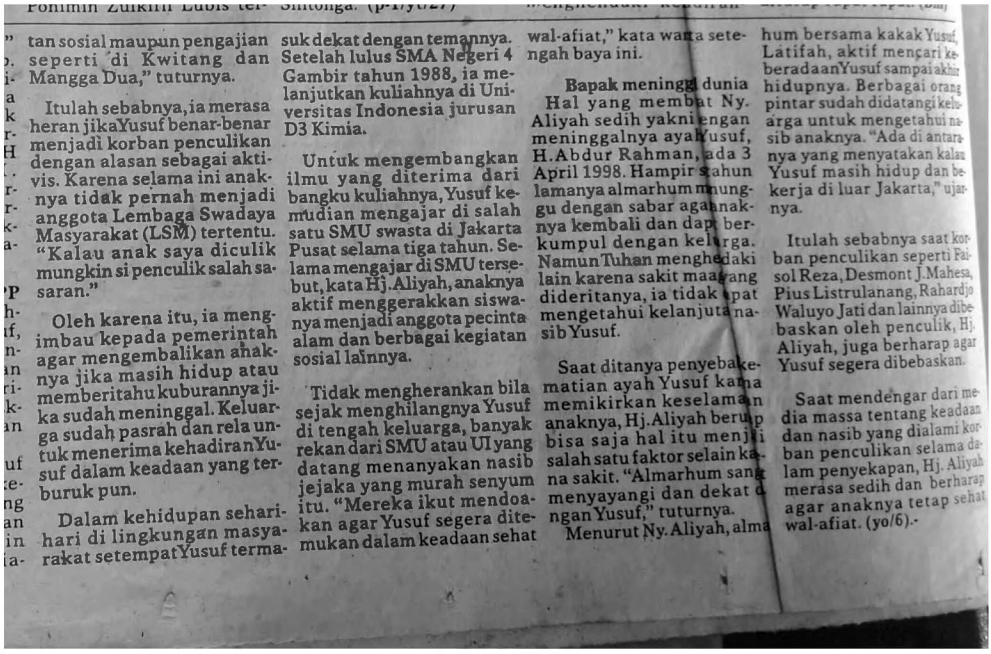

tan sosial maupun pengajian seperti di Kwitang dan Mangga Dua," tuturnya.

Itulah sebabnya, ia merasa heran jika Yusuf benar-benar menjadi korban penculikan dengan alasan sebagai aktivis. Karena selama ini anaknya tidak pernah menjadi anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tertentu. "Kalau anak saya diculik mungkin si penculik salah sasaran."

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada pemerintah agar mengembalikan anaknya jika masih hidup atau memberitahu kuburannya jika sudah meninggal. Keluarga sudah pasrah dan rela untuk menerima kehadiran Yusuf dalam keadaan yang terburuk pun.

Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat setempat Yusuf termasuk dekat dengan temannya. Setelah lulus SMA Negeri 4 Gambir tahun 1988, ia melanjutkan kuliahnya di Universitas Indonesia jurusan D3 Kimia.

Untuk mengembangkan ilmu yang diterima dari bangku kuliahnya, Yusuf kemudian mengajar di salah satu SMU swasta di Jakarta Pusat selama tiga tahun. Selama mengajar di SMU tersebut, kata Hj. Aliyah, anaknya aktif menggerakkan siswanya menjadi anggota pecinta alam dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Tidak mengherankan bila sejak menghilangnya Yusuf di tengah keluarga, banyak rekan dari SMU atau UI yang datang menanyakan nasib jejaka yang murah senyum itu. "Mereka ikut mendoakan agar Yusuf segera ditemukan dalam keadaan sehat wal-afiat," kata wanita setengah baya ini.

Bapak meninggal dunia

Hal yang membuat Ny. Aliyah sedih yakni dengan meninggalnya ayah Yusuf, H. Abdur Rahman, pada 3 April 1998. Hampir setahun lamanya almarhum menunggu dengan sabar agar anaknya kembali dan dapat berkumpul dengan keluarga. Namun Tuhan menghendaki lain karena sakit maag yang dideritanya, ia tidak dapat mengetahui kelanjutan nasib Yusuf.

Saat ditanya penyebab kematian ayah Yusuf karena memikirkan keselamatan anaknya, Hj. Aliyah berujar bisa saja hal itu menjadi salah satu faktor selain karena sakit. "Almarhum sangat menyayangi dan dekat dengan Yusuf," tuturnya.

Menurut Ny. Aliyah, almarhum bersama kakak Yusuf, Latifah, aktif mencari keberadaan Yusuf sampai akhir hidupnya. Berbagai orang pintar sudah didatangi keluarga untuk mengetahui nasib anaknya. "Ada di antaranya yang menyatakan kalau Yusuf masih hidup dan bekerja di luar Jakarta," ujarnya.

Itulah sebabnya saat korban penculikan seperti Faisol Reza, Desmont J. Mahesa, Pius Lustrulanang, Rahardjo Waluyo Jati dan lainnya dibebaskan oleh penculik, Hj. Aliyah, juga berharap agar Yusuf segera dibebaskan.

Saat mendengar dari media massa tentang keadaan dan nasib yang dialami korban penculikan selama dalam penyekapan, Hj. Aliyah merasa sedih dan berharap agar anaknya tetap sehat wal-afiat. (yo/6).-

Pos Kota
2 Agustus 1998

H. Abdur Rahman, meninggal dunia pada 3 April 1998. Hampir setahun lamanya almarhum menunggu dengan sabar agar anaknya kembali dan dapat berkumpul dengan keluarga. Namun, Tuhan menghendaki lain karena sakit mag yang dideritanya, ia tidak dapat mengetahui kelanjutan nasib Yusuf.

Saat masih hidup, H. Abdur Rahman bersama kakak Yusuf, Latifah, aktif mencari keberadaan Yusuf. Berbagai orang pintar sudah didatangi keluarga untuk mengetahui nasib anaknya. Ada yang bilang, Yusuf masih hidup dan bekerja di luar Jakarta.

Itulah sebabnya saat para korban penculikan dilepas oleh penculiknya, Hj. Aliyah berharap agar Yusuf segera dibebaskan. Saat mendengar dari media massa tentang keadaan dan nasib yang dialami korban penculikan selama dalam penyekapan, Hj. Aliyah merasa sedih dan berharap agar anaknya tetap sehat.

(*) Disarikan dari Pos Kota *("Jeritan Hati Keluarga Korban Penculikan: Jika Meninggal Di Mana Kuburannya", 2 Agustus 1998).*

Jeritan hati keluarga

'WAJAH ABAH SE

Hendrik Sirait akan diperiksa Puspom

Herman bukan aktivis yang dicari

JAKARTA (Pos Kota) - Dan Puspom ABRI Mayjen TNI Syamsu D, SH menegaskan Herman Hendrawan yang kini berada di Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Davao City, ke hal 5 kol. 1

Dedy Hamdun dan anaknya Abdul Ha

DEDDY OMAR HAMDUN

Adalah Laila Ali, istri pertama Deddy Hamdun, tak pernah terpikirkan suaminya diculik. Deddy bukan aktivis, ia hanya simpatisan PPP. Laila justru mengetahui kabar raibnya Deddy setelah membaca surat kabar. Terakhir kali bertemu suaminya pada 27 Mei 1997 di Hotel Nirwana Jatinegara saat mengikuti kampanye PPP.

Karena hilangnya Deddy saat bersama Eva Arnaz, Laila tidak melaporkannya ke polisi. Namun, setelah kasus hilangnya Deddy ramai diberitakan media massa sebagai korban penculikan, Laila pun sering terlihat keluarga korban penculikan yang lain, baik di Puspom ABRI maupun di kantor YLBHI.

Deddy Hamdun tak terdengar kabar beritanya barengan dengan Noval Alkatiri dan Ismail saat meninggalkan RS Bunda di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, tepat saat pemilihan umum 29 Mei 1997.

Siang itu, lebih kurang pukul 12.30, Deddy dan Eva pergi ke RS Bunda untuk berobat. Tak lama kemudian, datang Noval dan Ismail. Selama Eva menjalani pemeriksaan, Deddy terlibat pembicaraan serius dengan Noval dan Ismail. Setelah itu, ketiganya pamit pergi dan sejak saat itulah tak pernah terlihat lagi.

a korban penculikan

LALU TERBAYANG'

JAKARTA (Pos Kota) - Doa penantian keluarga korban penculikan hingga kini belum membuahkan hasil. Meski upaya mencari keadilan bagi sanak saudaranya yang 'diambil' paksa telah dilakukan tapi kabar keselamatan mereka ke hal 5 kol. 3

KISAH LAINNYA, BACA BESOK

Puslabfor dan Forensik UI gali kuburan di Way Umpu

Pos Kota
5 Agustus 1998

Sebelum diculik, aku Laila Ali, kebiasaan Deddy kerap menanyakan kabar anak-anak melalui telepon. Meski tidak lagi tinggal bersama, hubungan antara Laila dan Deddy tidak terputus karena Deddy rajin menjenguk anak-anaknya. Namun belakangan, Laila waswas karena Deddy tak pernah lagi menelepon.

Sebelum penculikan terjadi, Laila punya firasat yang sempat mengganggu pikirannya. Setiap hari hatinya selalu dirundung gelisah. Entah kenapa pikirannya selalu tersedot pada Deddy Hamdun.

Bagi Laila, Deddy adalah tipe suami bertanggung jawab. Meski sudah punya istri lagi, kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya tetap dipenuhi.

Terhadap anak-anak, Deddy menjadi sosok ayah yang penuh perhatian dan kasih sayang. Meski disibukkan dengan urusan bisnis, ia selalu menyempatkan diri menemani anaknya untuk pergi. Terutama, si bungsu Lady. Anak-anak Deddy selalu menanyakan ke mana ayah mereka pergi.

Dari perkawinan Deddy Hamdun dan Laila Ali pada 1979, lahir Della Masyitoh, M. Fanser, Abdul Hakim, Abdul Hafiz, dan Lady Sofiah.

Setelah Deddy Hamdun hilang, Laila terpaksa harus membanting tulang membiayai hidup dan sekolah anak-anaknya. Hari-harinya dilewatkan dengan membu-

Deddy Hamdun Pendukung Fanatik PPP

Rumah asri nan elok di kawasan bergengsi di Jalan Yupiter 4A/5 Villa Cinere Mas - Jakarta itu tampak lengang. Tak ada hentakan tubuh tinggi besar dan suara *ciat-ciat* —berlatih silat— seperti dua tahun silam. Begitu pula di Jalan Kebon Nanas II/2, Jakarta. Tak ada lagi senda gurau sang ayah dengan anak-anaknya.

Sejak 29 Mei 1997 lalu, pemilik kedua rumah tersebut —Deddy Hamdun— menghilang. Kini tinggallah istri keduanya, Eva Arnaz, yang tinggal di Cinere dan istri pertamanya, Laila, beserta ketiga anaknya di Kebon Nanas yang menunggu-nunggu kapan Deddy pulang. Begitu pula orang tua Deddy, yakni pasangan Abdullah Hamdun dan S. Attamimi yang tinggal di Ambon.

"Saya sengaja ke Jakarta untuk mencari kejelasan apakah anak saya hidup atau mati," kata Abdullah kepada ADIL. Yang ia dapati adalah kekecewaan. Danpuspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalaluddin —kata Abdullah— tak memberi jawaban di mana keberadaan anaknya dengan alasan masih memerlukan penyelidikan dan penyidikan. "Di Dephankam malah ketemu Jenderal Wiranto pun tidak," katanya.

Jenderal Wiranto pun tidak," katanya.

Deddy Hamdun, 43, lenyap tepat pada hari penceblosan pemilu 1997. Hari itu ia mengantar Eva Arnaz, memeriksakan kesehatan di RS Bunda Menteng. Kemudian pergi bersama kedua temannya, Noval Alkatiri dan Ismail. Waktu itu, menurut Eva, Deddy duduk di depan di samping Noval yang mengemudikan BMW itu.

Setelah itu, Deddy tak pernah pulang. Baik ke rumah Eva maupun ke istri tuanya. Eva telah mengadukan perkara itu ke sana ke mari. Namun tak ada jawabnya. Berbagai spekulasi sempat merebak. Termasuk kemungkinan telah dihabisi oleh saingan bisnisnya, sesama makelar tanah.

Kisah gelap tentang Deddy sedikit terkuak setelah Pius Lustrilanang dan Desmond J. Mahesa dilepaskan penculiknya. Baik Pius maupun Desmond mendapat cerita dari Sonny dan Yani Afri —yang hingga kini juga masih raib— bahwa Deddy Hamdun pernah satu sel dengan mereka.

Berbagai spekulasi baru tentang penculikan Deddy pun mencuat. Banyak pihak meyakini, Deddy diculik oleh aparat keamanan karena keterlibatannya dalam berbagai kerusuhan semasa kampanye pemilu 1997. Salah satunya adalah tawuran massal antara pendukung PPP dan Golkar di

DOK KELUARGA

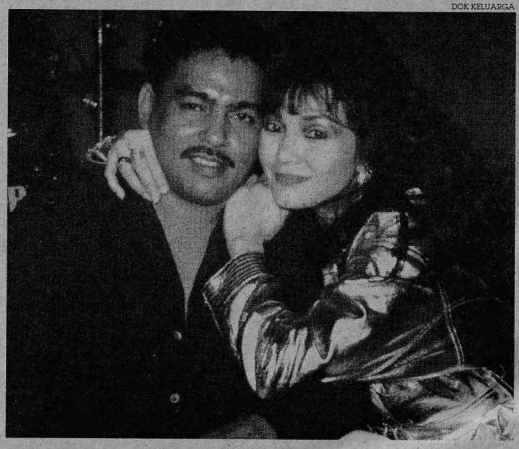

Cawang, Jakarta Selatan. Deddy yang sangat populer di kalangan komunitas keturunan Arab di bilangan Jakarta-Bogor, memang dikenal sebagai pendukung fanatik partai berlambang bintang.

Dugaan kematian yang berembus belakangan, membuat keluarganya panik. Abdullah Hamdun, S Attamimi, Luthfi, dan Eva Arnaz, hampir tiap hari terlihat di Kontras berupaya mencari kabar sebenarnya orang yang mereka nantikan kedatangannya itu.

Sementara Laila, istri pertama Deddy Hamdun, juga menunggu kedatangan suaminya di rumah kunonya yang cukup luas di sudut Jalan Kebon Kacang Jakarta. Laila dan ketiga anaknya, merasa sangat kehilangan. Menurut mereka, sebelum hilang Deddy masih selalu berkomunikasi dengan mereka meskipun lebih sering bermalam di kediaman Eva Arnaz.

Laki-laki tinggi, tegap, berhidung mancung, dan berkulit gelap yang bernama Deddy Hamdun itu, oleh keluarga dan teman-temannya dikenal berpembawaan keras. Sejak kecil ia berlatih bela diri. Sejak SD hingga SMA-nya di Ambon, lelaki blasteran Ambon-Arab itu, sehari-harinya tak lepas dari aktifitas fisik. Waktu mudanya di Ambon, ia selalu membela teman-temannya jika mendapatkan kesulitan.

"Jika temannya pada pihak yang benar, ia pasti membelanya, meski harus dengan berkelahi," kata Abdullah Hamdun, ayah Deddy.

Dua belas tahun masa sekolah di Ambon, dia jalani dengan lancar. Angka rapornya selalu lumayan, pergaulan dengan kawan-kawannya baik, begitu pula di mata guru-gurunya. Dengan kebiasaan melatih fisiknya, bagi teman-temannya, Deddy menjadi tumpuan yang andal saat kawan-kawan mendapatkan kesulitan. Misalnya ketika terjadi kesalahpahaman antara satu kumpulan anak-anak muda atau pelajar dengan kumpulan yang lain.

Selepas SMA, 1972, Deddy pergi ke Yogyakarta melanjutkan kuliah di Akademi Bank Indonesia hingga tamat sebagai sarjana muda, 1978. Semasa kuliah, Deddy juga menjadi orang yang aktif dalam organisasi yang mewadahi para perantau yang berasal dari Ambon.

Seusai merampungkan sarjana mudanya, Deddy berlibur ke Jakarta. Sehari menjelang Natal 1978, ia bertemu Laila — tinggal di kawasan Matraman, Jakarta — yang masih duduk di bangku kelas II SMA. Perkenalan itu berlangsung di rumah seorang teman Laila. "Enam bulan kemudian kami kawin," kata istri pertama Deddy mengenang.

Sejak menikah, Deddy tidak lagi mendapat kiriman uang dari orang tuanya di Ambon. Hingga bangku kuliah pun ia tinggalkan. Ia pun bekerja serabutan untuk menafkahi keluarganya. Dari bisnis jual beli mobil, hingga mengurus penjualan tanah.

Perkawinan dari cinta kilat sejoli Deddy-Laila, awalnya tidak disetujui kedua pihak keluarga. Sebab, mereka masih sekolah. Tapi, mereka tetap nekat kabur. Mereka berpindah-pindah dari rumah satu saudara ke saudara lainnya. Hingga tahun 1984, pasangan tersebut membangun rumah sendiri di Jalan Kebon Nanas II/2 yang sampai sekarang ditempati Laila bersama anak-anak mereka: Della, Panser, dan Lady.

Tahun 1992, Deddy mengawini Eva Arnaz. Meski sejak pernikahannya dengan Eva ia lebih sering bermalam di kediaman Eva dan sudah pisah dengan Laila, Deddy masih selalu berkomunikasi. "Kalau *nggak* ke saya, ke anak-anak. Sekarang puri, walaupun Pak Deddy-nya nggak ada, saya masih menganggap dia ada," katanya. Bahkan, pada 28 Mei 1997 malam, Deddy masih mengunjungi Laila. Mereka makan malam bersama anak-anaknya di Hotel Nirwana, Jatinegara.

Kedekatan Deddy —Direktur Operasi PT Cisarua Selatan itu— dengan keluarganya, setidaknya terbukti oleh banyaknya keluarganya yang selalu mencari keberadaan Deddy sejak hilang. Orang tuanya di Ambon menjadi sering ke Jakarta karena mencari kabar anak ketiga dari tigabelas bersaudara itu.

Laila, dan anak-anaknya, serta istri keduanya Eva Arnaz juga telah berusaha keras mencari Deddy. Dari melapor ke Polda Metro Jaya dua bulan setelah Deddy hilang dan menguasakan ke pengacara. Hingga bergabung dengan para keluarga korban penculikan yang belum kembali, mengadukan nasibnya ke Komnas HAM, dan mendatangi Tim Pencari Fakta ABRI dan Menhankam/Pangab dengan didampingi Kontras.

Bagi Eva, selama enam tahun berjalan berumah tangga dengan Deddy, perjalanannya mengarah ke yang baik. Misalnya, mereka berdua telah berhaji bersama tahun 1996. Bahkan, menjelang hilangnya Deddy, mereka sedang bikin pesantren di Warnasari, desa yang berbatasan dengan Selabintana, Sukaburni.

Bagi Laila, Deddy adalah ayah yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya. "Ia sering mendatangi anak-anaknya, dan kalau pergi ke luar kota selalu memberitahu," kata Laila. Begitu pun bagi orang tua dan adik-adiknya, yang menghormati Deddy sebagai orang yang mandiri.

Lalu, bagaimana perasaan mereka dengan dugaan kematian Deddy Hamdun? "Saya merasa Mas Dèddy masih hidup, meskipun saya pasrah dengan takdir Allah," kata Eva kepada ADIL. Perasaan yang sama juga dialami keluarga Abdullah Hamdun. Menurut perasaan mereka Deddy masih hidup. "Meskipun dengan kabar dugaan kematiannya, kami *deg-degan* dan was-was," kata Abdullah Hamdun. ❑ dikki

Adil
4 Agustus 1998

II yang akhirnya tenggelam (us).*

WAJAH ABAH SELALU ..... (Sambungan dari hal. 1)

masih simpang siur. Kepastian nasib Dedy Hamdun dirasakan oleh Ny. Laila Ali, istri pertamanya.

"Pada mulanya tidak terpikir suami saya bakal diculik. Dia bukan aktivis tapi hanya simpatisan PPP," kata Laila Ali, 37. Laila justru mengetahui khabar raibnya Dedy setelah membaca surat kabar. Ia mengatakan, terakhir kali bertemu suaminya pada 27 Mei 1997 di Hotel Nirwana Jatinegara saat mengikuti kampanye PPP.

Karena hilangnya Dedy saat bersama Eva, ia mengaku tidak melaporkan ke polisi. Namun setelah kasus hilangnya Dedy ramai diberitakan media massa sebagai korban penculikan, Laila sering terlihat bersama keluarga korban penculikan yang lain, baik di Puspom ABRI maupun di Kantor YLBHI.

Dedy Hamdun, yang juga suami artis Eva Arnaz ini tak kedengaran khabar beritanya bersama Noval Alkatiri dan Ismail saat meninggalkan Rumah Sakit Bunda di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, tepat saat pemilihan umum 29 Mei 1997.

Raibnya Dedy, anak kedua dari 12 bersaudara pasangan Abdullah Hamdun, bermula saat dirinya minta dijemput Noval dan Ismail (Pos Kota 3/8), di RS Bunda. Namun ketiganya tidak kembali bersama BMW 320 1 warna putih dengan Nopol B 136 HY milik Noval.

Menurut Eva Arnaz, siang itu pukul 12:30 ia dan suaminya pergi ke RS tersebut untuk berobat. Kemudian datang Noval dan Ismail, dua rekan Dedy. "Selama saya menjalani pemeriksaan, ketiganya terlibat pembicaraan serius," katanya. Setelah itu, kata Eva, Dedy minta ijin pergi bersama Noval dan Ismail. Dan sejak itulah, ketiganya tak pernah kelihatan lagi.

Ditambahkan oleh Ny. Laila, sebelum diculik kebiasaan suaminya sering menanyakan khabar anak-anaknya melalui telepon. Meski sudah tidak lagi tinggal bersama, hubungan mereka tidak terputus karena Dedy rajin menjenguk anak-anaknya. "Tapi belakangan saya heran kok dia tidak pernah menelepon lagi. Saya jadi was-was," tutur ibu 5 putra ini.

Sebelum penculikan terjadi, ia mengaku punya firasat yang sempat mengganggu pikirannya. "Setiap hari hati saya selalu tidak enak. Entah kenapa pikiran saya selalu tertuju ke Bang Dedy," katanya. Laila berpandangan kepedihan yang dialaminya merupakan cobaan Tuhan, jadi sebagai manusia ia berserah diri.

Laila mengatakan, Dedy adalah tipe suami yang bertanggung jawab. Meski diketahui Dedy punya istri lagi, kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya tetap dipenuhi.

Terhadap anak-anaknya, ujar Laila, ia ayah yang penuh perhatian dan kasih sayang. Meski disibukkan dengan urusan bisnis ia selalu menyempatkan diri menemani anaknya untuk pergi.

"Ia sangat sayang pada si bungsu Lady," ujarnya. Yang membuatnya terharu anak-anaknya selalu menanyakan kepergian ayahnya.

Dari perkawinan Dedy Hamdun dan Laila pada tahun 1979 lahirlah Della Masyitoh (17), M. Fanser (15), Abdul Hakim (13), Abdul Hafiz (11), dan Lady Sofiah (8).

Anak ketiganya Abdul Hakim yang kini duduk di bangku kelas III SMP, berharap pemerintah segera menemukan ayahnya karena sudah sejak lama ia tidak bertemu. "Kami rindu, setiap hari wajah Abah selalu terbayang. Kami masih membutuhkan Abah," tuturnya sedih.

Sementara itu anak sulung Dedy, Della, mengaku sedih saat ulang tahun ke-17 bulan Juni lalu tanpa kehadiran ayahnya. "Padahal selama ini Abah selalu ada setiap saya merasakan kebahagiaan di hari kelahiran saya," katanya. Iapun meminta agar pemerintah sungguh-sungguh mencari dimana ayah yang dicintainya berada.

Sepeninggal Dedy, Laila terpaksa harus membanting tulang membiayai hidup dan sekolah anak-anaknya. Hariharinya dilewatkan wanita cantik ini dengan membuka usaha catering dan usaha lainnya. "Yah, agar bisa menyambung hidup. Apalagi di tengah kondisi krisis moneter, hidup saya tambah berat," ujarnya.

Dedy Hamdun selama ini dikenal sebagai pengusaha ulet. Ia berbisnis jual beli tanah dan menjabat Direktur Operasi PT Cisarua Selatan yang berlokasi di Puncak. Perusahaan ini antara lain berhasil membebaskan tanah yang saat ini dibangun Taman Safari di Ciawi Bogor.

Menurut Laila Dedy dikenal berjiwa sosial. Ia tak segan-segan menyumbang dana untuk yatim piatu, karang taruna, ataupun temantemannya yang membutuhkan. Maka tak heran pada kampanye PPP ia kerapkali mendukung dana kegiatan tersebut.

Menanggapi keterlibatan oknum Kopassus terhadap kasus penculikan beberapa aktivis, Laila merasa tidak memiliki dendam terhadap pelakunya. "Yang penting bagi saya kembalinya Bang Dedy di tengah keluarga merupakan obat mujarab atas rindu kami karena sekian lama tak bertemu," katanya.

Namun yang mengherankan Laila mengapa suaminya diculik, padahal Dedy bukan aktivis atau orang yang layak untuk diculik karena terlibat kegiatan politik. "Kalau dia bersalah adili dulu. Saya heran di negara yang berdasarkan hukum ini suami saya diculik," katanya.

Ia menambahkan hendaknya pemerintah bertanggung jawab terhadap keluarga korban penculikan yang selama ini tidak ada kabar beritanya. Ia menyayangkan mengapa selama ini pemerintah tidak pernah menghubungi pihak keluarga korban penculikan untuk memberikan perhatian.

Orang tua Dedy pengen bertemu

"Seperti halnya orangtua korban lainnya, orangtua sayapun ingin tahu keselamatan Dedy dan ingin segera bertemu," ujar Lutfi Abdullah, adik kandung Dedy Hamdun. Lutfi mengatakan, latar belakang penculikan yang menimpa kakaknya belum diketahui dengan pasti. Hanya, katanya, Bang Dedy selama ini dikenal sebagai pendukung fanatik PPP.

Sementara itu artis Eva Arnaz menjelaskan, ABRI harus bertanggung jawab terhadap nasib korban penculikan yang belum kembali. "Mereka harus secepatnya mengumumkan ada tidaknya korban penculikan agar keluarganya tenang," katanya.

"Kami tidak memikirkan soal pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atau apapun namanya. Bagi kami yang penting umumkan dulu mereka ada atau tidak."

Menurut Eva, sebagai istri tentu saja ia was-was atas nasib suaminya yang tidak jelas. "Saya hanya bisa berdoa dan berusaha mencari keadilan atas keselamatan suami saya," katanya.

Sebagai muslim, ujarnya, saya tidak pernah berpikir ia telah tiada. "Saya tidak mau ngeduluin Allah SWT. Betapapun beratnya cobaan itu harus saya hadapi dengan sabar."

Menanggapi soal kemungkinan melakukan tuntutar jika ternyata suaminya meninggal, ia mengatakan belum memikirkannya. "Saya tidak pernah memikirkan yang penting suami saya cepat-cepat dikembalikan," katanya.

Soal berita penemuan 14 mayat mengapung di Sungai Way Umbu Bandar Lampung beberapa waktu lalu, Eva dan orangtua Dedy sempat kaget. Apalagi dalam pemberitaan itu disebut-sebut mayat itu adalah korban penculikan.

"Saya kaget, kecewa dan makin was-was mendengar berita itu," katanya. Pada awal hilangnya Dedy ia merasa mengalami beban berat. "Sebagai manusia toh saya harus menghadapinya. Lama-lama cobaan ini saya nikmati," ujar Eva. (yy/yo).*

MINYAK GORENG AKAN ..... (Sambungan dari hal. 1)

usul keturunan melainkan tingkat kepedulian kepada

Dalam waktu yang sama Bank Muamalat Indonesia

(dwi/10)

Pos Kota
5 Agustus 1998

"Kami rindu Abah. Setiap hari wajah Abah selalu terbayang."

| ***Abdul Hakim**, Putra Ketiga Dedy Hamdun, dalam berita Pos Kota ("Wajah Abah Selalu Terbayang", 5 Agustus 1998)*

ka usaha katering dan usaha serabutan lainnya agar hidup terus berlangsung.

Deddy dikenal sebagai pengusaha ulet. Ia berbisnis jual beli tanah dan menjabat direktur operasi PT Cisarua Selatan yang berlokasi di Puncak. Perusahaan itu antara lain berhasil membebaskan tanah yang saat ini dibangun Taman Safari di Ciawi, Bogor.

Putra dari Abdullah Hamdun ini juga dikenal memiliki jiwa sosial tinggi. Ia tak segan-segan menyumbang dana untuk yatim piatu, karang taruna, ataupun teman-temannya yang membutuhkan. Tak heran pada kampanye PPP, Deddy kerap mendukung dana kegiatan tersebut.

Yang mengherankan bagi Laila mengapa suaminya diculik, padahal Deddy bukan aktivis atau orang yang layak untuk diculik karena terlibat kegiatan politik. Kalau bersalah, adili. Ini negara hukum.

> **"Mereka (ABRI) harus secepatnya mengumumkan ada tidaknya korban penculikan agar keluarganya tenang. Kami tidak memikirkan DKP atau apa pun namanya. Bagi kami yang penting umumkan dahulu mereka ada atau tidak. Saya hanya bisa berdoa dan berusaha mencari keadilan atas keselamatan suami saya."**
>
> | ***Eva Arnaz**, Istri Deddy Hamdun, dalam berita Pos Kota ("Wajah Abah Selalu Terbayang", 5 Agustus 1998)*

(*) Disarikan dari Pos Kota *("Jeritan Hati Keluarga Korban Penculikan: 'Wajah Abah Selalu Terbayang'", 5 Agustus 1998), Adil ("Deddy Hamdun Pendukung Fanatik PPP", 4 Agustus 1998).*

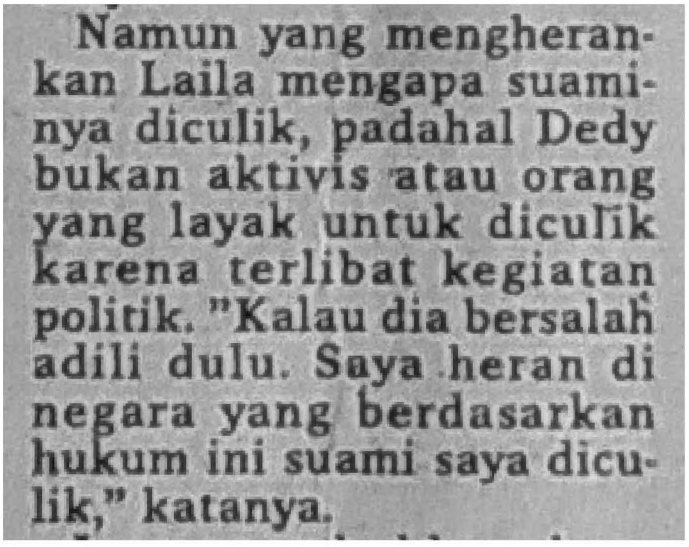

Namun yang mengherankan Laila mengapa suaminya diculik, padahal Dedy bukan aktivis atau orang yang layak untuk diculik karena terlibat kegiatan politik. "Kalau dia bersalah adili dulu. Saya heran di negara yang berdasarkan hukum ini suami saya diculik," katanya.

Pos Kota
5 Agustus 1998

| ***Ny. Laila Ali,*** *istri pertama Deddy Omar Hamdun, dalam berita Pos Kota ("Jeritan Hati Keluarga Korban Penculikan: Wajah Abah Selalu Terbayang", 5 Agustus 1998)*

Jeritan hati keluarg

'KEMBALIKAN AN

"SAYA yakin Noval masih hidup. Untuk itu sa- bali.

KISAH LAINNYA, BACA BESOK

"SAYA yakin Noval masih hidup. Untuk itu saya mohon kepada siapapun yang menculik anak saya agar segera dikembalikan," kata Ny. Beby, 48, ibu kandung Noval Alkatiri, 31, satu dari 14 korban penculikan yang hingga kini belum kembali.

Sebagai ibu yang melahirkan, hingga setahun lebih sejak Noval diculik penculiknya dalam perjalanan ke Rumah Sakit Bunda, Beby meyakini anak nomor duanya itu masih

ke hal 3 kol. 1

Ny. Beby dan Navila (ibu dan anak Noval). Kanan : Noval Alkatiri, yang diculik. (vy/sur)

Disambar truk yang menabrak Angkot

3 Orang tewas, 4 luka

BOGOR (Pos Kota) - Tiga orang tewas dan empat lainnya luka-luka akibat tersambar truk yang bertabrakan dengan mobil angkutan kota (Angkot), di Jalan Raya Cibinong, Minggu pagi.

Korban tewas: Rusdianto, 20, sopir Angkot F 1961 CX, Siti Rasanah, 28,

ke hal 4 kol. 4

Duel karena saingan berebut lapak

Nyawa pedagang oncom melayang

JAKARTA (Pos Kota) - Dua pedagang oncom di Pasar Tradisional Kampung Bulak 1, Klender, Jakarta Timur, Minggu subuh terlibat baku hantam. Duel yang diduga berlatar belakang persaingan dagang itu menewaskan salah seorang pedagang, Mayat Irsyad, 28

ke hal 7 kol. 1

Pos Kota
3 Agustus 1998

NOVAL ALKATIRI

Oleh keluarga, Noval dinyatakan hilang pada 29 Mei 1997, bertepatan dengan pemilihan umum. Ayah satu putri yang membuka tempat usaha jual beli tikar Sangkuriang di Tebet Barat ini mendapat telepon dari Deddy Hamdun, suami Eva Arnaz yang juga menjadi korban penculikan.

Waktu itu, Noval yang menurut ibunya, Ny. Beby, sudah sejak lama mempunyai hubungan dekat dengan Deddy Hamdun yang baru pulang "mencoblos". Keduanya sudah seperti saudara. Teman dekat. Meski berlainan bisnis, tetapi sering ketemu.

Sorenya, bersama putrinya, Navila, ia mampir ke kantornya.

Deddy dan Eva yang sedang berobat meminta Noval untuk menjemput mereka di Rumah Sakit Bunda, Menteng,

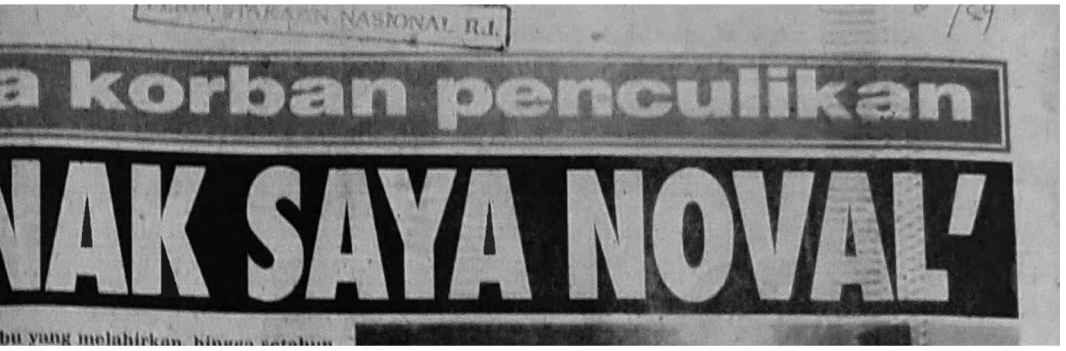

Jakarta Pusat. Setelah terlebih dahulu mengantar si kecil Navila ke rumah (Noval dan Navila tinggal di rumah sang ibu, Ny. Beby), Noval ditemani salah satu pegawainya, Ismail, segera meluncur ke Rumah Sakit Bunda.

Menurut Navila, setelah menerima telepon, ia dipesan Noval agar memberitahu neneknya untuk bersiap-siap karena setelah magrib mereka akan makan malam di luar. Tapi, setelah ditunggu-tunggu, Noval tak muncul, dan saat dihubungi via ponsel, ponsel tidak aktif. Padahal, biasanya ke mana pun ia pergi selalu pamit.

Sejak saat itu, tak terdengar kabar Noval Alkatiri. Bersamaan dengan Noval, Deddy Hamdun dan Ismail pun hilang bersama mobil BMW warna putih dengan nomor polisi B 136 HY.

Awalnya, Ny. Beby tak punya firasat apa-apa karena ia berpikir Noval paling pergi ke Puncak (Bogor) seperti yang sering ia lakukan. Apalagi, kepergian Noval sangat terburu-buru untuk menjemput Deddy Hamdun. Sebab, banyak pekerjaan yang harus diselesaikannya di kantor hari itu.

Hamdun yang sudah sejak lama berpisah dengan istrinya sempat diingatkan pegawainya untuk tidak pergi terlalu lama mengingat pekerjaan menumpuk di kantor.

Karena tak juga muncul, akhirnya ayah Noval, Said, melaporkan kehilangan putranya ke Polda Metro Jaya.

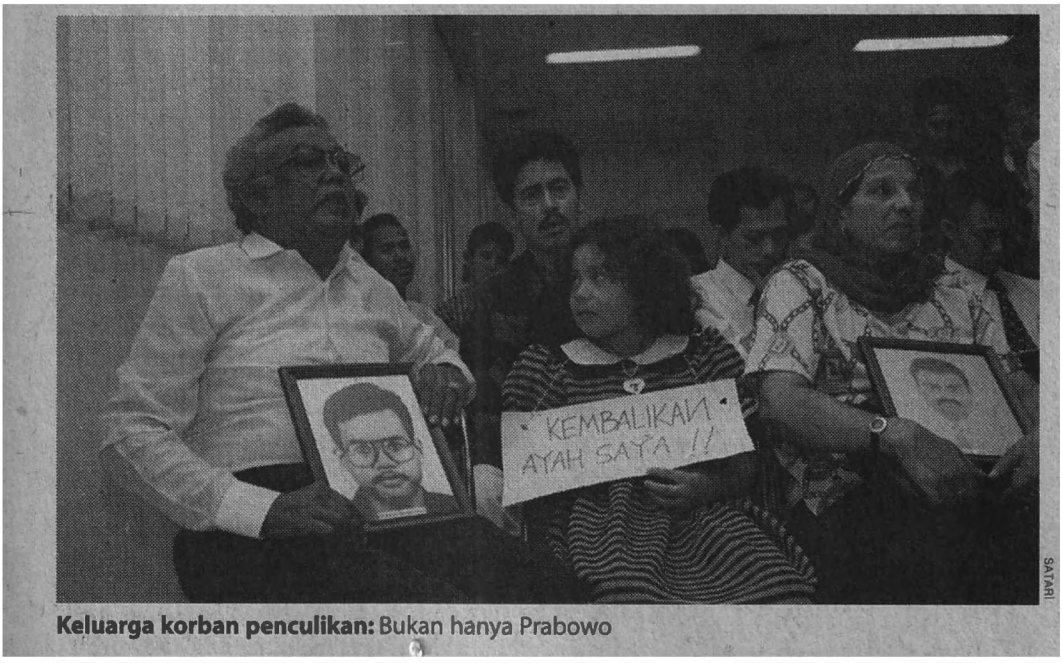

Keluarga korban penculikan: Bukan hanya Prabowo

▲ Forum Keadilan
26 Agustus 1998

Adil ►
4 Agustus 1998

Noval tampaknya bukan sosok yang layak culik. Menurut ayahnya, Said Alkatiri, Noval sama sekali tidak aktif dalam politik. Dalam kampanye pemilu 1997 lalu, Noval oleh ayahnya disebut cuma menonton. "Jadi tak ada alasan atas penculikan anak saya," kata Said.

| ***Said Alkatiri,*** *Ayahanda Noval Alkatiri, dalam berita Adil ("Noval Alkatiri Cuma Nonton Kampanye", 4 Agustus 1998)*

Sebelum hilang, Noval berencana mengajak orang tuanya menunaikan ibadah haji. Ia meminta ibunya untuk mendoakan agar tahun 1998 ini bisa naik haji. Akibat penculikan itu, harapan untuk pergi haji bersama orang tua pupus sudah.

Baik Beby dan Said, tak lelah menelusuri dan mencari tahu kabar keberadaan Noval. bersama Navila, mereka sering terlihat di LBH Jakarta maupun di kantor Komnas HAM bersama keluarga orang hilang lainnya.

> **"Pak Munir (Ketua Kontras) telah banyak membantu kami. Insya Allah Noval masih hidup. Orangtua mana yang tidak sedih jika nasib anaknya tidak diketahui. Sebagai orang tua, siang malam saya berdoa untuk keselamatan anak saya. Mudah-mudahan pemerintah dan orang-orang yang mengurus persoalan ini diberi hati yang Rahim."**

*| **Ny. Beby**, ibunda Noval Alkatiri, dalam berita Pos Kota ("Kembalikan Anak Saya Noval", 3 Agustus 1998)*

> **"Pokoknya Navila pengen Abah kembali karena Abah tidak ada salahnya."**

*| **Navila**, putri Noval Alkatiri, dalam berita Pos Kota ("Kembalikan Anak Saya Noval", 3 Agustus 1998)*

(*) Disarikan dari Pos Kota *("Jeritan Hati Keluarga Korban Penculikan: 'Kembalikan Anak Saya Noval'", 3 Agustus 1998), Adil ("Noval Alkatiri Cuma Nonton Kampanye", 4 Agustus 1998),* Panji Masyarakat *("Prabowo dan Jenderal Terkait Lainnya", 26 Agustus 1998).*

Berbagai spekulasi baru tentang penculikan Deddy pun mencuat. Banyak pihak meyakini, Deddy diculik oleh aparat keamanan karena keterlibatannya dalam berbagai kerusuhan semasa kampanye pemilu 1997. Salah satunya adalah tawuran massal antara pendukung PPP dan Golkar di kecil ia berlatih bela diri. Sejak SD hingga SMA-nya di Ambon, lelaki blasteran Ambon-Arab itu, sehari-harinya tak lepas dari aktifitas fisik. Waktu mudanya di Ambon, ia selalu membela teman-temannya jika mendapatkan kesulitan.

"Jika temannya pada pihak yang benar, duduk di bangku kelas II SMA. Perkenalan itu berlangsung di rumah seorang teman Laila. "Enam bulan kemudian kami kawin," kata istri pertama Deddy mengenang.

Sejak menikah, Deddy tidak lagi mendapat kiriman uang dari orang tuanya di Ambon. Hingga bangku kuliah pun ia tingkipun saya pasrah dengan takdir Allah," kata Eva kepada ADIL. Perasaan yang sama juga dialami keluarga Abdullah Hamdun. Menurut perasaan mereka Deddy masih hidup. "Meskipun dengan kabar dugaan kematiannya, kami *deg-degan* dan was-was," kata Abdullah Hamdun. ❐ dikki

Ismail, Tumpuan Keluarga

Hawa, ayah Ismail, juga dikagetkan oleh media massa yang menulis dugaan kematian Ismail dalam penculikan. Ia buru-buru menelpon ke Luthfi, adik Deddy Hamdun, di Jakarta. Ia mesti bersusah payah mencari uang untuk interlokal; baginya adalah ongkos yang sangat mahal untuk sampai di Jakarta.

Maklum, orang tua Ismail, seperti kebanyakan masyarakat Indonesia, adalah miskin. Tetangganya pun tidak tahu apakah keluarga ini punya rumah atau tidak. Karena sejak menjadi tentara hingga pensiun, Hawa tetap menempati asrama tentara Yonif 733 Batu Merah Ambon.

Ismail, 31, pemuda Ambon yang baru saja masuk kota metropolitan lima tahun lalu, bekerja di perusahaan milik Noval Alkatiri baru berusia lima bulan. Ismail cukup dekat hubungannnya dengan sang majikan, ia sering jalan bareng bosnya dengan mbil BMW, hingga kemudian pada 29 Mei 1997 itu, ia ikut diculik oleh orang tak dikenal.

Sejak diculik, keluarganya tak pernah ke Jakarta karena alasan keuangan. Ayah Ismail kemudian hanya bisa pesan kepada keluarga majikannya, yaitu Said Alkatiri. "Semuanya diserahkan kepada kami soal bagaimana kabar anaknya. Makanya kami di samping mencari di mana keberadaan dan nasib anak kami, juga mencari informasi tentang Ismail," kata Said kepada ADIL.

Menurut Said, Ismail adalah pemuda yang keras bekerja dan tak pernah lalai dengan tugasnya. Karena itu ia dekat dengan majikannya. Sejak kecil Ismail gemar olah raga apa saja. Ketika tinggal bersama orang tuanya di asrama, Ismail kecil hingga beranjak dewasa saat kuliah di Fakultas Teknik Perkapalan Universitas Pattimura, Ambon, 1991/1992, selalu melatih fisiknya.

Diculiknya tamatan STM Ambon, yang sempat mampir kuliah itu, membuat kondisi fisik adik perempuannya di Ambon sakit-sakitan. Sejak Ismail hilang hingga terkabar dugaan wafat dalam penculikan, kesehatan adik perempuannya terus memburuk.

Buat keluarganya, Ismail adalah harapan. Menurut Luthfi, Ismail sering mengirim surat dan bahkan membantu membiayai sekolah adiknya. "Sekarang siapa lagi yang membantu," kata Hawa seperti ditirukan Luthfi kepada ADIL.

❐ dikki

TABLOID BERITA MINGGUAN ADIL ■ No. 43 TAHUN KF-66 ■ 20 JULI - 4 AGUSTUS 1998

ISMAIL

Hawa, ayah Ismail, bukan main kagetnya ketika membaca di media massa dugaan kematian Ismail dalam penculikan. Buru-buru ia menelpon Luthfi, adik Deddy Hamdun, di Jakarta. Ia mesti bersusah payah mencari uang untuk telepon sambungan jarak jauh atau interlokal. Sebab, bagi Hawa, sangat mahal jika harus ke Jakarta.

Orang tua Ismail adalah keluarga miskin. Punya rumah sendiri atau tidak, tetangga kiri kanan tidak tahu. Maklum, ayah Ismail ini dari jadi tentara aktif hingga pensiun tetap menempati asrama tentara Yonif 733 Batu Merah Ambon.

Ismail yang saat hilang berusia 31 tahun adalah pemuda Ambon yang menjajal nasib di Ibu Kota sejak 1994. Terakhir, ia bekerja di perusahaan Noval Alkatiri. Baru lima bulan. Ismail sangat dekat dengan Noval. Sering jalan bersama dengan BMW hingga datang hari sial itu. Pada 29 Mei 1997, Ismail diculik bersama Noval dan Deddy.

Sejak diculik, keluarganya tak pernah ke Jakarta karena alasan, ya itu tadi, finansial. Hawa hanya nunut perkembangan informasi ihwal Ismail lewat keluarga Noval, keluarga Said Alkatiri.

Seturut cerita Hawa, Ismail adalah pemuda pekerja keras dan selalu membereskan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Saat masih tinggal dengan orang tuanya di asrama, Ismail selalu melatih fisiknya dengan baik bah-

kan saat kuliah di Fakultas Teknik Perkapalan, Universitas Pattimura, Ambon.

Karena itu, Hawa tidak habis pikir bahwa Ismail yang tamatan STM Ambon jadi salah satu yang diculik. Ia memang tak terlalu tahu, politik macam apa yang diikuti Ismail hingga ia harus diculik, hingga ia mesti dihilangkan. Adik perempuannya, misalnya, mendengar kakaknya hilang, kesehatannya memburuk.

Bukan karena apa, Islamil adalah harapan dan cahaya keluarga bagi perbaikan finansial. Adiknya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi berharap pada baiknya pekerjaan Ismail.

Cahaya finansial keluarga itu tiba-tiba raib. Ismail diculik dan tak pernah lagi pulang.

(*) Disarikan dari Adil *("Ismail, Tumpuan Keluarga", 4 Agustus 1998)*

Adil
4 Agustus 1998

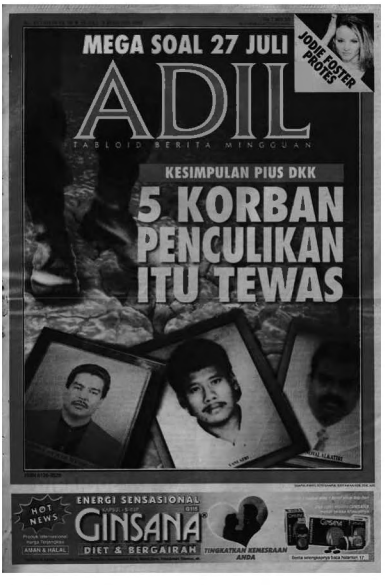

"Masih Hidup

Sragen, Bernas

Satu di antara korban penculikan yang melibatkan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus), adalah Suyat (23), mahasiswa Universitas Slamet Riyadi (Unisri), Solo. Hingga Selasa (21/7) orangtuanya mengaku belum menerima kabar mengenai nasib anaknya itu.

Ditemui di kediamannya, di Desa Kragilan, Kecamatan Gemolong, Sragen, kemarin, keluarga Suyat mendesak ABRI segera membongkar kasus penculikan terhadap sejumlah aktivis mahasiswa dan LSM, termasuk Suyat.

Seorang korban penculikan, Pius Lustrilanang, setibanya dari luar negeri, Minggu (19/7)

Suyat tahun 1994

SUYAT

"Pokoknya yang penting kejelasan di mana Suyat. Kalaupun masih ada atau jika sudah meninggal kami ingin kejelasan," kata Suyadi, kakak Suyat, sambil terisak. Ia belum percaya adik bungsunya itu sudah mati. Walau demikian, mereka hanya pasrah karena selama ini tak bisa lagi tahu ke mana lagi mereka mencari Suyat.

Selain mengadu ke Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Kapolres Sragen, keluarga juga sudah mencoba mencari informasi kepada beberapa orang aktivis.

Keluarga rela jika Suyat dianggap bersalah dan diberi hukuman jika aktivitasnya memang benar-benar melang-

pkah Suyat?"

menyatakan khawatir, bahwa lima di antara korban penculikan itu mungkin telah meninggal.

Sedangkan anggota Komnas HAM, Bambang W Soeharto, bahkan curiga, ke-12 orang yang kini masih tak jelas rimbanya itu, justru sudah meninggal. Hal serupa, juga dikemukakan Andi Arief, korban penculikan yang telah dikembalikan ke orangtuanya di Lampung.

Sementara itu, Andi Arief di kantor YLBHI Jakarta, kemarin menyatakan pernah diancam. "Kalau memberi keterangan jangan berbelit-belik, jika tidak mau di`Deddy Hamdun`kan," kata Andi Arief, me-

ist

Bersambung ke hal.8 kol 5

pkah Suyat?"

menyatakan khawatir, bahwa lima di antara korban penculikan itu mungkin telah meninggal.

Sedangkan anggota Komnas HAM, Bambang W Soeharto, bahkan curiga, ke-12 orang yang kini masih tak jelas rimbanya itu, justru sudah meninggal. Hal serupa, juga dikemukakan Andi Arief, korban penculikan yang telah dikembalikan ke orangtuanya di Lampung.

Sementara itu, Andi Arief di kantor YLBHI Jakarta, kemarin menyatakan pernah diancam. "Kalau memberi keterangan jangan berbelit-belik, jika tidak mau di`Deddy Hamdun`kan," kata Andi Arief, me-

ist

Bersambung ke hal.8 kol 5

Bernas
22 Juli 1998

gar hukum. Kalau salah, sialakan dia diadili dan dihukum. Tidak ada orang yang kebal hukum.

Suyat–mahasiswa Fisipol Unisri, Solo–dikenal juga sebagai aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Ia diculik dari rumah seorang temannya di Dusun Sumber, Desa Kragilan, gemolong, Sragen. Pada tengah malam, datang segerombolan orang dengan menggunakan mobil berplat wilayah Jakarta mendatangi rumahnya. Karena tidak bertemu, mereka kemudian berlalu. Kedatangan gerombolan penculik ini ke Gemolong menjadi akhir terang dari nasib Suyat.

(*) Disarikan dari Bernas *("Masih Hidupkah Suyat", 22 Juli 1998)*

NGKIN) TEWAS ITU

Yani Afri Dituduh Meledakkan Bom

Sonny Berlatar Belakang Pahit

Novel Alkatiri Cuma Nonton Kampanye

Adil
4 Agustus 1998

Yani Afri Dituduh Meledakkan Bom

Sonny Berlatar Belakang Pahit

Lahir di Jakarta 28 tahun lalu, beralamat di Rumah Susun Tanah Abang, hilang tanggal 26 April

Ryan, begitulah Yani Afri biasa dipanggil, kesehariannya narik mikrolet jurusan Tanjung Priok-Cilincing. Karena itu barangkali ketika terpikat peristiwa 27 Juli 1996, ia memilih berpartisipasi di DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara. Padahal wilayah domisilinya ada di Jakarta Pusat. Ia menyewa rumah tak jauh dari tempat tinggal orang tuanya di Rumah Susun Tanah Abang Blok 36 Lantai 3 Jakarta Pusat.

Lelaki kelahiran Jakarta 27 tahun lalu itu, hilang tanggal 26 April 1997 di Jakarta. Mulanya ia bersama temannya Sonny ditangkap petugas Kodim Jakarta Utara, dengan tuduhan terlibat dalam kasus peledakan bom di Kelapa Gading, Jakarta. Setelah ditahan semalam, mereka dibebaskan.

Namun, ketika baru beranjak keluar pintu gerbang kantor Kodim Jakarta Utara itu, sebuah Toyota *Hard Top* berhenti di depan dia dan Sonny. Lalu, turunlah empat orang berbadan kekar yang kemudian membawa mereka. Sejak itu keberadaan Ryan tak jelas rimbanya. Tetapi, Pius Lustrilanang dan Desmond J. Mahesa dalam kesaksian atas penculiknya, menyatakan bahwa Ryan disekap di tempat yang sama dengan mereka.

Tuti, ibu Ryan, telah mengadu ke sana ke mari. Upayanya belum menghasilkan sesuatu yang berarti. "Pencarian jawaban keberadaan anak saya di mana dan dalam kondisi bagaimana tidak terjawab," katanya kepada Adil. Padahal menurutnya, ia hanya ingin satu jawaban dengan dipulangkannya anaknya dalam kondisi apapun; hidup, mati, ataupun cacat. "Saya tidak akan menuntutnya," tambahnya.

Bagi Tuti, Ryan adalah gantungan hidup, setelah suaminya —Yansibur Sultan Raja Nansati— meninggal tahun 1994 lalu. Sebelum menghilang, hampir setiap hari Ryan mampir ke rumahnya — sengaja atau sebelum berangkat kerja — hanya untuk bermain gitar dan bernyanyi misalnya. "Saya senang kalau dia bernyanyi, kesulitan ekonomi kami sepertinya tak terlalu terasakan," katanya.

Adik-adik Ryan pun tak melanjutkan sekolah. Seperti Yusuf yang harapannya ke SMU terhenti setelah Ryan —yang akan membiayainya— diculik.

Ryan, anak ke-6 dari 11 bersaudara itu, memang dekat dengan saudara-saudaranya. Semasa kecil, sekali-kali main bola bersama dengan saudara-saudaranya, dan selebihnya hanya belajar dan membantu pekerjaan rumah. Sayangnya, Ryan setamat SLTP, 1985, mesti berhenti sekolah karena orang tua tak mampu membiayainya. Sejak itu, Ryan bergaul dengan teman-teman di luar, yang akhirnya membawanya menjadi sopir Mikrolet.

Sejak pernikahannya dengan Yeni tahun 1991, Ryan telah dikaruniai dua anak laki-laki. Oki berusia 6 tahun, dan Yahud berusia 4 tahun. Kedua anak itu sekarang mengikuti bunya, yang telah pindah entah ke mana. Yang pasti, diculiknya Ryan, telah membuat kubangan persoalan ekonomi keluarganya makin dalam ☐☐☐

YANI "RYAN" AFRI

Ryan, begitulah Yani Afri biasa dipanggil, kesehariannya jadi sopir mikrolet dengan trayek Tanjung Priok—Cilincing. Tak ada cerita detail bagaimana ia terpikat dengan PDI selain dipicu oleh peristiwa penyerbuan kantor PDI yang dipimpin Megawati Soekarnoputri pada 27 Juli 1996 di Jalan Diponegoro.

Lelaki pekerja keras ini hilang pada 27 April 1997. Mulanya, ia bersama rekannya Sonny ditangkap petugas Kodim Jakarta Utara dengan tuduhan terlibat dalam kasus peledakan bom di Kelapa Gading, Jakarta. Setelah ditahan semalam, mereka dibebaskan.

Namun, ketika baru beranjak keluar pintu gerbang kantor Kodim, sebuah Toyota Hard Top berhenti tepat di sisi dirinya dan Sonny. Lalu, turunlah empat orang berbadan kekar yang kemudian membawa mereka. Sejak itu, Ryan tak jelas rimbanya.

Keberadaan Ryan mulai terendus tatkala Pius Lustrilanang dan Desmond J. Mahesa memberikan pengakuan. Di "kapal selam" tempat mereka disekap di kompleks Kopassus, mereka bertemu dengan Ryan dan Sonny. Seturut pengakuan keduanya, sebelum korban penculikan lain datang, baik Ryan dan Sonny sudah "dibawa keluar" pada 12 Maret 1998.

Sayang, Tuti, ibunda Ryan, justru tak pernah lagi berjumpa dengan putranya itu tatkala badan Ryan "dibawa

keluar". Ia mengadu ke sana kemari. Menggotong foto persegi anaknya. Tak pernah ia temukan jawaban Ryan pulang ke mana sesaat setelah "dibawa keluar" dari gedung penyekapan yang biasa disebut "kapal selam" di kawasan Cijantung.

Ibu Tuti hanya ingin kepastian, Ryan masih hidupkah atau sudah mati. Makin tertekan perasaan Ibu Tuti saat menerima kenyataan, tiang penyangga ekonomi keluarga ini raib tanpa ada kepastian. Sejak suaminya meninggal, Yansibur Sultan Rajo Nansati, Ryan-lah yang menjadi tumpuan. Termasuk Yusuf, adik Ryan, mesti berhenti bersekolah karena tak ada yang membiayai.

Menurut cerita Tuti, Ryan memiliki 11 saudara. Semasa kecil, anak ke-6 ini senang bermain bola. Untuk pendidikan, Ryan hanya selesai sampai di SMP. Selanjutnya, ia bekerja serabutan hingga bertemu kerja terakhirnya: sopir mikrolet.

Ryan diculik dan hilang dengan meninggalkan seorang istri dan dua anak laki-laki. Raibnya Yani Afri membuat ekonomi keluarga ini makin tersuruk.

(*) Disarikan dari Adil *("Yani Afri Dituduh Meledakkan Bom", 4 Agustus 1998), Kedaulatan Rakyat ("Andi Arief Perkuat Dugaan Pius: Korban Penculikan Ada yang Meninggal", 21 Juli 1998).*

Seperti diberitakan harian ini (KR, 20/7), Sekjen Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera), Pius Lustrilanang, mengkhawatirkan nasib lima orang korban penculikan, yang diduganya telah meninggal. Kelima orang itu, Deddy Hamdun, Noval S Alkatiri, Sonny, Yanni Alfrie, dan Ismail. Sebab, setelah tiga setengah bulan ditahan, tiga di antaranya masih ditahan. Sedang Sonny dan Yanny Afrie sejak tanggal 12 Maret 1998 telah dibebaskan. Namun hingga sekarang keduanya belum diketahui di mana.

Kedaulatan Rakyat
21 Juli 1998

Jeritan hati keluarg

'KAMI YAKIN KEBEN

Petrus Bima Anugerah, korban penculikan. (sur)

JAKARTA (Pos Kota) - Bagi DT. Utomo Rahardjo resiko ditahan atau malah disekap tanpa proses hukum, adalah bagian hidup bagi setiap orang yang bergelut dengan masalah-masalah yang bersentuhan dengan kehidupan sosial politik negeri ini.

Namun bila kemudian orang bekerja tanpa pamrih untuk masalah-masalah tersebut, yang dikenal dengan sebutan aktivis, dihilangkan, ke hal 4 kol. 1

Belum ada permintaan akan dibuka Presiden

Kongres PDI di Palu agar ditunda

JAKARTA (Pos Kota) - Penandatangan fusi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), kemarin di Jakarta mengadakan pertemuan dengan anggota Dewan Pertimbangan Agung ke hal 5 kol. 1

PETRUS BIMA ANUGERAH

Bagi Utomo Rahardjo, risiko ditahan atau malah disekap tanpa proses hukum, adalah bagian hidup bagi setiap orang yang bergelut dengan masalah-masalah yang bersentuhan dengan kehidupan sosial politik di negeri ini. Namun, bila kemudian orang bekerja tanpa pamrih untuk masalah-masalah tersebut, yang dikenal dengan sebutan aktivis, dihilangkan, persoalan sudah menjadi lain. Apalagi kalau sampai tiada kejelasan sama sekali, kendati pelaku penghilangan (penculikan) sudah diketahui, hal itu sudah sangat keterlaluan.

Utomo Rahardjo, orang tua aktivis Petrus Bima Anugerah yang termasuk 14 aktivis yang dihilangkan dan kini belum jelas keberadaannya itu, hanya bisa terpekur dan pasrah kepada Tuhan. Karena berbagai upaya mencari putranya ini, dengan hilir mudik Jakarta–Malang kadang dilakukan, namun hasilnya nihil.

a korban penculikan

ARAN AKAN MUNCUL'

Pos Kota
6 Agustus 1998

Di antara usahanya itu bersama Kontras menemui Puspom ABRI, ke Fraksi ABRI DPR RI, tetapi tidak diterima dengan berbagai dalih.

Ia yakin kebenaran itu suatu kali akan muncul dan mengalahkan tindak kekejian yang dibuat manusia. Keluarga yang tinggal di Jalan Suryo, Gg. II/2, Malang, Jawa Timur ini, telah menerima apa pun yang terjadi dengan Bima; baik Utomo maupun ibunda Bima, G. Missiati, serta kakak sulung maupun adik Bima, yakni Anastasia Anggar Palupi Rahayu, A. Tridanang, dan ST Ari Priambodo.

Petrus Bima Anugerah, putra kedua DT Utomo Rahardjo yang tercatat sebagai mahasiswa semester kedua di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara, Jakarta, mahasiswa Fisipol Universitas Airlangga semester VI ini sebelum aktif dan terjun di Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang di era Soeharto diharamkan ini, sudah kadung bersentuhan dengan masalah politik di Unair.

Kepeduliannya terhadap kehidupan kemasyarakatan ini malah jauh sebelumnya sudah ditunjukkan di kota kelahirannya, Malang, dengan aktif bergabung dengan kegiatan-kegiatan gereja dan kesibukan-kesibukan lain.

Orang tua Petrus Bima sendiri masih berkeyakinan anaknya masih hidup. Kedua orang tuanya mengesampingkan Bima mati, meski nada-nadanya nasib 14 korban penculikan itu sudah tidak jelas lagi.

Terakhir, Dan Puspom ABRI menyatakan para korban penculikan sudah dilepaskan pertengahan Maret 1998.

akan berakhir. Kesibukan penerimaan untuk mencari pinjaman ke sana-sini memang mengesankan kesungguhan upaya membawa bangsa Indonesia keluar dari

kan kerusuhan, ini yang tidak kita kehendaki. Karena itu harus kita waspadai bersama."

ua-ketua Mario Viegas Carrascalao, H.A.R Tilaar,

KAMI YAKIN KEBENARAN ..... (Sambungan dari hal. 1)

persoalan sudah menjadi lain. Apalagi kalau sampai tiada kejelasan siapa sekali, kendati pelaku penghilangan (penculikan) sudah diketahui, hal itu sudah sangat keterlaluan.

DT. Utomo Rahardjo, orangtua aktivis Petrus Bima Anugerah yang termasuk dari 14 aktivis yang dihilangkan dan kini belum jelas keberadaannya itu, hanya bisa tepekur dan pasrah kepada Tuhan. Karena berbagai upaya mencari putranya ini, dengan hilir mudik Jakarta-Malang kadung dilakukan, namun hasilnya nihil.

Di antara usahanya itu bersama Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menemui Puspom ABRI, ke F-ABRI DPR RI, tapi tidak diterima dengan berbagai dalih.

"Kami yakin kebenaran itu suatu kali akan muncul dan mengalahkan tindak kekejian yang dibuat manusia," kata Utomo, pemeluk agama Katolik taat ini kepada Pos Kota melalui telepon dari kediamannya di Jalan Suryo, Gg. II/2, Malang, Senin malam.

Semua anggota keluarga memahami akan kebesaran Sang Maha Pencipta itu. Utomo melanjutkan tentang bagaimana penerimaan dari ibu Bima, G. Missiati dan kakak sulung dan dua adik Bimo, yakni Anastasia Anggar Palupi Rahayu, dan A. Tridanang serta ST. Ari Priambodo. "Semua menerimanya dengan rasa kepasrahan kepada Tuhan," katanya lagi memuji kebesaran Sang Maha Kuasa.

Petrus Bima Anugerah, putra kedua DT. Utomo Rahardjo yang tercatat sebagai mahasiswa semester kedua di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara Jakarta, mahasiswa Fisipol Unair semester VI ini sebelum aktif dan terjun di Partai Rakyat Demokratik yang di era rezim Soeharto diharamkan ini, sudah kadung bersentuhan dengan masalah politik di Unair.

Kepeduliannya terhadap kehidupan kemasyarakatan ini malah jauh sebelumnya sudah ditunjukan di kota kelahirannya, Malang, dengan aktif bergabung dengan kegiatan-kegiatan gereja dan kesibukan-kesibukan lain.

Saya kesampingkan dia mati

Orangtua Petrus Bima Anugerah ini sendiri masih berkeyakinan anaknya masih hidup. "Saya kesampingkan dia mati, meski nadanada nasib 14 korban penculikan itu sudah tidak jelas lagi," katanya setelah mendengar pemberitaan-pemberitaan tentang nasib 14 orang itu.

Terakhir Dan Puspom ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalaludin menyatakan para korban penculikan itu sudah dilepaskan pertengahan Maret 1998 lalu. Namun dalam keterangannya kepada pers beberapa waktu lalu itu, dia tidak merinci dimana mereka dilepas dan oleh siapa.

Keterangan ini makin kabur setelah ditemukannya sejumlah mayat di Way Umpu, Blambangan, Lampung oleh masyarakat setempat. Tapi belakangan penemuan mayat yang sudah rusak dan terkesan menghilangkan identitas korban itu dibantah sebagai mayat dari 14 korban penculikan.

Utomo melanjutkan keyakinan keluarga tentang Bima itu semakin bertambah, setelah semua anggota masyarakat khususnya Umat Gereja di Kota Malang, Jawa Timur selalu mendoakan keselamatan Petrus, dalam bentuk kelompok-kelompok doa.

Saat ini yang kami bisa lakukan hanya bersabar dan bersabar, karena melalui cara itulah berkah Tuhan akan muncul. "Apalagi masyarakat, semua berada di belakang kami," katanya menjelaskan dukungan berlimpah dari masyarakat.

Kehidupan keluarga sangat demokratis

Utomo menjelaskan sikap nrimo keluarga itu karena dasar didikan keluarga yang lebih menekankan kepada faktor keterbukaan. "Jadi saat Bima terjun di PRD, misalnya, kami sudah memahami resikonya, karena sebelumnya hal itu sudah dibicarakan pada semua anggota keluarga," tuturnya.

Namun sikap nrimo itu bukan berarti menghilangkan sikap kritis. "Sebagai orangtua, tentunya saya juga memberikan saran-saran dan pandangan, begitu pula ibu Bima," ujarnya mencoba meng-eleminir pengertian sempit sikap nrimo itu.

Bahwa kemudian sikap yang diambil putranya itu, dianggap berseberangan dengan pemerintahan dan berakhir dalam bentuk penghilangan Bima, semua itu tidak mengejutkan kami. Sehingga saat temen-temennya dari Jakarta memberitahu, 6 - 7 April, Bima hilang, kami dapat menerimanya. Bima dihilangkan, 30 Maret.

Dia, aku Utomo diyakini sudah mengetahui resiko dari aktivitas PRD yang dituduh sebagai dalang kerusuhan 27 Juli 1996, buntut dari penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro oleh sekelompok orang yang diduga dipimpin oleh Buttu Hutapea. Dengan demikian kami sekeluarga besar hati, bahwa Bima akan tabah menjalani kehidupan yang tak berperikemanusiaan itu.

Apalagi sebelum ini dia sudah berulangkali berurusan dengan aparat, karena aktivitasnya di Unair serta aktivitas lainnya, sehingga dia sudah tidak kaget lagi, Utomo menambahkan.

Hanya mungkin itu saja, penculiknya sudah ditangkap dan berbagai pengakuan dari beberapa korban penculikan diungkap ke permukaan, Bima bersama rekan aktivis lain belum dilepaskan. "Saya tidak mengerti kekuatan apa yang ada di belakangan semua itu," ujarnya prihatin.

"Logikanya kalau pelaku penculikan sudah diketahui, bahkan ditangkap oleh Puspom ABRI, korban penculikan yang belum dilepaskan bisa diketahui," sambungnya.

Kami sekeluarga berharap penculiknya itu mau melepaskan mereka yang tidak berdosa itu, serta meminta Pemerintah dan ABRI, terutama untuk terus mencari dan menangkap penculiknya, serta mengungkapkan secara transparan kepada masyarakat, khususnya actors intellectual-nya. "Jadi bukan cuma pelaku-pelakunya," Utomo menyampaikan harapannya.

(ahi).

MAYAT DI WAY UMPU ..... (Sambungan dari hal. 1)

orang dipimpin, Letkol dr. Slamet Purnomo, SpF, Ketua Ladok Dokkes Mabes Polri tiba di lokasi sekitar pukul 10:50 Wib penggalian mayat-mayat berakhir pukul 12:20 Wib. Penggalian kuburan mayat yang dibantu enam warga setempat dr. Slamet Purnomo dibantu Ketua Labkrim Kedokteran UI, dr H. Budi Sampurna dan Lettu Pol dr. Dadang Kurnia dari Polda Lampung langsung mengotopsi mayat tersebut. Pelaksanaan otopsi sekitar hampir 2 jam mendapat perhatian lebih dari 100 warga terutama kalangan pelajar SMUN I Blambangan, Ompu mendapat penjagaan ketat dari anggota Den POM ABRI II/3 Sriwijaya, Polda Lampung, Polres Lampung Utara. Bau busuk menyengat hidung tidak dihiraukan mereka tetap bertahan menyaksikan jalannya otopsi tersebut.

Ketua Ladok Dokkes Mabes Polri Letkol Pol dr. Slamet Purnomo kepada wartawan mengatakan pelaksanaan otopsi mayat tak dikenal diduga kuat berjenis kelamin laki-laki di perkirakan berumur antara 23-30 tahun. Tinggi korban diperkirakan 140 cm atau 160 cm tabpa diukur kepala.

Pelaksanaan otopsi tersebut, selain untuk mengetahui penyebab kematian juga bertujuan untuk mengetahui identitas korban, tapi memperjelas hal itu, Tim membawa tulang rusuk kiri, gigi dari rahang atas ke Jakarta untuk diperiksa di laboratorium.

Sementara kerusakan organ tubuh korban saat ditemukan karena terlalu lama berada di air, hingga seperti lambung berlubang yang nyaris tanpa isi itu diduga kuat dimakan ikan.," ujar Slamet Purnomo.

Kapolres Lampung Utara Letkol Pol Drs PL Tobing bersama jajarannya yang berkesempatan hadir menyaksikan proses otopsi itu mengakui, sejak ditemukannya mayat tak dikenal di aliran Way Umpu pada 18 Juli lalu tak satupun dari warganya yang merasa kehilangan salah seorang keluarganya.

Dengan melaksanakan otopsi Tim Puslabfor ini kata Tobing akan memeriksa tahkan anak buahnya mengimformasikan kepada masyarakat ciri-ciri korban hingga nanti kalau masyarakat yang kehilangan keluarga mengetahui dan melapor kepada kepolisian.

Sementara Kontras di LBH Bandar Lampung, Sesa (4/8) kembali melakukan cek informasi ulang ke lokasi Blambangan, Umpu. Tim terdiri, Muchtar Sinda (Kontras) dan Watoni Nadin melakukan meneme kembali beberapa orang yang memberikan informasi penemuan mayat terapung sebelumnya kepada Kontras dan LBH Bandar Lampung (sp/18)*

Pos Kota
6 Agustus 1998

Namun, dalam keterangannya, Puspom tidak merinci di mana mereka dilepas dan oleh siapa.

Utomo melanjutkan keyakinan keluarga tentang Bima itu semakin bertambah, setelah semua anggota masyarakat khususnya umat gereja di Kota Malang, Jawa Timur, turut mendoakan keselamatan Bima dalam bentuk kelompok-kelompok doa.

Saat ini yang kami bisa lakukan hanya bersabar dan bersabar karena melalui cara itulah berkah tuhan akan muncul. Apalagi, keluarga melihat bahwa masyarakat berada di belakang mereka

Utomo menjelaskan sikap nrimo keluarga itu karena dasar didikan keluarga yang lebih menekankan kepada faktor keterbukaan. Jadi, saat Bima terjun di PRD, misal, orangtua sudah memahami risikonya, karena sebelumnya hal itu sudah dibicarakan pada semua anggota keluarga.

Namun, sikap nrimo itu bukan berarti menghilangkan sikap kritis. Sebagai orang tua, tentunya mereka juga memberikan saran-saran dan pandangan.

Bahwa kemudian sikap yang diambil putranya itu dianggap berseberangan dengan pemerintahan dan berakhir dalam bentuk penghilangan Bima, semua itu tidak mengejutkan keluarga. Sehingga, saat teman-teman Bima dari Jakarta memberitahu, 6–7 April Bima hilang, orang tua dapat menerimanya. Bima dihilangkan pada 30 Maret.

Bima meyakini sudah mengetahui risiko dari aktivitas PRD yang dituduh sebagai dalang kerusuhan 27 Juli 1996, buntut dari penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro oleh sekelompok orang yang diduga dipimpin Buttu Hutapea. Dengan demikian sekeluarga berbesar hati, bahwa Bima akan tabah menjalani kehidupan tak berperikemanusiaan itu.

(*) Disarikan dari Pos Kota *("Jeritan hati keluarga korban penculikan: 'Kami yakin kebenaran akan muncul'", 6 Agustus 1998).*

SONNY

Sonny Berlatar Belakang Pahit

Lahir di Jakarta 28 tahun lalu, beralamat di Rumah Susun Tanah Abang, hilang tanggal 26 April 1997 di Jakarta. Sonny yang mantan preman itu aktif di PDI Perjuangan, terutama setelah terjadi peristiwa 27 Juli 1996 yang membuat ia bersimpati kepada kelompok Megawati.

Pius yang sempat berkomunikasi dengan Sonny selama penyekapan mengatakan bahwa pada awalnya Sonny dan Yanni Afri ditangkap pihak Kodim Jakarta Utara dengan tuduhan terlibat dalam kasus peledakan bom di Kelapa Gading Jakarta.

Setelah ditahan satu malam, mereka berdua kemudian dibebaskan. Namun belum sempat Sonny beranjak jauh dari kantor Kodim, sebuah Toyota *Hard Top* berhenti di depannya dan turunlah empat orang berbadan kekar. Sonny sempat berkeras menolak dan berpegangan pada pagar kantor Kodim.

Ketika petugas Kodim berusaha membantunya, para penculik kemudian mengeluarkan lencana dan membisikkan sesuatu kepada petugas Kodim. Si petugas tadi kemudian berbalik malah membantu si penculik membekuk Sonny.

Latar belakang keluarga Sonny pun tak jelas. Hingga kini, tak nampak ada keluarga yang mencarinya. Beberapa aktivis menduga, keluarga Sonny berada di tempat yang jauh dan tak mampu. Aktifitas keseharian Sonny sendiri hanya diketahui sebagai sopir tembak, yang hanya sekali-kali *nyerep* mobil pegangan temannya. Toh, dalam setiap pertemuan yang melibatkan keluarga korban penculikan, foto Sonny juga dibawa-bawa oleh keluarga korban lainnya.

Beberapa temannya hanya menyebut kehidupan Sonny sebelum diculik cukup pahit. Dia kerja sendiri untuk menghidupi dirinya. Tetapi apakah benar dia diculik karena aktifitas politiknya? Ori Rahman, anggota Kontras, membenarkannya. "Saya yakin dia diculik karena aktifitas politiknya, terutama pasca tragedi 27 Juli 1996," katanya. ☐ dikki

Adil
4 Agustus 1998

Tinggal di Rumah Susun Tanah Abang, pemuda kelahiran Jakarta ini hilang pada 26 April 1997 pada usianya yang ke-28. Sonny bergiat di PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri. Simpatinya makin menggebu, terutama setelah peristiwa 27 Juli 1996.

Sonny berada satu "kapal selam" penyekapan dengan aktivis lainnya seperti Desmond J. Mahesa dan Pius Lustrilanang. Pius, misalnya, memastikan mereka satu ruangan karena sempat berkomunikasi. Dari Pius kemudian informasi ini muncul: bahwa, Sonny ditangkap bersama Yani Afri atau Ryan oleh pihak Kodim Jakarta Utara dengan tuduhan terlibat dalam kasus peledakan bom di Kelapa Gading, Jakarta.

Setelah semalam ditahan, Sonny dan Ryan dibebaskan. Belum juga keduanya jauh meninggalkan pagar markas Kodim, tiba-tiba saja Toyota Hardtop berhenti dan empat orang berbadan kekar menarik keduanya masuk ke mobil.

Sejenak terjadi tarik-menarik antara penculik dan Sonny-Ryan yang bahkan mengundang perhatian petugas Kodim yang sedang berjaga. Saat penculik menunjukkan lencana, petugas Kodim pun berbalik membantu si penculik membekuk Sonny.

Siapa Sonny? Tak ada keluarga yang mencari sosok satu ini. Diketahui, aktivitas kesehariannya adalah "sopir tembak" yang hanya sesekali nyerep mobil pegangan temannya. Hidup hariannya saja sudah pahit, ditambah lagi diculik dan tak kedengaran di mana rimbanya. Kontras membenarkan Sonny diculik karena aktivitas politiknya, terutama setelah kerusuhan besar 27 Juli (1996).

(*) Disarikan dari Adil *("Sonny Berlatar Belakang Pahit", 4 Agustus 1998).*

BABAK V

Munir: Bayangkara Korban Kekerasan Negara

Ia ayah bagi mereka yang merasakan betapa sepi, betapa getir, betapa sakit, betapa langit nasib runtuh saat mendapatkan palu godam kekerasan negara. Ia setia mendampingi si bisu yang takut membuat pengakuan. Ia mewakafkan nyaris seluruh waktunya mendampingi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, tak ada garansi kapan pulang untuk mendapat kepastian hayat. Hidupnya berada di tepi jurang; melawan institusi dan tokoh jahat dalam lakon bayangkara negara. Ia dengan segala potensinya, berada di perahu kecil bernama Kontras, menjadi bayangkara bagi warga negara yang hak konstitusionalnya dirudapaksa dengan senjata dan teror.

Milik
STAKAAN DINAS
Pem.Daerah.Ist
ogyakarta

KOMPAS
AMANAT HATINURANI RAKYAT
HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

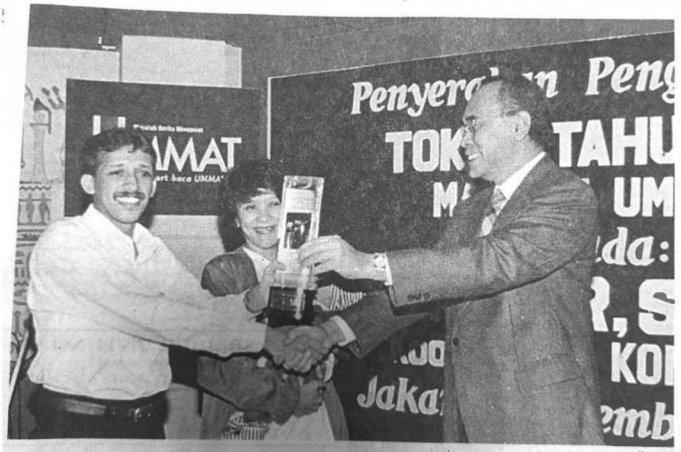

Kompas/Ipe

TOKOH 1998 — *Munir SH, Ketua Badan Pekerja Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) terpilih sebagai "Tokoh 1998" versi Majalah Ummat. Munir menerima trofi dari Abdillah Toha (Pemimpin Umum Majalah Ummat), didampingi istrinya, Suciwati, dan anaknya, Sultan Alif Alende, Senin (28/12) di Hotel Acacia, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat.* **Berita di hlm 11.**

Munir, "Tokoh 1998" Versi "Ummat"

arta, Kompas

ordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Kor- kekerasan (Kontras) Munir—tokoh yang meng- p kasus penculikan sejumlah aktivis—dinobat- bagai "Tokoh 1998" versi Majalah *Ummat*. Mu- ada di peringkat teratas di antara sejumlah no- ator kuat lainnya, antara lain Ketua Umum PB dlatul Ulama (NU) KH Abdurrahman Wahid (Gus ri), Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional N) Amien Rais, dan mahasiswa reformis.

pengumuman penobatan dilakukan Wakil Pemim- Redaksi Majalah *Ummat* fi Anwar, Senin (28/12) di rta. Penghargaan dan trofi rahkan langsung Pemimpin m Abdillah Toha, setelah an Juri melakukan penilai- elama 1,5 bulan terhadap h bersangkutan.

Menurut Syafi'i, penilaian adap "Tokoh 1998" dibagi tahap. Pada tahap pertama, ring Gus Dur, Amien Rais koh 1997"), Munir, dan se- h tokoh lainnya. Tahap ke- nggal Gus Dur, Amien dan Munir. Sedang tahap khirnya terpilih Munir. "Juri memilih sosok tokoh memiliki kepedulian mela- politik kekerasan. Kebera- niannya dilandasi keberpi- hakannya kepada ide dan visi kemanusiaan universal, yang menurut pengakuannya sendiri disemai oleh ajaran agama yang diyakininya. Dengan dasar pandangan itulah pilihan kami jatuh kepada Munir," papar Syafi'i dalam acara yang dihadiri puluhan wartawan.

Tujuan *Ummat* memilih pria kelahiran Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965, kata Syafi'i, sekadar mengingatkan masyarakat bahwa di Indonesia masih ada orang yang dengan keberanian luar biasa melakukan perlawanan terhadap praktik politik kekerasan. Munir antara lain telah berjasa melakukan perlawanan terhadap politik kekerasan oleh negara (*state violence*), terutama kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan aparat militer.

"Ketika orang masih ragu, sungkan, dan bahkan takut bicara tentang keterlibatan militer dalam kasus penculikan mahasiswa dan aktivis politik lainnya, Munir bicara lantang mengungkapkan fakta dan kebenaran. Tanpa ragu ia menyingkap berbagai praktik kejilan dan penistaan harkat dan martabat kemanusiaan sejumlah anak bangsa yang seharusnya dilindungi negara," kata Syafi'i.

Kritikan

Munir, alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, yang beberapa pekan sebelumnya menerima penghargaan Yap Thiam Hiem mengatakan, anugerah yang diterimanya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Namun penghargaan itu diakuinya telah memakutkan diri dan keluarganya.

"Saya sungguh takut karena khawatir penghargaan dan ketenaran ini menyebabkan saya tidak mampu mengontrol diri hingga menjadi manusia yang congkak," kata Munir yang hadir bersama Suciwati, istrinya, dan putranya yang masih berusia tiga bulan, Alif. Munir juga menyatakan terima kasih kepada istrinya yang telah mendorong perjuangannya itu.

Meskipun demikian, Munir yang kini menjabat Kepala Divisi Operasional YLBHI Jakarta, tidak lepas dari berbagai kritik. Mereka yang mengritiknya antara lain Sekjen Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) Hussein Umar, mantan Komandan Pusat Polisi Militer ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalaluddin, dan artis Eva Arnaz. Kritikan mereka termuat dalam *Ummat* edisi terbaru yang sampul depannya memuat Munir sebagai "Tokoh 1998".

Kritikan paling pedas datang dari Eva Arnaz, artis yang kehilangan suaminya (Deddy Hamdun) karena peristiwa penculikan. Eva menilai, apa yang dilakukan dirinya lebih dari sekadar yang dilakukan Munir dengan Kontras-nya. Bahkan ketika ditanya komentarnya mengenai perjuangan Munir, Eva mengatakan, "Capek. *Nggak* ada ujung pangkalnya, *nggak* ada hasilnya." (pép/oki)

Kompas
29 Desember 1998

Bernas
29 Desember 1998

Munir Berani Melawan Praktek Kekerasan Negara

Dinobatkan Tokoh 1998 versi "Ummat"

Jakarta, Bernas

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Munir SH dinobatkan sebagai "Tokoh 1998" versi Majalah Mingguan *Ummat*. Munir menyingkirkan dua nominasi lainnya yaitu Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan tokoh reformasi Dr Amien Rais.

Munir dipilih *Ummat* karena dia merupakan tokoh yang secara berani melawan kekerasan negara (*state violence*). Munir adalah orang yang pertama kali berani membongkar praktek-praktek kekerasan dan kejahatan politik yang dilakukan negara, terutama kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan instansi dan aparat militer.

Pengumuman hasil seleksi dilakukan Wakil Pemimpin Redaksi Majalah *Ummat* Syafi'i Anwar di Jakarta, Senin (28/12). Sedangkan penghargaan dan trofi diserahkan pemimpin umum majalah itu, Abdillah Toha.

Penghargaan kepada Munir diliput puluhan wartawan media cetak dan elektronik nasional maupun internasional.

Dewan juri dari *Ummat* telah melakukan penilaian selama 1,5 bulan atas tokoh nasional yang akan dinobatkan dilakukan secara teliti dan mempertimbangkan berbagai faktor. Seperti halnya ketika memilih Amien Rais tahun 1997, penilaian dibagi tiga tahap.

Tahap pertama meliputi Gus Dur, Amien Rais, Munir dan sejumlah tokoh lainnya. Tahap kedua hanya tinggal Gus Dur, Amien Rais dan Munir. Sedangkan tahap ketiga akhirnya memilih Munir.

Syafi'i mengatakan bahwa pilihan atas Munir didasarkan pada keberanian dan keberpihakannya kepada ide dan visi kemanusiaan universal. Munir dianggap telah sangat berani dan berhasil mengungkap kasus penculikan yang melibatkan 11 oknum Kopassus. "Tahun 1998 ditandai dengan merebaknya kasus-kasus kekerasan. Ada kesan kuat semua persoalan politik dan ekonomi dipecahkan melalui kekerasan politik, akibatnya kekerasan menjadi semacam mode," katanya.

Karena itu, *Ummat* tahun ini memilih sosok yang punya kepedulian melawan politik kekerasan. Tujuannya untuk mengingatkan agar semua pihak menyadari bahwa di Indonesia masih ada orang yang berani luar biasa melakukan

Bersambung ke halaman 8 kol 1

Bernas/is

Kontras, Munir, berpidato pada penyerahan hargaan Tokoh Tahun 1998 dari Majalah Ummat, (28/12).

#1

Munir–tokoh yang mengungkap kasus penculikan sejumlah aktivis–dinobatkan sebagai "Tokoh 1998" versi majalah *Ummat*. Munir berada di peringkat teratas di antara sejumlah nominator kuat lainnya, antara lain Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (NU) K.H. Abdurrahman Wahid, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, dan mahasiswa reformis.

Tujuan *Ummat* memilih Munir adalah sekadar mengingatkan masyarakat bahwa di Indonesia masih ada orang yang dengan keberanian luar biasa melakukan perlawanan terhadap praktik politik kekerasan. Munir antara lain telah berjasa melakukan perlawanan terhadap politik kekerasan oleh negara *(state violence)*, terutama kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan aparat militer.

Ketika orang masih ragu, sungkan, bahkan takut bicara tentang keterlibatan militer dalam kasus penculikan mahasiswa dan aktivis politik lainnya, Munir bicara lantang mengungkapkan fakta dan kebenaran. Tanpa ragu ia menyingkap berbagai praktik kekejian dan penistaan harkat dan martabat kemanusiaan sejumlah anak bangsa yang seharusnya dilindungi negara.

#2

WAWANCARA

AKAN LAHIR SUKARNO DAN SOEHARTO BARU

MUNIR SH

Nyalinya tak sekecil postur tubuhnya. Juga tak sependek namanya: **Munir SH.** Sepak terjang dan berbagai pernyataannya memang acap bikin merah kuping pemerintah dan kalangan militer. "Banyak tentara yang marah sama Anda, *lho*, Mas," cetus seorang perwira menengah —terdengar seperti sedang meneror— kepadanya suatu ketika.

Teror dengan segala macam bentuknya memang tak asing lagi bagi Munir. Toh, ia memutuskan untuk terus menekuni kerja kemanusiaannya. Alumni FH Unibraw, Malang, ini juga merasa tak perlu bersikap berlebihan terhadap teror-teror itu. Harus berpengawal ke manamana, misalnya. "Saya tak terlalu paranoid dengan pekerjaan saya," katanya kepada UMMAT.

Pekan lalu, Koordinator Kontras ini bertandang ke kantor UMMAT dan berdiskusi dengan awak redaksi seputar maraknya aksi kekerasan dan rekayasa politik di baliknya. Mantan pengurus Al-Irsyad dan aktivis HMI ini juga membeberkan berbagai kritik yang diterimanya.

ALFAN/UMMAT

Ummat
9 November 1998

Berbagai aksi kekerasan seperti tak ada habis-habisnya menimpa bangsa ini. Bagaimana Anda melihatnya dalam perspektif kehidupan politik kita?

Saya yakin, semua ini merupakan produk proses politik yang panjang di masa lalu. Jadi, ini bukan hal baru dalam proses politik di Indonesia. Menurut saya, konfigurasi yang ada saat ini situasinya kurang lebih sama dengan tahun 1989, saat terjadi 3 kali operasi militer besar. Dan, kita tahu operasi itu memakan korban tidak sedikit.

Bagaimana detailnya?

Pertama, saat meledaknya kasus Warsidi di Lampung pada Februari 1989. Kasus ini meledak karena negara menolak pola penumbuhan resistensi suatu kelompok masyarakat. Orang-orang Lampung waktu itu punya obsesi membangun masyarakat Islami. Nah, pola ini harus berhadapan dengan kecenderungan sentralistik kekuasaan. Pola itu dihadapi dengan kekuatan militer karena dianggap sebagai suatu pemberontakan. Tak terelakkan, akhirnya jatuh korban cukup banyak, bahkan termasuk bayi-bayi.

Yang *kedua* adalah meletusnya kasus Thomas Wanggai di Irian Jaya pada April 1989. Waktu itu sekitar 35 ribu orang turun ke jalan menunjukkan sikap politiknya. Tapi, lagi-lagi mereka dihadapi dengan senjata oleh tentara, yang menyebabkan korban berjatuhan. Sementara, Thomas kemudian ditahan.

Yang terakhir adalah pada September 1989, ketika terjadi perlawanan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebenarnya simpul-simpul perlawanan masyarakat Aceh sudah ada sejak kabinet Natsir di tahun 1950-an. Saat itu Natsir ingin menyatukan Aceh dengan Sumatera Utara. Tapi, rakyat Aceh menolak.

Potensi perlawanan Aceh kembali bangkit saat terjadi eksploitasi sumber daya alam gila-gilaan oleh rezim Orde Baru pada 1970-an. Lalu, (mantan) Presiden Soeharto mengirim 12.000 pasukan untuk menumpas GAM. Ini berarti 1 orang anggota GAM berhadapan dengan 100 tentara RI. Hasilnya, lebih dari 100 orang GAM dipenjarakan dan ribuan warga Aceh dibunuh. Tapi perlawanan GAM tak kunjung berhenti. Sebenarnya, kalau ABRI sungguh-sungguh mau menghabisi GAM, sudah sejak dulu bisa dilakukan. Tapi tampaknya ABRI sendiri sengaja memelihara keberadaan GAM. Kenapa?

Pasalnya, di balik status DOM yang kemudian diberlakukan di Aceh, ada kepentingan ekonomi yang ingin dilindungi. Misalnya, untuk mem-*back-up* PT Arun, beberapa penambangan batubara, dan pemotongan hutan. Dengan demikian, bisa dikatakan DOM bukan perlawanan terhadap GAM, melainkan upaya proteksi ABRI terhadap kepentingan ABRI di Aceh.

Dari semua kasus itu, sebenarnya menunjukkan hal apa?

Kesimpulan saya, terjadinya perlawanan rakyat sebenarnya bukanlah riil datang dari bawah. Memang benar ada rasa ketidaksukaan terhadap pemerintah pusat. Tetapi momen munculnya perlawanan itu tergantung pada kebijakan dan konflik di tingkat elite. Misalnya, kalau para jenderal di atas pada bertarung, maka yang di bawah pun akan terkena imbasnya. Indikasinya, terlihat dari terjadinya beberapa kerusuhan pada tahun yang sama.

Namun kemudian, selalu ditunjukkan bahwa pada kerusuhan tersebut ada yang meledakkan. Akibatnya kemudian, muncul kebijakan di tingkat makro yang intinya memperkokoh legitimasi negara. Contohnya, setelah berbagai kerusuhan pada 1989, terjadi peningkatan orientasi pengawasan politik masyarakat.

Banyak orang yang mati bagi negeri ini kan bukan barang baru. Kasus Lampung, Tanjung Priok, dan Aceh hingga kini tak ada angka yang jelas. Saya kira, ini suatu proses di mana kalau membunuh 100-200 orang, hanya dianggap barang murah di negeri ini.

Pola semacam itukah yang kini tengah terjadi?

Ya. Kita lihat basis legitimasi Soeharto sudah mulai goyang pada 1995. Itu ditandai dengan meluasnya perlawanan masyarakat —tercermin dalam bentuk kerusuhan di Situbondo, Tasikmalaya, dan lain-lain— tidak kompaknya tentara, dan lain-lain. Kerusuhan itu berkelanjutan sampai menjelang Pemilu 1997. Nah, berbagai kerusuhan tersebut digunakan sebagai basis legitimasi untuk memunculkan kebijakan yang memperkuat resistensi negara. Bentuknya, kita lihat munculnya posko kewaspadaan sampai tingkat koramil. Ini mirip dengan tahun 1984 yang memunculkan Bakorstanas.

Artinya, ada "keuntungan" politik yang mau diambil...

Betul. Berbagai kerusuhan itu akhirnya memunculkan *reward* politik kontrol yang semakin luas ke bawah. Juga munculnya institusionalisasi peran-peran kontrol. *Reward* itu juga muncul pada naiknya anggaran hankam untuk tahun 1996-1997 sebesar 250%. Menurut dokumennya, *sih*, kenaikan itu untuk mengkonsentrasikan kekuatan di 5 kodam. Juga disebutkan untuk membentuk 5 wilayah *back up* kodam. Yang terakhir ini *nggak* jelas, apakah maksudnya untuk menumpuk sembako di 5 kodam atau apa. Menariknya, IMF dalam hal ini juga tidak mau mempersoalkannya.

Menurut Anda, *reward* politik apa yang ingin dicapai dengan berbagai aksi kekerasan belakangan ini?

Saya khawatir *output* kerusuhan ini adalah keluarnya kebijakan politik tertentu. Gejalanya sudah muncul berupa UU Unjuk Rasa. Pada UU tersebut terlihat adanya upaya untuk tidak membedakan kegiatan unjuk rasa sebagai partisipasi politik dengan tindak kriminal para penjarah dan aktor provokasi.

Memang, di setiap kerusuhan selalu ada tiga pihak di dalamnya. *Pertama*, mereka yang berpartisipasi politik untuk memberikan koreksi. *Kedua*, provokator yang mengalihkan alur partisipasi politik menjadi anarki. Dan *ketiga*, pelaku kriminal murni. Nah, UU tersebut mencoba mengaburkan ketiganya, sehingga memberikan basis legitimasi untuk melakukan kebijakan represif dan menghantam. Yang dituju sebetulnya bukan para maling atau pun provokator itu, tetapi justru para partisipan politik agar perannya bisa dikembalikan pada proses-proses lama.

Tapi, bagaimana mungkin untuk sekadar mendapatkan *reward* politik harus dikorbankan sekian ribu jiwa?

Banyaknya orang yang mati bagi negeri ini kan bukan barang baru. Kasus Lampung, Tajung Priok, dan Aceh hingga kini tak ada angka yang jelas. Saya kira, ini suatu proses di mana kalau membunuh 100-200 orang, hanya dianggap barang murah di negeri ini.

Dengan melihat *reward* politik-nya, sebenarnya kita bisa melihat siapa yang bermain di balik kerusuhan tertentu?

Benar. Untuk kasus Banyuwangi, misalnya, kita lihat dulu kebijakan negara apa yang akan muncul. Kalau ada *output* berupa institusionalisasi represi, maka siapa pemainnya akan jelas. Tapi sekarang ini lagi proses. Kita hanya bisa menyaksikan dengan segala kekhawatiran mesin politik yang tengah bergerak itu.

Pada kasus Banyuwangi, apa pengamatan sementara Anda?

Pada kasus Banyuwangi, sekarang ini ada dua sisi. Mereka yang membantai di balik isu dukun santet dan yang melakukan pembalasan terhadap ninja. Keduanya

Ummat
9 November 1998

SUKMA/UMMAT

MUNIR BERSAMA KELUARGA KORBAN DOM ACEH. *Sejak Kabinet Natsir*

adalah korban dari budaya kekerasan yang diperkenalkan. Apalagi mereka kemudian diprovokasi.

Lihatlah proses teror dari Banyuwangi yang cepat meluas ke wilayah lain sejak September. Aksi pembunuhan "dukun santet" berakhir 5 Oktober, sejak Kapolda Jawa Timur mengatakan tidak ada lagi yang dibunuh. Tapi kemudian terjadi arus balik, yaitu pembunuhan terhadap orang yang dituduh ninja. Arus balik ini diikuti provokasi terhadap beberapa pesantren —terutama— di Jawa Tengah bahwa mereka akan dibunuh. Ini membuat amarah warga kian keras. Lalu, sama saja. Dulu terjadi pembiaran pembantaian terhadap orang yang dituduh dukun santet. Kini terjadi pembiaran proses pembantaian terhadap "tersangka" ninja.

Anda ingin mengatakan bahwa aparat lamban bertindak?

Gejala ketidakpuasan di masyarakat sekarang ini sudah cukup tinggi. Hal itu difikuti makin lunturnya kepercayaan masyarakat kepada aparat. Tetapi masyarakat selalu mendua. Di satu sisi mereka melakukan eksekusi untuk mendapatkan rasa aman, di tingkat makro mereka berharap adanya proteksi negara. Di sinilah negara lalu mematikan peran sebagai perawat jasa-jasa baik pengamanan. Saya kira ini agak konyol. Tanpa diminta, negara seharusnya bertanggung jawab terhadap ini semua. Tetapi di Indonesia, itu malah menjadi semacam jasa baik dan bukan kewajiban. Dengan "jasa baik" itu, mereka menjadi pahlawan kembali. Menurut saya, kalau sampai terjadi sekian banyak orang mati dibantai, pemerintah harus mundur.

Kenapa harus mundur?

Berdasarkan konsep-konsep HAM, negara harus bertanggung jawab terhadap kejahatan kemanusiaan, baik berupa teror, pembunuhan, maupun perlakuan tak manusiawi. Adalah kewajiban negara untuk memberikan proteksi. Kalau negara membiarkan, sama artinya melanggar HAM. Seperti kasus Banyuwangi, negara harus bertanggung jawab, sebab gagal memberikan proteksi kepada warganya. Bentuknya tidak cukup hanya dengan menghentikan dan memulihkan keadaan seperti sedia kala. Ratusan orang yang mati pun harus dipertanggungjawabkan.

Sejauh ini, uraian Anda mengasumsikan bahwa pemerintah itu monolit (tunggal) yang berhadapan dengan rakyat. Bagaimana faktor persaingan dan konflik di tingkat elite politik sendiri di balik berbagai kasus-kasus ini?

Konflik elite politik memang ada, tapi biasanya berkaitan dengan berbagai ketetapan di dalam. Tapi, ketika menghadapi tuntutan seperti demokratisasi atau partisipasi peran politik rakyat, saya kira visi mereka sama. Mereka menjadi satu.

Bahkan hal itu dilakukan oleh tokoh sipil di birokrasi?

Sejarah menunjukkan, tokoh-tokoh (sipil) yang ingin naik ke puncak kekuasaan harus selalu berkoalisi —salah satunya— dengan alat keamanan semacam ABRI. Itu pernah dilakukan oleh Masjumi, PSI, bahkan oleh PKI dulu. Yang sekarang terjadi, tidak jauh beda. Memang, sekarang orang bersedia bersaing secara *fair* dalam satu mekanisme politik demokratis. Tetapi di sisi lain masih ada tentara yang berpolitik. Nah, ini bisa diibaratkan ABRI adalah seorang gadis cantik yang diperebutkan banyak jejaka. ABRI lalu bilang, "Oke, kalian semua silakan saling bertarung. Pemenangnya nanti bersanding dengan ABRI."

Nah, kalau saat ini ABRI telah menetapkan pilihan pada salah satu partai, bisa-bisa pemilu mendatang penuh tipu-menipu lagi. ABRI akan mem-*back up* partai pilihannya. Ini kan sama saja dengan mengulangi kesalahan Golkar kemarin.

Saat ini kira-kira siapa yang dilirik ABRI?

Ini akan menjadi soal di tingkat proses-proses politik. Megawati sendiri, misalnya, tak berani tegas bicara soal dwifungsi ABRI. Tak bisa saya bayangkan kalau PDI Megawati menang tapi dia berbeda konsep dengan ABRI. Mau *nggak* ABRI tetap berperan? Saya kira ABRI dan PDI Megawati bisa berkoalisi dalam tingkat tertentu. ABRI punya kecenderungan monolitik, artinya melakukan politik dominasi dengan ideologi militerisme.

Sepertinya Anda pesimistis bahwa pemilu mendatang akan melahirkan rezim baru yang bersih dan bisa diharapkan...

Sebetulnya, proses perubahan bisa dilakukan lewat sistem yang menopang kekuasaan itu. Sebab, siapa pun yang memimpin, kalau sistem yang menopang masih lemah, ya susah dikontrol. Perma-

salahannya, *concern* pemain-pemain politik saat ini terhadap penataan sistem masih lemah. Kalau ini terus terjadi, saya yakin, akan lahir Sukarno dan Soeharto baru.

Dan itu sama artinya kita tak bisa mengharapkan lagi tumbuhnya kekuatan sipil...

Saya kira ukurannya tergantung pada kekuatan yang bisa menjadi *balance* kekuatan militer. Jika lemah, bukan tak mungkin akan terjadi *civil disorder*. Sebenarnya kita bisa belajar dari Taiwan. Di sana ada tiga kekuatan politik yang sampai hari ini seimbang kekuatannya. Pemerintah Taiwan sangat didukung oleh basis masyarakat sehingga militer *nggak* berani melakukan kudeta atau macam-macam. Kekuatan ketiga adalah modal kelas menengah. Mereka tumbuh bukan karena sarana negara atau kolusi. Kelas menengah di Taiwan tidak tergantung pada pemerintah. Itu yang membuat mereka kuat.

Anda sudah melihat bahwa kekuatan sipil kita di tahap perpecahan?

Faktanya, ada dua kekuatan besar yang tengah berbeda pendapat: mereka yang mengakui pemerintah Habibie sebagai pemerintahan transisi, dan mereka yang menolak Habibie. Sebenarnya, keduanya memilih jalur parlementer untuk menyelesaikannya. Nah, lalu di mana posisi militer? Saya belum tahu, mereka mau main di dua-duanya atau di mana. Atau punya agenda sendiri? Yang jadi soal adalah kalau kedua kekuatan itu tak punya titik singgung sama sekali. Itu bakal jadi ribut *bener*.

Anda sendiri bagaimana memandang pemerintahan Habibie?

Kalau saya, perdebatan soal konstitusional atau tidak pemerintah Habibie, itu disudahi saja. Itu hanya buang-buang umur. Kalau soal tidak konstitusional, Soeharto dulu naik kekuasaan kan juga tidak konstitusional.

Kita beralih ke soal Kontras yang Anda pimpin. Sejauh ini, bagaimana efektivitasnya?

Yang bisa menilai pekerjaan Kontras hanya masyarakat. Hanya saja, saya yakin, proses perjalanan Kontras selama ini sudah benar. Tapi memang saya ingin mengukurnya. Salah satu caranya adalah mengumumkan ke masyarakat apakah mereka berkepentingan atas kerja Kontras? Jika ya, apakah mereka mau menyumbang dana? Selama ini yang datang malah ibu-ibu bawa kendi (uang), sampai pengamen yang memberikan hasil kerjanya. Memang ada juga yang mengirim cek. Dana masyarakat itulah yang kami gunakan selama ini, mulai dari kampanye *banner* orang hilang di seluruh Jakarta sampai *ngirim* orang ke Jenewa kemarin.

Ada isu suntikan dana dari Vatikan. Komentar Anda?

Kalaupun Vatikan mau *ngasih*, saya akan terima sepanjang pekerjaan saya benar-benar untuk kemanusiaan. Tapi, sejauh ini memang belum ada dan saya belum mau minta.

Kontras juga dikritik kurang memperhatikan isu yang berkaitan dengan umat Islam...

Orang lupa bahwa pekerjaan pertama Kontras adalah mengurusi kasus Aceh, bukan orang hilang. Kontras-lah yang mendatangkan janda-janda dari Aceh saat Sidang Umum MPR dulu. Tapi prinsipnya, Kontras bekerja tidak melihat apa agamanya. Urusan kemanusiaan tidak bisa begitu. Di kesempatan lain saya malah pusing, yaitu waktu mengurus soal kasus Warsidi (Lampung). Saya didemonstrasi 32 bis dari sekian pesantren. Mereka menuding kami ingin menghidupkan aliran sesat. Wah, aliran sesat apa lagi? Begini-begini, basis saya adalah organisasi Islam. Saya pernah menjadi pengurus Al-Irsyad dan aktif di HMI.

Saya didemonstrasi 32 bis dari sekian pesantren. Mereka menuding kami ingin menghidupkan aliran sesat. Wah, aliran sesat apa lagi? Begini-begini, basis saya adalah organisasi Islam. Saya pernah menjadi pengurus Al-Irsyad dan aktif di HMI.

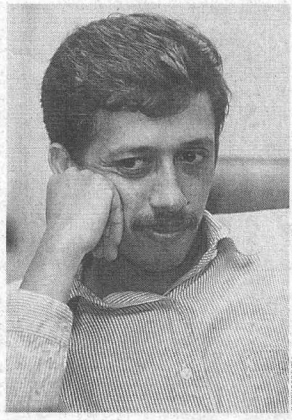

Jadi, apa obsesi Kontras sebenarnya?

Kami punya obsesi untuk menyatukan semua kekuatan korban represi militer selama ini. Baik yang Aceh, Irian, Timtim, atau Tanjung Priok. Mari kita lihat, sebenarnya kita ini korban siapa. Jangan sampai kita jadi korban bulan-bulanan konflik elite lagi. Pokoknya, itu semua adalah korban kejahatan institusional. Harus ada yang bertanggung jawab. Kalau, misalnya, nanti Jenderal (Purn) Benny Moerdani yang kena, itu urusan nanti.

Omong-omong, bagaimana perkembangan terakhir kasus penculikan aktivis?

Kontras sejauh ini mengambil posisi agar proses peradilan terhadap anggota Kopassus yang disangka menculik tak dilaksanakan dulu, sepanjang belum jelas bagaimana nasib 13 orang yang diculik. Sementara ABRI berpendapat, biarlah nanti peradilan yang bicara bagaimana nasib 13 orang itu.

Tampaknya masyarakat akan dibodoh-bodohi. Harus dipahami, fungsi peradilan bukan untuk menyelidiki lagi, tapi membuktikan surat dakwaan oditur militer. Nah, dalam surat dakwaan yang diperoleh lewat BAP dari POM ABRI, sama sekali tak disebut-sebut tentang 13 orang itu. Tidak dijelaskan di sana apakah yang 13 itu mati atau tidak. Jadi, otomatis dakwaannya hanya berbunyi penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.

Lantas, apa tindakan Anda?

Kami ingin menyampaikan catatan-catatan kelemahan itu. Tak apa-apa sidangnya tertunda 3-4 bulan, asal ABRI bisa menyampaikan sikap. Apakah 13 orang itu sudah dibunuh, masih hidup, dan mau dilepas?

Bagaimana dengan tersangka penculiknya? Anda yakin mereka memang pelakunya?

Sampai hari ini kita minta dipertemukan dengan mereka, tapi tidak diberi kesempatan. Tapi, ada beberapa yang saya tahu memang *confirm* dia pelakunya. Ada yang berpangkat mayor, letkol, dan sebagainya (Munir menyebut beberapa nama —*Red.*). Nah, *kayak*-nya yang mau dikorbankan mayor ke bawah ini. Tapi, berdasarkan investigasi kita, bukan hanya mereka penculikriya. Yang lucu, beberapa korban penculikan sempat bertemu pelakunya di jalan. Mereka dulu-duluan lari menghindar. Jadi, ternyata para penculik itu tidak ditahan. Dan itu sudah diakui. Jadi, selama ini kita hanya dibohong-bohongi saja. U

Pembela HAM Terancam Teror

Jakarta, Kompas

Perlindungan hukum bagi mereka yang bekerja sebagai pembela hak asasi manusia (HAM) dan pekerja kemanusiaan amat mendesak di Indonesia. Karena di negeri ini nyawa pembela HAM terancam dengan adanya intimidasi dan segala bentuk teror. Perlindungan hukum bagi pembela dan pekerja HAM itu adalah tanggung jawab pemerintah.

Kompas/js

PENGHARGAAN HAM — *Munir, yang mewakili Kontras bersama pejuang HAM Aceh Farida Haryani, Kamis (10/12) malam menerima penghargaan HAM Yap Thiam Hien. Keduanya dinilai sebagai pejuang HAM yang gigih. Yap Thiam Hien Award diberikan setiap tahun oleh Yayasan Pusat Studi HAM (Yapusham).*

Demikian diutarakan Ketua Dewan Juri Anugrah HAM Yap Thiam Hien 1998, Dr Mely G Tan sewaktu penyerahan Yap Thiam Hien Award di Hotel Santika, Jakarta, Kamis (10/12) malam. Anugerah HAM untuk tahun 1998 ini diserahkan kepada pekerja HAM bagi korban daerah operasi militer (DOM) di Aceh, Farida Haryani, serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Yap Thiam Hien Award untuk Farida diserahkan Mely G Tan. Sedang penghargaan untuk Kontras diserahkan anggota Yayasan Pusat Studi HAM (Yapusham) Dr Daniel Dhakidae kepada Ketua Badan Pekerja Kontras, Munir. Peraih Yap Thiam Hien Award menerima plakat dan uang tunai Rp 10 juta.

Penghargaan HAM Yap Thiam Hien diprakarsai Yapusham. Anugerah itu diberikan setiap tahun, kecuali tahun 1997. Penerima penghargaan itu, antara lain HC Princen, Marsinah, Trimoelja D Soerjadi, Petani Jenggawah, dan Sandyawan Sumardi. Datang dalam acara penyerahan itu, antara lain Dr Adnan Buyung Nasution, Jakob Oetama, Prof Dr Loebby Loqman, dan Kartono Mohammad.

Dalam kesempatan itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meluncurkan buku *Yap Thiam Hien: Negara, HAM, dan Demokrasi*. Peluncuran buku itu ditandai dengan penyerahan buku dari Ketua Dewan Pengurus YLBHI Bambang Widjojanto kepada pengacara muda LBH Jakarta, Aulia Hidayat.

Sangat mendesak

Menurut Mely, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebenarnya saat ini sedang memfinalisasi protokol untuk melindungi pembela maupun pekerja HAM. Namun, karena perlindungan itu merupakan tanggung jawab pemerintah, maka sebaiknya dibentuk dengan undang-undang (UU). Dan, UU perlindungan hukum bagi pekerja dan pembela HAM itu sudah sangat mendesak.

Mely mengaku sangat bersyukur, sebab di Indonesia bermunculan pembela HAM dan pekerja kemanusiaan yang umumnya generasi muda. Bahkan, di zaman represif masa pemerintahan Orde Baru, mereka yang pembela HAM tetap berani tampil ke depan.

"Sangat tepat pada tahun 1998 ini Anugrah Yap Thiam Hien diberikan kepada Kontras, sebagai organisasi yang membuktikan ketabahan dan keuletannya untuk mengejar kejahatan penculikan yang begitu mencekam. Juga kepada Farida, yang oleh perasaan kemanusiaan bersedia menghadapi risiko terhadap dirinya sendiri, untuk membantu mereka yang menjadi korban kekerasan dan kekejian," tutur Mely.

Sementara anggota Yapusham, Aristides Katoppo memprihatinkan makin semaraknya budaya kekerasan di Indonesia. Itu, katanya, ditandai dengan sering terjadinya beragam tindak kekerasan beberapa waktu ini. Dan, dalam aksi kekerasan itu nyawa manusia seolah-olah tiada harganya.

"Apakah budaya damai sudah mengungsi dari bumi Indonesia ini? Tugas kita sekarang untuk memulihkan budaya damai itu di negara ini dengan melakukan pencegahan terjadinya konflik, sehingga tak terjadi kekerasan lagi," paparnya.

Dikatakan Katoppo, kekerasan tak hanya terjadi secara vertikal, yakni dilakukan negara kepada warga negaranya, tetapi terjadi pula secara horisontal, yakni warga negara melakukan kekerasan pada warga negara lainnya. Kedua model kekerasan itu harus dicegah.

Ditambahkan, penumbuhan budaya damai harus jadi agenda bangsa. "Semua harus mencari jalan untuk menumbuhkan budaya damai, sehingga HAM bisa tumbuh dalam kedamaian dan ketenteraman. Bukan di tengah-tengah budaya kekerasan yang seolah-olah menjadi perangai bangsa," tandas Katoppo.

Munir yang mewakili Kontras dan Farida berharap agar politik kekerasan di negeri ini segera diakhiri. Karena, kata keduanya, sudah banyak korban dari politik kekerasan yang menyengsarakan rakyat. **(oki/tra)**

Kompas
11 Desember 1998

▲ *Yap Thian Hien Award untuk KontraS 10 Desember 1998*

#3

Yap Thiam Hien Award diserahkan untuk Kontras dan diterima langsung oleh perwakilannya yang juga sosok selalu duduk sejajar dengan para keluarga korban kekerasan negara: Munir. Konteks penyerahan plakat Yap Thiam Hien Award dan sejumlah uang itu karena kegigihan Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan sebagai organisasi yang membuktikan ketabahan dan keuletannya untuk mengejar kejahatan penculikan yang begitu mencekam.

Yap Thiam Hien Award yang diberikan kepada sosok atau institusi seperti Kontras adalah semacam kerlip lampu di semenanjung gelap dengan pesan utama: mendesaknya suatu perlindungan hukum bagi mereka yang bekerja sebagai pembela hak asasi manusia (HAM) dan pekerja kemanusiaan.

Mengenai pemilihan umum yang akan datang, PDI Perjuangan juga menyatakan siap untuk ikut pemilu. "Targetnya cukup satu kata, menang," kata Megawati.

(Bersamb. ke hal. 11 kol. 1-2)

Kontras Terima S Tasrif Award

Jakarta, 9 Agustus

Pengurus organisasi kewartawanan seharusnya tidak menjadi pengurus suatu partai politik (parpol) untuk menjaga objektivitas pemberitaannya. Hak masyarakat untuk mendapat informasi yang benar dan independen tidak mungkin terwujud jika wartawan yang bersangkutan menjadi pengurus suatu parpol yang tengah berjuang meraih suatu dalam pemilu mendatang.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lukas Luwarso, mengatakan hal tersebut kepada wartawan seusai peringatan ulang tahun ke-4 AJI di Jakarta, Jumat malam. Di tempat yang sama, Menpen Junus Yosfiah secara diplomatis mengatakan, pihaknya tidak mempunyai aturan apapun mengenai keterlibatan wartawan dalam suatu parpol. "Wartawan sendiri yang harus mengatur masalah itu," katanya.

Tampak hadir dalam acara ulang tahun AJI, Pemred tabloid Detik Eros Jarot, Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Parni Hadi, Presiden International Federation of Jurnalist (IFJ) Christopher Warren, mantan Sekjen DPP Golkar, Sarwono Kusumaatmadja dan pengacara terkenal yang selama ini acapkali menjadi pembela atau penasihat hukum kalangan jurnalis, Todung Mulya Lubis.

Peringatan ulang-tahun AJI yang dihadiri juga oleh sejumlah kalangan diplomatik kali ini berlangsung meriah dan unik. Ulang tahun AJI kali ini diselenggarakan di tengah suasana keterbukaan yang tidak terdapat dalam acara-acara tahun lalu di mana AJI masih dianggap sebagai organisasi kewartawanan yang ilegal.

Menpen dalam sambutannya bahkan mengatakan, dia terpaksa harus meninggalkan suatu acara di tempat lain karena ingin menghadiri acara AJI. Suasana semakin meriah ketika sejumlah hadirin menyanyikan lagu "panjang umur" untuk Menpen yang pada hari itu memang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-54.

Kontras

Seperti peringatan ulang tahun AJI sebelumnya, tahun ini AJI memberikan penghargaan S Tasrif Award dan Udin Award. Tim Dewan Juri yang diketuai Masinimar Mangiang (Pemred Harian Nemeu Ekonomi) dengan anggota, Didik Supriyanto (Koordinator Peliputan Tabloid Adil di Jakarta) dan Santoso (peneliti di Institut Studi Arus dan Informasi) menyatakan, pemenang S Tasrif Award yang merupakan penghargaan untuk kalangan nonjurnalis baik itu individu atau kelompok yang memberikan kontribusi bagi terciptanya hak masyarakat untuk mendapat informasi diberikan kepada Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras).

Sementara itu, penghargaan Udin Award untuk pekerja pers yang dalam tugasnya mewujudkan kebebasan pers mendapat tekanan besar diberikan kepada Pemred dan wartawan senior majalah D&R Margiono, dan Bambang Budjono.

"Wah, penghargaan ini lebih merupakan peringatan agar saya terus mencari kepastian mengenai nasib 14 korban penculikan yang sampai sekarang belum jelas nasibnya," kata Koordinator Budan Pekerja Kontras, Munir, yang menerima penghargaan Tasrif Award.

Parpol

Berkaitan dengan hubungan wartawan dengan parpol, Parni Hadi dalam diskusi bertema "Tekanan Masin Pada Pers" yang diselenggarakan AJI awal pekan lalu mengatakan, kongres PWI akhir tahun ini akan membahas keterlibatan wartawan dengan parpol. Wartawan senior itu berjanji akan mengusulkan agar pengurus PWI tidak menjadi pengurus sebuah parpol.

Parni sendiri mengaku di tengah ramainya pembentukan parpol ia pernah ditawari untuk menjadi pengurus parpol. "Jangankan menjadi pengurus parpol, sampai sekarang pun saya tidak mau menjadi pengurus Golkar," katanya.

Parni dan Lukas mengakui pada dasarnya wartawan adalah aktor politik yang lewat pemberitaannya bisa menciptakan atau mengarahkan opini publik. "Wartawan boleh-boleh saja menjadi anggota parpol, tapi pengurus suatu organisasi kewartawanan sebaiknya tidak menjadi pengurus sebuah parpol," kata Parni. (E-5/A-14)

JANGAN LEWATKAN

#4

Di Jakarta, 7 Agustus 1998 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menganugerahkan S. Tasrif Award untuk Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang diterima langsung oleh Munir. Anugerah S. Tasrif ini merupakan penghargaan untuk kalangan nonjurnalis, baik itu individu atau kelompok, yang memberikan kontribusi bagi terciptanya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

> **"Wah, penghargaan (S. Tasrif Award) ini lebih merupakan peringatan agar saya terus mencari kepastian mengenai nasib 14 korban penculikan saya sampai sekarang belum jelas nasibnya."**

| ***Munir**, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)*

SUARA PEMBARUAN

PEOPLE POWER
THE CIVIL SOCIETY AGAINTS MILITARISM
IN INDONESIA

Diplomat Dan Pasukan AS Takkan Ditarik

Juara Bertahan RC Lens Tumbang

PDI Perjuangan Siap Ikut Pemilu

Suara Pembaruan
9 Agustus 1998

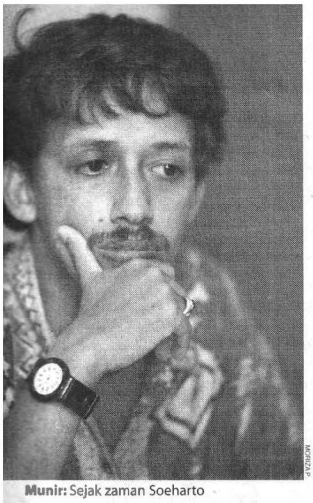

Munir: Sejak zaman Soeharto

Munir

Pangab Keliru

Wawancara: Ada indikasi institusi lain terlibat. Dan Soeharto pasti tahu.

Ia berwajah keturunan Arab. Tubuhnya mungil. Tetapi, Munir, begitu namanya, tak pernah lelah mengungkap kasus orang-orang hilang. Berkat kegigihannya pula kini kasus penculikan sejumlah aktivis terkuak. Berikut wawancara wartawan *Panji*, Darmawan Sepriyossa, dengan Munir, koordinator Kontras dan juga pengurus YLBHI itu. Berikut petikannya:

Apa benar penculikan itu cuma kesalahan prosedur?

Pertama, sebelum itu saya ingin katakan bahwa perintah penculikan bukan awal tahun ini. Tapi di tempat yang sama itu telah ada orang yang diculik sejak satu tahun yang lalu. Itu prinsip. Jadi kalau dikatakan bahwa perintah penculikan itu baru awal tahun ini, harus diklarifikasi ulang. Sonny yang bertemu Faisol Reza dan Desmon segala itu, sudah diambil satu tahun lebih, sejak Mei 1997. Artinya, apa yang disampaikan Pangab itu keliru.

Kedua, secara substantif kita menghargai apa yang telah dilakukan ABRI. Tetapi ini bukan persoalan perintah ataupun kesalahan prosedur perintah, tapi memang institusinya tidak memiliki dasar untuk melakukan upaya itu. Kopassus kan pasukan tempur, buat apa melakukan operasi-operasi intelijen macam itu? Ini kan tidak benar. Bila anak buahnya melakukan kesalahan mestinya "ditempeleng" satu kali menjadi sepuluh kali, itu satu peristiwa yang seharusnya sudah dia ketahui ketika dia memerintahkannya. Jadi, tetap dia bertanggung jawab penuh. Itu yang harus diluruskan. *Nggak* bisa, "Oo ini perintahnya begini, dijalankan begitu...."

Yang menjadi tersangka baru 10 orang?

Bagi saya bukan jumlah yang penting. Yang penting, berapa banyak institusi yang terlibat, itu yang harus dikemukakan ke media massa. Dibuka. Kodam jelas terlibat, makanya Kodam juga harus dikemukakan, sementara pembantu-pembantu macam Kodim itu juga harus dibuka.

Bagaimana sampai Kodam Jaya terlibat?

Sjafrie Sjamsoeddin sendiri kan pernah ngomong menanggapi pernyataan bahwa Nezar Patria c.s., yang diperiksa lebih dulu di Kodam dua hari, baru diserahkan ke Mabes Polri. Itu menunjukkan bahwa ia terlibat, itu pengakuan dia sendiri secara formal.

Kira-kira Soeharto tahu ada skenario penculikan aktivis ini?

Ini kan prosesnya sudah panjang, mulai dari zaman Soeharto dulu. Ini bukan kelakuan satu atau dua tahun, ini kelakuan 30 tahun. Cuma kan waktu itu belum jadi persoalan. Ini juga terjadi di berbagai pelosok Tanah Air. Contoh kasus Marsinah. Dia kan diculik dua minggu, digebuki dulu oleh intel sebelum disampaikan ke polisi. Kasus PRD 1996, kan dikerjai dulu di BIA selama dua minggu sebelum diserahkan ke polisi. Kalau mau didata se-Indonesia, dari ujung ke ujung, itu banyak. Itu pekerjaan yang sudah mekanis sifatnya. Karena itu presiden harusnya tahu. Contohnya kasus Petrus, kan Soeharto baru ngomong kemudian hari di bukunya bahwa, "Sayalah yang memerintahkan." Jelas sampai hari ini belum ada orang yang minta pertanggungjawaban. Kriminal yang maling ayam, atau apa *kek* namanya, dia kan punya hak untuk tetap hidup. *Nggak* dipetrus begitu, dan itu harus tetap dipertanggungjawabkan. Bukan tak mungkin untuk soal ini pun Soeharto tahu dan bisa jadi ini perintah dia. Bukan tidak mungkin, karena kan yang lebih jahat dari itu pernah dia perintahkan.

Adakah temuan Kontras atau indikasi yang mengarah pada Prabowo?

Saya tidak peduli pada orang. Bagi kita bukan urusan Prabowo, Sinyo, Tony, atau siapa. *Nggak* penting bagi kita, yang menurut saya penting justru keterlibatan institusional, lepas siapa mereka. Memang yang bertanggung jawab adalah pemimpinnya. Kalau memang Kopassus, siapa pun komandan Kopassus waktu itu, kalau tahun 1996 seingat saya memang Prabowo, kalau di atas Maret, ya Muchdi.

Dalam kasus ini adakah indikasi keberanian ABRI untuk "mengorbankan" jenderal-jenderalnya sendiri?

Kalau bergerak dari komitmen ABRI, ya mestinya harus ada keberanian. Komitmennya pada Saptamarga dan macam-macam. Itu kan yang harus mereka lakukan.

Itu kan idealnya....

Nggak, kalau saya lebih berpegang pada komitmen saja. Kalau ABRI memang jujur pada komitmennya, ya beres. Kecuali kalau mereka *nipu-nipu* diri sendiri....

Adakah ini berkaitan dengan persaingan di kalangan elite?

Ya mungkin saja ada, tapi saya lebih melihat bukan pada persaingan, tapi pada sesuatu yang sistemis. Memang ada kebijakan-kebijakan represif atas mekanisme sistem politik Indonesia sehingga mekanisme itu membenarkan berbagai tindakan, di antaranya pembunuhan dan penculikan. Menurut saya, yang tadi Anda tanyakan bisa terjadi, tapi tidak signifikan untuk saat ini. Yang signifikan, bahwa ABRI saat ini tak punya pilihan kecuali harus membongkarnya.

Ada indikasi kasus ini akan dilarutkan dan dibuat skenario baru?

Menurut saya *nggak* ada pilihan, karena kasus ini sekarang menyangkut kepercayaan. internasional maupun dalam negeri. Otomatis, kalau berlarut maka krisis kepercayaan ini akan makin panjang. Kalau makin panjang maka otomatis *nggak* akan bisa dipecahkan problem-problem dalam negeri kita. Jadi *nggak* ada alasan untuk melarutkan.

Kan masih ada yang belum dilepas?.

Ya, bagi mereka juga harus ada kejelasan. Kalau mereka cacat harus diserahkan pada keluarga dan pemerintah. Kenapa *nggak* dilakukan itu? Itu kan *nggak* bakalan membuat orang apriori pada ABRI, malahan akan bersimpati. Justru kalau disusun skenario pelepasan dengan cara-cara penculikan lagi, maka itu kan *nggak* bener. Tinggal yang ini, yang saya anggap pemerintah lamban untuk menyelamatkan mereka.

Ada keterlibatan institusi lain?

Saya melihat, ya. Karena itu kendaraan-kendaraan yang dipakai ada BMW, sepeda motor, bukti-bukti alat penyiksaan, itu harus diselamatkan. Ini satuan operasinya cukup banyak.■

▲ Suatu waktu, setengah bercanda, Munir bilang Kontras itu adalah akronim dari Kontra Suharto. Karena itu, penulisan akronim Kontras yang resmi itu adalah KontraS dengan "S" kapital. Mengapa "S" kapital? Mungkin kliping ini adalah jawabannya. Tentu saja, Munir selalu menempatkan institusi seperti ABRI tak boleh lepas dari tanggung jawab atas kekerasan yang memang "sudah mekanis sifatnya".

Panji Masyarakat
29 Juli 1998

#5

**“Bukan tak mungkin untuk soal (pencu-
likan aktivis) ini pun Soeharto tahu
dan bisa jadi ini perintah dia. Bukan
tidak mungkin, karena kan yang lebih
jahat dari itu pernah dia perintahkan.”**

| **Munir**, *Koordinator Kontras*

Wawancara Munir, SH:

"Yang Bertanggung Jawab Pemerintah cq. ABRI; Tersangka Utama Polisi!"

Proses penghilangan orang dan tindak kekerasan dengan penyiksaan telah dijadikan alat kontrol dan teror oleh penguasa. Setidaknya itulah yang diungkapkan oleh **Munir, SH**, koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), yang juga staf YLBHI kepada **Purwani Diyah Prabandari** dari **TEMPO** *Interaktif*. Tindak kekerasan dan penghilangan orang yang tidak diakui oleh aparat ini mengundang geram rakyat maupun dunia internasional.

Lebih jauh dikatakan, tindakan represif semacam itu biasanya dilakukan oleh rezim yang korup dan militeristik. Munir mengidentifikasikan Indonesia dalam kategori macam itu.

Katanya, tersangka dalam kasus ini adalah polisi, terlepas mereka melakukannya atau hanya dimintai "bantuan".

Berikut petikan lebih lanjut wawancara itu.

Menurut Anda, siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam tindak penculikan atau penghilangan orang itu?

Menurut saya, yang bertanggung jawab adalah pemerintah *cq.* ABRI. Bukan berarti kalau orang berbicara ABRI yang bertanggung jawab, lantas berarti ABRI yang melakukan secara langsung sebagai institusi. Tidak selalu begitu. Tetapi dalam kasus ini, tersangka utamanya adalah polisi.

Bagaimana logikanya?

Karena satu-satunya yang sudah mengaku: polisi. Mereka mengaku menangkap Andi Arief pada 28 Maret. Dan Andi Arief mengatakan bertemu dengan mereka yang hilang lainnya, yang belum pulang sampai sekarang. Kedua, Andi Arief dan Pius Lustrilanang ditempatkan di tempat yang sama. Artinya, kalau antara 28 Maret sampai sekarang dia berada di tangan polisi, berarti yang hilang lainnya yang ditemui Andi Arief dan Pius Lustrilanang saat di dalam tahanan, juga ada di sana, yaitu di tangan polisi semua. Katanya mereka ditahan di tempat yang sama. Jadi, tersangka utama semua penculikan ini adalah polisi. Kecuali mereka mau berterus terang bahwa yang melakukan bukan mereka, tetapi mereka hanya menerima dari si A. Siapa si A, itu yang harus dicari. Sekarang ini tidak ada gunanya polisi menghindar. Karena, itu justru akan menempatkan posisi polisi pada tempat yang paling sulit. Karena para saksi menyatakan mereka ditahan di tempat yang sama dengan Andi Arief.

Meski polisi menjadi tersangka utama, apa menurut Anda penculikan itu benar-benar dilakukan polisi?

Kalau melihat keterangan Andi Arief, penculikan dilakukan oleh pihak lain. Polisi hanya menerima. Tanggal 11 April, dia dioper dari tempat penculikan untuk dibawa di Mabes Polri. Kalau melihat keyakinan itu, ini memang bukan polisi. Tetapi mereka tahu siapa yang melakukannya. Kuncinya di polisi. Polisi harus diperiksa atau terbuka dengan sendirinya bahwa dia menerima dari A atau B.

Pius mengatakan bahwa salah satu pelakunya mengaku lulusan Akabri. Bagaimana menurut Anda?

Yang pasti, ada aparat — tidak tahu dari

#6

"Menurut saya, hanya ada dua pasal yang layak disampaikan. Pasal tentang pembunuhan berencana, karena pasal ini adalah pasal yang paling berat di antara sekian pasal yang bisa dikenakan. Tetapi, kalau orangnya tidak mati, dikenakan pasal 333, menghilangkan kemerdekaan seseorang. Tetapi bentuk-bentuk kekerasannya memang bisa digunakan sebagai kumulatif hukuman yang bisa diancamkan."

| ***Munir**, Koordinator Kontras*

◀ Tempo Interaktif
Agustus 1998

angkatan mana. Karena kasus ini tidak mungkin dilakukan oleh non-aparat. Karena kekuatannya harus lebih besar dibanding Kapolri. Dia bisa menekan Kapolri untuk mengakui polisilah yang menahan Andi Arief. Saya kira, itu indikasinya ke situ.

Apa tujuan penculikan itu?

Kontrol dan teror. Kontrol terhadap perilaku para aktivis, supaya mereka tidak melakukan aktivitas-aktivitas politik. Kemudian kontrol itu dilakukan dengan kemampuan rekayasa, artinya agar mereka hanya melakukan A, B, atau C, sesuai dengan yang mereka kehendaki. Kemudian juga sebagai teror terhadap para aktivis lainnya. Secara umum, mereka ingin membangun ketakutan bahwa ada risiko yang sedemikian besar kalau para anggota masyarakat melakukan upaya-upaya yang bersifat politik dan kritis terhadap kekuasaan yang ada.

Bagaimana dengan pelanggaran hukum dari tindak penculikan dan penyiksaan atas mereka?

Untuk penculikan, itu pelanggaran pasal 333 KUHP, yakni penghilangan kemerdekaan orang. Itu tindak pidana, sehingga harus ada yang bertanggung jawab. Kalau orang yang diculik sampai mati, dikenai pasal pembunuhan berencana. Kalau penganiayaan saja, dia kena kasus penganiayaan. Tetapi menurut saya, hanya ada dua pasal yang layak disampaikan. Pasal tentang pembunuhan berencana, karena pasal ini adalah pasal yang paling berat di antara sekian pasal yang bisa dikenakan. Tetapi kalau orangnya tidak mati, dikenakan pasal 333, menghilangkan kemerdekaan seseorang. Tetapi bentuk-bentuk kekerasannya memang bisa digunakan sebagai kumulatif hukuman yang bisa diancamkan.

Kalau melihat modus penyiksaan terhadap para aktivis selalu sama, apa memang ada alasan khusus?

Bentuk penyiksaan memang macam-macam. Ada penyiksaan yang diniatkan untuk membuat orang jera. Ada bentuk penyiksaan yang membuat orang memberi informasi. Ada penyiksaan untuk membuat orang mengakui sesuatu. Sejauh ini, kalau kita lihat, penyiksaan itu berlangsung di mana-mana, tidak peduli dalam kasus apa pun. Itu sangat potensial terjadi. Misalnya di Surabaya ketika dilakukan operasi KTP, polisi bisa memukuli orang sampai mati di tahanan. Tetapi khas dalam kasus penghilangan aktivis ini, penyiksaan yang dilakukan memang untuk membuat mereka jera, membuat mereka memberi informasi, dan mereka mengakui sesuai keinginan penyiksa. Jadi, ketiga kategori itu masuk semua. Ini berbeda dengan penyiksaan terhadap para preman, yang mungkin hanya bertujuan untuk mengakui sesuatu. Tidak sampai mencoba membuat mereka jera.

Apakah menurut Anda, penculikan ini atas perintah para pejabat tinggi ABRI atau ada faksi?

Kalau berpegang pada yang disampaikan oleh Kassospol, saya lebih khawatir ada institusi atau kelompok atau grup yang bermain sendiri di bawah. Karena, menurut saya, kalau panglima yang memerintahkan, mereka menghadapi risiko yang terlalu besar. Jadi ada pemain-pemain di bawah yang tidak terkontrol, yang punya kekuatan cukup besar untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Mengapa sebuah institusi melakukan hal itu?

Ada sekian aktivis yang harus dikontrol. Kalau mereka mau menarik ke prosedural hukum, mereka menganggap bahwa prosedural hukum tidak cukup memberikan kejeraan bagi para aktivis. Mereka sendiri sebenarnya sudah tidak kuat dengan peran hukum untuk melakukan kontrol terhadap para aktivis. Kemudian mereka menggunakan pola-pola kekerasan semacam itu.

Biasanya proses penghilangan orang dan penyiksaan itu dilakukan di negara-negara macam apa?

Biasanya terjadi di negara-negara yang berkembang di bawah rezim fasis. Kecende-

rungannya kemudian menjadi militeristik dan menggunakan bentuk-bentuk kekerasan. Kekerasan, secara teoritik, hanya ada di negara yang korup. Karena kaki lain dari rezim korup adalah kekerasan dalam rangka membunuh kontrol masyarakat.

Apa Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara yang seperti itu?

Kalau melihat melihat *ranking* Indonesia sebagai negara yang paling korup di dunia, atau juga nomor tiga di beberapa sensus yang dilakukan baik di Hong Kong maupun Amerika, maka saya melihat bahwa Indonesia memang seperti itu. Ini bentuk dari pembinasaan kontrol rakyat dengan penggunaan kekerasan, karena memang tingkat penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan sangat luar biasa.

Apakah di negara-negara lain juga terdapat lembaga semacam Kontras?

Ada. Misalnya di Chili, ada perhimpunan ibu-ibu yang mempersoalkan orang hilang, yang sampai menjadi sebuah gerakan yang cukup besar. Di beberapa negara Amerika Latin, saya yakin, juga ada. Di Filipina juga ada. Karena itu ciri yang terjadi di negara-negara yang bersifat represif. Dan itu semakin represif ketika negara akan berubah.

Mereka bukan bentukan pemerintah?

Bukan. Mereka benar-benar independen.

Apa yang mereka lakukan ?

Mereka melakukan tekanan politik agar ada pertanggungjawaban, ada rehabilitasi terhadap korban, dan juga terus melakukan tuntutan-tuntutan perubahan.

Apakah mereka menjadi lembaga permanen atau hanya bersifat sementara selama ada *moment*?

Moment kekerasan selalu memunculkan lembaga dan beberapa lembaga itu menjadi lembaga yang cukup kuat. Contohnya, Amnesti Internasional. Amnesti Internasional lahir ketika terjadi pergolakan di Eropa, dan itu kemudian menjadi lembaga permanen yang begitu kuat dan bertahan dalam tempo yang begitu lama, meskipun intensitas dan rezimnya telah berubah-ubah. Saya kira, sangat mungkin represi ini justru melahirkan organisasi-organisasi yang melakukan kontrol terhadap kekuasaan atau bahkan organisasi perlawanan. Seperti misalnya kelompok Suara Ibu Peduli, sebuah perlawanan dalam bentuk lain. Bentuk keprihatinan atas terjadinya berbagai persoalan.

Apakah lembaga-lembaga semacam Kontras di negara-negara lain itu berhasil dengan perjuangannya ?

Relatif berhasil. Meskipun tidak total. Tetapi mereka memberi nilai pada proses perubahan. Karena bagaimanapun juga proses perubahan dibutuhkan tanpa adanya kekerasan oleh negara. Merekalah yang mencoba agar kekerasan tidak terjadi.

Apa yang akan dilakukan Kontras menghadapi masalah penghilangan orang ini ?

Kontras akan terus-menerus memperhatikan hak asasi manusia, hingga praktek-praktek penghilangan orang itu tetap akan menjadi perhatian penting kita selagi praktek itu terus berlangsung. Dalam tingkat tertentu, Kontras akan berupaya mempengaruhi kebijakan negara agar penggunaan kekerasan tidak berlangsung terus-menerus.

Itu untuk jangka pendek, mengingat masih ada beberapa aktivis yang masih hilang ?

Kontras akan terus melakukan upaya-upaya negosiasi dengan berbagai pihak yang kemungkinan tahu tentang keberadaan orang-orang yang hilang tersebut. Inilah yang sedang kita lakukan. Beban kita masih enam orang lagi yang hilang, dan sangat mungkin jumlah itu akan bertambah. Enam orang tersebut adalah Herman Hendrawan, Suyat, Bima Petrus, Yani Afri, Sony, dan Noval.

✦✦✦

#7

Forum
9 Mei 1999

DEI

Peradilan K

Di dalam RUU HAM, ada gagasan membentuk Per
tersebut. Sebab, hal itu tidak menj

Romli Atmasasmita
Dirjen Kumdang Depkeh

Untuk membahas Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM) perlu atau tidak, kita batasi dahulu mengenai pelanggaran HAM. Apa kriterianya? Gampang. Bahwa pelanggaran itu dilakukan oleh aparatur negara terhadap anggota masyarakat. Bukan pelanggaran antarsesama warga. Jadi, kalau ada aparat menculik dan tertangkap, ada pasal penculikan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tapi, karena tindakan itu tergolong pelanggaran HAM, tinggal mencari unsur pemberatan ancaman pidana. Seorang aparat yang mestinya mengayomi, malah menculik.

Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), kewenangan menyelidiki itu ada pada polisi. Nah, berdasarkan RUU HAM dan Komnas HAM, kewenangan itu diberikan kepada Komnas HAM. Hasil penyelidikan ini menjadi bukti permulaan yang cukup bagi polisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, memanggil, dan memeriksa si aparatur itu. Jadi, pada waktu Komnas HAM melakukan *subpoena power*, dia akan merekomendasi terjadi pemerkosaan HAM oleh seorang pejabat. Dan, polisi tak akan keluar dari jalur itu.

MUFRODI

Kalau Komnas HAM hanya sebatas verifikasi dan kemudian penyelidikan dan penyidikannya diserahkan ke polisi seperti selama ini, polisi bisa berpendapat lain. Misalnya, pejabat yang melanggar HAM itu menyangkut korpsnya. Mereka bisa mengatakan tidak ada aparatur yang terlibat. Tapi, dengan RUU ini, hasil verifikasi Komnas HAM akan menjadi bukti permulaan yang cukup. Kalau ada yang keberatan, hal itu menunjukkan jalan di tempat.

Selain itu, hasil penyelidikan Komnas HAM akan mubazir kalau tidak ada Peradilan HAM. Apa bedanya dengan kasus biasa. Peradilan HAM ini bersifat khusus. Khususnya apa? HAM. Kalau HAM digolongkan kasus biasa, sama saja dengan kasus horizontal (pelanggaran sesama warga). Jadi, kasus penculikan aktivis oleh Tim Mawar (dari Kopassus) sama saja dengan penculikan biasa. Apa bedanya? Padahal, dalam pelanggaran HAM ada pemberatan pidana.

Di samping itu, buat apa pelanggaran HAM akibat kebijakan publik diteruskan ke parlemen. Parlemen itu lembaga legislatif. Kalau soal itu di bawa ke sana, berarti tugas parlemen bukan hanya mengurusi UU, tapi juga mencari fakta. Tugasnya terlampau luas. Tapi kalau diadili di Pengadilan HAM, malah ancaman pidananya makin berat karena masuk kategori pelanggaran HAM. ❑

44

EBAT

Khusus HAM

eradilan HAM. Tapi, ada yang tidak setuju dengan ide
njawab problem hak asasi yang real.

Munir
Koordinator Kontras

Pembuat RUU HAM dan Komnas HAM ini tampaknya mengalami kebingungan fundamental menempatkan Komnas HAM sebagai lembaga pemantau, mediator masalah HAM, penyelidik, atau/dan bagian dari legislatif. Saya justru melihat Komnas HAM itu lebih pas berfungsi sebagai lembaga penyidikan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Jika ditemukan unsur pidana, Komnas HAM merekomendasi ke kejaksaan untuk diteruskan ke peradilan (umum).

Selain itu, Komnas HAM berfungsi sebagai instrumen parlemen. Bila pelanggaran hak asasi itu dilakukan institusi negara, parlemenlah yang akan meminta pertanggungjawaban unsur negara. Parlemen kan punya kewenangan memecat pejabat, misalnya gubernur atau presiden.

Tapi, RUU itu mengabaikan bahwa pelanggaran HAM itu ada yang dilakukan atas kebijakan makro negara, bukan hanya individu perorangan. Seperti diketahui, pelanggaran HAM itu ada dua. Pertama, ketika negara mengambil hak-hak orang secara normatif. Misalnya, polisi menangkap orang. Lantas, orang yang ditangkap itu digebuki sampai mati. Itu melanggar HAM.

Kedua, ketika negara gagal melindungi masyarakat dari berbagai tekanan masyarakat. Misalnya, kegagalan negara melindungi orang Madura di Pontianak. Atau, kegagalan negara mempertanggungjawabkan mengapa di Ambon terjadi bunuh-bunuhan. Begitu juga dengan pembantaian di Banyuwangi. Itu pelanggaran HAM yang paling mendasar. Sebab, dalam konsep hak asasi, setiap negara bertanggung jawab dan wajib melindungi setiap hak-hak warganya.

Nah, tampaknya, ada gejala dari RUU ini bahwa pelanggaran hak asasi itu adalah pekerjaan para oknum, bukan institusi. Karena itu, konsep RUU ini malah membenarkan konsep hukum lama yang gagal melindungi hak asasi yang dilakukan institusi. Contohnya, kasus penculikan. Dengan Peradilan HAM, kalau penculikan itu adalah keputusan politik negara, hal itu tak akan terungkap karena pengadilannya tidak akan mengejar sampai ke tingkat pengambil keputusan institusi. Jadi, tak ada perbedaan dengan peradilan umum sekarang ini.

Selain itu, dalam hal negara gagal melindungi masyarakat di Ambon, siapa yang dipidanakan? Ini kan pertanggungjawaban institusional yang mestinya dipertanggungjawabkan di parlemen. Karena itu, pembentukan Peradilan HAM tersebut tak cukup menjawab problem hak asasi yang real. ❑

FORUM KEADILAN: No. 05, 9 MEI 1999

◄ *Keterangan Pada 23 September 1999, UU HAM akhirnya resmi diundangkan. Kliping ini, dan Munir ada di sini, setahun sebelumnya turut memikirkan postur UU baru yang hadir di pengujung kekerasan masif berlangsung nyaris tanpa henti di peralihan kekuasaan. Munir mempersoalkan bahwa faktor kebijakan makro negara berpotensial menimbulkan pelanggar HAM dan bukan individu perorangan. Peradilan HAM tak cukup bisa menjawab problematika hak asasi yang real.*

#8

Mantan Pedagang Melawan Kekerasan

Berperawakan kecil dan berkulit gelap, rambut dan misainya tampak tebal kemerahan. Kendati profesinya pengacara, karena penampilan fisiknya terlalu bersahaja, ia tak seperti sosok pengacara biasa yang lazim menebarkan wangi dan kemilau busana penuh selera. Bahkan, ia lebih tampak sebagai "oknum" yang membutuhkan jasa pengacara, ketimbang sebaliknya. Namanya pun sederhana: Munir. Ya, hanya Munir. Tanpa embel-embel ini-itu, selain gelar sarjana hukum yang juga jarang dikenakannya.

Kepada lelaki bersorot mata tajam dan hidung runcing itulah, antara lain, rasa kemanusiaan dan keadilan bangsa ini layak menyatakan rasa hormat dan terima kasihnya. Sebab, berkat nyali dan kesungguhan Munir, borok-borok kemanusiaan yang selama ini hanya dianggap lamunan seorang skizofrenia menjadi lebih nyata: kekuasaan yang bertahta selama lebih dari tiga dekade itu rupanya didirikan di atas penistaan terhadap harkat manusia.

Tak hanya lewat politik ekonomi, yang membuat rakyat kecil hanya mampu bertumpuk-tumpuk dalam kereta listrik yang pengap. Lebih hina dari itu, kekuasaan itu dipertahankan dengan kekerasan, berikut pelbagai variannya. Melalui Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) yang dipimpinnya, Munirlah yang pertama kali menyebut-nyebut keterlibatan instansi militer dalam sejumlah aksi penculikan.

Kegigihan Munir dan Kontrasnya itulah yang secara tak langsung membuat ABRI memutasi Danjen Kopassus Letjen Prabowo dan Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsudin—sebagai pimpinan militer yang disebut-sebut Kontras terlibat penculikan—ke jabatan yang bisa dinilai kurang strategis. Tak hanya itu, ABRI pun harus membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk menelisik keterlibatan para perwira itu dan jajaran di bawahnya dalam aksi penculikan tersebut.

Munir

Lahir:
Malang, 8 Desember 1965
Pendidikan:
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
Karir:
Staf LBH Malang (1991)
Ketua Divisi Buruh LBH Surabaya (1992)
Ketua Bidang Operasional LBH Surabaya (1994)
Direktur LBH Semarang (1995)
Sekretaris Bidang Operasional YLBHI (1996)
Wakil Ketua Bidang Operasional YLBHI (1997)

Cukup? Munir berpendapat bahwa pembentukan DKP itu tidak cukup sebagai sebuah penyelesaian. "Penyelesaian lewat DKP lebih bersifat politis. Padahal, masyarakat menginginkan penyelesaian hukum," ujarnya lantang. "Masyarakat menghendaki siapa yang bersalah itu dimintai pertanggungjawaban menurut prosedur hukum yang berlaku," katanya lagi.

Begitu juga dengan Prabowo, yang menyatakan siap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan anak buahnya di Kopassus. Di mata Munir, pernyataan itu hanya menunjukkan keterlibatan menantu mantan presiden Soeharto itu dalam aksi tersebut. "Itu menunjukkan suatu titik di mana dia merupakan bagian dari pelaku. Itu kan soal perintah. Secara institusional, dalam hal ini ABRI juga harus bertanggung jawab," kata Munir. Menurut Munir, selain pertanggungjawaban politis dan sosial, pemerintah juga harus segera mengumumkan siapa saja korban yang masih hidup atau meninggal. "Pemerintah harus mengakui bersalah dan secara politik ia harus segera mengumumkan siapa saja di antara yang diculik masih hidup, cacat, atau sudah meninggal," katanya.

Seperti diketahui, sejumlah orang yang diyakini mengalami penculikan itu sampai kini tak tentu nasibnya. "Masih ada 14 orang yang belum ketahuan nasibnya," kata Munir. Mungkin saja tidak semua dari mereka ada di tangan penculik. Tapi, berdasarkan informasi yang didapat pihaknya, Munir yakin, sedikitnya ada delapan orang yang masih ada dalam sekapan para penculik. "Mereka yang diculik itu, termasuk yang sudah dibebaskan, sempat bertemu dengan yang lain," tuturnya.

Selain pertanggungjawaban tadi, masih ada lagi yang diinginkan Munir: rehabilitasi dan ganti rugi terhadap para korban dan keluarganya. Tentu saja, penerapan hukum dan ganti rugi itu jangan dilihat sebagai upaya balas dendam, tapi sebagai penghormatan terhadap akal sehat dan kemanusiaan. "Jika kita ingin mendidik masyarakat untuk percaya mekanisme bernegara dan hukum, pemerintah harus membuktikan itu dulu," ujarnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan, "Visi Kontras tidak sekadar ingin mengirim mereka ke penjara, tapi lebih pada perubahan *policy* negara untuk tidak lagi menggunakan bentuk-bentuk kekerasan sebagai media komunikasi dengan rakyat. Itu yang penting." Artinya, bagi Munir, kasus itu hendaknya menjadi refleksi bagi pemerintah untuk memperbaiki berbagai kebijakan kenegaraan yang bertentangan dengan demokrasi dan kemanusiaan, terutama dalam hal penggunaan kekerasan.

Kendati begitu, Munir tak yakin keinginannya bisa terwujud, khususnya dalam hal mengadili Letjen Prabowo. Apa sebab? "Persoalan beginikan rumit! Itu sangat tergantung keputusan politik," katanya. Kalau pengusutan itu bergerak dari fakta, ia yakin masalah itu akan sampai ke meja hijau. "Kecuali jika dihambat dengan keputusan politik, misalnya diselesaikan lewat pemecatan. Atau pemerintah mencoba melindungi Prabowo dengan mengatakan perintah Prabowo itu disalahartikan," katanya lagi.

Terlahir sebagai anak keenam dari tujuh putra-putri pasangan Said-Jamilah, keterlibatan Munir di dunia aktivis bisa disebut sebagai "penyimpangan", terutama bila melihat tradisi keluarganya. Sebagaimana lazimnya keluarga keturunan Timur Tengah, almarhum sang ayah, yang meninggal ketika Munir berusia lima tahun, adalah lelaki yang mengandalkan nafkah hidupnya kepada perdagangan. Begitu juga dengan saudara-saudara Munir.

Bahkan, Munir sendiri bukannya sama sekali bersih dari aktivitas itu. Demi mempertahankan hidup, sepeninggal sang ayah, ia ikut ber-

▲ *Biografi ringkas yang ditampilkan dalam Forum Keadilan ini memperlihatkan daya-dalam dan persuasi dari Munir kepada mereka yang menjadi korban dan sekaligus tak membelokkan pandangannya bahwa kekerasan berupa penculikan dan penghilangan paksa ini bukan kerja oknum, tetapi makro ekonomi politik penguasa yang sedang menjalankan mesin negara.*

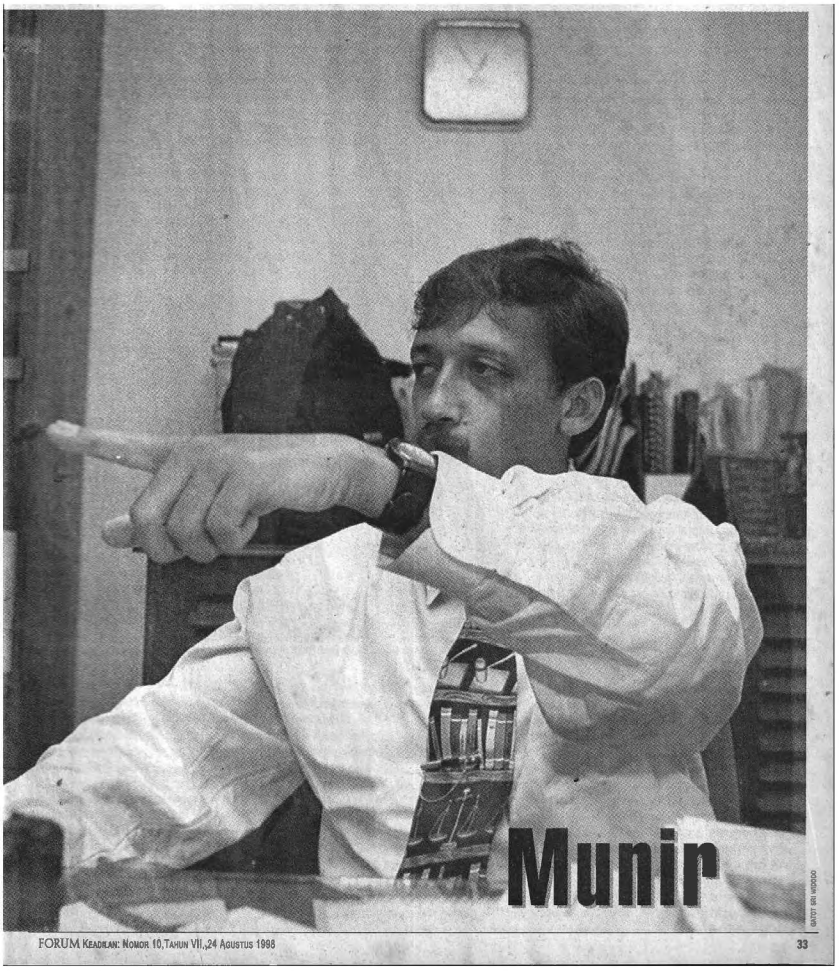

Forum
24 Agustus 1998

"Penyelesaian lewat DKP lebih bersifat politis. Padahal, masyarakat menginginkan penyelesaian hukum."

dagang kaki lima dengan kakak-kakaknya, mulai dari berjualan kain, sepatu, sampai jasa pertukangan dan jual-beli barang elektronik. "Bisnis itu baru saya setop ketika sudah tingkat tiga," ujar alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang itu. Ketika itu, sang kakak yang melihat potensi akademis dan keterlibatan Munir dalam organisasi kemahasiswaan, menyatakan siap membiayai kuliahnya sampai tuntas.

Munir memang sudah jadi aktivis sejak mahasiswa, baik di organisasi intra maupun ekstrauniversitas. Ia, antara lain, pernah aktif di senat mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, sampai Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Di organisasi-organisasi kemahasiswaan itu ia selalu tercatat sebagai salah seorang pengurus. Puncak karirnya di organisasi kemahasiswaan adalah Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. "Sebagai 'birokrat mahasiswa', saya kerap berseteru dengan 'aktivis mahasiswa jalanan'". Salah satunya kini malah menjadi rekan kerja saya di Kontras dan YLBHI, yakni Bambang Sugianto," ceritanya. Dalam forum diskusi, keduanya sering beda pendapat. Tetapi, untuk urusan kerja kemanusiaan, ternyata mereka menemukan kecocokan.

Pria kelahiran Malang, 8 Desember 1965 itu mengawali karir kepengacaraannya di LBH Malang. Tidak melulu karena dedikasinya terhadap bidang hukum, tapi seperti diakuinya, karena banyak teman mantan aktivis HMI yang juga berkiprah di sana. Lama-kelamaan, ketertarikan Munir berubah menjadi kepedulian. Kasus Marsinah adalah salah satu perkara yang pernah ditanganinya.

Setelah sempat menjabat Ketua Divisi LBH Surabaya, ia kemudian diangkat sebagai Ketua Bidang Operasional LBH di kota yang sama. Namun, ketika YLBHI dilanda pertentangan di kalangan pengurusnya, ia ditugasi menjabat Direktur LBH Semarang (1995). Baru setelah konflik di antara para aktivis itu mereda, sebagian segera membentuk Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), dan ia pun ditarik ke Jakarta. Lalu, sejak pertengahan 1996, ia dipercaya sebagai Sekretaris Bidang Operasional YLBHI.

Sementara itu, sebagai Ketua Divisi Buruh LBH Surabaya, tentunya ia tak hanya berurusan dengan para buruh, tapi juga dengan sesama aktivis, termasuk yang bernama Suciwati, alumni Jurusan Sastra Indonesia IKIP Malang. Dan perkenalan mereka dalam suatu pelatihan itu rupanya berbuntut panjang. Buktinya, dari rahim perempuan itulah, kini, Munir tengah menantikan lahirnya seorang bayi. Atas kehendak Tuhan, Suci-Munir melangsungkan pernikahan sebulan sebelum Peristiwa 27 Juli meletus.

Disebut kehendak Tuhan karena, sebagaimana dikisahkan Munir-Suci kepada sebuah tabloid, mulanya perasaan Munir kepada Suci "biasa-biasa" saja. Apalagi, ketika itu, Munir menaruh rasa dan asa kepada perempuan lain. Namun, lama-kelamaan, rasa "biasa-biasa" itu berubah. Munir melihat apa yang diidamkannya dari seorang istri ada dalam diri Suci. "Ia tegas, agak kelaki-lakian, dan mandiri," katanya. Cintanya pun bergeser. Dan ketika perasaan itu dinyatakan Suci hanya terdiam, Munir pun menafsirkannya sebagai penerimaan. Sungguh, sebuah tafsiran yang tidak keliru.

Ketika kemudian Suci mengandung buah perkawinan mereka, "Menurut USG, bayi kami laki-laki," kata Munir. Mendengar itu, Munir segera terkenang pada pejuang tanpa kekerasan yang kemudian menjadi Presiden Cile. Ia pun menyiapkan nama Allende bagi "cikal anak"-nya itu. Rupanya, selain mengagumi Nabi Muhammad S.A.W., ia memang mengagumi tokoh Amerika Latin tersebut. Meskipun begitu, ketika ditanya siapa manusia yang paling mempengaruhi cara berpikirnya, Munir menyebut sang ibu: Jamilah.

DI MONUMEN ANTI DISKRIMINASI NEGRO DI WASHINGTON. *Dia merupakan bagian dari pelaku.*

Forum
24 Agustus 1998

DI TENGAH DEMONSTRAN TIBET. *Untung, perubahan segera terjadi.*

BERSAMA ANDI ARIEF. *Tidak sekadar ingin mengiring mereka ke penjara.*

> *"Masyarakat menghendaki siapa yang bersalah dimintai pertanggungjawaban menurut prosedur hukum yang berlaku."*

Kendati ibunya hanya perempuan biasa, dalam ingatan Munir, wanita itu mempunyai prinsip yang luar biasa. Ia lalu mengenang, bagaimana pada masa kecilnya ia sering melihat ibunya bertengkar dengan tetangga yang kebetulan keturunan Cina hanya karena berebut tembok. Namun, ketika ada warga setempat yang ingin mengganggu keluarga Cina tadi karena perbedaan etnis, ibunyalah yang berdiri paling depan untuk membela. "Dari Ibu, saya belajar banyak bagaimana menghargai orang lain yang berbeda," tuturnya.

Begitulah. Arus sejarah rupanya membawanya lebih jauh. Oktober tahun silam, sejumlah LSM yang menaruh perhatian terhadap persoalan hak asasi manusia (HAM)—mulai dari LBH sampai Aliansi Jurnalis Independen (AJI)—berkumpul. "Kami menangkap adanya gejala peningkatan kekerasan oleh negara terhadap ketidakpuasan masyarakat karena kondisi ekonomi," ujar Munir. Ketika itu tercatat, sedikitnya ada 1.600 manusia di Pulau Jawa yang ditahan dan ditangkap secara ilegal, lengkap dengan kekerasan yang menyertainya.

"Kami melihat itu berbahaya, krisis akan terus naik, dan negara akan menggunakan kekerasan terus-menerus," tambah Munir. Hasil pertemuan itu? Para aktivis itu sepakat membentuk Komisi Independen untuk Pengawasan Pelanggaran HAM (KIPP-HAM). Ketika perdebatan soal Tap HAM muncul menjelang SU-MPR 1998, komisi itu ikut terlibat dalam diskusi. Bahkan, mereka juga mengajukan naskah rancangan ketetapan majelis wakil rakyat tersebut.

Eh, hampir bersamaan dengan perdebatan tadi, pertengahan Februari lalu, tiba-tiba dua aktivis PRD, Pius Lustrilanang dan Desmon J. Mahesa, dikabarkan hilang. "Kami menangkap fenomena yang agak aneh. Ada orang yang diculik. Apakah itu bagian dari SU-MPR atau bukan? Ketika itu, kami sudah mulai mengkampanyekan soal itu tapi masih dalam kerangka KIPP HAM," katanya.

Setelah itu, pada 15 Maret 1998, beberapa aktivis Komite Nasional Penegakan Demokrasi (KNPD) melaporkan bahwa ada tiga teman mereka hilang setelah keluar dari YLBHI di Jalan Diponegoro, Jakarta. Sehari sebelumnya, Wakil Sekjen PDI-Perjuangan, Haryanto Taslam, juga dikabarkan hilang. "Dari serangkaian peristiwa itulah Kontras terbentuk," kata Munir.

Toh, Munir mengakui bahwa ibunda Faisol Reza—aktivis yang juga dikabarkan hilang—yang ikut berjasa melahirkan Kontras sebagaimana kita kenal sekarang. "Ia datang ke YLBHI dan menanyakan kenapa tidak ada organisasi yang khusus menangani orang hilang. Mereka tidak tahu mau mengadu ke mana," ujarnya. Pertanyaan serupa datang juga dari ibu aktivis Yani Avri.

Melihat semua itu, tak ada pilihan lain bagi pihak Munir selain membentuk komisi khusus untuk orang hilang dan korban kekerasan. Ya, Kontras itu. Tak kurang dari 12 LSM dan dua ormas mahasiswa yang ikut dalam rapat pembentukan komisi tersebut, pada 19 Maret 1998. Berisikan 19 tokoh yang duduk di Badan Penasihat, Badan Pekerja Kontras berisikan 10 orang aktivis dari berbagai LSM dan relawan. Kini jumlah anggota badan pekerja itu ada 14 orang.

Munir menolak kalau Kontras dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang menaruh perhatian terhadap kasus orang hilang. Begitu juga dalam hal "menekan" ABRI sehingga membentuk DKP. Ratna Sarumpaet dan kelompoknya juga melakukan hal itu. "Bagaimanapun, Kontras hanya salah satu dari sekian banyak kelompok penekan yang ada di masyarakat, agar masalah itu segera diselesaikan," kata Munir.

Hanya, kelompok-kelompok yang ada ketika itu masih memiliki beberapa kelemahan. Satu di antara kelemahan itu, yang dinilai Munir, malah yang paling strategis, yakni tidak mengambil sikap yang lebih tegas terhadap pemerintah. "Ketika itu kami tidak mengira Soeharto akan turun secepat ini. Kami sudah menyiapkan stamina yang panjang

dan keras. Kami siap dengan risiko menghadapi kekerasan, mungkin juga dihilangkan. Kami mengambil pilihan itu," katanya.

Menurut Munir, kalaulah Kontras terlihat berkibar sendirian, itu tak lebih berkat adanya perhatian dunia internasional, masyarakat, dan media massa. Tanpa ketiga hal itu, plus turunnya Soeharto dari kursi kepersidenan, bisa jadi Kontras tak akan menjadi pahlawan seperti sekarang ini. "Ketika kami berbenturan sangat keras dengan pemerintah, untungnya, perubahan segera terjadi," ujarnya. Mereka pun selamat, bahkan ruang gerak mereka pun lebih leluasa. Apalagi, sejumlah data sudah mereka dapatkan sebelum Soeharto jatuh.

Sementara itu, akibat pilihan sikap yang siap berbenturan dengan pemerintah tadi, Kontras justru sempat terlempar ke titik kritis. Ketika itu, masa antara 10 dan 18 Mei, Kontras sudah menuduh Kodam dan menuduh satu institusi lain. Padahal, main tuduh itu biasanya sangat jarang mereka lakukan. Lebih jauh lagi, tuduhan yang mereka lemparkan itu membuat mereka terpojok. Tudingan balik melanda. "Ketika itu, kami sudah mulai menghadapi represi: 'Tolong, dibuktikan. Ini mendiskreditkan ABRI'. Ketika itu, justru kami yang dipojokkan," katanya. Toh, dedikasi, idealisme, dan ketabahan lebih kuat dari segalanya. "Kami sepakat, apa pun akibatnya, kami tidak boleh mundur," tuturnya.

Ketabahan seperti itu rupanya memang sudah mendarah daging dalam sebuah pemanggilan resmi, ia tak hanya diancam aparat kedam setempat akan diseret dengan tudingan subversi, tapi juga diancam akan dihilangkan nyawanya lantaran melibatkan diri dalam urusan kematian buruh pabrik di Sidoarjo itu. Tapi, sebagaimana terbukti kemudian, ia bergeming. "Mereka tidak berhasil menekan kami, tapi hakimnya yang ditekan, dengan menyatakan pengadilan tidak berwenang."

Ada lagi pengalamannya yang unik. Suatu ketika, istrinya kedatangan tamu perempuan. Ia mengaku pacar gelap Munir. Tapi, Suciwati bukan pujaan Munir bila ia menanggapi provokasi itu dengan kalap. Suci bahkan mengajak "madu"-nya itu bertemu langsung dengan Munir di kantor di YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta. Karena takut rahasianya terbongkar, cewek tadi pun lari terbirit. "Itu kan risiko yang harus dipilih," katanya.

Walhasil, kemampuan Munir (dan istrinya) dalam mengatasi rasa takut itu tampaknya sudah di atas rata-rata. Ketika keadaan Jakarta begitu mencekam, pada 19 Mei silam, saat tentara ada di mana-mana dan isu penculikan terhadap aktivis merajalela, Munir dan istri pun merasa tak nyaman tinggal di rumah. Apa usaha mereka mengusir ketidaknyamanan itu? "Semalaman, sampai pagi, saya dan istri jalan-jalan, menonton Istana dan *under-water* Jakarta," ujarnya saambil tertawa renyah.

Totalitas kerja Munir bagi Kontras tentu sudah tidak diragukan lagi.

BERSAMA KELUARGA. *Agak kelaki-lakian dan mandiri.*

"Bagaimana saya harus menghadapi keluarga-keluarga yang mengadu kalau saya sendiri takut. Itu kan risiko yang harus dipilih. Ketakutan itu teror buat diri sendiri."

Jangan tanya pukul berapa ia pulang kantor. Ketika pekerjaan sedang sepi, ia biasa pulang pukul 8 atau 9 malam. Bila tugas menumpuk, ia baru pulang tengah malam. Dan di rumah, ia tidak sepenuhnya lepas dari masalah kerja. Soalnya, beberapa aktivis korban penculikan tak jarang ikut menginap di rumahnya yang sederhana. "Kalau terjadi apa-apa, minimal saya bisa memberikan bantuan," kata Munir, yang selalu pulang kerja dengan sepeda motornya itu.

Tak banyak waktu bagi lelaki itu untuk benar-benar beristirahat di rumah bersama istri. Baru pada hari Minggu ia bisa sedikit bernapas lega, berbagi dengan sang istri, seraya menjalani hobinya di bidang pertukangan dan berkebun. "Kelak, kalau negeri ini makin demokratis, saya mau pulang ke Malang. Saya mau dagang saja," kata Munir berseloroh. Kendati mau kembali ke asal-usulnya, toh ia juga tak mau melepaskan profesinya yang sekarang. Ia ingin tetap punya kantor bantuan hukum yang bisa bebas membela rakyat kecil.

Itulah Munir, yang di mata kolega-koleganya dikenal sebagai manusia yang menyenangkan. "Munir itu orangnya lucu dan humoris," kata Standar Kiaa, salah seorang anggota Badan Pekerja Kontras. Toh, kendati tubuhnya kecil dan usianya relatif muda, kewibawaannya tetap tak berkurang. Dan itu, menurut Kiaa, karena Munir menguasai persoalan hukum. "Kelemahannya hanya pelupa dan tak terlalu peduli dengan detail," kata Viktor, staf Kontras. Rekannya yang lain, Heppy, pun berpendapat senada. Munir boleh saja pelupa. Tapi, apa yang dilakoninya sekarang tak akan pernah dilupakan orang.

Maman Gantra dan Sen Tjauw

dan jiwa Munir. Soalnya, sebagai aktivis HAM, terlebih di tengah bencana kemanusiaan semasa Orde Baru, ancaman dan teror bukanlah hal mulus yang harus dihadapi. Dan ia sadar akan risiko itu. "Memang banyak teror yang dilakukan. Tetapi, saya sekarang berada dalam posisi memiliki tanggung jawab moral untuk tidak takut," kata Munir." Bagaimana saya harus menghadapi keluarga-keluarga yang mengadu, kalau saya sendiri takut. Itu kan risiko yang harus dipilih. Ketakutan itu kan teror buat diri sendiri," ujarnya menambahkan.

Hampir tiap hari ia menerima berbagai jenis teror. Tidak hanya telepon gelap atau faks, tapi ada peneror yang datang dan bertemu langsung dengannya. "Saya tidak bisa menebak mereka dari mana, tapi kalau dibilang aparat, mereka tidak pernah memakai seragam," ujarnya. Bahkan, ada salah seorang relawan Kontras yang sudah akan diculik tapi dilepas lagi karena salah menangkap orang. "Kesatuan-kesatuan penculik itu masih sering nongkrong di depan YLBHI," ujarnya.

Munir lalu teringat pengalamannya saat menangani kasus Marsinah:

Forum
24 Agustus 1998

#9

LEBIH JAUH DENGAN

Munir

PENGANTAR REDAKSI

IBARAT roket, dalam waktu setahun namanya langsung dikenal jutaan orang penduduk Indonesia. **Munir**, nama yang singkat dan tidak biasa untuk umumnya orang Indonesia yang bernama panjang, kini menjadi sosok yang sulit dilepaskan dari soal kekerasan. Visi dan sikapnya yang tegas menolak segala bentuk kekerasan, menjadi air penyejuk di tengah "bara api" tindak kekerasan yang muncul di berbagai tempat di Indonesia belakangan ini.

Tidak mengherankan bila kiprah bapak muda kelahiran Malang, 8 Desember 1965—bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang resmi berdiri 21 April 1998—menghasilkan beberapa penghargaan, antara lain Suardi Tasrif dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Yap Thiam Hien dari Yayasan Studi Hak Asasi Manusia (Yapusham). Dalam kapasitas pribadi, suami dari **Suciwati**, yang juga pernah aktif membela hak-hak kaum buruh, dan ayah **Soultan Alif Allende**, yang baru berusia tiga bulan ini, dinobatkan sebagai *Man of The Year 1998* versi majalah *Ummat*.

Ditinggal ayahnya sejak 1978, Munir sejak kecil telah akrab dengan kerja keras. Ketika anak-anak SD dan SMP lainnya membeli mainan dari toko, Munir membuat sendiri mobil-mobilan dari kayu. Bahannya diambil dari sebuah pabrik pembuat raket yang berada di belakang rumahnya di Malang, Jawa Timur.

"Kelas enam SD saya sudah bisa buat senapan peluru gotri, pakai pentil sepeda motor. Waktu itu tren di Batu, anak kecil-kecil sudah bisa buat senapan. Akhirnya polisi *ngelarang* seluruh penjual alat-alat sepeda untuk menjual pentil sepeda ke anak kecil, karena itu bakal jadi senapan," kenangnya.

Sebelum bergelut dengan persoalan hukum, tindak kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang lulus tahun 1990 ini, juga pernah bekerja di perusahaan perseiwaan *sound system*. Perusahaan ini memberinya keterampilan menjadi juru servis perangkat elektronik. Dunia bisnis pun sudah lebih dulu digelutinya, dari membuat dan menjual antena UHF, menjual sepatu, sampai menjual parabola yang salah satunya dipasang di halaman gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta.

"Karena dasarku dari pedagang, ya pikirannya jadi pedagang. Obsesinya punya toko. Tetapi namanya pedagang kecil, ya obsesi punya tokonya juga toko kecil. Tetapi ketika SMA saya dengan sadar menyerahkan diri pada jurusan. Kalau tidak berhasil ke IPA, saya ingin *ngambil* hukum, kalau masuk IPA mau ke teknik. Pada waktu itu saya tidak punya pandangan sedikit pun tentang profesi hukum karena saya tidak pernah kenal satu pun sarjana hukum dalam hidup saya," ungkap pengacara yang masih bersepeda motor bebek itu.

Di bidang hukum, ia merintis kariernya dari *volunteer* LBH Surabaya sejak 1989, Ketua LBH Surabaya Pos Malang (1991), Kepala Bidang Operasional LBH Surabaya (1993-1995), Direktur LBH Semarang (1996), dan Sekretaris Bidang Operasional YLBHI (1996). Sebelum melejit lewat kasus penculikan sejumlah aktivis, Munir pun sudah tampil sebagai kuasa hukum keluarga Marsinah, kuasa hukum warga Nipah (Madura), kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas, kuasa hukum Muchtar Pakpahan, dan masih banyak lagi perkara yang hampir semua berbau politis.

Pengalaman demi pengalaman menangani berbagai kasus itu, bukannya membuat Munir semakin yakin akan profesi kepengacaraan. Dia lebih memilih jadi aktivis. "Saya semakin tidak ingin jadi pengacara, termasuk di LBH ini pun. Menurut saya pengacara ini profesi yang ideal, tetapi tidak boleh orang hidup bergantung pada profesi ini. Kepelesetnya banyak," katanya.

Agaknya, karena itu pulalah, Munir bahagia saja hidup di rumah "petak" di kawasan Prumpung, Cipinang, Jakarta Timur. Dia tak punya ruang kerja. Ruang makan pun menyatu dengan ruang tamu dan ruang keluarga. Hiburannya hanyalah sebuah akuarium berukuran 1,5 meter kali 40 cm, tiriggi 60 cm, yang didalamnya berisi ikan arwana perak.

Berikut perbincangan *Kompas* dengan Koordinator Badan Pekerja Kontras itu, seusai penobatan dirinya menjadi tokoh tahun ini versi *Ummat*

Kompas
3 Januari 1999

Munir

#10

siap.
dela-
ngapa
indur
s ber-
apa-
bisa
ma-
eman
setuju

Badan Pekerja Kontras?

Sebenarnya perubahan dalam diri saya hanya sedikit. Dulu saya bukan *campaigner* (juru kampanye), tetapi orang lapangan. Waktu di lapangan dan tidak pernah tampil di media massa itu pun, saya pernah diancam Kodam untuk dijadikan sosis. Tetapi pada waktu itu saya sudah hitung. Waktu saya dipin-

den
bers
akib
bun
nga
S
ting
atat
had
mer
Y
(Se
ber

Kompas
3 Januari 1999

#11

| *Munir,*
Koordinator
Kontras

cullah tampilan *campaigner*.

Di Kontras ini situasinya harus dihadapi dengan lugas, meskipun dengan konsekuensi tertentu. Saya sendiri justru meyakini benar bahwa dengan bersikap lugas, orang sulit melakukan sesuatu dengan kita.

Lebih mudahnya, formulasi

#12

Sebenarnya obsesi jangka panjang adalah ada satu proses di mana bukan saja kasus kekerasan, tetapi semua kasus kekerasan, dipertanggungjawabkan secara politik. Itu ruangannya 'kan ruang perubahan politik. Cuma sayangnya, perubahan politik kita ini belum secara otomatis membuka ruang untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahan dan kejahatan kemarin.

Kedua, kita juga belum punya ruang untuk merehabilitasi para korban. Misalnya orang yang di tahun 1965 keluarganya terkena bantai, sampai sekarang keluarganya masih ketakutan, rehabilitasi psikologis tidak ada. Keluarga korban Priok saja berapa orang yang telepon ke sini, janjian mau datang tetapi *enggak* jadi karena takut, ada teror, dan sebagainya. Tidak ada proses rehabilitasi situasi sama sekali.

Kompas
3 Januari 1999

#13

dak tepat. Misalnya orang melihat saya ini *kok* tidak pantas menggunakan sepeda motor. Sebetulnya kalau saya terima juga bisa, tanpa konsesi apa-apa. Tetapi justru lebih banyak orang yang menunggu untuk memaki-maki, kalau saya menerima itu. Saya sadar benar tentang itu. Setiap perubahan diri kita akan diamati orang sangat besar. Jadi, sensitif, meskipun banyak orang yang bersimpati, ada yang menawari rumah gratis, ada dealer mobil yang menawari mobilnya dengan harga yang terserah saya menentukan, seribu rupiah pun tidak apa-apa asal ada syarat jual beli.

Saya tidak mau menerima, karena itu nanti menjadikan *bias* terhadap saya dan tim. Saya merasa harus menjaga moralitas tim. Kalau moralitas timnya kacau, disorientasi menguber yang begitu-begituan, hancur organisasi ini. Termasuk penghargaan-penghargaan ini, sama mewahnya dengan hal yang bersifat materiil itu. Makanya, saya lebih senang kalau yang dihadiahi itu Kontras daripada saya sendiri.

| ***Munir,*** *Koordinator Kontras*

#14

Setahu saya, istri saya lebih berani dibanding saya. Dia lebih berani dan lebih siap. Lebih berani, dalam artian dia yang paling sering menafsirkan sesuatu secara ringan. Dia biasa mensimplifikasi satu persoalan yang seolah-olah berat, sehingga kalau ngobrol sama dia menjadi ringan, ditafsirkan dengan gampang.

Istri saya 'kan tidak berpendidikan tinggi, pendidikannya biasa. Dia representasi masyarakat umum yang menafsirkan Kontras. Maka kalau saya membuat *statement*, pasti saya tanya dia dulu. Kalau begini gimana? Cara dia menafsirkan itu gambaran apakah masyarakat umum menangkap tidak maksudnya, atau masyarakat umum menganggap itu kurang berani, tidak tegas atau apa.

Kompas
3 Januari 1999

Kompas
3 Januari 1999

Sebuah bangsa itu perlu pemberhentian, sebuah halte untuk duduk bersama, nongkrong. Sekarang kita itu belum sampai di tempat pemberhentian itu. Perubahan yang Mei kemarin belum menjadi jeda untuk orang duduk bersama melihat itu. Ada konfigurasi konflik elite, persaingan di dalam, keinginan dominatif, dan macam-macam yang mengakibatkan keinginan untuk duduk bersama, melihat permasalahan kemarin, menjadi lemah.

Satu-satunya cara agar orang duduk bersama adalah ketika ada kesadaran untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang kemarin, dan membangun kembali proses perbaikan. Itu ruangan

| ***Munir***, *Koordinator Kontras*

#16

Menurut saya pribadi, saya bukan orang yang berani. Cuma kami lebih melihat situasi ini butuh reaksi yang lugas. Reaksi yang lugas itu kemudian harus ditampilkan dalam bentuk seperti apa. Karena itu kami juga menghitung konteks, situasinya seperti apa.

| ***Munir,*** *Koordinator Kontras*

#17

PROFIL

Munir, Seorang 'Ayah' bagi Si Anak Hilang

MUNIR lahir sebagai seorang ayah. Bukan hanya ayah bagi Sultan Alis Allende, bayinya yang baru berusia tujuh bulan hasil pernikahannya dengan Suciwati, tapi juga "ayah" bagi para aktivis yang hilang karena diculik. Dan sang "ayah"—serta kelompok yang dipimpinnya, yang bernama Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)—tentu saja layak diganjar Yap Thian Hien Award, pekan lalu, dari Yayasan Pusat Hak Asasi Manusia untuk upayanya memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia, terutama dalam soal tindak kekerasan dan penculikan. Tapi penghargaan dengan berbagai efek finansial dan prestise itu bukanlah suatu hal yang memuaskan batin aktivis ini. "Saya lebih puas melihat anak-anak yang hilang itu kembali ke pelukan keluarganya," tuturnya suatu sore yang basah tersiram hujan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), tempat Kontras "menumpang" berkantor.

Mendengar cerita korban penculikan.

Lahir di Malang, 8 Desember 1965, dari pasangan Said dan Jamilah, Munir tampaknya sebuah contoh klasik anak yang "menyimpang" dari tradisi keluarga yang berniaga. Di masa kecilnya, bersama kakak-kakaknya, Munir ikut berjualan kain, sepatu, serta barang elektronik. Kegiatan itu baru dihentikan ketika Munir memasuki tahun ketiga di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Sejak saat itulah Munir terlibat dalam berbagai kegiatan kampus, yang kemudian membawanya kepada aktivitas advokasi di LBH Malang pada 1991.

Dari aktivitasnya mengurus buruh hingga terlibat dalam memperjuangkan nasib Marsinah, akhirnya Munir "berlabuh" dalam kasus orang yang hilang. "Saya mulai memperhatikan masalah orang hilang sejak bulan Desember 1992," Munir berkisah. Pada 26 Desember 1992, Munir mendapat laporan, salah satu buruh yang juga kawannya tertangkap, hilang diculik selama tiga hari. Tujuan penculikan ini adalah untuk mengetahui seluk-beluk dan kegiatan Munir sebagai aktivis buruh. "Ia sempat dicabuli dan disiksa aparat," tutur Munir dengan nada getir. Sejak saat itulah Munir berkonsentrasi memperjuangkan nasib orang yang hilang. Tentu saja, di masa Orde Baru, istilah yang sering digunakan aparat adalah "diamankan". "Kamilah yang pertama kali menyebutnya sebagai kasus penculikan," kata Munir. Munir menyadari, kasus penculikan sebetulnya sudah lama ada. Peristiwa Malari, Tanjungpriok, dan berbagai kerusuhan, menurut penelitian Munir, pasti disertai kegiatan penculikan aktivis politik. "Kasus penculikan seperti ini melibatkan militer yang terang-terangan menculik dan menangkap mereka," tutur Munir. Dan setelah puluhan tahun para orang tua korban penculikan tak punya tempat mengadu, Kontras menjadi sebuah lembaga yang memperjuangkan bukan hanya kepentingan keluarga korban, tapi juga skala yang besar: hak asasi manusia.

Semua dimulai pada Peristiwa 27 Juli 1996 dan Pemilu 1997, ketika LBH menerima laporan sejumlah aktivis yang hilang, antara lain Petrus Bimo dan Suyat. Adalah ibu Yani Avri—salah satu korban penculikan yang hingga kini belum ditemukan—yang datang mengunjungi LBH diantar oleh aktivis Aliansi Jurnalis Independen (AJI). "Ia mengeluh karena tidak ada lembaga yang mengurus orang-orang yang hilang," tutur Munir. Maka, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama berbagai lembaga lain—antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), AJI, dan Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (Elsam)—memberikan dukungan dana untuk mendirikan kelompok kerja, yang akhirnya, pada Maret 1998, diberi nama Kontras. "Kemunculan Kontras adalah hasil refleksi rekan-rekan karena melihat kelemahan advokasi tak bisa memberikan jaminan terhadap tindak kekerasan dan orang hilang," tutur Munir. Mereka mempertanyakan mengapa lembaga advokasi yang sudah ada kurang bisa memberi kebutuhan yang lebih konkret. Dan ternyata, setelah berdirinya Kontras, ia menjadi bagian yang ikut memberikan dampak besar bagi perubahan di negeri ini.

Adalah Pius Lustrilanang, aktivis Aldera dan Siaga, yang pertama kali muncul di depan umum, pada April 1997, berkisah tentang pengalamannya diculik. Selanjutnya Desmond Mahesa, Raharjo Waluyo Djati, Faisol Reza, dan akhirnya Andi Arief. Setelah Pius, yang didampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) dan Komnas HAM,

TEMPO, 21 Desember 1998

membuka suara, Munir juga selalu mendampingi kesaksian para aktivis lain yang menjadi korban penculikan. "Dari pengalaman penculikan itu, saya perhatikan, proses penyiksaan yang paling parah terjadi pada Faisol Reza dan Waluyo Djati," kata Munir. Indikasinya, menurut Munir, adalah karena penyiksaan dan penyekapan yang mereka alami jauh lebih lama dari yang lain, dan juga kemampuannya mengatasi trauma cukup lama. "Ketika kami berkunjung ke Puspom, Faisol Reza langsung melompat kaget mendengar sirene. Begitu takutnya ia hingga tak berani ke toilet sendirian," tutur Munir. Adapun Andi Arief, menurut Munir, matanya ditutup selama tujuh hari berturut-turut dan disiksa habis-habisan sehingga penglihatannya agak terganggu untuk beberapa lama.

Bahwa Prabowo Subianto—sebagai salah satu sosok yang paling ditakuti di masa Orde Baru—akhirnya diberhentikan dari jabatannya sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando (Dansesko) dan dari karir kemiliterannya, sebagai ekor dari terungkapnya kasus penculikan ini (dan juga sebagai ekor dari tumbangnya Soeharto), bagi Munir, itu bukan sebuah ukuran keberhasilan. "Bagi saya, ukuran keberhasilan (kami) adalah menyelamatkan para korban penculikan, untuk pulang. Dan ukuran keberhasilan kedua, kasus itu harus dibuka dan adil, sehingga peristiwa kekerasan itu tidak

TEMPO, 21 Desember 1998

◄ Bahwa Prabowo Subianto—sebagai salah satu sosok yang paling ditakuti di masa Orde Baru–akhirnya diberhentikan dari jabatannya sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando (Dansesko) dan dari karir militernya, sebagai ekor dari terungkapnya kasus penculikan ini (dan juga sebagai ekor dari tumbangnya Soeharto), bagi Munir, itu bukan sebuah ukuran keberhasilan. Bagi Munir, seperti dalam kliping ini, ukuran keberhasilan adalah menyelamatkan para korban penculikan untuk pulang. Dan ukuran keberhasilan kedua, kasus itu harus dibuka dan adil sehingga peristiwa kekerasan itu tidak terjadi lagi.

Forum
23 Desember 1998

terjadi lagi." Munir bahkan mengakui, ada empat orang korban penculikan yang sudah pulang tapi hingga hari ini belum bersedia berbicara—dan keinginan para korban itu dipatuhi dan dihormati Kontras sebagai sebuah hasil kesepakatan.

Munir mengisi subuh dengan menikmati perannya sebagai ayah Sultan Alis Allende. Pagi itu, sebelum mandi, ia berjalan-jalan mengitari Gang Buntu Cipinang di kawasan Bekasi Timur bersama Wati—sang istri—dan Allende (sebuah nama yang diambil dari nama Presiden Cile yang ditumbangkan diktator Pinochet pada 1973). Setelah mencari sinar matahari bagi sang bayi, Munir ikut mencemplungkan sang bayi ke dalam seember air dan memandikannya. Ini adalah sebuah kemewahan tiada tara bagi sang ayah baru. Sebab, selanjutnya, dengan menggunakan sepeda motor, ia melaju ke Kantor LBH dan berganti peran menjadi "ayah" bagi para aktivis yang hilang hingga tengah malam.

Sembari memandikan sang anak, Munir berkisah kepada reporter TEMPO bagaimana keluarganya menerima teror harian sebagai makanan utama yang rutin. Di suatu siang yang gerah, seorang perempuan cantik mengunjungi rumah pasangan yang aktivis itu. Dalam keadaan hamil, Wati mendengar kisah yang meluncur dari mulut perempuan tersebut bahwa ia adalah kekasih gelap Munir. Dengan tenang, Wati malah mengajak sang "kekasih gelap" bertemu dengan Munir dan menuntutnya. Menurut Wati, jika memang wanita itu kekasih gelap Munir, ia patut menuntut haknya dan Wati bersedia membantunya. Ketenangan itu ternyata membuat sang perempuan mundur teratur. Ia kabur. Dan, seperti yang sudah diduga, ini adalah salah satu bentuk teror rutin yang sudah menjadi menu harian Munir dan keluarganya. "Teror yang kami alami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan teror yang dialami kawan-kawan yang diculik," tutur Munir, yang sudah kenyang dengan ancaman penculikan, penangkapan, pembunuhan, hingga pengiriman bunga yang diperciki darah. Tujuan orang melemparkan teror, bagi Munir, adalah agar ia ketakutan. Dan, "Saya harus merasa mampu mengalahkan rasa takut itu."

Apa yang dialami Munir dan keluarganya, bagi Munir, tidak sebanding dengan yang dialami keluarga korban penculikan, "Terutama 13 korban penculikan yang sampai saat ini belum jelas nasibnya," kata Munir dengan nada prihatin. Ia bercerita bagaimana seorang ibu korban selalu melompat jika mendengar suara motor karena menyangka anaknya pulang. "Itu siksaan paling berat dan seumur hidup," kata Munir. Munir, meski tidak belajar psikologi secara formal, mulai mempelajari bahwa para orang tua akan melampaui rasa takut dan sedih itu, dan sebuah sikap baru akan muncul kemudian: keberanian. "Mereka jadi jauh lebih berani. Keberanian yang melampaui keberanian siapa pun!" katanya kagum.

Munir berkisah bagaimana keberanian gerombolan orang tua dari 13 korban penculikan yang diantar ke Kantor Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI akhir Oktober silam. Keberanian yang tidak membuat mereka sungkan untuk mengecam Mayjen Djasri Marin—Komandan Puspom ABRI—yang dianggap lamban dalam menangani kasus 13 korban penculikan itu. "Saya tidak bisa menyalahkan sikap mereka, karena faktanya memang militer keterlaluan," katanya. Ia mengakui, keberanian dan ketangguhan keluarga korban selalu mengobarkan semangatnya untuk terus bekerja mencari mereka yang hilang.

Munir juga menyebut bahwa lahirnya Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)—yang idenya meniru negara-negara Amerika Latin—memang dibutuhkan karena mereka bisa saling membantu dan menopang secara moril. Kontras sendiri menyediakan program rehabilitasi dan konseling bagi korban karena "begitu korban dilepas para penculiknya, mereka sangat takut dan mengalami trauma, sehingga sebisa mungkin kami membantu menyembuhkan dengan bekerja sama dengan lembaga *crisis center*," kata Munir.

"Pemecatan Prabowo lebih karena soal kepentingan ABRI..."

FULLY KESUMA

Ketika ditanya apakah Munir pernah memiliki kesempatan bertemu dengan Prabowo, dengan tegas ia menjawab, "Tidak. Kalau mau, saya bisa bertemu, tapi saya tak punya kepentingan. Yang saya temui adalah jalur-jalur proses yang harus dibongkar, misalnya Puspom." Munir juga tak percaya bahwa perintah penculikan itu—atau apa pun istilah Orde Baru untuk itu—hanya hasil interpretasi atau tafsiran. "Yang namanya BKO (bawah kendali operasi) atau perintah dalam sebuah operasi sudah seperti darah dengan daging. Tidak mungkin orang itu memakai interpretasi sehingga salah menafsir," katanya. Lebih jauh lagi, Munir dengan nada sinis mengatakan, "Pemecatan Prabowo lebih karena soal kepentingan ABRI sendiri, bukan karena kasus penculikan." Seharusnya ABRI secara institusional mengakui kesalahannya dan ada pertanggungjawabannya secara politik.

Kini, dengan berbagai penghargaan di Kantor Kontras, Munir dan timnya tetap ingin masyarakat dan aparat keamanan terus-menerus ingat tentang 13 korban yang sampai saat ini belum jelas nasibnya.

"Kami mengadakan kampanye dengan meletakkan poster foto korban di mana-mana, pameran foto, diskusi, dan berkeliling," kata Munir. "Kalau mereka tewas, kami ingin tahu kuburannya; kalau luka, kami ingin mereka dikembalikan; kalau hidup, di mana mereka. Kami harus tahu keberadaan mereka, hidup atau mati," ujarnya dengan tegas. Ketika media sudah mulai surut dan cenderung melupakan nasib para orang hilang—mungkin karena ada berita lain yang dianggap "lebih" hangat dan menarik—Munir tetap berlaku sebagai seorang "ayah". Kehilangan para aktivis itu, baginya, adalah sebuah kehilangan anak. Dan tidak banyak "ayah" semacam Munir saat ini.■

Leila S. Chudori dan Hani Pudjiarti

TEMPO, 21 Desember 1998

Forum
23 Desember 1998

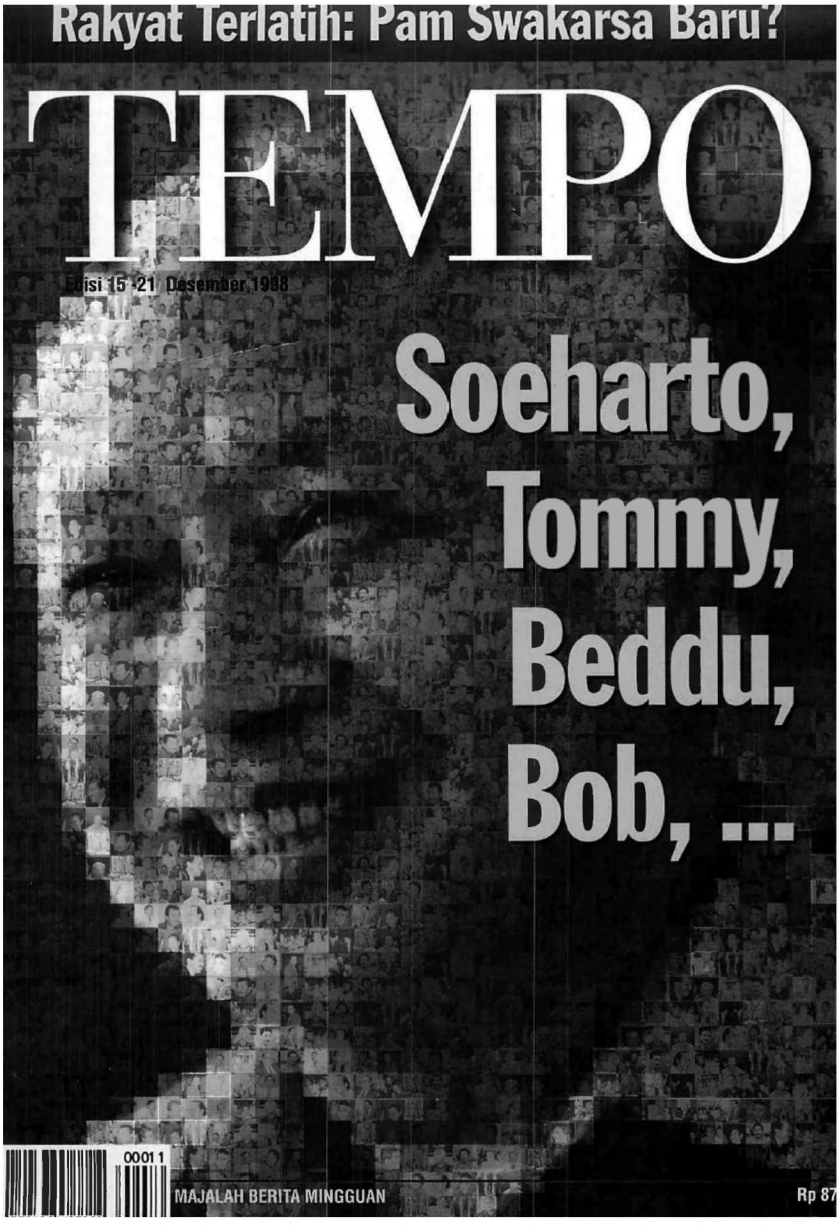
Rakyat Terlatih: Pam Swakarsa Baru?
TEMPO
Edisi 15 -21 Desember 1998
Soeharto,
Tommy,
Beddu,
Bob, ...
MAJALAH BERITA MINGGUAN
Rp 87

EPILOG

Sebab Lupa Tak Bisa Membebaskan Kita

OLEH ZEN RS

Rentetan peristiwa 1998 menjadi satu-satunya momen besar dalam sejarah politik Indonesia yang saya alami dan saksikan langsung sehingga saya punya ikatan khusus, juga ingatan yang spesifik, tentangnya.

Saya tidak mengalami peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah republik ini. Sumpah Pemuda, proklamasi 17 Agustus 1945, 10 November, tragedi 1965, atau Malari, Talangsari, Priok... Saya belum lahir saat itu sehingga peristiwa-peristiwa tersebut hanya saya ketahui melalui bahan bacaan.

Karena merasa menjadi bagian dari 1998, setidaknya mengalaminya langsung, saya tidak pernah tidak tertarik dengan segala hal yang terkait 1998. Sejak masih mahasiswa hingga hari ini, saya merawat (dan terus

mencari serta mengumpulkan) berbagai dokumen tentangnya, terutama arsip surat kabar—yang di kemudian hari menjadi pondasi utama buku ini.

Sebagai pembelajar sejarah, saya tidak ingin informasi dan pengetahuan tentang 1998, berikut berbagai tragedinya, menjadi sulit diakses—*naudzubillah* kalau sampai menjadi barang terlarang seperti segala pernak-pernik tentang 1965 pada masa Orde Baru.

Saya punya sedikit cerita tentang hal itu.

Pada akhir 2005, di salah satu sudut bagian belakang Perpustakaan Daerah Yogyakarta di Jl. Malioboro, saya menemukan semacam kotak kayu menyerupai lemari yang memiliki rongga di salah satu bagiannya. Kotak kayu itu dalam keadaan digembok. Mulanya saya tidak terlalu memperhatikan secara khusus lemari tersebut.

Namun, seiring waktu, setelah belasan sesi kunjungan, saya penasaran dengan isinya. Suatu hari, setelah memasuki 2006, dengan lebih dulu membawa antena radio yang bisa dilipat, saya mengorek-ngorek isi lemari tersebut melalui salah satu rongganya. Saya melihat semacam brosur tentang kota Praha. Saya korek-korek lagi, masih dengan antena radio, saya melihat halaman depan surat kabar Harian Rakyat.

Eureka! Yakin sudah bahwa lemari itu berisi arsip-arsip surat kabar terkait atau terafiliasi dengan peristiwa 1965, Partai Komunis Indonesia dan onderbouwnya, atau yang sejenis dengan itu.

Usaha untuk mengakses dokumen tersebut kandas karena otoritas di perpustakaan tidak mengizinkannya, padahal Soeharto sudah lengser bertahun-tahun. Karena tidak atau belum punya rencana khusus dengan dokumen-dokumen tersebut, saya mengabaikannya, walau tetap rutin berkunjung ke perpustakaan tersebut untuk berbagai keperluan.

Beberapa bulan setelah gempa dahsyat 2006 yang meluluhlantakkan sebagian Yogayakarta, saya membaca kabar tentang renovasi bangunan Perpustakaan Daerah Yogyakarta di Jl. Malioboro yang terdampak oleh gempa.

Saya teringat dengan lemari tersebut dan mencemaskan kemungkinan kehilangan jejak dengan isinya. Saya memberi tahu kolega saya, Muhidin M. Dahlan, tentang keberadaan lemari tersebut dan apa isinya, dan menyarankannya untuk menghubungi pihak Perpustakaan Daerah guna meminta izin mendigitalkan semua isinya.

Dari situlah lahir trilogi buku *Lekra Tak Membakar Buku*, buku yang disusun berdasar ribuan kliping surat kabar terlarang.

***

Buku ini adalah usaha yang sebenarnya remah saja untuk menjaga ingatan.

Peristiwa 1998 belum lama-lama amat, rasanya seperti baru kemarin. Namun, banyak hal yang begitu jelas duduk perkaranya pada masa itu, perlahan-lahan mengabur karena berbagai sebab yang di sengaja atau pun tidak. Sementara, sejumlah ketidakpastian yang sejak awal memang sudah kelewat tebal terancam semakin runyam oleh berbagai situasi baru yang datang susul menyusul.

Bahkan dokumen-dokumen yang berasal dari era sebelum 1965 masih saja dalam status "tergembok" jauh setelah Soeharto lengser, apalagi peristiwa 1998 yang sejumlah aktornya masih hidup, masih berkiprah, dan boleh jadi masih menentukan banyak hal yang terjadi dan/atau akan terjadi di republik ini.

Hingga hari ini, misalnya saja, dokumen resmi keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk oleh Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto, untuk memeriksa personel militer yang terlibat dalam aksi penculikan para aktivis pada 1997–1998 belum bisa diakses oleh publik. Berkas digital keputusan DKP sempat beredar di dunia maya di sekitar Pemilu 2014, dan terulang lagi pada masa Pemilu 2019, tapi tidak pernah ada institusi resmi yang mengotorisasi apakah berkas yang beredar itu adalah otentik. Mungkin karena Wiranto, Panglima ABRI saat itu, berada di kubu yang berbeda dengan Prabowo

Subianto maka versi digital berkas itu bisa menyelinap keluar. Bagaimana jika sejak 2014, misalnya, Wiranto satu barisan dengan Prabowo?

Historiografi tidak mengenal pengandaian, tapi pengandaian bisa mempertajam perspektif kita atas peristiwa masa lampau. Andai keputusan DKP itu dibuka kepada publik sejak awal, kita bisa tahu lebih banyak apa yang sebenarnya terjadi, juga siapa saja yang terlibat, dalam kasus penculikan para aktivis pada ujung kekuasaan Orde Baru.

Kalau kita baca dengan cermat berkas digital keputusan DKP yanng beredar di dunia maya, kita akan menemukan kalimat begini: "Secara sengaja melakukan kesalahan dalam analisa tugas terhadap ST Kasad Nomor : STR/41/1997 tanggal 4 Pebruari 1997 dan STR/92/1997 tanggal 11 Maret 1997 walaupun mengetahui bahwa Kasad sebagai Pembina tidak berwenang untuk pemberian tugas tersebut."

Kita tahu Kasad pada 1997 adalah R. Hartono, tapi kita tidak pernah tahu apa bunyi dari ST Kasad Nomor: STR/41/1997 dan STR/92/1997. Apa isinya? Kapan kita akan tahu isinya? Wallahualam.

Dengan membaca berbagai kliping yang terdapat dalam buku ini, kita akan menemukan banyak pihak yang yakin Prabowo Subianto melakukannya tidak sendirian. Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah Prabowo, dalam wawancara yang klipingnya juga termuat dalam buku ini, menyebutkan nama R. Hartono (Kasad), Feisal Tanjung (Panglima ABRI) dan Soeharto (Panglima Tertinggi ABRI)—tiga atasan Prabowo dalam hierarki ABRI saat dua ST Kasad itu rilis.

Prabowo sendiri tidak pernah mau menyebutkan nama atasan yang memberinya perintah, baik saat ia masih diperiksa DKP hingga hari ini. Segala spekulasi tentang peristiwa tersebut, agaknya, akan selamanya menjadi spekulasi karena tidak pernah ada usaha serius untuk mengungkapkannya secara terbuka, baik melalui institusi resmi maupun oleh kesadaran individual para pihak yang terlibat melakukan maupun para pihak yang terlibat di DKP.

Habibie meletakkan pondasi dengan mengeluarkan

Perppu No. 1 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. Gus Dur meletakkan batu pondasi tambahan dengan mengesahkan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, dan kemudian dengan itu digelarlah persidangan kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur pasca referendum 1999. Setelah dua presiden dengan kekuasaan paling pendek di masa transisi tersebut, praktis tidak ada lagi kemajuan berarti dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa transisi 1997-1999. Tak ada lagi batu pondasi baru yang ditambahkan presiden-presiden berikutnya—dari Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo—dalam pengungkapan tragedi kemanusiaan di masa transisi 1997–1999.

Nasib 14 korban penculikan yang belum kembali akan selamanya tersimpan dalam kabut sejarah yang seiring waktu niscaya kian kabur dan terlupakan.

Jika untuk sebuah peristiwa yang sebagian pelakunya, yaitu Tim Mawar, pernah diadili saja kita sukar mendapatkan keutuhan cerita, apalagi untuk hal-hal lain yang pengungkapannya lebih sedikit—katakanlah kerusuhan 12-14 Mei, Tragedi Semanggi I dan II.

Pahit, tapi demikianlah kenyataannya.

***

Milan Kundera membuka novel *The Book of Laughter and Forgetting* melalui adegan yang berlangsung di balkon sebuah istana di Praha. Di atas balkon itu, pemimpin komunis Ceko, Klement Gottwald, berbicara di hadapan ribuan kolega-kolega seperjuangannya. Tiba-tiba saja salju turun membawa udara dingin yang mencucuk. Rekan Gottwald, Clementis, yang berdiri di sebelahnya, melepas topi bulu yang dipakainya dan menyerahkannya pada Gottwald untuk dikenakan.

Ribuan foto diproduksi untuk mengabadikan adegan itu: Gottwald berdiri di balkon mengenakan topi bulu dan Clementis berdiri di sebelahnya. Repro foto dan gambar adegan itu disebarkan ke berbagai penjuru, lewat berbagai

buku, tak terkecuali buku pelajaran, sebagai rekaman atas adegan terpenting sejarah Cekoslowakia yang komunis.

Empat tahun berikutnya, Clementis dihukum gantung karena tuduhan pengkhianatan. Clementis kemudian dihapus dari sejarah. Divisi propaganda partai menarik foto di balkon itu, menyuntingnya sedemikian rupa, dan lalu menyebarkannya kembali: kali ini hanya Gottwald di balkon itu, Clementis sudah raib dari foto.

Dari sinilah Kundera melahirkan pasasenya yang begitu terkenal: "Perjuangan manusia melawan kekuasaan itu seperti perjuangan ingatan melawan lupa."

Lupa adalah sahabat karib impunitas. Dengan lupa, praktik impunitas menjadi semakin mudah dijalankan. Impunitas, atau dibebaskannya pelaku kejahatan dari sanksi secara cuma-cuma, akan terasa sebagai hal normal dan biasa saja jika semua orang melupakan apa yang pernah terjadi. Bukan tidak ada kejahatan saat tidak ada saksi mata, tapi tidak ada lagi kejahatan saat tak ada lagi yang ingat dan mempedulikannya.

Kenapa setelah 1965 masih ada Tragedi Priok (1984), Talangsari (1989), Santa Cruz (1991) hingga Kudatuli (1996)? Kenapa usai kerusuhan 12-14 Mei 1998 masih ada penembakan mahasiswa 11-13 Nov 1998 (Tragedi Semanggi I)? Kenapa setelah Semanggi I masih ada Semanggi II (24 September 1999)? Kenapa usai Widji Thukul dan 13 orang lainnya hilang masih ada pembunuhan Munir? Kenapa setelah belasan orang tewas, beberapa di antaranya karena peluru tajam, dalam peristiwa Bawaslu & Tanah Abang pada 21-22 Mei 2019 masih ada yang tewas karena peluru tajam di KM 50 pada 7 Desember 2020?

Saya tak pernah membayangkan setelah periode transisional 1997-1999 akan ada mahasiswa yang tewas dalam demonstrasi karena peluru tajam. Membunuh mahasiswa dengan peluru tajam adalah tabu dari segala tabu pasca 1998. Nyatanya, pada 26 September 2019, dalam peristiwa besar demonstrasi #reformasidikorupsi dua orang mahasiswa Universitas Halu Leoo Kendari, Himawan Randy dan Yusuf Kardawi, tewas ditembak peluru tajam.

Saya ingin menunjukkan betapa dekatnya peluru tajam dengan batang leher kita lewat satu ilustrasi;

Peluru tajam terakhir yang ditembakkan kepada mahasiswa terjadi pada 24 September 1999 di Semanggi. Peluru tajam kembali membunuh mahasiswa pada 26 September 2019 di Kendari. Jadi, hanya butuh 20 tahun kurang dua hari saja untuk tabu dari segala tabu reformasi, yaitu membunuh mahasiswa dengan peluru tajam, diterabas. Begitu tabu dari segala tabu itu diterabas, maka hal-hal yang lain menjadi mungkin untuk dilakukan.

Dan itulah yang akhirnya terjadi. Menurut data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sekitar 52 orang tewas dalam aksi demonstrasi hanya sepanjang 2019 saja.

Karena memang nyaris tidak pernah ada hukuman bagi pelaku kejahatan HAM. Karena impunitas. Bangsa ini memang pemurah, sayangnya termasuk dalam urusan nyawa yang cuma selembar ini.

***

Masih banyak ruang gelap dalam sejarah bangsa ini. Sangat jamak publik, termasuk sejarawan, tidak bisa mengakses dokumen-dokumen primer dan resmi.

Kita tidak pernah tahu di mana berkas asli Supersemar, misalnya. Jika B.M. Diah tidak berbaik hati, mungkin selamanya kita tidak akan melihat lagi rancangan teks proklamasi hasil tulisan tangan Sukarno. Selama 47 tahun pendiri surat kabar Merdeka itu merawat dokumen luar biasa penting itu.

Butuh waktu sekitar 4 dekade pula bagi bangsa ini untuk mendapatkan lagi notulensi sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang disimpan oleh A.K. Pringgodigdo, wakil kepala sekretariat BPUPKI. Pada 1959, berdasar notulensi yang disimpan A.K. Pringgodigdo dan dipinjam Muhammad Yamin, putra Sawahlunto itu menerbitkan buku *Naskah Persiapan UUD 1945* pada 1959 yang menampilkan pidato Yamin sepan-

jang 21 halaman, lengkap dengan usulan lima dasar negara. Buku itulah yang menjadi cikal bakal buku resmi Orde Baru tentang sejarah Pancasila, yaitu buku *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*, yang mengerdilkan peran Sukarno dalam sejarah kelahiran Pancasila.

Belakangan arsip A.K. Pringgodigdo ditemukan kembali. Dari sanalah ditemukan bukti meyakinkan bahwa Sukarno yang pertama kali menyampaikan usulan mengenai lima dasar negara secara komprehensif pada 1 Juni 1945, sekaligus yang pertama kali mengucapkan kata Pancasila. Sedangkan pidato Yamin ternyata jauh lebih pendek, bukan 21 halaman, dan hanya mengusulkan tiga dasar saja.

Banyak momen sejarah bangsa ini hanya menjadi urusan segelintir elite yang terlibat atau yang menyimpan dokumentasinya. Entah itu Yamin, atau B.M. Diah, atau siapa pun entah yang menyimpan arsip Supersemar, maupun yang menyimpan arsip keputusan DKP dan notulensi persidangannya, dan berbagai peristiwa/dokumen lain. Kita, publik, seperti pasrah menunggu kemurahan hati, mungkin juga kebesaran hati, para elite agar sudi membuka atau menyerahkan dokumen yang mereka miiliki terkait berbagai urusan dan kejadian yang pernah terjadi di republik ini.

Surat kabar, koran, majalah, atau tabloid menjadi alternatif untuk mengakses masa silam yang berkabut. Karena sifatnya yang populer, dicetak dalam jumlah banyak, arsip surat kabar sangat mungkin masih tersimpan di berbagai tempat; dan tidak dikendalikan segelintir orang yang memegang kunci gembok berbagai laci dan brankas tersembunyi.

Arsip surat kabar memang sumber tidak resmi, tapi dengan itulah ia menjadi "testamen jalanan", semacam "dokumen rakyat", yang kepadanya kita bisa menemukan wajah masa lalu yang belum banyak dipermak oleh kekuasaan. Dengan segala kekurangannya sebagai sumber, arsip surat kabar sering kali menjadi benteng perlindungan terakhir menghadapi wabah amnesia sejarah.

Saya teringat Pramoedya Ananta Toer. Sekitar sebulan sebelum wafat, Pram diberi pertanyaan oleh redaksi Playboy Indonesia tentang "kekuasaan yang belum berpihak pada kesejarahan yang benar". Dan beginilah sejarawan (pertikelir) terbesar Indonesia itu menjawab:

"Ya, kalau kekuasaan nggak memperhatikan sejarah, publik yang memperhatikan. Itu nggak bisa dilarang, hak publik. Setiap terpelajar mulailah mendokumentasikan sejarah. Supaya setiap saat punya bahan yang bisa dipakai. Tanpa dokumentasi, gerayangan saja. Dan mendokumentasikan itu belum merupakan tradisi Indonesia. Mesti dimulai."

Ya, sudah, ayo kita mulai!

Jakarta, 12 Januari 2024.

| ***Zen RS,*** *esais, jurnalis, dan dokumentator partikelir.*

Twitter: @zenrs.

Daftar Sumber

Achmad Subechi, Agung Budi Santoso, Dahlan. "Soeharto Mencuci Uang Haram ke Yordania". *Bangkit*, No. 014 Th. I, 28 Desember 1998-3 Januari 1999. H. 3—5

Agus Basri, M. Asrian Mirza. "Prabowo pun Bicara Presiden". *GAMMA*, No. 1 Th. I, 20 Februari 1999. H. 28—29

Ahi. "Kami Yakin Kebenaran akan Muncul". *Pos Kota*, 6 Agustus 1998. H. 1, 4

Ahi. Ip. "Aktivis Hendrikson Sirait akan Beri Kesaksian ke Pupsom ABRI". *Pos Kota*, No.11465, 9 Agustus 1998. H. 1, 3

Ahmad Nur S. "Mimpi Buruk Hendrik". *D&R*, No. 34/XXIX, 11 April 1998. H. 18

Aj, Ip. "Kasad Subagyo: Prabowo Cs bisa dimahmilkan tergantung Pangab". *Pos Kota*, 15 Agustus 1998

Akhmad AR. "Prabowo sampai sumpah-sumpah". *AKSI*, No. 122 Vol.3, 2-4 Maret 1999. H. 24

Akmal Stanzah. "Raibnya Para Aktivis". *Panji Masyarakat*, No. 50 Th. I, 6 April 1998. H. 15

Aksi (Redaksi). "Karena Bisikan Hati Nurani". *Aksi*, Vol. 3 No. III, 29 Desember 1998-4 Januari 1999

Aksi (Redaksi). "Prabowo Tuntut Habibie". *Aksi*, Vol. 3 No. III, 29 Desember 1998-4 Januari 1999

Albertina S. Calemens, Asvin Ellyana. "Rekomendasi TGPF Minta Tanggung Jawab". *Media Indonesia*, 8 November 1998

Ama, Myr, Fik, Jl, Ano. "Prabowo Akui Salah Analisis Perintah". *Kompas*, 13 Agustus 1998

Ant. "Karier the Rising Star Sudah Berakhir". *Harian Ekonomi Neraca*, 25 Agustus 1998

Ant. "Munir Berani Melawan Praktek Kekerasan Negara: Dinobatkan Tokoh 1998 versi 'Ummat'". *Bernas*, 29 Desember 1998

Anton Bachtiar. "Raja Minyak Disangka Makar". *Tiras*, No. 9 Th. 4, 30 Maret 1998. H. 18—19

Ardiansyah H., Kahfi Siregar, Mas'ad T., Syahdan Nurdin, Ridlo Aryanto. "Dari Diskusi ke Sangkaan Makar Arifin Panigoro". *Tiras*, No. 9 Th. 4, 30 Maret 1998. H. 12—14

Ardiansyah Harjunantio. "Pertemuan Itu Nggak Neka-Neka". *Tiras*,

No. 9 Th. 4, 30 Maret 1998. H. 17

Asian Week. "Newsmakers 1998". *Asian Week*, December 25, 1998-January 1, 1999

Ate, Budi Nugroho, Rachmat H. C., Sri Indrayati. "Yang Pasrah, Berharap, dan yang Gembira". *D&R*, No. 34/XXIX, 11 April 1998. H. 19—20

Ate, Budi Nugroho, Tiarma Siboro. "Orang-Orang Hilang". *D&R*, No. 34/XXIX, 11 April 1998. H. 17

Baharuddin Lopa. "Culik dan Demokrasi". *Forum Keadilan*, No. 10 Th. VII, 24 Agustus 1998. H. 37

Bambang Bujono, Rachmat H. Cahyono, Tiarna Siboro. "Cara Prabowo Menerjemahkan Perintah". *D&R*, 15 Agustus 1998. H. 16—17

Bambang Sujatmoko dan A. Latief Siregar. "Batu Sandungan Baret Merah". *Gatra*, No. 36 Th. 4, 25 Juli 1998. H. 29—30

Bambang Widjojanto SH. Ketua YLBHI. "Persidangan yang Kaburkan Kenyataan". *Gugat*, No. 5 Th. I, 28 Desember 1998-3 Januari 1999

Bangkit (Redaksi). "Prabowo Punya Link dengan Mossad". *Bangkit*, No. 014 Th. I, 28 Desember 1998-3 Januari 1999.

Bangun. "Jalan Panjang Menuju Kursi Terdakwa". *Gugat*, No. 5 Th. I, 28 Desember 1998-3 Januari 1999

Bb, Oki. "Penculikan Dilakukan atas Panggilan Nurani". *Kompas*, 24 Desember 1998

Bb, Tra. "Prabowo, Muchdi, dan Hartono Harus Didengar Keterangannya". *Kompas*, 8 Januari 1999

Bb. "Nezar Patria: Saya Disetrum dan Dipukuli". *Kompas*, 9 Januari 1999

Berita Buana (Redaksi). "Empat Panser Jaga Rumah Prabowo". *Berita Buana*, 25 Agustus 1998

Berita Yudha (Redaksi). "Berakhir, Masa Dinas Prabowo Subianto. *Berita Yudha*, 25 Agustus 1998

Berita Yudha (Redaksi). "Letjen Prabowo Dinonaktifkan". *Berita Yudha*, 4 Agustus 1998

Berita Yudha (Redaksi). "Perintah Penculikan Bukan dari Pangab". *Berita Yudha*, 11 Agustus 1998

Berita Yudha (Redaksi). "Prabowo Bisa Diajukan ke Mahmil". *Berita Yudha*, 5 Agustus 1998

Bernas (Redaksi). "Andi Arief Sedia Bersumpah Beberkan Penculikan". *Bernas*, 8 Mei 1998

Bernas (Redaksi). "Bambang: Adili Prabowo". *Bernas*, 22 Juli 1998

Bernas (Redaksi). "Feisal Tanjung Bantah Terlibat Penculikan". *Bernas*, 25 Juli 1998

Bernas (Redaksi). "Kulit Ngilu Selama Seminggu". *Bernas*, 26 Juli 1998. H. 1, 8

Bernas (Redaksi). "Lima Aktivis yang Diculik Mungkin Telah Meninggal". *Bernas*, 20 Juli 1998

Bernas (Redaksi). "Pangab: Itu di Luar Batas!". *Bernas*, 17 Juli 1998

Bernas (Redaksi). "Penculik Tanyakan Koalisi Amien-Mega-Gus Dur". *Bernas*, 27 Juni 1998

Bernas (Redaksi). "Perwira di Atas Prabowo Bisa Diperiksa". *Bernas*, 12 Agustus 1998

Bernas (Redaksi). "Pius akan Gugat Prabowo". Bernas, 30 Agustus 1998

Bernas (Redaksi). "Pius Kembali, Priyono Hilang". *Bernas*, 17 Juli 1998

Bernas (Redaksi). "Prabowo Diperiksa Pekan Depan". *Bernas*, 21 Juli 1998

Bernas (Redaksi). "Prabowo Mengaku Salah". *Bernas*, 13 Agustus 1998

Bernas (Redaksi). "Presiden: ABRI Tak Boleh Kecewakan Rakyat". *Bernas*, 26 Juli 1998

Bernas (Redaksi). "Presiden: ABRI Tak Boleh Kecewakan Rakyat". *Bernas*, 26 Juli 1998

Bernas (Redaksi). "Puspom ABRI Periksa Dan Grup IV Kopassus". *Bernas*, 23 Juli 1998

Bernas. "Empat Jenderal Dampingi Desmond". *Bernas*, 26 Juni 1998

Bersihar Lubis, Rita Triana Budiarti, A. Latief Siregar. "Menunggu Sean Connery Menyibak Misteri". *Gatra*, 25 Juli 1998

Bsa, Hep, Tw. "Amien Rais: Prabowo Harus Dimahmilkan". *Republika*, 25 Agustus 1998

Buana Minggu (Redaksi). "Berstatus menantu presiden tak menjadi beban Prabowo berkiprah". *Buana Minggu*, 1 April 1986

Buana Minggu (Redaksi). "Prabowo setuju Habibie Presiden, tetapi Pangab-nya dia". *Buana Minggu*, 2 Agustus 1998

Buana Minggu (Redaksi). "Wiranto menolak izin unit pasukan elite turun di Ibukota". *Buana Minggu*, 1 April 1986. H. 1, 8

Buana Minggu (Redaksi). "Wiranto menolak izin unit pasukan elite turun di Ibukota". *Buana Minggu*, 1 April 1986. H. 1, 8

Budi Nugroho, Seno Joko Suyono, L.N. Idayanie, Tomi Lebang, Dwi Arjanto. "Cerita Wewegombel dan Orang-Orang Hilang". *D&R*, 25 April 1998. H. 16, 18

Budi Setyarso, Wahyu Dhyatmika, HYK. "Siasat Wiranto di Balik Mundurnya Soeharto". *Tempo*, Edisi 9-15 Oktober 2006. H. 30

Budiyono, Darmawan Sepriyossa. "Babak Akhir Radisson". *Panji*

Masyarakat, No. 50 Th. I, 6 April 1998. H. 19

Budiyono. "Tak Mungkin Inisiatif Prabowo Pribadi". *Panji Masyarakat*, No. 15 Th. II, 29 Juli 1998. H. 26

Bw. "Komnas HAM: Harus Dibatalkan, Peradilan 11 Anggota Kopassus". *Kompas*, 7 Januari 1999

D&R (Redaksi). "Bukan Aturan untuk Kerbau". *D&R*, 15 Agustus 1998

D&R (Redaksi). "Kasus Letnan Jenderal Prabowo". *D&R*, No. 41/XXIX, 30 Mei 1998. H. 3—4

D&R (Redaksi). "Prabowo Digeser". *D&R*, No. 41/XXIX, 30 Mei 1998

D&R (Redaksi). "Siapa di Balik Penculikan dan Penembakan Trisakti". *D&R*, No. 41/XXIX, 30 Mei 1998.

Dahlan, Junianto Setiyadi. "Ide Gila Tim Mawar". *Bangkit*, No. 014, Th. I, 28 Desember 1998-3 Januari 1999. H. 10—11

Dahlan, Junianto Setyadi. "Aksi di Siang Bolong". *Bangkit*, No. 14, Th. I, 28 Desember 1998. H. 11

Dahlan, Junianto Setyadi. "Buah Karya Soeharto". *Bangkit*, No. 14, Th. I, 28 Desember 1998. H. 11

Dahlan, Junianto Setyadi. "Ide Gila Tim Mawar". *Bangkit*, No. 14 Th. I, 28 Desember 1998. H. 10, 11

Darmawan Sepriyossa. "Munir: Pangab Keliru". *Panji Masyarakat*, No. 15, Th. II, 29 Juli 1998. H. 62

Darmawan Sepriyossa. "Sudah Saling Bantu". *Panji Masyarakat*, No. 17 Th. II, 12 Agustus 1998

Deden Setiawan, Rika Condessy, Sarbinnor Karim. "Menghitung Peluang di Kamis Keramat". *Paron*, 31 Mei 1997

DeTAK (Redaksi). "Ayah Prabowo Buka Kartu". *DeTAK*, No. 09 Th. I, 8-14 September

DeTak (Redaksi). "Pasang Surut Biduk Pak Cum". *DeTak*, No. 09 Th. I, 8-14 September 1998. H. 8

Dikki. "Mereka yang (Mungkin) Tewas Itu". *Adil*, No. 43 Th. 66, 4 Agustus 1998. H. 6—7

Dob, Son, Wip, Yos, Nil. "Tujuh Anggota Kopassus Ditahan". *Bernas*, 15 Juli 1998

Dudi Rahman. "Dua Kubu yang Beradu". *Panji Masyarakat*, No. 19 Th. III, 25 Agustus 1999. H. 30—33

E-8, A-14. "Kontras Terima S. Tasrif Award". *Suara Pembaruan*, 9 Agustus 1998

Edi, Wdh, Was. "Pius Mendatangi Puspom ABRI". *Media Indonesia*, 11 September 1998

Edi, Wdh. "Karier Militer Prabowo Tamat". *Media Indonesia*, 25 Agustus 1998

Edi. "Prabowo Direkomendasikan ke Mahmil". *Kedaulatan Rakyat*, 15 Agustus 1998

Fadjar, Syahdan. "Gaya Gus Dur Membidik Prabowo". *ADIL*, No. 33 Th. 68, 12-18 Mei 2000. H. 4—5

Farid Gaban, Ali Anwar, Maifil Eka Putra. "Kenapa Prabowo Diganti?". *Ummat*, No. 45 Th. III, 1 Juni 1998. H. 51

Farid Gaban. "Drama 1998: Turunnya Soeharto, Runtuhnya Orde Baru?". *Tempo*, Edisi 29 Desember 1998-4 Januari 1999. H. 38

Firmus Madhu Dhengi. "Antara Kelinci dan Libra". *Sinar Nusantara*, Edisi 36 Th. V, 28 Juli 1998. H. 40

Forum Keadilan (Redaksi). "Awas Penculikan". *Forum Keadilan*, No. 3 Th. VII, 18 Mei 1998.

Forum Keadilan (Redaksi). "Debat Romli Atmasasmita dan Munir: Peradilan Khusus HAM". *Forum Keadilan*, No. 05, 9 Mei 1998

Forum Keadilan (Redaksi). "Kronologi Raibnya Korban dan Masa Jabatan Petinggi ABRI". *Forum Keadilan*, No. 9 Th. VII, 10 Agustus 1998. H. 90

Forum Keadilan (Redaksi). "Membentuk Tim, Mencari Penculik". *Forum Keadilan*, No. 3 Th. VII, 18 Mei 1998. H. 10—11

Forum Keadilan (Redaksi). "Perolehan Kursi Bukan Target Utama". *Forum Keadilan*, No. 26 Th, VII, 5 April 1999. H. 74—77

Forum Keadilan. "Sketsa Ruang Penyekapan Pius Lustrilanang". *Forum Keadilan*, No. 3 Th. VII, 18 Mei 1998. H. 13

Ful, Sim. "DKP Rapat Tertutup soal Prabowo Cs". *Kedaulatan Rakyat*, 16 Agustus 1998

Gatra (Redaksi). "Memburu Karier di Yordania". *Gatra*, No. 7 Th. V, 2 Januari 1999

Gatra (Redaksi). "Mengungkap Penembak Trisakti Berdarah". *Gatra*, No. 30 Th. IV, 13 Juni 1998

Genot Widjoseno, Dewi Sri Utami, A. Latief Siregar. "Mencurigai Panggilan Nurani". *Gatra*, No. 7 Th. V, 2 Januari 1999

Gg, Uu, Myr. "Prabowo Lakukan Tindak Pidana". *Kompas*, 26 Agustus 1998

Gs. "Menkeh: Peradilan militer berwenang adili Prabowo". *Pos Kota*, 29 Agustus 1998

Gugat (Redaksi). "Aduh, Anak Buah Prabowo Dikorbankan". *Gugat*, No. 5 Th. I, 28 Desember 1998-3 Januari 1999

Gugat (Redaksi). "Menunggu Prabowo Diadili Rakyat". *Gugat*, No. 5 Th. I, 28 Desember 1998-3 Januari 1999

Gugat (Redaksi). "Penjara Menanti Prabowo dan Beddu Amang?". *Gugat*, No. 5 Th. I, 28 Desember 1998-3 Januari 1999

Hamid Ahmad dan Iqbal Setyarso. "Prabowo dan Ormas Islam". *Panji Masyarakat*, No. 7 Th. II, 1 Juni 1998. H. 17

Hanibal W. Y. Wijayanta, Arief Rusli, Tim FORUM. "ABRI di Persimpangan Jalan". *Forum Keadilan*, No. 26 Th. VII, 5 April 1999. H. 79—90

Hanibal W. Y. Wijayanta, Tony Hasyim, Sen Tjiauw. "DKP: Demi Kehormatan Prabowo". *Forum Keadilan*, No. 10 Th. VII, 24 Agustus 1998. H. 10—13

Harian Terbit (Redaksi). "Kebijakan lembaga atau oknum?". *Harian Terbit*, 18 Agustus 1998. H. 1, 7

Harian Terbit (Redaksi). "Melumpuhkan tokoh tertentu". *Harian Terbit*, 21 Agustus 1998. H. 1, 7

Harian Terbit (Redaksi). "Menghambat kelompok radikal". *Harian Terbit*, 22 Agustus 1998. H. 1, 2

Harian Terbit (Redaksi). "Menyulap pembangkang jadi agen". *Harian Terbit*, 20 Agustus 1998. H. 1, 11

Harian Terbit (Redaksi). "Teknik penyiksaan gaya Hitler". *Harian Terbit*, 24 Agustus 1998. H. 1, 7

Harian Terbit (Redaksi). "Untuk melemahkan lawan politik". *Harian Terbit*, 19 Agustus 1998. H. 1, 11

Hendardi. "Hilang". *D&R*, No. 34/XXIX, 11 April 1998. H. 6—7

Hendrico, Haryo Prasetyo. "Agar Intel Tak Kebablasan". *Media Indonesia*, 23 Agustus 1998

Hermawan Sulistyo. "Wawancara Imajiner dengan Prabowo Subianto". *Bangkit*, No. 014 Th. I, 28 Desember 1998-3 Januari 1999.

Ip, Ta. "Prabowo CS hari ini diperiksa lagi". *Pos Kota*, 6 Agustus 1998. H. 1, 5

Ip. "ABRI berwenang mahmiltikan Prabowo". Pos Kota, 28 Agustus 1998

Ip. "Herman bukan aktivis yang dicari". *Pos Kota*, No. 11461, 5 Agustus 1998. H. 1,5

Iqbal Setyarso. "Dia Memang Dekat". *Panji Masyarakat*, No. 7 Th. II, 1 Juni 1998. H. 19

Isa, Edi. "Presiden Minta Maaf Atas Pelanggaran HAM Berat". *Kedaulatan Rakyat*, 16 Agustus 1998

Ivan Haris. "Apa Mungkin Seorang Jenderal Bisa Melakukan Perbuatan Itu?". *Forum Keadilan*, No. 3 Th. VII, 18 Mei 1998. H. 14

Iwan Qodar Himawan, A. Latief Siregar, Kastoyo Ramelan. "Kisah Gilang dan Djati". *Gatra*, 13 Juni 1998. H. 34

Iwan Qodar Himawan, A. Latief Siregar, Kastoyo Ramelan. "Kisah Gilang dan Djati". *Gatra*, 13 Juni 1998. H. 34

Iwan Qodar Himawan, Sapto Waluyo, Hidayat Gunadi, Taufik Ridho. "Jejak Prabowo pada Setangkai Mawar". *Gatra*, No. 7 Th. V, 2 Januari 1999. H. 25—27

J.E. Sahetapy. "Hukum Rimba". *Forum Keadilan*, No. 3 Th. VII, 18 Mei 1998

Jakarta Post (Redaksi). "Prabowo discharged from ABRI". *Jakarta Post*, 25 Agustus 1998

Jawa Pos (Redaksi). "Pangab: Kejelasannya Tunggu Hasil Persidangan DKP". *Jawa Pos*, 12 Agustus 1998

Jawa Pos (Redaksi). "Perintah BKO dari Prabowo Sendiri". *Jawa Pos*, 12 Agustus 1998

Jawa Pos (Redaksi). "Prabowo diperiksa tanpa pengamanan khusus". *Jawa Pos*, 10 Agustus 1998

Jawa Pos (Redaksi). "Prabowo Salah Terjemahkan Perintah". *Jawa Pos*, 11 Agustus 1998

Jawa Pos (Redaksi). "Prabowo Sudah Mengaku Bersalah". *Jawa Pos*, 13 Agustus 1998

Jawa Pos (Redaksi). "PRD Boleh Jadi Partai, asal...". *Jawa Pos*, 12 Agustus 1998

Jawa Pos (Redaksi). "PRD Menangkan Gugatan Atas Mendagri". Jawa Pos, 11 Agustus 1998

Jawa Pos (Redaksi). "Sidang DKP Hanya Periksa Dokumen". *Jawa Pos*, 12 Agustus 1998

Jj, Csm, Tris, Ff. "Pius Lustrilanang: Prabowo Harus Diadili". *Bernas*, 24 Desember 1998. H. 1

Jl, Ama, UU. "Letjen TNI Prabowo, Pangkostrad Baru". *Kompas*, 24 Maret 1998

Jpe. "Tokoh 1998". *Kompas*, 29 Desember 1998

Kedaulatan Rakyat (Redaksi). "40 Oknum ABRI Diperiksa Intensif". *Kedaulatan Rakyat*, 3 Juli 1998

Kedaulatan Rakyat (Redaksi). "Aktivis Disekap di Kompleks Kopassus". *Kedaulatan Rakyat*, 23 Juli 1998

Kedaulatan Rakyat (Redaksi). "Andi Arief Dibebaskan". *Kedaulatan Rakyat*, 15 Juli 1998

Kedaulatan Rakyat (Redaksi). "Andi Takkan Beri Keterangan di Puspom". *Kedaulatan Rakyat*, 22 Juli 1998

Kedaulatan Rakyat (Redaksi). "Letjen Prabowo Diperiksa 7 Jam". *Kedaulatan Rakyat*, 11 Agustus 1998

Kedaulatan Rakyat (Redaksi). "Lima Aktivis Dikhawatirkan Tewas". *Kedaulatan Rakyat*, 20 Juli 1998

Kedaulatan Rakyat (Redaksi). "Oknum Kopassus Menakutkan". *Kedaulatan Rakyat*, 17 Juli 1998

Kedaulatan Rakyat (Redaksi). "Penculikan Aktivis Libatkan CIA". *Kedaulatan Rakyat*, 28 Agustus 1998

Kedaulatan Rakyat (Redaksi). "Perwira yang Diajukan ke DKM Bisa Diseret ke Mahkamah Militer". *Kedaulatan Rakyat*, 22

Juli 1998

Kedaulatan Rakyat (Redaksi). "Pius akan Gugat Prabowo". *Kedaulatan Rakyat*, 28 Agustus 1998

Kedaulatan Rakyat (Redaksi). "Prabowo Subianto Mengaku Bersalah". *Kedaulatan Rakyat*, 13 Agustus 1998

Kedaulatan Rakyat (Redaksi). "Segera Mahmilubkan Prabowo". *Kedaulatan Rakyat*, 14 Agustus 1998

Kedaulatan Rakyat (Redaksi). "Setelah Letjen TNI Prabowo, Perwira Lebih Tinggi Diperiksa". *Kedaulatan Rakyat*, 12 Agustus 1998

Kedaulatan Rakyat (Redaksi). "Setelah Prabowo Subianto Mengaku Bersalah". *Kedaulatan Rakyat*, 14 Agustus 1998

Kompas (Redaksi). "DKP Masih Akan Periksa Prabowo, Muchdi, dan Chairawan". *Kompas*, 14 Agustus 1998

Kompas (Redaksi). "Instruksi Habibie Selidiki Keterlibatan Prabowo". *Kompas*, 22 Desember 1998

Kompas (Redaksi). "Laporan Akhir TGPF Selidiki Pertemuan di Kostrad 14 Mei". *Kompas*, 4 November 1998.

Kompas (Redaksi). "Prabowo Bantah Dalangi Penculikan". *Kompas*, 23 Desember 1998.

Kompas (Redaksi). "Prabowo Diberhentikan, Muchdi dan Chairawan Bebas Tugas". *Kompas*, 25 Agustus 1998

Kompas (Redaksi). "Prabowo, Warga Jordania". *Kompas*, 22 Desember 1998

Kompas (Redaksi). "PRD Bisa Diakui sebagai Partai Baru". Kompas, 12 Agustus 1998

Kompas (Redaksi). "Puspom Nyatakan Siap Periksa Sutiyoso". *Kompas*, 12 Agustus 1998

Kompas (Redaksi). "Wiranto Tolak Ungkap yang Perintah Prabowo". *Kompas*, 12 Agustus 1998

Kumala Dewi. "Pentolan PRD Membelot Sidang". *Paron*, 26 April 1997

Las. "Gus Dur Ungkap Pertemuan dengan Prabowo 15 Mei". *Media Indonesia*, 6 November 1998

Leila S. Chudori, Hani Pudjiarti. "Munir, Seorang 'Ayah' bagi Si Anak Hilang". *Tempo*, 21 Desember 1998. H. 30—32

M-14. "Reza Menduga Syafrie Terlibat". *Kedaulatan Rakyat*, 26 Juli 1998. H. 7, 8

M. Ridwan Pangkapi, Rifwan Hendri, Darmawan Sepriyossa. "Golden Boy di Ujung Tanduk". *Panji Masyarakat*, No. 17 Th. II, 12 Agustus 1998. H. 16—18

M. Tohir. "Mungkinkah Prabowo 'Gigit' Pak Harto". *Liberty*, No. 1991, 11-20 Agustus 1998. H. 6—9

Ma. "Operasi Khusus, Dana Khusus". Detak, No. 8 Th. I, 1-7

September 1998. H. 4

Maman Gantra, Sen Tjiauw. "Munir: Mantan Pedagang Melawan Kekerasan". *Forum Keadilan*, No. 10, Tahun VII, 24 Agustus 1998. H. 32—36

Maman Gantra. "Ancaman bagi yang kafir dan yang kufur". *Forum Keadilan*, No. 18 Th. VII, 28 Desember 1998. H. 32—36

Media Indonesia (Redaksi). "Ini Suatu Coreng Bagi Kopassus". *Media Indonesia*, 9 Agustus 1998

Media Indonesia (Redaksi). "Nasib Prabowo Dibahas Pekan Depan". *Media Indonesia*, 14 Agustus 1998

Media Indonesia (Redaksi). "Pengusutan DKP Bakal Melebar". *Media Indonesia*, 12 Agustus 1998

Media Indonesia (Redaksi). "Prabowo Mengaku Salah". *Media Indonesia*, 13 Agustus 1998

Media Indonesia (Redaksi). "Prabowo Mulai Diperiksa". *Media Indonesia*, 5 Agustus 1998

Media Indonesia (Redaksi). "Prabowo tidak Dicekal karena Ia tidak akan Lari". *Media Indonesia*, 5 September 1998

Media Indonesia (Redaksi). "Puspom ABRI Teliti Tiga Mayat Tak Dikenal". *Media Indonesia*, 6 Agustus 1998

Media Indonesia (Redaksi). "Unjuk Rasa Keluarga Korban Penculikan". *Media Indonesia*, 17 September 1998

Merdeka (Redaksi). "Prabowo Agar Hadap Puspom ABRI untuk Diperiksa". Merdeka, 26 Agustus 1998

Merdeka (Redaksi). "Prabowo Menculik Sembilan Aktivis". *Merdeka*, 25 Agustus 1998

Mik, Ado, Bh, Gie, Adb. "Prabowo Cs Akan Diperiksa Puspom Lagi". *Jawa Pos*, 26 Agustus 1998

Mik. "Lagi, Keluarga Orang Hilang Mengadu ke Gus Dur". *Jawa Pos*, 14 Agustus 1998

Muchlis Ainurrafik, Rika Condessy, Sarbinnor Karim, Rommy Fibri, Syaifuddin Alamsyah. "Bumerang Mega Bintang". *Paron*, 24 Mei 1997

Munawar Chalil, Hannibal W.Y.W., Ivan Haris. "Mengungkap Kerusuhan Mei dengan Fakta Kontroversial". *Forum Keadilan*, No. 17 Th. VII, 30 November 1998. H. 82—85

Munawar Chalil. "Pius Lustrilanang: Nasionalisme Saya Tidak Sempit". *Forum Keadilan*, No. 3 Th. VII, 18 Mei 1998. H. 12, 13

Nan. "Prabowo Mengaku Bersalah". *Berita Yudha*, 13 Agustus 1998

Nasihin Masha. "Saya Menyusun Kekuatan Apa?". *Tekad*. No. 17 Th. 11, 28 Februari-5 Maret 2000. H. 20—21

Oki, Bb. "Soal Penyiksaan, Pengakuan Korban Tak Cukup". *Kompas*, 2 Januari 1999

Oki, Tra. "Pembela HAM Terancam Teror". *Kompas*, 11 Desember 1998. H. 8

Oki. "Pius: Saya Ingin Semua Ini Diakhiri". *Kompas*, 26 Desember 1998

Oki. "Prabowo Inginkan Semua Kasus Terkait Dirinya Disidik Ulang". *Kompas*, 20 Oktober 1999

Ondy A. Saputra, Tiarma Siboro, Pieter S. "Hukum Harus Ditegakkan, Bukan Dimain-Mainkan". *D&R*, 31 Oktober 1998

Panji Masyarakat (Redaksi). "Jaringan Sofjan Wanandi Digugat". *Panji Masyarakat*. No. 42 Th. 1, 9 Februari 1998.

Panji Masyarakat (Redaksi). "Kodam Menganggap Selesai". *Panji Masyarakat*. No. 42 Th. 1, 9 Februari 1998. H. 22—23

Panji Masyarakat (Redaksi). "Muchdi Danjen Kopassus". *Panji*, No. 50 Th. I, 6 April 1998. H. 26

Panji Masyarakat (Redaksi). "Saat-Saat Genting Jenderal Prabowo". *Panji Masyarakat*, No. 07 Th. II, 1 Juni 1998. H. 12—15

Panji Masyarakat (Redaksi). "Soeharto Berkenan Menculik". *Panji Masyarakat*, No. 15 Th. II, 29 Juli 1998

Panji Masyarakat (Redaksi). "Sofian Effendi cuma alat kelompok itu". *Panji Masyarakat*, No. 49 Th. I, 30 Maret 1998

Panji (Redaksi). "Saat-Saat Genting Jenderal Prabowo". *Panji Masyarakat*, No. 7 Th. II, 1 Juni 1998. H. 13—19

Paron (Redaksi). "Buya Ismail: Oposan Tunggangi PPP". *Paron*, 24 Mei 1997

Paron (Redaksi). "Saya Tetap PRD". *Paron*, 3 Mei 1998

Paron (Redaksi). "Secara Fisik Saya Rugi". Paron, 10 Mei 1997

Paron (Redaksi). "Tiada Maaf Kalau Gagal". *Paron*, 26 April 1997

Paron (Redaksi). "Wawancara Andi Arief dan Kastorius Sinaga". *Paron*, 31 Mei 1997

Pelita (Redaksi). "Letjen TNI Prabowo Diberhentikan". *Pelita*, 25 Agustus 1998

Pep, Oki. "Munir, 'Tokoh 1998' Versi 'Ummat'". *Kompas*, 12 Desember 1998

Pikiran Rakyat (Redaksi). "Pangab Tidak Transparan". *Pikiran Rakyat*, 26 Agustus 1998

Pikiran Rakyat (Redaksi). "Pangab: Prabowo Diberhentikan". *Pikiran Rakyat*, 23 Agustus 1998

Pikiran Rakyat (Redaksi). "Perwira Lebih Tinggi Diperiksa". *Pikiran Rakyat*, 12 Agustus 1998

Pikiran Rakyat (Redaksi). "Prabowo Diperiksa Tujuh Jam". *Pikiran Rakyat*, 11 Agustus 1998

Pikiran Rakyat (Redaksi). "Prabowo Mengaku Salah". *Pikiran Rakyat*, 13 Agustus 1998

Pos Kota (Redaksi). "Atasan Prabowo Bisa Diperiksa". *Pos Kota*, 12 Agustus 1998

Pos Kota (Redaksi). "Karier Letjen Prabowo Selesai". *Pos Kota*, 25 Agustus 1998

Pos Kota (Redaksi). "Kerja DKP berakhir, usulkan nasib Prabowo Cs ke Pangab". *Pos Kota*, 19 Agustus 1998

Pos Kota (Redaksi). "Kontras Desak Puspom Lakukan Investigasi". *Pos Kota*, 1 Agustus 1998

Pos Kota (Redaksi). "Kopassus akan dibenahi". *Pos Kota*, 29 Agustus 1998

Pos Kota (Redaksi). "Letjen TNI Prabowo akan diperiksa Senin". *Pos Kota*, 8 Agustus 1998

Pos Kota (Redaksi). "Loebby Loqman: Prabowo bisa diajukan ke pengadilan umum". *Pos Kota*, 26 Agustus 1998

Pos Kota (Redaksi). "Mayjen Muchdi Diperiksa 5 Jam". *Pos Kota*, 7 Agustus 1998

Pos Kota (Redaksi). "Prabowo Akui Diperintah Atasan". *Pos Kota*, 11 Agustus 1998. H. 1, 7

Pos Kota (Redaksi). "Prabowo Mengaku Salah". *Pos Kota*, 13 Agustus 1998

Pracoyo Wiryoutomo, Agung Y. Achmad, Budiyono, Darmawan Sepriyossa, Akmal Stanzah. "Pasukan Sipil Saat Rusuh". Panji Masyarakat, No. 17 Th. II, 12 Agustus 1998. H. 20—21

Pracoyo Wiryoutomo. "Soeharto Paling Berkepentingan". *Panji Masyarakat*, No. 15 Th. II, 29 Juli 1998. H. 28.

Priyono B. Sumbogo, Genot Widjoseno, Ahmad Husein. "Isunya, Saya Sudah Ditangkap". *Gatra*. No. 11 Th. IV, 31 Januari 1998. H. 31—33

Priyono B. Sumbogo, Genot Widjoseno, Hidayat Tantan. "Jaringan di Balik Ledakan Bom". *Gatra*. No. 11 Th. IV, 31 Januari 1998. H. 25—27

Priyono B. Sumbogo, Hariyadi. "Serangan Balik Kembali pada Habibie". *GAMMA*, No. 1 Th. I, 20 Februari 1999. H. 24—27

Priyono B. Sumbogo. "Bom di Tengah Krisis". *Gatra*. No. 11 Th. IV, 31 Januari 1998. H. 23

Purwani Diyah Prabandari. "Wawancara Munir, SH: Yang Bertanggung Jawab Pemerintah cq. ABRI; Tersangka Utama Polisi!". *Tempo Interaktif*, Edisi 09/III, 2 Mei 1998. H. 41—43

R-9, Sim, Ful. "Korban Penculikan Ada yang Meninggal". *Kedaulatan Rakyat*, 21 Juli 1998. H. 1

R.F.M. "Prabowo, the Rising Star yang Pudar". *D&R*, No. 41/XXIX, 30 Mei 1998. H. 57

Rachmat H. Cahyono. "Jangan Dilihat Kopassusnya". *D&R*, 15 Agustus. H. 18—20

Rakaryan Sukarjaputra. "Lebih Jauh dengan Munir". *Kompas*, 3 Januari 1999. H. 2

Rangga, Evie, Dikki. "Ada Penculik Lain?". *ADIL*, No. 48 Th. 66, 2 September 1998

Republika (Redaksi). "DKP: Prabowo Tak Diperintah Menculik". *Republika*, 11 Agustus 1998

Republika (Redaksi). "Letjen Prabowo Pensiun". *Republika*, 25 Agustus 1998

Republika (Redaksi). "Pangab: DKP Bisa Memeriksa Atasan Prabowo". *Republika*, 12 Agustus 1998

Rid, Awi. "Presiden Bicara Soal HAM". *Media Indonesia*, 9 September 1998

Ridwan Pangkapi, Johansyah, Yuyuk Andriati, Iskak, Agung Y. Achmad, Deni R. Secaatmaja, Kiki Mohammad Hikmat, Dudi Rahman, Rizagana. "Medan Tempurnya di Ladang Bisnis". *Panji Masyarakat*, No. 25 Th. II, 7 Oktober 1998. H. 16—19

Ridwan Pangkapi, Johansyah, Yuyuk Andriati, Iskak, Agung Y. Achmad, Deni R. Secaatmaja, Kiki Mohammad Hikmat, Dudi Rahman, Rizagana. "Medan Tempurnya di Ladang Bisnis". *Panji Masyarakat*, No. 25 Th. II, 7 Oktober 1998. H. 16—19

Rifwan Hendri. "Ini Berat Bagi Wiranto". *Panji Masyarakat*, No. 15 Th. II, 29 Juli 1998. H. 27

Rifwan Hendri. "Pius Lustrilanang: Ini Berat bagi Wiranto". *Panji Masyarakat*, No. 15 Th. II, 29 Juli 1998

Rifwan Hendri. "Saya Kecewa Kopassus". *Panji Masyarakat*, No. 17 Th. II, 12 Agustus 1998. H. 22

Rika Condessy, Sarbinnor Karim. "Wawancara Syarwan Hamid dan Ismail Hasan Metareum". *Paron*, 31 Mei 1997

Riza Sofyat. "Persidangan Sembilan Belas Tumbal". *Forum Keadilan*. No. 6 Th. VII, 29 Juni 1998

Rizagana, Kiki Mohammad Hikmat. "Geliat Kobame pun Mandek". *Panji Masyarakat*, No. 15 Th. II, 29 Juli 1998. H. 30

Ryt, Jar. "Pengakuan Desmond J. Mahesa: Konsekuensinya Saya akan Dihabisi". *Bali Post*, 13 Mei 1998. H. 1, 11

SA. "Kasus Penculikan Disidangkan Awal Oktober". *Media Indonesia*, 25 September 1998

SA. "Temuan TGPF Diumumkan Hari Ini". *Media Indonesia*, 3 November 1998

Saeno M. Abdi. "Rangkaian Penjerat Prabowo". *AKSI*, Vol. 3, No. 111, 29 Desember 1998-4Januari 1999

Saf, Ado, Adb. "Membunuh Satu Matahari Bernama Prabowo". *Jawa Pos*, 26 Agustus 1998. H. 3

Sapto Waluyo. "Ke Yordania, Itu Biasa". *Gatra*, No. 7 Th. V, 2 Januari 1999

Sen Tjiauw, Fenty Effendy, Dedi Hermawan, Anton Bachtiar Rifa'i. "Mari Mengintai Pelanggar HAM". *Forum Keadilan* No. 30, 31 Januari 1999, H. 38—39

Shodiqin, Ahmady. "Selamatkan Mereka, Pak Wiranto". *Adil*, No. 43 Th. 66, 29 Juli-4 Agustus 1998. H. 4—5

Sinar (Redaksi). "Yang Salah Soeharto". *Sinar Nusantara*, 28 Juli 1998

Sinar Nusantara (Redaksi). "Yang Salah Soeharto". Sinar Nusantara, 28 Juli 1998. H. 43

Sri Raharti, Hanibal. "Protes Jenderal di Pengasingan". *Forum Keadilan*, No. 28 Th. VIII, 17 Oktober 1999. H. 84

Suara Merdeka (Redaksi). "Dan Puspom ABRI: Para Aktivis Disekap di Markas Kopassus". *Suara Merdeka*, 23 Juli 1998

Suara Merdeka (Redaksi). "Munir: DKP Cacat Hukum". *Suara Merdeka*, 6 Agustus 1998

Suara Merdeka (Redaksi). "Pangab: Ada Perintah Pimpinan Kopassus". *Suara Merdeka*, 17 Juli 1998

Suara Merdeka (Redaksi). "Pius akan Gugat Prabowo". Suara Merdeka, 30 Agustus 1998

Suara Merdeka (Redaksi). "Pius Menduga Lima Aktivis Sudah Tewas". *Suara Merdeka*, 20 Juli 1998

Suara Merdeka. "Prabowo Mengaku Diperintah Atasan". *Suara Merdeka*, 11 Agustus 1998

Suara Pembaruan (Redaksi). "DKP Akan Rekomendasikan Prabowo, Muchdi, dan Chairawan ke Mahmil". *Suara Pembaruan*, 15 Agustus 1998

Suara Pembaruan (Redaksi). "DKP Mulai Periksa Prabowo, Muchdi, dan Chairawan". *Suara Pembaruan*, 5 Agustus 1998

Suara Pembaruan (Redaksi). "Kemal Idris: Ajukan Prabowo ke Mahkamah Militer". *Suara Pembaruan*, 25 Agustus 1998

Suara Pembaruan (Redaksi). "Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Pelaksanaan Tugas". *Suara Pembaruan*, 8 Agustus 1998

Suara Pembaruan (Redaksi). "Perwira Tinggi Bisa Diperiksa". *Suara Pembaruan*, 11 Agustus 1998

Suara Pembaruan (Redaksi). "Pius akan Gugat Prabowo". *Suara Pembaruan*, 30 Agustus 1998

Suara Pembaruan (Redaksi). "Prabowo Kemungkinan Diperiksa Senin". *Suara Pembaruan*, 7 Agustus 1998

Suara Pembaruan (Redaksi). "Prabowo Mulai Diperiksa". *Suara Pembaruan*, 10 Agustus 1998

Suara Pembaruan (Redaksi). "Prabowo, Muchdi, dan Chairawan Langgar Kode Kehormatan Perwira". *Suara Pembaruan*, 3 Agustus 1998

Suara Pembaruan (Redaksi). "Puspom ABRI akan Periksa Prabowo". *Suara Pembaruan*, 26 Agustus 1998

Suara Pembaruan. "Pangab: Tunggu Hasil DKP". *Suara Pembaruan*, 6 Agustus 1998

Suara Pembaruan. "Presiden BJ Habibie Minta Maaf Atas Pelanggaran HAM". *Suara Pembaruan*, 15 Agustus 1998

Sub. "Prabowo dan Sjafrie Bertanggung Jawab". *Media Indonesia*, 4 November 1998

Sudarsono dan Ardi Bramantyo. "Perlu Komisi, Bukan Tim Kecil". *Forum Keadilan*, No. 4 Th. VII, 1 Juni 1998. H. 23

Sudarsono, Ardi Bramantyo. "Penculikan Aktivis: Perlu Komisi, Bukan Tim Kecil". *Forum Keadilan*, No. 4, Th. VII, 1 Juni 1998. H. 23

Sudarsono, Riza Sofyat, Moh. Kholifan. "Aktivis Hilang Kian Bertambah". *Forum Keadilan*, No. 13 Th. VII, 5 Oktober 1998

Sudarsono, Sen Tjiauw, Victoria Sidjabat. "Membentuk Tim Mencari Penculik". *Forum Keadilan*, No. 3 Th. VII, 18 Mei 1998. H. 10, 13

Sumarjono. "Rusuh Tiba PRD Dituding". *Paron*, 31 Mei 1997

SW, TR. "Peluang di Negeri Antik". *Gatra*, No. 7 Th. V, 2 Januari 1999

Syahdan Nurdin. "Sofian Membuat Laporan Palsu". *Tiras*, No. 9 Th. 4, 30 Maret 1998. H. 16

Syahdan. "Masak Gus Dur Takut Sama Saya". *ADIL*, No. 33 Th. 68, 12-18 Mei 2000. H. 6

Ta, Ahi, Yo, Gs. "Kontras minta Prabowo Cs dimahmilkan". *Pos Kota*, 21 Agustus 1998

Tajuk (Redaksi). "Dari Sidang Umum hingga Tanah Tinggi." *Tajuk*, No. 11 Th. I, 23 Juli 1998. H. 16—17

Tajuk (Redaksi). "Insiden di Atas Feri Mufida". *Tajuk*, No. 11 Th. 1, 23 Juli 1998. H. 12, 29

Tajuk (Redaksi). "Ketika ABRI Jadi Sasaran Tembak". *Tajuk*, No. 11 Th. I, 23 Juli 1998. H. 70—74

Tajuk (Redaksi). "Kisah Sebuah Bintang Jatuh". *Tajuk*, No. 11 Th. I, 23 Juli 1998. H. 12—29

Tajuk (Redaksi). "Kisah Sebuah Bintang Jatuh". *Tajuk*, No. 11 Th. I, 23 Juli 1998. H. 12—29

Tajuk (Redaksi). "Kisah Sebuah Bintang". *Tajuk*, No. 11 Th. I, 23 Juli 1998. H. 15

Tajuk (Redaksi). "Kopassus Terlibat Penculikan?". *Tajuk*, No. 10 Th. I, 9 Juli 1998

Tajuk (Redaksi). "Mengapa Kelompok Prabowo Subianto?". *Tajuk*, No. 7 Th. 1, 10 Juni 1998

Tajuk (Redaksi). "Mengusut Pil Pahit ABRI". *Tajuk*, No. 11 Th. I, 23 Juli 1998.

Tajuk (Redaksi). "Perkiraan Penculikan di Luar Kopassus". *Tajuk*, No. 14 Th. 1, 3 September 1998. H. 25

Tajuk (Redaksi). "Prabowo Ditindak, Feisal Tanggung Jawab". *Tajuk*, No. 11, Th. I, 23 Juli 1998-6 Agustus 1998

Tatik S. Hafidz, Eni Saeni. "Dan Letjen Prabowo pun Diganti". *Tajuk*, No. 7 Th. I, 28 Mei 1998. H. 16—17

Tempo (Opini). "Mahkamah untuk Prabowo Subianto". *Tempo*, 4 Januari 1999

Tempo (Redaksi). "Karikatur TGPF". *Tempo*, 16 November 1998

Tempo (Redaksi). "Menunggu Laporan 25 Halaman". *Tempo*, 11 September 1998

Tempo (Redaksi). "Mister 14 Mei: Di Mana Para Jenderal". *Tempo*, Edisi 10, 16 November 1998. H. 26—30

Tempo (Redaksi). "Prabowo Mau Mengekup Habibie?". *Tempo*, Edisi 1 Maret 1999. H. 28

Tempo Interaktif (Redaksi). "Jangan Pernah Berhenti Menyuarakan Kebenaran". *Tempo Interaktif*, Edisi 09/III, 02 Mei 1998.

Tempo Interaktif (Redaksi). "Kasus Orang Hilang Indikasi Penguasa Sudah Panik". *Tempo Interaktif*, Edisi 09/III, 02 Mei 1998.

Tempo Interaktif (Redaksi). "Wawancara Pius Lustrilanang: Tidak Ada Lagi Resiko yang Lebih dari Mati". *Tempo Interaktif*, Edisi 09/III, 2 Mei 1998. H. 3—10

Tempo. "Menunggu Nurani Tim Mawar". *Tempo*, Edisi 29 Desember 19984 Januari 1999. H. 23

Tiarna Siboro, Seno Joko Suyono. "Pergantian yang Menghebohkan". *D&R*, 30 Mei 1998

Tim Forum (Redaksi). "Prabowo Mau Mengkudeta Habibie?". *Forum Keadilan*, No. 24 Th. VII, 8 Maret 1999. H. 69

Tiras (Redaksi). "Siapa Dituding Makar". *Tiras*, No. 9 Th. 4, 30 Maret 1998.

Tony Hasyim, Victoria Sidjabat. "Mereka Sejak Dulu Perwira Terbaik". *Forum Keadilan*, No. 24 Th. VI, 9 Maret 1998. H. 25

Tony Hasyim. "Bagai Bulan Separuh Bayang". *Forum Keadilan*, No. 10 Th. VII, 24 Agustus 1998. H. 14—16

Toriq Hadad, Wahyu Muryadi, Ahmad Fuadi. "Koneksi Prabowo di Negeri Gurun". *Tempo*, Edisi 29 Desember 19984 Januari 1999. H. 20—22

Tra. "Saksi Tanyakan Kaitan Terdakwa dengan Prabowo". *Kompas*, 13 Januari 1999. H. 1, 11

Tt, Ii. "Desmond akan Ungkap Penculikan Dirinya". *Bernas*, 12 Mei 1998

Ummat (Redaksi). "Munir SH: Akan Lahir Sukarno dan Suharto Baru". *Ummat*, 9 November 1998. H. 74—77

Ummat (Redaksi). "Wah, Jenderal-Jenderal Berantem". *Ummat*, No. 6 Th. IV, 17 Agustus 1998

Uni Z. Lubis. "Siapa Sih yang Tidak Peduli Situasi?". *Panji Masyarakat*, No. 49 Th. I, 30 Maret 1998. H. 18—19

Untung Widyanto. "Mertua Pegang Kendali, Menantu yang Beroperasi". Tajuk, No. 12 Th. I, 6 Agustus 1998

Vik, Bdm, Myr. "Seharusnya Komandan Bertanggung Jawab". *Kompas*, 29 Desember 1998

Vik, Gg, Uu, Myr. "Kalau Gagal, Ya Sedih, Kecewa...". *Kompas*, 26 Agustus 1998

Vy-14. "Kembalikan Anak Saya Noval". *Pos Kota*, No. 11459, 3 Agustus 1998. H. 1, 3

Wahid Rahmanto. "Dulu 'Hijau', Kini 'Merah Putih'?". *Forum Keadilan*, No. 21 Th. VII, 25 Januari 1999. H. 23

Wahyu Muryadi, Kelik M. Nugroho, Setiyardi, Purwani D. Pabandari. "Habibie Menyerang Prabowo, Soemitro Prihatin". *Tempo*, Edisi 1 Maret 1999. H. 26—27

Wahyu Muryadi. "Aceh Sudah Lampu Merah". *Tempo*, Edisi 29 November - 5 Desember 1999. H. 28—29

Was, SA. "Tenda Keprihatinan Semakin Ramai Dikunjungi Massa". *Media Indonesia*, 16 September 1998

Was. "Prabowo Subianto Diperiksa Tim Pencari Fakta". *Media Indonesia*, 9 September 1998 09 09

Wdh. "Korban dan Keluarga Aktivis Minta Bertemu Para Penculik". *Media Indonesia*, 19 September 1998

Widadi. "Bisa Perintah Soeharto". DeTAK, No. 8 Th. I, 1-7 September 1998. H. 5

Widhie. "'The Rising Star' di Tangan Tiga Penguasa". *Adil*, No. 33 Th. 68, 12-18 Mei 2000. H. 8—9

Willy Pramudya, Sugiyanto. "Lapor, Ambon-Ambon Sudah di Tangan!". *Bernas*, 23 Juli 1998. H. 1, 8

Willy Pramudya, Sugiyanto. "Mau Jadi Suami Eva Arnaz?". *Bernas*, 24 Juli 1998. H. 1, 4

Wip. "Diculik, Dianiaya di Tempat 'X'". *Bernas*, 9 Juni 1998. H. 1, 8

Wip. "Penculik Tanyakan Koalisi Amien-Mega-Gus Dur". *Bernas*, No. 216 Th. 52, 27 Juni 1998. H. 1, 7

Yanto Mushtofa, Yuyun Hadiwiratmo, Taufik Rinaldi, Asep S. Sambodja, Edi Purnawadi. "Ada Kehormatan Sebelum Meja Hijau". *Ummat*, No. 6 Th. IV, 17 Agustus 1998. H. 24—25

Yo-6. "Jika Meninggal di Mana Kuburannya". *Pos Kota*, No. 11458, 2 Agustus 1998. H. 1, 7

Yohanes S. Widada, Bambang Mulatho, Noor Yanto, Parulian Manullang, Widiarsi Agustina. "Terperangkap Dalam Jebakan". *Sinar Nusantara*, 28 Juli 1998

Yos, Ant, Ded, Wip, Jpg. "Pius: Penculik Bikin Malu Negara". *Bernas*, 2 Mei 1998